



**SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 - 1949)
DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**Rektorat
dayaan**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

700/1992
MILIK DEPDIKBUD
TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

919.836
RAM
5

**SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 - 1949)
DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

Tim Penulis

Drs. H. Ramli Nawawi

Drs. M. Idwar Saleh

Drs. Busra Djamal

Drs. H.A. Gazali Usman

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA**

1991

Konsultan

Brotomoeljono
Drs. Yustan Aziddin

Editor

Drs. H.A. Gazali Usman
Drs. H. Ramli Nawawi

PRAKATA

Buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan ini diterbitkan oleh Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (IPNB) Kalimantan Selatan tahun anggaran 1991/1992. Sedangkan naskahnya merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Kalimantan Selatan tahun 1979/1980.

Sehubungan dengan jarak waktu yang cukup lama antara kegiatan penelitian dan penulisan naskah dimaksud dengan pencetakannya ini, maka oleh Tim Penulisnya telah dilakukan penyuntingan/perbaikan-perbaikan seperlunya. Namun demikian untuk penyempurnaan buku ini selanjutnya, kami senantiasa akan memperhatikan setiap saran dan kritik yang disampaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Banjarmasin, 20 Desember 1991

Bagian Proyek IPNB Kalimantan Selatan,
Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ramli Nawawi

NIP 130239301

PENGANTAR

No : 128/IDKD/XII/79/Kal Sel

Pada hakekatnya tahun 1979/1980 ini Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) memasuki tahun ketiga. Meskipun namanya sudah diubah menjadi Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Proyek IDKD), ruang lingkup kegiatannya tetap meliputi lima aspek kebudayaan daerah. Hanya satu aspek yang mengalami perubahan, yaitu aspek Ensiklopedi Musik dan Tari Daerah, yang diganti dengan aspek Permainan Rakyat, sehingga keseluruhan aspeknya menjadi Sejarah Daerah, Adat Istiadat Daerah, Geografi Budaya Daerah, Cerita Rakyat Daerah dan Permainan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan.

Alhamdulillah, tahun inipun kami dapat menyelesaikan tugas relatif sesuai dengan target waktu yang tersedia. Hal ini tidak lain adalah berkat bantuan dan kerja sama yang baik antara Proyek IDKD (d/h P3KD) dengan segala instansi Pemerintah Daerah Tk I dan Tk II, KPN, Inspeksi Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi, Kantor Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Selatan, Universitas Lambung Mangkurat cq Fakultas Keguruan dan Museum Lambung Mangkurat. Instansi-instansi di atas memberikan kemudahan kepada kami dalam masalah penyelesaian tugas lapangan oleh Tim-tim Proyek IDKD, pembebasan pajak, penyelesaian keuangan, bantuan data dan informasi, dan bantuan tenaga peneliti yang diperlukan bagi suksesnya tugas Proyek IDKD Kalimantan Selatan, sehingga berhasil menyusun lima buah naskah, antara lain seperti apa yang anda hadapi sekarang ini.

Sudah barang tentu keberhasilan Proyek IDKD Kalimantan Selatan sangat ditentukan oleh para petugas yang turun ke lapangan, yang dalam hal ini adalah para peneliti dan para informan yang menjadi sumber informasi dan data yang sangat diperlukan bagi penyusunan naskah/draft I setiap aspek.

Pada kesempatan ini kami dari Proyek IDKD Kalimantan Sela-

tan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerja sama yang baik selama ini bersama kami. Dan secara khusus kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Tim/Kontraktor kelima aspek, atas partisipasinya yang tinggi dalam menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan sampai menjadi naskah/draft I sehingga siap dievaluasi oleh Tim Evaluasi Proyek IDKD Pusat di Jakarta.

Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini terus dapat kita bina, dalam usaha kita turut mensukseskan program Pemerintah disektor Kebudayaan. Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita.-

Banjarmasin, 26 Desember 1979

PEMIMPIN PROYEK,

= DRS. YUSTAN AZIDDIN =
NIP. 130078398.-

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya menyambut dengan gembira dan dengan rasa syukur atas diterbitkannya buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan oleh Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Kalimantan Selatan tahun 1991/1992 ini. Mengingat masih terbatasnya buku-buku Sejarah Daerah Kalimantan Selatan yang beredar saat ini di masyarakat, maka diharapkan buku ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi mereka yang ingin memperluas wawasan kesejarahannya, khususnya tentang daerah Kalimantan Selatan.

Diharapkan pula agar buku ini dapat memberikan informasi tentang keterlibatan dan peran masyarakat daerah Kalimantan Selatan dalam perjuangan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945 di daerah Kalimantan Selatan, sebagai salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga segala upaya untuk menerbitkan buku ini membawa manfaat bagi khalayak yang membacanya.

Banjarmasin, 20 Desember 1991



Kepala,

Drs. H. Amat Asnawi

NIP 130287338

SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

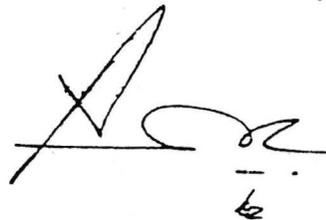
Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1991

Direktur Jendral Kebudayaan



Drs. GBPH Poeger

NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA.....	v
PENGANTAR.....	vii
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMAN- TAN SELATAN	ix
SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN PENELITIAN.....	1
B. MASALAH PENELITIAN.....	2
C. RUANG LINGKUP.....	3
D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSE- DURE PENELITIAN.....	5
BAB II. KEADAAN DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JE- PANG (1942 - 1945)	
A. BIDANG PEMERINTAHAN	10
1. Keadaan umum	10
2. Berakhirnya kekuasaan Belanda di Kal-Sel	11
3. Struktur pemerintahan	14
B. BIDANG SOSIAL EKONOMI	18
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA	22
1. Pendidikan	22
2. Bidang kehidupan beragama.....	26
3. Bidang Seni Budaya	27
4. Media Massa	30
5. Pengaruh Politik	36

D. INTERAKSI DI KAL.SEL DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK/SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL	38
1. Seinendan	39
2. Konan Hokoku Dan	39
3. Bo-Ei Sein Tai	39
4. Heiho	39
5. Tokubetsu Tokutai	40
6. Peta	40
7. Fujin-kai	40
8. Kenrohoshi	42

BAB III. KEADAAN DI KALIMANTAN SELATAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEDIATAN MASYARAKAT PADA AWAL REVOLUSI REVOLUSI	48
1. Peristiwa-peristiwa menjelang Proklamasi ..	48
2. Berita Proklamasi Kemerdekaan dan sikap Pasukan Jepang	51
3. Hambatan-hambatan dan partisipasi masyarakat	57
B. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN ORANG-ORANG NIVA	59
1. Sikap masyarakat terhadap tentara Sekutu dan tentara NICA	59
2. Akibat-akibat datangnya tentara NICA	67
C. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN R.I. DAERAH KALIMANTAN.....	70
1. Pembentukan K.N.I. Daerah	70
2. Pengibaran bendera Sang Merah Putih	75

D. PEMBENTUKAN ORGANISASI-ORGANISASI PERJUANGAN	79
1. Timbulnya organisasi-organisasi kelaskaran dan satuan ekspedisi dari pulau Jawa	79
2. Perjuangan Politik dan Partisipasi rakyat ...	96
BAB IV. PERJUANGAN DI KALIMANTAN SELATAN	
A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I	105
B. PENGARUH AKSI MILITER BELANDA I DI KALIMANTAN SELATAN DAN PERIODE PERANG GERILYA	109
C. PENGARUH AKSI MILITER BELANDA II DI KALIMANTAN SELATAN	119
1. Aksi perlawanan bersenjata	119
2. Proklamasi 17 Mai 1949 Gubernur Tentara ALRI	125
3. Markas besar Alam Roh	140
a. Bidang Militer	146
b. Bidang Politik	150
c. Bidang Sosial	154
d. Bidang Ekonomi	155
D. CEASE FIRE MINGGU RAYA, 2 SEPTEMBER 1949	159
E. SIKAP RAKYAT KALIMNATAN SELATAN TERHADAP PERISTIWA KONPERENSI MALINO, BFO, LINGGARJATI, RENVILLE, DEVIDE ET IMPERA VAN MOOK	174
F. KEGIATAN MASYARAKAT KALIMANTAN SELATAN DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN	187

1. Kegiatan ekonomi	189
2. Kegiatan sosial	190
3. Kegiatan pendidikan	191
4. Kegiatan seni budaya	192
5. Keadaan kehidupan beragama	193
6. Bidang pers daerah	194
7. Bidang pemerintahan	197
BAB V. KEADAAN DI KALIMANTAN SELATAN MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)	
A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN K.M.B.	202
B. SIKAP MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KONFERENSI ANTAR INDONESIA	207
C. PELAKSANAAN HASIL K.M.B. DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN R.I.	210
D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN	216
1. Keadaan sosial	218
2. Ekonomi	221
3. Sosial Budaya	226
4. Pendidikan	227
5. Perkembangan Agama	228
6. Wanita	229
BAB VI. P E N U T U P	
A. KESIMPULAN	233
B. DAFTAR SUMBER	237
C. DAFTAR KATA-KATA	246
D. LAMPIRAN-LAMPIRAN	259

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berlangsung secara bersamaan dan menyeluruh. Rakyat Indonesia yang berdiam tersebar di beberapa pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh laut-laut yang terbentang di Nusantara ini, hidup dalam kelompok suku-suku yang terpisah-pisah. Keadaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan gerak dan corak perjuangan rakyat yang berada di daerah-daerah yang terpisah-pisah itu.

Rakyat Kalimantan Selatan yang berjuang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam gerak perjuangannya di samping mempunyai persamaan-persamaan juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Perbedaan gerak dan corak perjuangan yang terjadi di daerah ini antara lain disebabkan oleh latar belakang letak wilayah/daerah dan kaitan administrasi dengan daerah lain, keadaan sosial budaya serta keadaan ekonomi rakyatnya.

Gerak perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mempunyai *karakteristik* tersendiri inilah yang menjadi titik berat penelitian ini. Penelitian ini bertujuan melakukan **penggalan**, pengumpulan, pencatatan dan pengolahan sumber-sumber sejarah perjuangan kemerdekaan daerah ini, untuk kemudian menyusunnya menjadi suatu naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Selatan.

Dalam penyusunan materi sejarah daerah Kalimantan Selatan ini, Team Penyusunan berusaha menyesuaikan dengan ketentuan yang digariskan dalam *Term of Reference (TOR)*. Namun karena adanya perbedaan kronologis kegiatan berlangsungnya perjuangan rakyat di daerah ini dengan yang tertera dalam TOR, maka Tim dalam menyusun materi hasil penelitian ini pada bagian tertentu menyesuaikannya dengan keadaan yang terjadi di daerah. Hal ini ditempuh sesuai dengan tujuan utama dari Proyek IDKD ini adalah penggalan bahan, sumber dan materi tentang peristiwa perjuangan kemerdekaan yang terjadi di daerah.

Selanjutnya melalui penelitian yang dapat menghasilkan naskah tentang perjuangan kemerdekaan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan bahan pelengkap khususnya tentang peristiwa di daerah dalam rangka penyusunan Sejarah Nasional Indonesia yang lengkap dan menyeluruh.

Di samping itu secara umum penelitian ini dilakukan dalam rangka menginventarisasi dan mendokumentasikan kebudayaan daerah, yang dimaksudkan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep dalam rangka kebijaksanaan Kebudayaan Nasional.

B. MASALAH PENELITIAN

Revolusi Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai dengan 1949 adalah merupakan bagian dari sejarah yang mempunyai nilai terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa itulah seluruh rakyat Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah berjuang bersama menyusun negara dan menata bangsa dalam rangka memperjuangkan kehidupan yang bebas dan merdeka. Peristiwa yang telah menimbulkan rasa kesatuan dan persatuan dalam usaha menggalang kehidupan bangsa dan negara serta budaya tersebut perlu diteliti, dicatat dan didokumentasikan.

Perjuangan kemerdekaan yang berlangsung secara serentak di seluruh daerah Indonesia itu, terjadi dengan gerak dan corak serta ragam yang berbeda-beda. Sehubungan dengan itu untuk dapat memahami nilai penting mengenai zaman tersebut, perlu penelitian tentang sejarah perjuangan rakyat di daerah, sewaktu memperjuangkan kemerdekaan ini.

Di samping itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan tersebut belum banyak yang ditulis atau dibukukan. Karena itu untuk menjaga agar segala kegiatan perjuangan yang mengandung nilai-nilai *patriotisme* itu tidak hilang atau terlupakan begitu saja, maka perlu penelitian dalam rangka menginventarisasikan dan mendokumentasikan segala peristiwa tersebut.

Kalimantan Selatan sebagai suatu daerah di antara daerah-daerah lainnya di Indonesia, dalam masa perjuangan kemerdekaan memberikan bukti-bukti tentang usaha dalam menentang *unitarisme*. Rakyat di daerah ini dengan gigih menentang usaha-usaha Be-

landa yang hendak menegakkan *federalisme*. Suatu *moment* perjuangan sebagai suatu masalah yang perlu diteliti di mana semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* tumbuh di tengah-tengah berkecamuknya api revolusi kemerdekaan.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan judul tulisan ini, yakni Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan, maka ruang lingkup penelitian dan penulisan naskah ini berkisar sekitar peristiwa yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan antara tahun 1945 sampai 1949. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu meliputi masalah perjuangan membela Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk kebebasan daerah ini dari penjajahan *NICA* yang telah siap kembali untuk menjajah setelah penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu.

Secara lengkap dapat dikemukakan bahwa aspek-aspek yang diteliti dan menjadi permasalahan dalam tulisan ini meliputi :

1. Keadaan sosial, ekonomi dan budaya di daerah Kalimantan Selatan pada masa pemerintahan pendudukan Jepang.
2. Keadaan sosial budaya di daerah Kalimantan Selatan sesudah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
3. Perjuangan di daerah Kalimantan Selatan pada masa Revolusi Kemerdekaan.
4. Keadaan sosial, ekonomi dan budaya di daerah Kalimantan Selatan menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan.

Tentang pengertian daerah Kalimantan Selatan dalam tulisan ini adalah Propinsi Kalimantan Selatan, bagian dari pulau Kalimantan yang terdapat di bagian sebelah tenggara. Pada zaman Hindia Belanda bagian ini termasuk daerah disebut "*Zuider en Ooster - afdeeling*" 1)

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, seluruh daerah Kalimantan berada di bawah kekuasaan pemerintahan Angkatan Laut *Men Sei Bu*, yang merupakan bagian dari pemerintahan *Men Sei Fu* yang berpusat di Makasar. 2)

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, daerah-daerah yang

dahulu disebut *Zui der en Ooster afdeeling* dan *Wester afdeeling* oleh Pemerintah R.I. dijadikan "satu" Propinsi Kalimantan, dengan ibu kota Banjarmasin. Bersama dengan itu NICA yang datang kembali ke negeri ini mengeluarkan Staatblad 1945 No. 64, yang membagi Kalimantan (bagian Indonesia) atas 3 kresidenan, yaitu :

1. Keresidenan Kalimantan Selatan
2. Keresidenan Kalimantan Timur
3. Keresidenan Kalimantan Barat.

Tahun 1953 terjadi perubahan administrasi pemerintahan, dan Kalimantan bagian Indonesia ditetapkan atas 3 daerah propinsi baru, yaitu :

1. Propinsi Kalimantan Barat, ibu negerinya Pontianak
2. Propinsi Kalimantan Timur, ibu negerinya Samarinda
3. Propinsi Kalimantan Selatan, ibu negerinya Banjarmasin.⁴⁾

Selanjutnya pada tahun 1956 Propinsi Kalimantan Selatan dibagi lagi atas :

- a. Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kotanya Palangkaraya.
- b. Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ibu kotanya Banjarmasin.⁵⁾

Jadi yang disebut Propinsi Kalimantan Selatan saat ini adalah bagian dari pulau Kalimantan yang dibatasi :

- a. di sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah
- b. di sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Timur
- c. di sebelah timur dengan Selat Makasar
- d. di sebelah selatan dengan Laut Jawa.

Propinsi ini terdiri atas 10 Kabupaten/Kotamadya, serta sebuah Kotamadya administratif yaitu :

- 1). Kotamadya Banjarmasin ibu kotanya Banjarmasin
- 2). Kabupaten Banjar, ibu kotanya Martapura
- 3). Kabupaten Tapin, ibu kotanya Rantau
- 4). Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ibu kotanya Kandungan
- 5). Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ibu kotanya Barabai

- 6). Kabupaten Tabalong, ibu kotanya Tanjung
- 7). Kabupaten Barito Kuala, ibu kotanya Marabahan
- 8). Kabupaten Tanah Laut, ibu kotanya Pelaihari
- 9). Kabupaten Kotabaru, itu kotanya Kotabaru, dan Kotamadya Administratif Banjarbaru, ibu kotanya Banjarbaru. 6)

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDURE PENELITIAN

Penelitian dalam rangka penyusunan Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Selatan ini dilaksanakan berdasarkan *TOR* yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim, dapat dilihat adanya persamaan-persamaan dan kelainan-kelainan gerak perjuangan di daerah ini dengan pola yang digambarkan dalam *TOR* tersebut. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Pimpinan Proyek IDKD Pusat, bahwa dalam penyusunan materi Sejarah Daerah Tematis ini di samping penggarapannya disesuaikan dengan caupan-cakupan (*TOR*), juga dihindari hal-hal yang bersifat pemaksaan. Sehubungan dengan itu Tim menetapkan sedemikian rupa sehingga situasi yang terdapat di lapangan dapat digambarkan dalam keadaan situasi yang sebenarnya. Sesuai dengan "juklak" tersebut naskah ini disusun sesuai dengan materi peristiwa yang terjadi di daerah pada masa revolusi kemerdekaan tersebut.

Demikian pula untuk kontinuitasnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa perjuangan itu, maka dalam penulisan naskah ini disesuaikan dengan hasil / data yang ditemukan pada penelitian lapangan. Untuk itu setelah Bab I mengenai Pendahuluan ini, maka pada Bab II mengenai inter-aksi organisasi politik dan organisasi sosial di pusat dan di daerah, telah disederhanakan dengan hanya membicarakan organisasi-organisasi yang pada zaman Jepang itu terdapat di Kalimantan Selatan. Sedangkan pada Bab III khronologis dari peristiwa kegiatan perjuangan rakyat di daerah ini tidak sama dengan khronologis seperti yang tercantum dalam *TOR*. Karena itu semua materi yang terdapat dalam peristiwa di daerah sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sepenuhnya di sajikan dan disesuaikan dengan khronologis peristiwa yang berlangsung di daerah Kalimantan Selatan. Pada Bab IV titik berat dari

susunan naskah diletakkan pada kegiatan perjuangan bersenjata yang untuk daerah Kalimantan Selatan dikoordinir dalam *ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan*. Sementara peristiwa Aksi Militer Belanda I dan Aksi Militer Belanda II serta peristiwa Pemberontakan PKI Madiun yang tidak terjadi di daerah Kalimantan Selatan, namun pengaruh dari kejadian-kejadian tersebut sangat terasa juga bagi perjuangan rakyat di daerah Kalimantan Selatan. Disamping itu pada Bab ini diuraikan pula kegiatan-kegiatan sekitar tanggapan/sikap rakyat terhadap usaha-usaha Van Mook dalam rangka menamakan politik federalismenya. Dan pada bagian akhir dari Bab ini diuraikan pula kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Semua materi yang dikemukakan dalam Bab ini adalah materi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Dapat ditambahkan bahwa ada bagian-bagian materi seperti yang tercantum dalam *TOR* yang tidak terjadi/terdapat di daerah Kalimantan Selatan.

Selanjutnya pada Bab V tentang keadaan di daerah pada akhir Revolusi Kemerdekaan, akan dikemukakan sikap masyarakat dalam hal pelaksanaan hasil KMB, (Konperensi Meja Bundar). Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa rakyat Kalimantan Selatan telah berjuang melalui rapat-rapat umum dalam rangka memajukan *mosi* menuntut pembubaran Dewan-dewan buatan Belanda serta mengembalikan status Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya pada Bab VI yakni bagian Penutup akan diuraikan secara singkat kesimpulan dari isi naskah ini. Selain itu dicantumkan pula Daftar Sumber, Daftar kata-kata dan Lampiran-lampiran lainnya.

Dalam melakukan penelitian sampai dengan penulisan naskah, Tim telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan penelitian, yang disusun sebagai berikut :

Tahap I : Persiapan (15 Juli s/d 31 Juli 1979)

- a. Rapat persiapan penyelesaian kontrak
- b. Pembahasan *TOR*
- c. Membuat daftar Informan
- d. Menyusun *instrument* penelitian

- e. Mengumpulkan bahan-bahan perpustakaan
- f. *Orientasi lokasi/* tempat Informan dan pendekatan sosial.

Tahap II : Kegiatan penelitian lapangan (1 Agustus s/d 15 September 1979)

- a. *Interview* dan *observasi* di tingkat Kotamadya Banjarmasin dan sekitarnya
- b. *Interview* dan *observasi* di tingkat Kabupaten dan sekitarnya

Tahap III : Pengolahan data dan penulisan naskah (16 September s/d 30 Nopember 1979)

- a. Diskusi dan pengolahan data
- b. Penulisan naskah
- c. Koreksi naskah

Tahap IV : Pengetikan naskah (1 Desember s/d 31 Desember 1979)

- a. Pengetikan naskah pada sheet stensil
- b. Koreksi naskah stensil
- c. Penjilidan naskah
- d. Penyampaian naskah hasil penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Selatan ini adalah metode Kepustakaan dan Wawancara. Namun apa yang dapat diperoleh dari kepustakaan yang memuat sejarah tentang Kalimantan Selatan, apalagi khusus tentang perjuangan kemerdekaan dapat dikatakan langka sekali. Karena itu di samping metode wawancara sebagai cara yang paling banyak dilakukan terhadap tokoh-tokoh pelaku, telah dapat pula dikumpulkan surat-surat selebaran dari pemerintah, koran-koran, artikel, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh yang dahulu menjadi pelaku dalam kegiatan-kegiatan perjuangan pada masanya.

Dalam hal terdapat pertentangan pendapat/keterangan antara para Informan, maka jalan keluar yang ditempuh adalah di samping dicari hubungannya dengan peristiwa lain yang semasa, juga dilihat khronologis kejadiannya, di samping itu dicari keterangan/sumber lain baik dari kepustakaan atau wawancara dengan tokoh lainnya. Sehingga keterangan yang mendapat dukungan dari sumber-sumber lain merupakan data/keterangan yang dianggap lebih besar.

Cara yang ditempuh oleh Tim dalam mencari, mendapatkan dan menentukan sumber dan data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah ini, dimulai dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah atau mendatangi rumah-rumah mereka yang diketahui mempunyai buku atau naskah, dan lain-lainnya yang mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian sekitar zaman Revolusi Kemerdekaan di daerah ini. Sementara itu untuk menentukan/menyusun daftar Informan, ditempuh jalan :

- a. meminta keterangan langsung melalui Kantor Legiun Veteran Propinsi Kalimantan Selatan, tentang nama-nama orang yang mempunyai peranan penting dalam masa perjuangan kemerdekaan di daerah ini.
- b. meminta daftar Informan untuk daerah-daerah tingkat Kotamadya/Kabupaten, melalui surat kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya/Kabupaten, juga kepada Walikota/para Bupati se Kalimantan Selatan.

Wawancara terhadap tokoh-tokoh pelaku tersebut sebagian besar telah dilakukan. Sementara yang lain karena tidak diketahui alamat dari Informan yang jelas, atau karena ada daerah tingkat II yang tidak memberikan tanggapan, atau balasannya sangat terlambat sekali maka Tim tidak sempat melakukannya karena sudah di luar jadwal penelitian lapangan. Namun sebagai imbangannya Tim telah mendapatkan tulisan-tulisan/naskah-naskah yang disusun oleh tokoh-tokoh tersebut.

Dan dapat dikemukakan bahwa kesulitan-kesulitan/hambatan-hambatan yang ditemui Tim dalam melakukan penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Sempitnya waktu yang tersedia untuk suatu kegiatan penelitian lapangan dalam suatu wilayah yang cukup luas, di mana penggunaan metode wawancara yang langsung ber

hadapan dengan manusia sumber tidak semudah yang diperkirakan untuk dapat dimintai kapan saja keterangan-keterangan mereka.

2. Untuk daerah Kalimantan Selatan kepustakaan (buku-buku, tulisan-tulisan) tentang sejarah daerah ini langka sekali. Sementara tokoh-tokoh pejuang zaman Revolusi itu pada umumnya tidak mempunyai catatan-catatan pengalaman pribadi. Sehingga apa yang mereka ceriterakan ketika di wawancarai, semata-mata berdasarkan pada ingatan saja.

Akhirnya apa yang dapat dilakukan oleh Team dalam menyusun naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan ini, adalah merupakan hasil yang maksimal yang dapat dikerjakan dalam segala keterbatasan dan kekurangan-kekurangan sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang dapat ditemukan sampai ini.

CATATAN

- 1) Tjilik Riwut, *Kalimantan Memanggil*, Endang, Djakarta, 1968, hal. 4.
- 2) *Hasil wawancara*, dengan H.M. Yakub Amin.
- 3) Kodam X/LM, *Kodam X/LM Membangun*, Banjarmasin, 1962, hal.480.
- 4) *Lot.cit.*
- 5) *Loc.cit.*
- 6) M.Noor.HS, *Propinsi Dati I Kalimantan Selatan*, Penerbit Indah, Banjarmasin, 1975, hal.28.

BAB II.

KEADAAN DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Keadaan Umum.

Pada tanggal 8 Desember 1941, sekitar jam 3 dinihari, pemerintah Hindia Belanda menerima berita serangan Angkatan Laut Jepang atas Teluk Mutiara di Hawaii. Empat jam kemudian setelah mengadakan pembicaraan telegrafis dengan pemerintah pelarian Belanda di London, maka Pemerintah Hindia Belanda memaklumkan perang kepada Jepang. Dengan tindakan tersebut Hindia Belanda terjun dalam kancah Perang Fasifik sebagai anggota from ABCD. Untuk mempertahankan daerah Hindia Belanda yang terdiri dari 13.667 pulau besar dan kecil ini, Belanda hanya memiliki tentara KNIL yang terdiri dari kurang lebih 40.000 orang tentara bayaran, tentara cadangan sebesar kira-kira 50.000 orang. Sebagian besar pasukan ini memusat di pulau Jawa. Pasukan-pasukan ini tidak memiliki perlengkapan untuk perang modern. Angkatan Darat ini dibantu oleh sebuah eskader Angkatan Laut yang lemah, terdiri dari 3 penjelajah, 7 pemburu torpedo dan 15 kapal selam. Angkatan Udara dalam taraf pembangunan memiliki kira-kira 97 buah bomber Glenn-Martin type kuno, sejumlah kecil pesawat tempur yang kualitatif jauh lebih rendah mutunya dari pesawat Jepang, serta pesawat-pesawat pengintai jenis Catalina.¹⁾

Pada tanggal 10 dan 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerbu wilayah Hindia Belanda, Tarakan pos terdepan jatuh ke tangan Jepang. Ketika pada tanggal 9 Maret 1942, Letnan Jenderal Ter Poorten, komandan pasukan Belanda menyerahkan Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang, angkatan udara Hindia Belanda telah musnah di atas Serawak, armadanya yang dipimpin Vice-Admiral Karel Doorman telah lenyap pula dalam pertempuran terakhir di Laut Jawa.

Setelah Tarakan jatuh, tiba giliran Balikpapan dan pada tang-

gal 13 Februari Banjarmasin jatuh ke tangan Jepang.

Dengan tindakan ini seluruh wilayah Kalimantan Selatan dikuasai oleh Jepang. Apa yang disaksikan rakyat dalam minggu itu amat mengesankan. Bila dalam 6 bulan sebelumnya rakyat tiap saat dipertontonkan show of force dari KNIL sebagai tentara yang tak terkalahkan, latihan terbang dari angkatan udara Belanda di lapangan Ulin, semua itu adalah kosong belaka. Yang dilihat rakyat adalah serangan-serangan Jepang yang demonstratif tanpa balasan pihak Belanda, kepanikan, pelarian-pelarian tanpa memikirkan perlawanan apa-apa, pelarian pimpinan pasukan Belanda lebih dahulu ke Jawa dan meninggalkan pasukan dan orang sipil dalam keadaan kucar kacir, penyerahan dan pemancungan orang-orang Belanda oleh Jepang.

Mythos Hindia Belanda yang tak terkalahkan runtuh. Prestise Belanda jatuh serendah-rendahnya. Untuk sementara waktu oleh putera-putera Matahari Terbit disegani rakyat dan ditakuti.

2. Berakhirnya kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan.

Dalam tahun 1941, jauh sebelum pecah perang Pasifik, orang-orang Jepang yang tinggal di Kalimantan Selatan telah dipanggil pulang ke tanah airnya. Bertahun-tahun mereka telah tinggal di daerah ini, sebagai perintis dan pelaksana kolonne ke V pemerintahnya. ²⁾ Jumlah mereka tidak banyak, terdiri dari pengusaha perkebunan Danau Salak dan Plaihari, pengusaha paberik karet Nomura, pengusaha toko N.ABE dan TAKARA, dokter Kojin kan, dokter gigi Shogenyi, tukang cukur dan tukang potret.

Untuk menghadapi perang Pasifik, Belanda sibuk dengan mobilisasi. Orang Belanda, Cina-peranakan, orang Indonesia, dimasukkan ke dalam Stadswacht (Pasukan Pengawal Kota), Luchtbeschermings Dienst atau LBD (Penjaga Bahaya Udara), Afweer-en Vernielings Corp (AVC - Pasukan Pelawan dan Pengrusak) serta kesatuan lain di bawah KNIL. ³⁾ Mobilisasi ini terjadi di tiap-tiap kota seluruh Hulu Sungai dan sebagai pusatnya di Banjarmasin. Mereka mengadakan latihan perang-perangan sehingga betul-betul Belanda sudah siap jika Jepang datang. ⁴⁾

Ketika perang pecah, panik memuncak, sebagian besar orang-orang sipil Belanda dan Cina mengungsi bersama KNIL dengan ka-

pal ke Jawa. Pada tanggal 8 Pebruari 1942, berangkatlah rombongan pengungsi terakhir dengan kapal "TOBA" yang diperlengkapi dengan pelampung dan rakit-rakit tambahan apabila ditenggelamkan oleh musuh. Untuk pertama kali rakyat menyaksikan serangan Jepang terhadap Catalina Belanda di atas Barito. 5)

Ketika Balikpapan jatuh sebagian tentara Jepang menerobos hutan-hutan ke arah Hulu Sungai Utara dan naik ke Muara Uya bagian ter-utara dari Kalimantan Selatan dan berbatasan dengan Kalimantan Timur. Tentara Jepang tiba di Tanjung dengan berjalan kaki, ada juga yang bersepeda yaitu sepeda yang dirampas dari penduduk waktu dalam perjalanan. Jumlah tentara Jepang yang datang itu cukup banyak dan segar-segar. Ketika sampai di Tanjung tentara Jepang tersebut mencari Idar, sebab sejak jaman Belanda Idar (sekarang Haji) menjabat sebagai Pembekal. Oleh pimpinan tentara Jepang tersebut, Idar harus membantu setiap datang tentara Jepang yang lewat nanti dengan diberi tanda merah dengan huruf dan bahasa Jepang. Tentara Jepang ini hanya berhenti selama 3 hari, rombongan meneruskan perjalanan ke Amuntai. Kurang lebih dua minggu kemudian datang lagi rombongan tentara Jepang. Mereka yang datang ini naik kuda, jadi tidak berjalan kaki. Sebagaimana tentara yang terdahulu, tentara inipun menemui Idar, dan karena sudah ada ban merah dilengan Idar, hubungan dengan Jepang tersebut berjalan dengan lancar. 6)

Tentara Jepang tiba di Amuntai secara mendadak, tidak lewat jalan raya, tapi jalan sungai dengan perahu. Sehari sebelum tentara Jepang ini masuk kota, pemerintah Belanda membumi hanguskan beberapa gudang karet, gudang beras dan yang bersifat vital lainnya. Belanda memperkirakan, tentara Jepang yang datang tidak berdaya karenanya. Tentara Belanda, Polisi, Stadswacht dan sebagainya, tak berdaya sama sekali dan masing-masing melarikan diri dengan membuang senjata ke sungai, sehingga Jepang masuk langsung bisa menyatukan diri dengan masyarakat. Masyarakat pinggiran kota diajak ke kota dan diajak mengangkut barang-barang dan membongkar toko segala bahan makanan, toko pakaian. Dalam hal ini toko Cina menjadi sasaran pembongkaran.

Pada waktu itu yang memimpin kota Amuntai adalah seorang aspirant Controleur Belanda. Aspiran ini ditangkap Jepang dan ditembak, begitu pula dua orang polisi dimuka jembatan Paliwara

dan dilemparkan di kali. Jepang menggunakan rumah Controleur tersebut sebagai asrama tentara Jepang. Tentara Jepang yang datang ke Amuntai ini mula-mula hanya 3 (tiga) orang yang menduduki kota Amuntai, kemudian datang lagi 5 (lima) orang dan yang 3 orang yang terdahulu datang, berangkat lagi meneruskan perjalanan ke arah selatan, yaitu Barabai, begitu seterusnya silih berganti, dan seterusnya Banjarmasin.

Situasi vacuum pemerintahan ini, karena pemerintah Belanda tidak ada lagi sedangkan Jepang belum mengatur pemerintahan (yang ada hanya beberapa orang serdadu Jepang) kesempatan tersebut digunakan oleh beberapa orang pencuri, dan yang terutama menjadi sasaran adalah orang Cina. Orang-orang Cina ada yang lari ke kampung menyembalatkan diri dan diantara mereka ada yang masuk agama Islam.⁷⁾

Berita tentang kedatangan tentara Jepang ini yang didesuskan dalam jumlah yang besar, menimbulkan hati kecut bagi Belanda di daerah sebelah selatannya. Berita pendudukan kota Amuntai ini menyebabkan kota selanjutnya, Barabai, Kandangan, Rantau, Martapura membuka pintu seluas-luasnya terhadap kedatangan Jepang. Tak ada satupun perlawanan yang terjadi.

Baru saja terdengar bahwa kota Amuntai telah jatuh ke tangan Jepang, KNIL dan pemerintah sipil Belanda melarikan diri ke daerah Dayak Besar, sehingga membiarkan seluruh wilayah Kalimantan Selatan jatuh ke tangan Jepang tanpa perlawanan apa-apa. Untuk menyerahkan kota Banjarmasin kepada Jepang, ditugaskan kepada Wali Kota Banjarmasin Van der Meulen dan kepada Javache Bank Konig. Pembumihangusan terhadap kotapun dilaksanakan oleh AVC, pada malam Minggu tanggal 9 dan 10 Februari 1942 kota Banjarmasin menjadi lautan api, seluruh kendaraan militer dirusak dan dijejer di jalan Simpang Sungai Bilu, jembatan Coen diledakkan, satu-satunya jembatan yang menyeberangi sungai Martapura sehingga menggetarkan seluruh kota.⁸⁾ Begitu pula percetakan "Suara Kalimantan", betul-betul dibumihanguskan, dirusak mesin-mesinnya, sedangkan letter-letter yang masih merupakan zetsel yang ada dalam raam, dibuang ke sungai. Sementara itu percetakan De Endracht yang mencetak "Borneo Post" dan "Bintang Borneo", bukan dirusak, akan tetapi turut terbakar dalam komplek toko-toko dan

pasar yang dibakar oleh tentara Belanda (Vernielingscorps). Percetakan "Suara Kalimantan" memang satu-satunya surat kabar yang menentang penjajahan, karena itu dinomor satukan untuk dibumi hanguskan, sedangkan percetakan lain seperti Banjarmasinsche Drukkery hanya dibuka bagian-bagian pentingnya saja seperti piringan tinta dan rol tinta, bagian tersebut disembunyikan agar tidak dapat dipergunakan dengan segera oleh Jepang.⁹⁾

Pengrusakan seperti ini juga berlaku di seluruh Kalimantan Selatan, begitu pula yang terjadi di Barabai.¹⁰⁾

Akan tetapi sebelum kota Banjarmasin itu diserahkan, terlebih dahulu kota dibumihanguskan oleh AVC dengan baik. Seluruh persediaan bensin dekat mesjid Jami', bensin kapal terbang di Banaa Anyar, bensin di Bagau, karet di gudang-gudang Mac Laine & Watson di Ujung Murung, bangunan Fort Tatas dibakar habis. Sentral listrik ANIEM dan paberik karet Hoktong dihancurkan sampai tinggal pondasinya saja lagi.¹¹⁾

Rakyat dikerahkan untuk mengangkut persediaan beras di gudang Borsummy dan Big Five lainnya serta diakhiri dengan penggedoran toko-toko Cina dan rumah Belanda yang kosong.

Seluruh alat kekuasaan Belanda menghilang setelah membuka pakaian seragamnya.

Tentara Rikugun Jepang (Angkatan Darat) yang datang memasuki Banjarmasin lewat Hulu Sungai pada tanggal 13 Februari 1942, sebagian datang dengan sepeda, sebagian lagi berjalan kaki. Serah terima kota tidak jadi dilaksanakan karena alasan politik bumi hangus AVC. Wali kota Van der Meulen dan Kepala Borneo Internaat Smith dan seorang Cina yang menyambut Jepang dipancing di atas sisa-sisa reruntuhan jembatan Coen.

Tiga hari kemudian barulah Jepang memulai konsolidasi kekuasaannya yang dilaksanakan mula-mula oleh Rikugun (Angkatan Darat) yang dikenal oleh rakyat dengan sebutan "Cap Bintang", kemudian diambil oper oleh Kaigun (Angkatan Laut).

3. Struktur Pemerintahan

Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu :

- a). Jawa dan Madura, dengan pusat Batavia, di bawah kekua-

saan Rikugun atau Angkatan Darat.

- b). Sumatera dengan pusat Bukittinggi, tetapi kemudian digabungkan dengan Singapura, di bawah kekuasaan Rikugun.
- c). Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusat Makasar, di bawah Kaigun atau Angkatan Laut.¹²⁾

Kedua angkatan perang ini yaitu Rikugun dan Kaigun, selalu kelihatan ada persaingan dalam arti mengambil hati rakyat yang dijajah, lebih-lebih waktu perang hampir berakhir. Semua ini berada di bawah komando Panglima Besar yang berkedudukan di Saigon.

Untuk mengembalikan ketertiban dibentuklah Panitia Pemeintahan Civil (PPC), yang beranggotakan pemuka-pemuka rakyat dan tokoh-tokoh pergerakan rakyat di Banjarmasin, terdiri dari : Pangeran Musa Ardikesuma, dr.R. Susudoro, Mr. Rusbandi dan H. dhariyah M. Untuk Kandangan : H.M. Syukeri dan dr. Sumarno. Kemudian Jepang mengangkat kembali semua pegawai bekas pegawai Belanda dalam aparat pemerintah, sehingga struktur organisasi pemerintahan Belanda tetap dipakai. Jabatan penting yang dulu dipegang oleh orang Belanda, dipegang oleh orang Jepang.

Tindakan konsolidasi yang diambil pemerintahan Jepang untuk mengatur roda pemerintahan pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan ialah :

- a). Panitia Pemerintahan Civil (PPC) yang mula-mula dipimpin oleh Mr. Rusbandi segera diambil alih, diganti dengan Pemerintahan pendudukan Jepang. Sebagai wali kota ditunjuk dokter Shogenyi.
- b). Sisa pelarian KNIL dan Gubernur Haga, dan pegawai pemerintah Belanda, dipaksa menyerah diri, diambil dari Dayak Besar untuk kemudian bersama-sama hampir seluruh orang Eropah dan Cina yang dicurigai dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Tatas. Dalam kelompok ini termasuk pula golongan Gusti-Gusti yang dicurigai untuk mendirikan kembali kekuasaan Kerajaan Banjar.
- c). Bekas polisi dan bekas pegawai pemerintah Belanda diaktifkan kembali. Polisi baru ini dikerahkan untuk mengum-

pulkan kembali milik orang asing yang dirampok rakyat.

- d). Keamanan dan ketertiban umum dikembalikan dengan cara-cara Jepang, yaitu menghukum mati mereka yang dianggap bersalah di muka umum dan ditonton rakyat banyak.
- e). Kerusakan peninggalan Belanda, seperti kendaraan, jembatan Coen, sentral listrik ANIEM dan lain-lainnya, dibetulkan kembali dalam waktu singkat.
- f). Kebudayaan asing ditindas dengan mewajibkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah dan bahasa Indonesia sebagai pengantar umum.
- g). Pergerakan rakyat mati, semua radio disegel.
- h). Pimpinan Angkatan Darat segera digantikan oleh pimpinan angkatan laut. Pemerintahan Minseibu dibentuk dengan pengisian jabatan tinggi yang dulunya oleh orang-orang Belanda dengan orang-orang Jepang.

Tanpa merubah struktur dan personalia orang Indonesia ini, Jepang mengharapkan lancarnya pemerintahan agar bisa melangsungkan kepada tujuan yang penting yakni menggerakkan rakyat membantu memenangkan Dai Toa Senso (Perang Asia Timur Raya). Seluruh administrasi pemerintahan memakai bahasa Indonesia., Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di seluruh tingkat sekolah. Pemerintah Jepang telah mempersiapkan suatu cara penggerakan massa yang dipandanginya efektif dalam masa perang, dengan semboyan, "Pembangunan Sin Borneo" (Borneo Baru) di dalam lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah naungan Hi-no-Maru (bendera kebangsaan Jepang).

Sejak tahun 1943 dibentuk dua "Badan Penasihat" untuk mendampingi Minseibu Cokan (Gubernur). Untuk bidang pemerintahan disebut Rensei Seimo-Co Sain (Penasehat Rahasia) diambil dari tokoh-tokoh partai, pamong praja dan perorangan. Mereka itu ialah : Amir Hasan Bondan, Willem Anton Samad, Mr. Rusbandi, Hadhariah M, dr. Susudoro Djatikusumo, Noorhanafiah dan dr.R. Sumarno.13)

Seperti sudah kita jelaskan di muka bahwa Jepang tidak merubah susunan pemerintahan yang sudah dijalankan oleh Belanda, dengan harapan bahwa Jepang mudah mengorganisir rakyat dalam

tujuannya untuk memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Kalimantan termasuk pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) Jepang, yang terdiri dari 4 propinsi, yaitu Kalimantan (Borneo) Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku-Irian. Pemerintahan pusat berada di Makasar dinamakan Minseifu. Minseifu Co Kan berada di bawah komando Panglima Besar yang berkedudukan di Saigon.

Untuk Borneo (Kalimantan) ini meliputi wilayah seluruh pulau Kalimantan, termasuk bekas jajahan Inggeris yaitu Serawak dan Sabah dan Protektorat Inggeris Brunai. Pusat pemerintahan berkedudukan di Banjarmasin di bawah pimpinan Minseibu Cokan.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 1945 termasuk wilayah Kalimantan Tengah yang waktu itu dinamakan Dayak Besar, sedangkan sesudah tahun 1957, yang dinamakan Kalimantan Selatan itu tidak termasuk lagi daerah Kalimantan Tengah.

Minseibu Cokan yang menguasai seluruh Borneo (Kalimantan) membawahi *Ken Kan Rikan* yang pada masa pemerintahan Belanda adalah daerah yang dinamakan Afdeling dijabat oleh seorang Kiai Besar berkedudukan di Kandangan yang meliputi wilayah Hulu Sungai. Daerah *Ken Kan Rikan* ini membawahi beberapa daerah *Bunken* yang pada masa pemerintahan Belanda disebut *Onderafdeling* yang dijabat oleh seorang *Kiai Kepala* (Kewedanaan). Wilayah kewedanaan ini meliputi beberapa buah kecamatan atau *Onderdistrik* yang dijabat oleh *Huku Gunco* atau Camat. Sedangkan wilayah terendah dalam daerah Kecamatan ini terbagi atas beberapa Kepala Kampung atau Pembekal yang disebut *Sonco*.

Daerah Kalimantan Selatan memiliki sebuah pemerintahan otonomi kota yang pada masa Belanda disebut *Gemeente*. Pemerintahan *Gemeente* ini mempunyai dewan kota yang disebut *Gemeente Raad*. Pada masa pemerintahan Jepang status ini tetap berlaku yang disebut *Banjarmasinshi*, sedangkan dewan kotanya disebut *Si Kai Gi In* anggotanya terdiri dari 12 orang, yang ditunjuk oleh Jepang. Ketuanya adalah orang Jepang yang disebut *Si Co*.

Untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan juga mempunyai Dewan yang pada masa pemerintahan Belanda disebut Banjar Raad, oleh Jepang tetap ada yang disebutnya *Co Sai Gi In* yang anggotanya 20 orang, juga ditunjuk oleh Jepang. Salah seorang anggotanya

adalah H.A.A. Hamidhan tokoh wartawan di Kalimantan. 14)

B. BIDANG SOSIAL EKONOMI.

Ekonomi yang lumpuh akibat peperangan segera disehatkan kembali, dengan jalan mendatangkan barang pokok seperti : garam, rokok kretek *Dji Sam Soe*, rokok BAT dari Jawa dengan perahu-perahu layar, tembakau bambung dari Sulawesi. Dengan cara ini perekonomian dapat distabilkan.

Peperangan modern memerlukan ekonomi yang kuat. Untuk keperluan tersebut Angkatan Laut Jepang membangun ekonomi perang agar sama sekali segala kebutuhan perang dan rakyat tidak tergantung dari import dari Jepang. Pimpinan pelaksanaan ekonomi perang ini ditugaskan kepada cabang-cabang perusahaan negara atau kepada kepala lembaga-lembaga ekonomi yang berpusat di Jepang. Perusahaan setempat dengan bentuk perseroan terbatas untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan fasilitas penuh. Pegawai-pegawainya kebanyakan orang Jepang dengan orang-orang Indonesia sebagai pembantunya.

Pada tahun 1943 telah beroperasi di Kalimantan Selatan sejumlah perseroan terbatas, seperti :

- a). untuk urusan gula dan lain-lain - *Mitsui Bussan Kaisha*.
- b). untuk urusan bahan makanan - *Mitshubishi Kabushiki Kaisha*.
- c). untuk urusan tekstil - *Toyo Menka Kaisha*.
- d). untuk urusan kayu - *Nomura Teindo Kabushiki Kaisha*.
- e). untuk urusan ikan - *Borneo Suisan Kabushiki Kaisha*.
- f). untuk urusan pembikinan kertas - *Oji Seizi Kabushiki Kaisha*.
- g). untuk pembuatan kapal-kapal laut - *Borneo Shosenshoe Kabushiki Kaisha*.
- h). untuk pembuatan kendaraan angkutan. - *Toyota Kabushiki Kaisha*.i).
- i). untuk pengangkutan di sungai dan laut. - *Kasen Ong kookai dan Koonan Kaiyoon*.

Selain itu didirikan pula perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan seperti *Makassar Koncojo*, *Nitetsu* dan *Ishihara*. Perusahaan-perusahaan kecil bergerak di bidang penjualan obat-obatan, barang pecah belah. *Eigasha* bergerak di bidang urusan film, sedangkan Borneo *Shimbonsha* menerbitkan harian *Borneo Shimbun*. Untuk tenaga khusus, Jepang menggunakan tenaga-tenaga Cina yang telah berpengalaman dalam perusahaan *Big Five*, atau perusahaan mereka sendiri.

Kumiai merupakan suatu gerakan koperasi terpimpin ketat, baik untuk penyebaran barang distribusi, maupun untuk pembelian bahan dari rakyat terutama padi. Tugas pokoknya adalah untuk pengumpulan produksi rakyat yang dikuasai Jepang.

Pembiayaan usaha-usaha ini ditulumpangtonggong oleh Bank-Bank pemerintah, seperti *Taiwan Ginko* sebagai pengganti *Javasche Bank* dan *Shoomin Ginko* pengganti Bank Rakyat. Uang yang di edarkan di daerah ini adalah uang kertas Jepang yang memakai teks bahasa Indonesia, terdiri dari uang kertas pecahan 1 sen sampai dengan 10 rupiah.

Uang logam ditarik dari peredaran. Uang kertas *Javansche Bank* tetap beredar, tapi lambat laun hilang sama sekali. Ketika produksi membanjir barulah dikeluarkan uang kertas ratusan, dengan teks Bahasa Indonesia. Sebagian uang ini disedot lagi melalui lotery pemerintah dan Asuransi Jiwa Bumiputera. Seluruh perdagangan dikuasai oleh perusahaan pemerintah dan *Kumiai*, rakyat bergerak di bidang produksi. Semua kegiatan ekonomi ini dijalankan oleh tenaga Jepang, penduduk setempat, orang hukuman, romusha daerah atau yang didatangkan dari Jawa. Penebangan kayu dilakukan secara besar-besaran dengan tenaga manusia. Di pinggir sungai Barito dari pulau Alalak ke hulu sepanjang 10 Km segera ditutupi ribuan batang-batang kayu yang dibuat balok atau papan. Pembelian sisa kayu bangunan oleh penduduk hanya mungkin dengan surat izin *Numora*.

Dengan memakai tenaga manusia yang amat murah, persawahan pasang surut arealnya diperluas. Di daerah Rantau, Kabupaten Tapin ada sungai yang namanya sungai Jepang, karena sungai tersebut digali atas perintah Jepang untuk memperbaiki pengairan.

Di daerah Barabai juga penduduk diperintah melakukan kerja

gotong royong (*kenrohoshi*) untuk membuat sungai untuk mengalirkan air sungai ke daerah persawahan. ¹⁵⁾ begitu pula di daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

Di Pelaihari yaitu di Tarini dibuka tambang dan pengecoran besi. Dengan cara ini desa-desa segera menghasilkan produksi untuk keperluan pemerintah pendudukan dan sisanya untuk rakyat.

Karet sebagai hasil yang terbesar dari Kalimantan Selatan, selain sebagai bahan perdagangan yang dimonopoli oleh pemerintah Jepang, juga digunakan sebagai produksi bahan keperluan sehari-hari. Penggunaan karet untuk keperluan sehari-hari ini hampir terdapat di seluruh Kalimantan Selatan.

Untuk menjalankan mobil diperlukan bensin, sedang waktu itu tidak ada bensin. Untuk menjalankan mobil ini, digunakan minyak getah yang diperoleh setelah disuling dan dengan minyak dari getah karet ini mobil dapat berjalan. ¹⁶⁾ Ban sepeda ditanggulangi dengan membuat *ban-buta* dari karet, yaitu ban untuk sepeda yang tidak menggunakan udara, yang langsung dipakai. Di daerah Barabai, yang terbesar dibuat di Kayubawang. ¹⁷⁾ Di Amuntai karet dibuat sepatu. Memang sebelum perang kota Amuntai terkenal sebagai kota pembuat sepatu kulit yang terbaik dan sandal kulit. Tetapi ketika pendudukan Jepang kulit sulit dicari, oleh karena itu diproduksi sepatu dari karet, bahkan dengan berwarna yang cukup menarik. Di samping itu masih membuat sepatu dari kulit yang disamak sendiri, tetapi karena cara penyamakannya kurang masak, sehingga sepatu setelah dipakai sebulan, sepatu tersebut mengembang dan membesar, karena kulitnya mengembang. ¹⁸⁾ Kegunaan karet bukan sampai di situ saja, ternyata pada saat kekurangan bahan pakaian, karet dapat dibuat pakaian, dibuat celana dan baju, juga berwarna yang menarik. Pada waktu perlombaan barisan Seinendan di Barabai, salah satu regu yang diikuti oleh Bapak Kare (pensiunan Patih Barabai), seluruh pasukan beliau berpakaian dari karet. ¹⁹⁾ Pada masa pendudukan Jepang pula diproduksi sejumlah besar kondom dari karet sebesar 3000 sehari untuk keperluan orang Jepang. Pembuatannya dilakukan oleh Lamberi Bustani atas pengawasan dari Jepang, yaitu pimpinan perusahaan Nomura, Hitaki di Pabrik Nomura di Teluk Tiram. ²⁰⁾

Perusahaan sabun juga terdapat hampir di setiap kota di Kali-

mantan Selatan, umumnya merupakan perusahaan swasta. Di Banjarmasin perusahaan sabun "Antara Sukei" kepunyaan H.M. Yakub Amin termasuk perusahaan sabun yang berkwalitas tinggi. Perusahaan sabun yang lainnya kepunyaan orang Cina, tetapi kualitasnya agak rendah. Bahan baku sabun dibuat dari bahan yang ada di daerah ini, yaitu : abu saktut kelapa dengan minyak kelapa. Garam dibuat dari abu nipah yang banyak terdapat di rawa-rawa di Kalimantan Selatan terutama di Banjarmasin. Produksi kertas yang dibuat dari ilung, hanya merupakan monopoli dari pemerintah Jepang, juga terdapat di Banjarmasin. 21)

Menenun digalakkan dalam rangka menanggulangi kekurangan bahan pakaian. Di Alabio terkenal dengan produksi bahan pakaian dari benang yang ditenun. Untuk memperoleh benang ini, memang Jepang telah memerintahkan menanam kapas juga pernah dikumpulkan benang jala (*lunta*), kemudian di lepaskan benangnya dan kemudian ditenun. 22) Pabrik rokok juga di bangun hampir tiap daerah. Pabrik kramik di Bitahan Rantau, dapat menghasilkan sejumlah besar piring, mangkok dan berjenis keperluan rumah tangga. Bahannya diambil dari tanah putih yang banyak sekali terdapat di sekitar Bitahan Rantau. Buruhnya lebih dari 200 orang dengan pimpinannya orang Jepang. Bahan bangunan, besi cor juga diproduksi.

Perahu sungai, kapal sungai dan kapal laut ukuran sampai 200 ton hasil produksi galangan kapal *Koonan Kaiyoon*, di Telaga Biru, gerobak-gerobak kayu made in *Toyota* dibuat untuk angkutan darat.

Pengangkutan umumnya menggunakan perahu. Dari Banjarmasin diangkut barang ke Hulu Sungai dengan menggunakan kapal sungai dan sampai mencapai Tanjung daerah paling utara dari Hulu Sungai. Perdagangan antar kota harus dengan izin. Seorang pedagang kopiah di Barabai, harus meminta izin untuk membawa beledru bahan baku kopiah dari Amuntai. Yang sangat terlarang adalah perdagangan beras, meskipun membawa untuk sekedar keperluan makan saja. 23)

Panen padi tahun 1943/1944 gagal total. Kalau tak mendapat kiriman dari daerah lain, hanya cukup untuk 6 bulan saja. Pemerintah Jepang merahasiakan kegagalan panen ini, sambil mengarahkan penduduk untuk menanam singkong, ubi-ubian lainnya untuk me

nutupi kekurangan tersebut dengan hasil yang baik. Sayuran harus ditanam, halaman yang lapang harus ditanami dengan ubi, sayuran atau singkong ataupun dengan kacang. Semua hasil tersebut harus dijual pada *Kumiai* yaitu koperasi terpimpin, padahal rakyat sendiri kekurangan bahan makanan. Sejak pendudukan Jepang bahan pangan berubah dari beras, ke segala macam ubi, sagu atau makanan yang mengenyangkan.

Kesulitan korek api, memaksa penduduk mencari api dengan bahan serbuk enau (*lumuh*) digeserkan dengan batu yang tajam.

C. BIDANG SOSIAL BUDAYA.

1. Pendidikan

Penduduk Kalimantan Selatan dikenal sebagai orang Banjar dan beragama Islam. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Banjar sebuah lingua franca yang luas dipakai Orang Banjar berjiwa pedagang, mempunyai kecakapan sebagai pedagang antar pulau. Dengan menggunakan perahu Banjar yang dikenal sebagai *penes* Banjar, mereka mempunyai kemampuan untuk berlayar mengarungi lautan Indonesia bahkan sampai ke Muangthai. Sebagai suatu suku bangsa yang mempunyai jiwa busines, dalam masa-masa penjajahan yang silam orang Banjar memperhitungkan benar-benar dahulu untung ruginya memasukkan anak mereka ke sekolah. Hal ini sangat menguntungkan bagi politik pendidikan pemerintahan Belanda yang berusaha agar rakyat jajahannya tetap bodoh. Oleh karena itulah di seluruh Kalimantan Selatan hanya terdapat sebuah MULO yang terdapat di Banjarmasin, didirikan pada tahun 1927. ²⁴⁾

Dalam hal ini berbeda pendapatnya tentang sekolah agama. Sebagai suku bangsa yang beragama Islam, mereka lebih mencurahkan perhatian mereka pada pendidikan agama. Madrasah-madrasah agama berkembang dengan pesat. Yang terkenal adalah Madrasah Darussalam Martapura yang mempunyai santri lebih dari 1000 orang. Santrinya berasal dari seluruh Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur bahkan juga ada yang berasal dari Tembilahan Sumatera Timur. Normal Islam Rantau termasuk di antara madrasah yang berhasil. Gurunya dari Sumatera Barat antara lain Khatib

Syarbaini, Bey Arifin dan lain-lain. Normal Islam Amuntai sampai sekarang merupakan madrasah agama yang berhasil.

Pandangan mereka terhadap sekolah yang didirikan oleh Belanda sebagai sekolah "kafir", menyebabkan mereka memusatkan perhatian mereka terhadap pendidikan agama. Mereka tidak segan-segan mengirim anak mereka ke sekolah agama di Jawa antara lain yang paling terkenal bagi masyarakat Kalimantan Selatan, adalah madrasah Gontor Ponorogo. Juga ada pula yang dikirim ke Sumatera Barat pada sekolah Thawalib yang juga terkenal di Kalimantan Selatan. Selebihnya adalah Perguruan Tinggi Al-Azhar di Mesir dan Mekah Saudi Arabia.

Sikap orang Banjar yang kurang tertarik pada sekolah-sekolah kolonial itu diterima penjajah dengan senang hati dan membiarkan daerah ini dalam keadaan terkebelakangan.

Sejak *MULO* didirikan tahun 1927 di Banjarmasin, baru tahun 1939 didirikan di Banjarmasin sebuah sekolah yang bernama *Inheemse Mulo* atau Mulo Bumiputera, tujuannya hanya sekedar memperoleh atau mendidik tenaga administrasi yang diperlukan mereka bukan untuk mempersiapkan bagi sekolah selanjutnya. 25)

Dari sebuah daftar Induk sekolah (Stamboek) peninggalan *Mulo* Banjarmasin, yang masih tersimpan di sekolah lanjutan yang menggantikannya, kita melihat gambaran yang menyedihkan. Perkembangan sekolah ini menunjukkan, bahwa orang Indonesia terdesak oleh orang asing yang membantu Belanda dalam menyempurnakan politik penjajahannya. Dari 492 orang pelajar yang terdaftar di *Mulo* Banjarmasin terdapat : 83 orang Belanda, 3 orang yang disamakan dengan Belanda, 180 orang Indonesia dan 226 orang Cina. Orang Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk sekolah ke *MULO* tersebut hanya kurang lebih 5% dari jumlah penduduk masa itu.

Sekolah-sekolah negeri yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan Selatan dalam rangka mencetak tenaga-tenaga pembantu, baik dalam bidang pemerintahan, maupun untuk keperluan perusahaan-perusahaan Belanda adalah sebagai berikut :

- a). Sekolah Rendah 196 buah
- b). *HIS* (Hollands Inlandse School) 3 buah

- c). *HCS* (Hollands Chinese School) 1 buah
- d). *Schakel School* 1 buah
- e). *ELS* (Europese Lagere School) 1 buah
- f). *CVO* (Cursus Volks Onderwijs) 8 buah
- g). *Klein Handel School* 3 buah
- h). *MULO* (Middelbaar Uitgebreid Leger Onderwijs) 1 buah
- i). *Inheemse MULO* 1 buah

Kesempatan untuk menuntut pengetahuan dari tingkatan rendah sampai yang lebih tinggi dalam sekolah pemerintah, bagi rakyat biasa sangat dibatasi.

Yang diberi kesempatan menuntut pelajaran secara luas di sekolah-sekolah negeri ialah : anak pegawai negeri, orang kaya, keluarga bangsawan, orang asing terutama Cina, sedang rakyat biasa hanya diizinkan setelah melalui *School Commissie* yang terdiri dari Tuan *Controleur*, (*Wedana*) dan *School Opziener*. 26)

Ketika Jepang menduduki Kalimantan Selatan; dengan pemerintahan Kaigunnya (Angkatan Laut), pemerintah Jepang mengadakan pembaharuan terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah tersebut dijepangkan dan kurikulumnya disesuaikan dengan keperluan Jepang. Tindakan mula-mula pada waktu Jepang datang, mengindonesiakan semua sekolah, demi kepentingan propagandanya supaya bangsa Indonesia percaya bahwa Jepang membawa tugas suci, tetapi menjelang tahun 1943 ketika pemerintahannya cukup kuat, mulai proses penjepangan.

Sekolah pada masa Jepang adalah dengan nama Jepang seperti :

- a). S.R.3 tahun dinamakan *Hutsu Kogakko*.
- b). S.R.6 tahun dinamakan *Hutsu Djokyu Kogakko*.
- c). S.M.P. dinamakan *Hutsu Tju Gakko*.
- d). Sekolah Menengah Pertanian dinamakan *Nogyo Tju Gakko*.
- e). Sekolah Guru setingkat SGB dinamakan *Sihan Gakko*.
- f). Sekolah Teknik 2 tahun dinamakan *Kogyo Djitsumo Gakko*.

g). Sekolah Dagang pengganti *Klein Handel School* dinamakan *Syogyo Djitsumo Gakko*.

H). Sekolah Pelayaran dinamakan *Kaiin Yoseijo*.

i). Sekolah Guru Pengganti CVO 2 tahun, dinamakan *Kyoin Joseijo*.

Sekolah-sekolah ini umumnya terdapat di Banjarmasin kecuali *Nogyo Tju Gakko* sekolah pertanian yang hanya ada di Kandangan.

Hutsu Tjo Gakko yaitu pengganti Mulo, lama pendidikan sama dengan MULO, terdapat di Banjarmasin dan di Barabai. Pada zaman pemerintah Belanda sekolah ini tidak terdapat di Barabai, dan hanya satu-satunya di Banjarmasin. Jumlah murid yang terdaftar 412 orang dengan jumlah gurunya 15 orang.

Nogyo Tjo Gakko, yaitu sekolah pertanian, lama pendidikan 3 tahun dan hanya terdapat di Kandangan, sebagai pengganti *Land Bouw School*, jumlah murid yang terdaftar 73 dengan guru 5 orang

Sekolah guru ada dua jenis, yaitu *Sihan Gakko* sederajat dengan SGBkemudian, lama pendidikan 4 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, murid yang terdaftar 102 orang, dengan jumlah guru 6 orang. Jenis sekolah guru yang kedua adalah : *Kyoin Yoseijo* sebagai pengganti CVO, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR. Sekolah guru jenis ini terdapat di Banjarmasin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Jumlah muridnya 200 orang dengan jumlah guru 10 orang.

Kogyo Djitsumo Gakko, yaitu sekolah dagang sebagai pengganti *Klein Handel School*, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, jumlah murid yang terdaftar 42 orang dengan jumlah guru 3 orang.

Kaiin Yoseijo, yaitu sekolah pelayaran, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, dengan jumlah murid 35 orang, dengan jumlah guru 3 orang. ²⁷⁾

Diskriminasi dalam pemberian kesempatan untuk belajar dihapuskan, semua rakyat berhak mendapat dasar pendidikan yang sama yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun, sedang sekolah nomor I atau *HIS* dihapuskan dan dalam waktu singkat berlipat ganda.

Pelajaran menulis, membaca dan berhitung tidak dipentingkan yang diutamakan hanya menyanyi, *taiso* (olah raga), *kinrohoshi*

(gotong-royong). Begitu pula mata pelajaran seperti : sejarah, ilmu bumi waktu itu dilarang diajarkan, kurikulum tidak ada, tetapi tujuannya hendak men-Jepang-kan bangsa Indonesia. 28) dengan mempergiat pelajaran bahasa Jepang. Menyanyi yang lebih diutamakan yang bernada mars dan lagu kemenangan perang. Begitu pula yang mengutuk Inggris dan Amerika sangat populer bagi anak sekolah. Jadi pendidikan jaman Jepang diarahkan kepada kemenangan perang Jepang.

Pelajaran huruf Arab di semua sekolah dihapuskan, diganti dengan huruf *Katakana*, *Hirtagana* dan *Kanji* (huruf Jepang). Guru-guru sekolah agama atau sekolah Islam, dianjurkan untuk membantu pembangunan Borneo Baru dan mengakibatkan sekolah-sekolah agama menjadi lumpuh tidak terbina lagi. Sekedar untuk gantinya di Banjarmasin didirikan sebuah Sekolah Menengah Islam yang pelajarannya mementingkan taiao, semangat bahasa Jepang.

Pondok Kebangunan Asia didirikan di Kandangan untuk tempat latihan pemuda-pemuda Islam, para guru dan Ulama Islam dilatih dan dididik dengan bahasa dan semangat Jepang.

Sekolah-sekolah partikular dengan sendirinya ikut bubar bersama Pergerakan Rakyat yang membinanya, karena pergerakan rakyat dilarang oleh Pemerintah Jepang dan diganti dengan Pergerakan Rakyat Indonesia-Jepang.

Dengan tekanan senjata tiap-tiap pagi diadakan penghormatan besar kepada Istana Jepang, dengan *sei Ke rei* kearah Tokio, oleh guru-guru dan murid-murid sekolah.

2. Bidang kehidupan beragama

Semua perkumpulan-perkumpulan agama, politik atau sosial tidak diperbolehkan berdiri. Bagi umat Islam disediakan gantinya sebuah perkumpulan yang bernama Jami'ah Islamiyah Borneo atau *Borneo Kaikyū Kyokai* yang diketahui oleh H. Abd. Rahman Siddik, di bawah pengawasan ulama-ulama Islam Jepang yang didatangkannya ke Kalimantan Selatan.

Ulama Islam Jepang yang datang ke sini ialah : Umar Faisal, Said Waqas, Tahir Zaki, Usman Yusuf dan Sarik Imaizumi. 29)

Meskipun Jepang mendatangkan ulama Jepang ke Kalimantan

Selatan, yang menurut katanya seorang ulama Islam, tetapi rakyat umumnya kurang begitu yakin terhadap keislaman ulama Jepang tersebut. Rakyat mendengar berita yang santer, bahwa pada waktu ulama Islam Jepang ini berada di Negara dia kencing berdiri dan tidak dibasuh.

Pada dasarnya tidak ada larangan dalam kegiatan beragama, tetapi orang selalu diburu oleh rasa ketakutan. Tetapi kenyataan yang tampak bahwa kehidupan beragama lebih mantap, mungkin dalam situasi yang keritis seperti ini, orang lebih dekat dengan Tuhan dan merasa lebih aman besama-sama di langgar atau mesjid dari pada dalam rumah sendiri. 30).

Perintah *sei kerei* pada tiap pagi-pagi ke arah Tokio, betul-betul sangat bertentangan dengan jiwa Islam, tetapi karena takut, meskipun badannya *sei ke rei*, tetapi jiwanya tetap menolak.

Pada waktu itu khotbah mulai menggunakan bahasa Indonesia yang mula-mulanya dimulai oleh golongan Muhammadiyah.

Di beberapa daerah umpamanya di Barabai, Jepang memerintahkan kepada semua orang supaya pergi sembahyang ke mesjid atau ke langgar, karena itu maka saat itu langgar atau mesjid hampir tidak dapat menampung orang yang mau sembahyang. 31)

3. Bidang Seni Budaya.

Pemerintahan *Kaigun* di Kalimantan Selatan tidak mempunyai jawatan yang namanya *Keimin Bunka Syidosyo* (Badan Pusat Kebudayaan), tetapi hanya mempunyai jawatan yang namanya *Keiming Syidobo* (Kantor Penerangan) yang dalam tuganya menggunakan media kebudayaan, yang meliputi media seni lukis, seni drama, seni sastra dan segala jenis kesenian lainnya.

Pada kantor *Keiming Syidobo* atau Kantor Penerangan Jepang yang berkedudukan di Banjarmasin, terdapat tokoh-tokoh yang menjalankan program penerangan Jepang tersebut antara lain : Lamberi Bustani, Arsyad Manan, Noor Brand, Solikhin, Abdul Manan dan lain-lain.

Kegiatan kesenian pada jaman Jepang dapat dikatakan mandek, sebab orang diliputi oleh suasana ketakutan, apalagi Jepang selalu menyiksa terhadap orang yang ditangkapnya. Pemuda-pemu-

da dipaksa melakukan kerja paksa yang dinamakan *kenrohoshi* terutama membuat lapangan terbang, dan kerja paksa lainnya, sehingga tidak ada kesempatan mengadakan atau mengembangkan kesenian. Yang ada hanya kesenian yang diadakan oleh Jepang, yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan propaganda Jepang. Dengan demikian kesenian diperalat oleh pemerintah Jepang. Contohnya : seni lukis, poster yang isinya membakar semangat membangun untuk kemenangan orang Jepang. Lukisan yang bersifat berlomba meningkatkan hasil bumi.

Solichin dan Noor Brand adalah pelukis yang bekerja di *Keiming Syidobo* pula.

Ada jenis hasil lukisan yang digunakan untuk penerangan, dalam bentuk yang namanya *kamisibai*, yaitu ceritera dalam bentuk gambar, seperti slide sekarang dan diceriterakan. Salah satu judul cerita yang terkenal adalah ceritera "*Amat Heiho*" buah karangan Lambri Bustani. Ceritera ini sangat terkenal di seluruh Kalimantan Selatan, yang menggambarkan keberanian Amat sebagai seorang Heiho, berjuang membantu Jepang menghalau musuh. Keberaniannya, kedisiplinannya dan semangatnya merupakan contoh dari seorang *Haiho* yang diharapkan Jepang. Seksi seni lukis atau gambar ini, termasuk juga poster dipimpin oleh seorang Jepang yang namanya Tanaka.

Salah satu group sandiwara yang terkenal adalah group "Pancar Surya". Semua isi ceritera yang akan dimainkan mendapat sensor yang keras oleh Jepang, waktu itu yang memegang sensor adalah Tuan Ikato yang merupakan seksi dalam kantor penerangan Jepang (*Keiming Syidobo*). Salah satu ceritera sandiwara yang mendapat hadiah dari Jepang adalah ceritera "*Fajar Minami*" karangan Lambri Bustani yang berisi tentang pembangunan desa dengan bekerjasama dengan pemuda Jepang (1944). Group ini pernah mengadakan banyak ceritera lain yang kesemuanya berisi semangat membangun, semangat membantu peperangan, rasa hormat pada saudara tua Jepang, yang kesemuanya baru dapat beredar untuk dimainkan setelah mendapat sensor dari Jepang. 32).

Di Barabai juga lahir organisasi kesenian tonil, salah seorang tokoh pimpinannya adalah Pak Kare (pensiunan Patih), tetapi semua ceritera yang akan dimainkan harus terlebih dahulu mendapat

sensor dari Kantor Penerangan setempat. Organisasi ini berkeliling dalam lingkungan Barabai dalam rangka hiburan rakyat. 33).

Kesenian rakyat yang juga masih hidup adalah seperti : wayang, lamut, mamanda. Di Amuntai pemain lamut yang terkenal ialah Kaderi atau Ikad. Dalang yang terkenal di Amuntai adalah Abdul Kadir, dan umumnya karena Amuntai adalah daerah yang kuat memegang agama, maka dalang jarang sekali orang Amuntai asli, meskipun wayang juga banyak penggemarnya di Amuntai. Kesenian lain yang juga berkembang di Amuntai pada masa Jepang ini adalah hadrah, tetapi umumnya hadrah ini merupakan kesenian yang penggemarnya penduduk sepanjang aliran sungai. Sandiwara atau tonil juga pernah dimainkan di Amuntai, yang kadang-kadang sebagai pemainnya adalah juga pegawai Kantor Penerangan tersebut. Ceriteranya ada yang dikarang sendiri di tempat atau yang dikirim dari Propinsi. 34)

Di Barabai pusat kesenian ini terdapat di kampung Kayubawang. Pemain wayang gong yang terkenal antara lain : Tukacil alias Kacuk, Moh.Daud. Pemain tonil di Barabai ialah anak buah dari Pak Kare. Di kampung seperti Kambat, Wawai juga ada group tonil di bawah pimpinan Ali Baderun. Kesenian lain yang timbul di Barabai ialah suling bambu, sedang seni hadrah tidak terdapat. 35)

Di Rantau sebagai pusat berkembangnya kesenian ini adalah daerah Pandahan Kecamatan Tapin Tengah. Kesenian rakyat yang sekarang hampir punah, andi-andi, juga berkembang di daerah ini. Tetapi pada masa pemerintahan Jepang kesenian ini masih diperlihatkan meskipun tidak sebegitu berkembang seperti sebelumnya, Mamanda, lamut, madihin, wayang juga terdapat di daerah ini.

Di Rantau pernah diadakan keramaian sebagai hiburan pada rakyat. Disamping mempertunjukkan kesenian lainnya yang sudah umum juga mendatangkan semua suku terasing Mancabung dan sekitarnya untuk memperagakan kurung-kurung yang lazimnya dipergunakan pada waktu upacara menugal di pegunungan.

Semua kesenian ini dimanfaatkan pemerintah Jepang sebagai alat propaganada Jepang, dengan kata lain kesenian yang tidak mendukung propaganda perang Jepang tidak bisa hidup. Tentunya perkembangan kesenian pada masa ini tidak sebebaskan sekarang karena rakyat selalu diliputi oleh rasa takut terhadap Jepang.

Pada Kantor Penerangan Jepang ini selain bekerja tokoh-tokoh kesenian juga terdapat ahli-ahli pidato sebagai agitator dan juga banyak terdapat muballig. Bapak Zafri Zamzam (almarhum) bekas Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, juga bekerja sebagai tokoh penerangan di Propinsi. Di Amuntai bekerja pada kantor ini Bapak Idham Chalid (mantan Ketua Umum PB NU, mantan Ketua DPR/MPR, mantan Ketua DPA), Bapak H. Maksid mantan Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Media massa

Persurat Kabar di Kalimantan Selatan. Sebelum tentara Jepang memasuki dan menduduki ibu kota Banjarmasin, yang menjadi ibu kota Propinsi Borneo, di Banjarmasin terbit : a). harian "Suara Kalimantan", b). "Borneo Post" terbit dua kali seminggu dan c). harian "Bintang Borneo". Sementara itu di Barabai diterbitkan mingguan "Suara Hulu Sungai" (penerbitan Suara Kalimantan,) dan *Borneo Courrant* terbit dua kali sebulan sebagai *advertentic-blad* disiarkan gratis yang dihentikan penerbitannya ketika Jerman dalam perang dunia II menduduki negeri Belanda, sebab percetakan *Banjarmasinse Drukkery* yang mencetak dan menerbitkan *advertentie-bland* itu adalah kepunyaan orang Jerman.

Dua hari sebelum tentara Jepang memasuki kota Banjarmasin, oleh pihak AVC Belanda dilakukan pembumihangusan terhadap instalasi, bangunan pasar-pasar, jembatan dan lain-lain. Tindakan ini dilakukan dengan suatu harapan agar alat-alat tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh Jepang yang berarti suatu pukulan atas kemajuan tentara Jepang.

Dalam hal ini termasuk juga percetakan, yang dapat dipergunakan untuk mencetak selebaran atau penerbitan koran. Dengan demikian maka percetakan yang menerbitkan "Suara Kalimantan", surat kabar yang terang-terangan selalu menentang politik penjajahan Belanda dinomor satukan dalam pengrusakan. Sedangkan percetakan lainnya hanya diperintahkan untuk dibuka bagian-bagian pentingnya seperti piringan tinta dan rol tinta agar disembunyikan hingga tidak dapat dengan segera dipergunakan. Hal ini dapat diketahui ketika percetakan *Banjarmasinse Drukkerij* diserahkan untuk penerbitan koran pertama dalam masa pendudukan Jepang, dalam

beberapa hari saja dapat dijalankan, sesudah alat-alat penting itu dipasang kembali. Tidak demikian dengan percetakan Suara Kalimantan yang betul-betul dibumihanguskan, dirusak mesinnya, sedang letter-letter yang masih merupakan zetsel yang ada dalam raam, dibuang ke sungai. Sementara itu percetakan De Eendracht yang mencetak Borneo Post dan Bintang Borneo, bukan dirusak, akan tetapi turut terbakar dalam kompleks toko-toko dan pasar yang dibakar oleh tentara Belanda (*Vernielingscorps*).

Untuk mengembalikan keadaan penghidupan rakyat di daerah pendudukan Jepang, pemerintah Jepang segera mengusahakan untuk penerbitan surat kabar. Terutama dimaksudkan supaya rakyat segera dapat mengetahui tentang maksud kedatangan Tentara Jepang di Indonesia, yaitu Jepang datang untuk melepaskan belenggu penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Jepang datang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Demikian janji Jepang mula-mula, hingga sudah tentu mendapat sambutan yang hangat dari seluruh bangsa Indonesia.

Demikianlah kepada A.A.Hamidhan, yang sebelum Jepang masuk adalah menjadi penerbit dan pemimpin redaksi harian "Suara Kalimantan" di Banjarmasin, disertai tugas untuk menerbitkan surat kabar. Oleh karena percetakan yang tadinya mencetak "Suara Kalimantan" dan mingguan "Suara Hulu Sungai", kena bumi hangus Belanda, maka disediakan sebuah percetakan yang bernama *Banjarmasinse Drukkery*, semula kepunyaan orang Jerman yang kemudian disita karena Jerman dalam keadaan perang dengan Belanda. Akhirnya jatuh ketangan seorang Cina, yang berhasil membelinya diwaktu dijual lelang sebagai barang rampasan perang.

Kemudian diadakan perbaikan pada mesin-mesin cetak dan penyusunan lainnya, maka permulaan bulan Maret 1942, dapatlah diterbitkan nomor pertama dari harian "Kalimantan Raya". Mengenai nama ini adalah pilihan A.A.Hamidhan sendiri, karena tidak menginginkan nama "Suara Kalimantan" untuk nama harian yang baru itu.

Yang menjadi sebab utama, adalah bahwa harian yang baru diterbitkan ini, adalah kepunyaan dan di bawah kekuasaan Pemerintah Jepang, yang isinya dan tujuannya sudah tentu amat bertentangan dengan harian "Suara Kalimantan". Tidak heran ketika hari-

an "Kalimantan Raya" itu mulai terbit, A.A.Hamidhan sudah mendapat pertanyaan dari pihak penguasa Jepang. Dalam hal ini A.A.Hamidhan menerangkan, bahwa sekarang Pemerintah Jepang bukan hanya menduduki daerah Kalimantan yang tadinya dikuasai oleh Belanda, tetapi meliputi daerah Serawak, Berunai dan Sandakan yang dulunya menjadi jajahan Ingggris. Itulah sebabnya dipilih namanya "Kalimantan Raya". Keterangan di atas dapat diterima oleh pihak Jepang. Patut pula dicatat bahwa sebelumnya penerbitan itu, Jepang telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Hamidhan. Yang penting surat kabar tersebut.

Untuk memperlengkap isi harian ini, terutama disesuaikan dalam situasi perang, maka atas bantuan Syamsul Arifin, dengan mempergunakan radio aqu diambil berita-berita dari siaran radio Tokio, kemudian pekerjaan ini diteruskan oleh Thalib Abadi.

Setelah dua minggu "Kalimantan Raya" diterbitkan, muncullah "Borneo Baru" yang dipimpin oleh Andin Boer'ie, yang sebelum Jepang masuk pemimpin harian "Bintang Borneo". Koran ini tidak dapat terbit lama karena kekurangan persediaan kertas.

Suatu pengalaman pahit yang pernah dirasakan oleh pimpinan "Kalimantan Raya", adalah suatu panggilan tiba-tiba dari Komandan tentara Jepang di Banjarmasin. Sebuah berita dari Kotabaru, yang diberi tanda dengan potlot merah yang tebal, disodorkan kepada Hamidhan, dengan kata-kata keras dalam bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang maksudnya " "kenapa dimuat berita gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam koran! Ini tidak betul! Bisa dihukum potong leher!".

Sudah tentu mengejutkan bagi Hamidhan, yang dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas segala isi "Kalimantan Raya". Tentang berita yang menjadi persoalan di atas adalah berita mengenai adanya perpisahan penduduk dengan sekelompok tentara Jepang yang terpaksa meninggalkan Kotabaru dan akan ditempatkan kelain daerah yang tidak disebutkan. Bagi kita berita demikian adalah berita yang wajar, tapi bagi tentara Jepang adalah termasuk strategi perang. Bagi Hamidhan untuk kali ini mendapat ampun tetapi apabila ada kemudian berita yang menjurus pada strategi militer tidak ada ampun lagi.

Sekitar permulaan bulan April 1942, tentara pendudukan Ang-

katan Darat Jepang (*Rikugun*) meninggalkan Kalimantan, untuk bergerak meneruskan penyerangannya ke daerah-daerah yang belum ditaklukkan, antara lain Birma. Untuk penggantinya datang tentara Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*), lengkap dengan bagian pemerintahan sipilnya. Sejak itu pula penerbitan "Kalimantan Raya" berada di bawah penilikan bagian politik dari Kantor Pemerintah Jepang, yang namanya Seimuka. Dari waktu itu pula, haluan harian "Kalimantan Raya" tidak sebebaskan sebagaimana permulaan diterbitkan.

Jika pada mulanya harian ini hampir setiap terbit selalu dinamakan kepada rakyat Indonesia, bahwa tanah air dan bangsa kita telah bebas dari penjajahan Belanda, berkat bantuan tentara Jepang, dan selalu menganjurkan supaya bangsa Indonesia memperteguh persatuan demi untuk nusa dan bangsa, maka kemudian kata-kata yang sesungguhnya tetap menjadi cita-cita kita, diperintahkan oleh kekuasaan Jepang, supaya berangsur-angsur dihapuskan hingga akhirnya dikehendaki Jepang, hilang sama sekali dari alam pikiran rakyat Indonesia. Malah dikehendaki oleh Pemerintah Jepang agar nama-nama Bung Karno dan Bung Hatta, tidak ada lagi menghias isi harian "Kalimantan Raya".

Pernah Hamidhan sebagai pimpinan harian "Kalimantan Raya" pada suatu hari menerima seorang utusan dari Pemerintah Pusat Angkatan Laut Jepang (*Minseifu*) di Makasar, yang maksudnya menjajaki dalam hal mengenai pemisahan pemerintahan Jepang di Indonesia. Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*) yang menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan New Guinea, sedangkan Angkatan Darat (*Rikugun*) menguasai Jawa, Bali, Sumatera sampai ke Malaka.

Bagi bangsa Indonesia rencana Jepang untuk menjadikan Indonesia menjadi dua bagian, bukanlah suatu persoalan, yang dirasakan sebagai suatu persoalan dan amat menyimpang dari cita-cita bangsa Indonesia, ialah bahwa penduduk yang berada dalam wilayah Angkatan Laut tidak diperbolehkan berhubungan dengan penduduk yang berada dalam wilayah Angkatan Darat Jepang. Lebih tegas lagi agar ikatan kebangsaan Indonesia yang sudah kuat itu, diputuskan begitu saja. Berbarengan dengan itu berkumandanglah kata-kata yang hebat, yakni Asia Timur Raya. Negara-negara yang telah ditaklukkan Jepang dimasukkan ke dalam Asia Timur Raya, dengan penduduk lebih dari 1000 juta jiwa.

Pada akhir bulan April atau permulaan bulan Mei 1942, dari Tokio, harian "*Asahi Simboen*" mengirimkan rombongan karyawannya yang terdiri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi dengan stafnya termasuk yang khusus mengambil berita langsung dari Domei Tokio, serta penyusun letter dan pencetaknya. Dalam suatu pertemuan antara pemerintahan sipil Jepang, pihak *Asahi Simboen* dan Kalimantan Raya, diambil suatu keputusan untuk melebur harian "Kalimantan Raya" menjadi "*Borneo Simboen*". Semula "*Borneo Simboen*", diterbitkan dengan bersama, yaitu dari 4 halaman, dijadikan 2 halaman huruf latin bahasa Indonesia, sedang sisanya huruf *kanji* (Jepang) berbahasa Jepang. Kantor dan percetakan "Kalimantan Raya", yang menjadi "*Borneo Simboen*", adalah berada disebelah kantor Borsumy dahulu yang kemudian menjadi Aduma Niaga. Kemudian pindah ke gedung bertingkat kepunyaan Geo Wehry disebelah BIM.

Sementara itu mesin-mesin cetak ditambah, yang didatangkan dari Surabaya yang pada mulanya mesin kepunyaan harian Sin Tir Po di Surabaya. Dengan demikian dapatlah penerbitan *Borneo Simboen* berbahasa Indonesia di pisahkan penerbitannya dengan *Borneo Simboen* berbahasa Jepang.

Meskipun kedua jenis *Borneo Simboen* itu diterbitkan dengan ukuran kecil, disesuaikan dengan persediaan kertas, yang untuk itu khusus didatangkan dari Tokio, akan tetapi jumlah wartawannya, baik untuk edisi Indonesia, maupun edisi Jepang cukup besar hingga rasanya tidak sesuai dengan ukuran halaman koran yang akan di isi.

Untuk *Borneo Simboen* edisi Indonesia, adalah terdiri dari : 1. A.A.Hamidhan sebagai pengurus dan pimpinan redaksi, 2. A.A. Rivai pengganti pimpinan redaksi, 3. Gt. Sugian Noor, 4. F.Mohani, 5. Marwan Ali, 6. Zaglulsyah, 7. Ahmad Basuni, 8. Syahransyah, 9. Abdulwahab, 10. Rosita Gani, 11. Golek Kencana, dan 12. Yanti Taya na.

Sensor dari pihak pemerintah Jepang, yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian Seimuka dari kantor Minseibu di Banjarmasin, diperkuat sedemikian rupa, hingga kalau semua karangan atau pemberitaan belum mendapat izin, maka koran tidak boleh dicetak dan diedarkan. Untuk mempermudah teknik bekerja dan kerjasama

yang baik, urusan sensor itu diatur sebagai berikut : setiap karangan (artikel) ataupun pemberitaan, dibuat dengan mesin tulis memakai karbon, dengan demikian selebar diturunkan kebagian percetakan untuk disusun (di-zet), sedang yang selembarnya dikirim ke kantor sensor. Apabila nanti ternyata ada perubahan pada artikel atau pemberitaan itu, maka segera diadakan koreksi, sedang kalau dilarang untuk dimuat, maka zetsel itu, yang biasa sudah *diopmaak* (disusun untuk dicetak) akan diangkat dan diganti dengan zetsel yang baru yang sudah lepas dari sensor.

Beberapa bulan kemudian, Borneo Simboen juga diterbitkan di Balikpapan, sebagai edisi untuk Kalimantan Timur. Edisi Bahasa Indonesia dipimpin oleh Andin Boer'ie, sedang yang bahasa Jepang oleh salah seorang wartawan Jepang, yang tadinya sebagai staf redaksi Borneo Simboen di pusat (Banjarmasin).

Setelah itu diterbitkan pula edisi Pontianak, edisi Bahasa Indonesianya dipimpin oleh Ahmad Kasim. Di samping edisi Indonesia juga diterbitkan Borneo Simboen bahasa Tionghoa dengan huruf Tionghoa yang juga dapat dibaca oleh orang Jepang, dipimpin oleh seorang Jepang yang pasih bahasa Tionghoa.

Pada permulaan tahun 1943, baru ada hubungan kapal antara Banjarmasin-Surabaya dan sebaliknya, dengan menggunakan bekas kapal Belanda. Kapal itu bernama *Niitei Maru*. Selain itu hubungan antara Jawa dan Banjarmasin menggunakan perahu layar atau penes-penes Banjarmasin. Kesempatan ada hubungan ini dipergunakan A.A.Hamidhan meninjau pulau Jawa. Dalam peninjauannya dia bertemu dengan wartawan-wartawan yang tergabung dalam PERDI (Persatuan Djurnalis Indonesia) seperti Mas Toekoel, Dermawan Lubis, dan Imam Supardi yang bekerja sebagai wartawan "Suara Asia" di Surabaya. Begitu pula di Semarang bertemu dengan Parada Harahap yang memimpin surat kabar "Sinar Asia". Dari penelitian A.A.Hamidhan ternyata wartawan di Jawa, lebih ketat diawasi oleh pemerintah Jepang dari pada di Banjarmasin.

Pada permulaan bulan Desember A.A.Hamidhan dipilih sebagai wartawan yang mewakili Kalimantan dalam Permusyawaratan Besar Persurat Kabar seluruh Asia Timur Raya yang diadakan di Tokio. Untuk daerah pemerintahan Angkatan Laut (*Kaigun*) lainnya dikirim 4 orang wartawan termasuk Hamidhan, Manai Sophian dan

Pantow untuk Sulawesi, dan Pattinaipow dari Ambon mewakili Maluku. Dari daerah pemerintahan Angkatan Darat Jepang (*Rikugun*) dikirim Mas Toekoel untuk Jawa, Adi Negoro untuk Sumatera, dan wartawan dari utusan Melayu-Singapura. Juga dua orang wartawan dari Birma, dua orang dari Thailand, dua orang dari Hongkong dan seterusnya dari Tiongkok dan Korea. Yang menjadi tuan rumah adalah wartawan Jepang. Yang menjadi keputusan dari Permusyawaratan Besar itu, terutama mengenai seluruh persurat kabaran di Asia Timur Raya, bersatu padu untuk memenangkan peperangan menghadapi pihak Sekutu.

Ketika serangan pihak Sekutu terhadap Jepang makin menghebat dan pertahanan Jepang sudah mulai runtuh, beberapa kota di Kalimantan mendapat serangan pesawat-pesawat pembom B-29, begitu pula kota Banjarmasin beberapa kali mendapat serangan udara Sekutu pihak penerbitan surat kabar diperintahkan untuk mempersiapkan suatu penerbitan darurat kalau terpaksa. Karena itu sebagian percetakan dengan beberapa staf redaksi dipindahkan ke Kandangan dan diterbitkanlah Borneo Simboen edisi Hulu Sungai. Sebagian besar berita dikirim dari Banjarmasin (pusat). Sebagian lagi dipindahkan ke Martapura dengan maksud yang sama.

Setelah tentara Sekutu datang, penerbitan Borneo Simboen di berhentikan.

5. Pengaruh Politik.

Usaha pemerintah Jepang untuk penjepangan bangsa Indonesia dilakukan dengan intensif sekali melalui segala bidang dan tingkatan, dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Pergerakan rakyatpun mengalami proses penjepangan pula, yaitu menjadi Pergerakan Indonesia-Jepang dan meluas sampai ke desa-desa, dengan segala organisasi ala Jepangnya. Dalam hal ini rakyat di desa sudah mengenal organisasi Pergerakan ala Jepang ini, tidak seperti keadaan sebelum Perang Dunia ke II, pergerakan rakyat hanya terbatas pada golongan terpelajar di kota dan belum meluas sampai ke desa.

Semua perkumpulan politik dan agama dilarang. Sebagai gantinya terhadap umat Islam, Jepang menyediakan perkumpulan yang namanya Jami'yah Islamiyah Borneo (*Borneo Kaikyo Kyokai*) yang

diketahui oleh H.Abd.Rahman Siddik di bawah pengawasan ulama-ulama Jepang.

Penjepangan terhadap pelajar lebih mendalam lagi. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, diadakan upacara penaikan bendera *Hino-Maru* dan menghadap ke utara (Tokio) untuk *ber-sei-ke-pei* yaitu hormat membungkuk kepada Tenno Heika. Pada tiap tahun 8 pada upacara itu ditambah dengan pembacaan *Syosyo* ialah sabda Tenno Heika yang dibacakan oleh *Koco-Sensei* (Kepala Sekolah). Upacara ini diakhiri dengan pekik : Tenno Heika, Banzai (Hidup Tenno Heika) dan *Dai Nippon Teikoku, Banzai* (Hidup kekaisaran Nippon Raya). Ketika masuk kelas pagi hari dengan pimpinan *Han-Ce* (Ketua Kelas) diucapkan dengan bersemangat sebuah semboyan : *Werarano kotoba, Wa Nippon-go, Asia nokotoba Wa Nippon-go* yang artinya : Bahasa kami adalah bahasa Nippon, bahasa Asia adalah bahasa Nippon.

Para pelajar dikerahkan pula dalam kesatuan-kesatuan *Gakku-to-Tai*. Kepala Sekolah dan sebagian guru sekolah lanjutan di Banjarmasin adalah orang Jepang. Tujuan pendidikan yang penting ialah penanaman semangat Jepang, yaitu semangat *Bushido* (sifat kesatria kaum Samurai) dan cita-cita *Hakko Iciu* (Cita-cita kepeimpinan Jepang di seluruh dunia terjamin kemurniannya).

Dalam rangka politik pen-Jepangan ini, pemerintah Jepang tidak segan-segan melakukan tindakan penyiksaan, pembunuhan terhadap orang Indonesia yang dicurigainya dan beratus rakyat Indonesia yang terbunuh tanpa bersalah. Suatu berita yang paling mengejutkan ialah berita harian "Borneo Simboen" nomor 324, tanggal 21 Desember 2603 (1943) dimana dihukum mati lebih dari 200 orang yang ditangkap antara lain, Belanda, Indonesia, dan Tiongkok, diantaranya : bekas Gubernur Haga, C.M. Vischer orang Swiss, Raden Susilo (50 tahun) saudara almarhum dr. Sutomo, Housman Babu, bekas Gunco Sampit seorang pelopor suku Dayak, pendiri Pakat Dayak.

Berita tentang hukuman mati itu dilanjutkan lagi dengan berita tanggal 2 Juli 2604 (1943), dimana diberitakan penembakan mati terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang antara lain : J.F.Pattisiana, Syarif Mohammad Alkadri Sultan Pontianak dengan keluarganya, 12 orang Sultan di Kalimantan Barat, Dr. Roebini beserta isterinya dan beratus-ratus rakyat dibunuh yang tidak berdosa. Inilah meru-

pakan keganasan Jepang dalam rangka menanamkan politiknya.

Kalau kita teliti akibat dari politik itu antara lain :

- a). Hilangnya permusuhan bagi umat Islam terutama antara golongan yang disebut kaum tua dan kaum muda (golongan pembaharuan). Sejak itu sudah dimulai khotbah Jum'at dalam bahasa Indonesia, yang sebelumnya hanya dalam bahasa Arab seluruhnya.
- b). Pergerakan rakyat yang dulunya hanya dikenal di kota, sekarang dengan melalui Pergerakan rakyat Indonesia Jepang sudah dikenal di desa-desa.
- c). Dengan adanya latihan-latihan militer kepada pemuda dari berbagai kelompok umur, merupakan bekal yang berguna dalam revolusi fisik menghadapi Nica kemudian.
- d). Pimpinan pergerakan rakyat mendapat latihan dan pengalaman, dalam mengatur pemerintahan, karena sebagian mereka diangkat Jepang sebagai penasehat Jepang.
- e). Politik penjepangan dalam segala lapangan ini dan propaganda Jepang dengan dalih pembangunan Borneo Baru, menimbulkan semangat nasionalisme dan rasa sadar akan harga diri. ³⁷⁾

D. INTERAKSI DI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KE GIATAN ORGANISASI POLITIK SOSIAL ANTARA LAIN :

Di daerah Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar (*Minseifu*). untuk seluruh Kalimantan berdiri pemerintahan yang namanya *Minseibu*. Untuk membantu pekerjaan *Minseibu Cokan* ini dibentuklah "Badan Penasihat" yang pekerjaannya sebagai penasehat bidang pemerintahan *Rensei Seimo Co Sain* (Penasihat rahasia). Sejak tahun 1943 Pemerintahan Jepang mulai mengadakan konsolidasi pemerintahannya dengan intensif. Semua jawatan, organisasi pemerintah di japanisasikan. Sasaran yang paling baik adalah para pemuda dan pelajar.

Setelah berunding dengan *Rensei Seimo Co Sain* dan mempertimbangkan gerakan-gerakan yang ada di Jawa seperti Gerakan

Tiga A, Putera (Pusat Tenaga Rakyat), maka *Minseibu Cokan* memutuskan membentuk gerakan-gerakan pemuda, secara bertingkat.

Gerakan Tiga A, Putera, Jawa Hokokai, *Cuo Sangi In*, gerakan seperti ini tidak terdapat di Kalimantan, begitu pula *Keimin Bunka Syidosyo* (Badan Pusat Kebudayaan) tidak terdapat. Untuk pengawasan kebudayaan termasuk seksi dalam Kantor Penerangan Jepang (*Keimin Syidobo*).

Gerakan-gerakan pemuda itu adalah sebagai berikut :

- 1). *Seinendan* untuk pemuda umur 15 sampai 20 tahun, dari tiap son (desa) satu *Buntai* (regu) dipusatkan pada *Fuku Gun* (kecamatan) dan *Gun* (Kewedanaan). Tugasnya bersifat lokal.
- 2). *Konan Hokoku Dan* untuk mereka yang berumur 20 tahun sampai 35 tahun, dari tiap *Fuku Gun* satu *Sotai* (seksi) dan dipusatkan pada *Gun*. atau Balai kota Banjarmasin.
- 3). *Bo-Ei-Tai Sin Tai*, merupakan pembaruan dan perluasan dari *Konan Hakoko Dan* sejak Mei 1945. Yang terakhir ini dihapus.

Kesatuan terakhir selain tugas lokal, tenaga cadangan untuk pembangunan, dipersiapkan untuk pasukan gerilya Jepang di daerah yang akan diduduki musuh. *Bo Ei Tai Sin Tai* mendapat latihan militer dan pengetahuan senjata ringan. Mereka tidak dikumpul dalam asrama tetapi mereka sewaktu-waktu berkumpul sewaktu ada latihan yang diberikan oleh anggota *Kaigun* dan diawasi oleh *Bunken Kenrikan* atau wakilnya yang berkedudukan sebagai polisi setempat kecuali untuk daerah Banjarmasin yang dipusatkan di *Rensindogo*. Khusus untuk calon pimpinan kesatuan di atas *konan Hokoku Dan* diselenggarakan sebuah *Rensei Doojo* (Pusat Latihan) di Banjarmasin dengan acara latihan berlangsung kira-kira dua bulan untuk tiap angkatan, yang berupa penggembelengan *Seisin* (sema ngat), anti Amerika dan Inggeris, kesetiaan kepada *Tenno Heika*, bahasa Jepang dan *Kyoren* (latihan kemiliteran) termasuk *taiso* (senam). Para pelatih semuanya orang Jepang. 38)

- 4). Untuk membantu Jepang menghadapi musuh bertempur dibentuklah *Heiho Angkatan Laut* sampai beberapa angkatan. Sebagian besar mereka tewas dalam pertempuran *Balikpapan* : *Heiho* adalah pembantu prajurit yang dilatih

secara militer dan mempunyai hierarchi kemiliteran tersendiri. Di Kalimantan Selatan ada tiga angkatan, angkatan pertama merupakan Heiho kelas satu.

- 5). Untuk menghadapi pendaratan Sekutu, Kaigun membentuk Tokubetsu Tokutai, terdiri dari Heiho-Heido pilihan dan perajurit kaigun. Semangat anti barat atau anti Belanda kemudian menjadi anti Amerika dan Inggris dinamakan benar-benar ke dalam dada pemuda di Kalimantan Selatan. "Amat Heiho" sangat digembor-gemborkan dan merupakan cita-cita yang diharapkan benar oleh Jepang, sebagai simbol pejuang menentang Amerika dan Inggris ini. Markas Tokubetsu Tokutai ini berada di Bati-Bati Peleihari.

Tokubetsu Tokutai dibentuk pada permulaan tahun 1945 saat Jepang hampir jatuh yang merupakan pasukan tempur khusus yang terdiri dari satu kompi Angkatan Laut Jepang ditambah satu kompi Heiho kelas satu (Heiho pilihan) yang jumlahnya kurang lebih 200 orang.

- 6). Sebuah satuan lain yaitu Peta juga telah dibentuk dari unsur-unsur Bo-Ei-Tan Sin tai, sejumlah satu kompi pada bulan Juni 1945. Seminggu sesudah pembentukan mereka dimasukkan dalam kapal dan dikirimkan ke tujuan yang tak diketahui dan tak ada satupun yang kembali. Yang hidup hanya seorang yaitu Sdr. Sachrul. Karena kejatuhan peti di kapal ibu jari kakinya pecah, hingga ia terpaksa ditinggal.

- 7). *Fujin-kai*.

Dalam usaha penjepangan ini tidak ketinggalan kaum wanita. Kaum wanita dihimpun dalam wadah yang namanya Fujin-kai dengan tujuan sebagai badan penggerak tenaga wanita untuk ikut membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya. Fujin-kai didirikan pada bulan Agustus 1943.

Dengan terbentuknya *Fujin-kai* ini sesuai dengan policy pemerintah Jepang (*Kaigun*) seluruh perkumpulan wanita yang telah berkembang sejak jaman Belanda, baik yang berdasarkan agama

maupun sosial dibekukan.

Struktur Fujin-kai digariskan oleh pemerintah Jepang dan pimpinannya sudah ditentukan, yakni setiap isteri pimpinan pemerintahan daerah otomatis menjadi ketua *Fujin-kai* daerah. Tugas Fujin-kai adalah ikut serta dalam usaha yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang terutama diarahkan kepada mobilitas tenaga wanita dalam usaha untuk mengumpulkan "dana" bagi keperluan Jepang. Kegiatan-kegiatan itu adalah :

- melakukan kegiatan mengikutsertakan wanita di dalam usaha perang, baris berbaris, bela diri, ke-palang-merahan, perlindungan terhadap bahaya serangan udara dan sebagainya.
- membantu meningkatkan produksi pangan.
- menyelenggarakan dapur umum dan mobil untuk pasukan tentara dan pekerja-paksa, mengumpul intan cukilan.

Melihat kepada tugas tersebut *Fujin-kai* sengaja dilibatkan terhadap kegiatan peperangan, terutama untuk garis-garis pertahanan di garis belakang. Semua tugas ini bagi wanita di Jawa dapat dilaksanakan dan ternyata pengalaman *Fujin-kai* ini seperti baris berbaris, Palang Merah, dapur umum dan sebagainya sangat bermanfaat karena kecakapan ini banyak membantu wanita di Jawa dalam revolusi fisik sesudah Jepang kalah.

Tugas-tugas seperti yang disebutkan di atas, tidak ditemukan pada *Fujin-kai* di Kalimantan Selatan. Kegiatan *Fujin-kai* Kalimantan Selatan yang dapat dicatat ialah usaha pencarian dana lewat pengumpulan harta benda rakyat berupa permata intan berlian dan mengadakan pasar malam amal lewat pertunjukan kesenian, juga dikerahkan dalam pengerahan tenaga kerja bakti, menanam jarak, padi dan mengetam padi, serta kerja bakti di rumah-rumah sakit.

Tokoh-tokoh Fujin-kai di Kalimantan Selatan kebanyakan wanita aktif dalam pergerakan sebelum perang.

Fujin-kai lebih bersifat pergerakan massa yang diorganisir yang mengakibatkan banyak wanita dari kalangan masyarakat biasa ikut terlibat di dalamnya. Gerakan Fujin-kai ini tidak hanya terdapat di Banjarmasin, tetapi terdapat di seluruh Kalimantan Selatan yaitu : Kandangan, Rantau, Tanjung, Haruai, Barabai.

Beberapa tokoh contoh dari *Fujin-kai* antara lain : Ny. Mastifah Hamdi, Ny. Norsehan Johansyah, Ny. Norjihana, Ny. Noorhanafiah, Ny. Syarifah Muzenah Assegaf, Ny. Asnah Hasan Basri.

Organisasi *Fujin-kai* tidak bersifat vertikal maupun horizontal dari pusat ke daerah. Strukturnya bersifat lokal saja, setiap daerah *Fujin-Kai* berada langsung di bawah pengawasan dan perintah-perintah Jepang setempat. Jika *Fujin-kai* dilihat sebagai suatu lembaga sosial maka sesungguhnya ia tidak memiliki struktur yang jelas. Sebagai contoh *Fujin-kai* daerah dipimpin oleh isteri Kepala Daerah setempat tetapi tanpa ada formasi dan personalia kepengurusan lebih lanjut. Hal ini diduga disebabkan karena *Fujin-kai* sesungguhnya suatu gerakan pengerahan massa bukan suatu organisasi sosial.

Wanita Banjar yang aktif dalam *Fujin-kai* umumnya selalu berusaha membuat jarak yang cukup jauh dalam pergaulan dengan orang-orang Jepang, sehingga Jepang tidak dapat berbuat hal-hal di luar tugas *Fujin-kai* yang telah digariskan.³⁹⁾

8). Pengerahan massa untuk kerja bakti (*Kenrohoshi*).

Pengerahan massa untuk melakukan kerja bakti ini merupakan kewajiban bagi setiap pemuda tiap desa. Tiap desa diwajibkan oleh pemerintah Jepang untuk mengumpulkan pemuda untuk dipekerjakan pada pekerjaan yang sudah ditentukan Jepang. Biasanya dikerahkan untuk waktu sebulan sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Tetapi kadang-kadang bisa juga terjadi *kinrohoshi* ini perlakuannya seperti kerja paksa seperti umumnya pengerahan tenaga yang didatangkan dari Jawa yang dikenal dengan *Romusya*. Dengan demikian pengertian *Romusya* ialah tenaga yang didatangkan dari Jawa biasanya diperoleh dengan tipu muslihat Jepang dan bekerja di tempat tertentu dengan tidak bisa kembali lagi.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga *Kinrohoshi* ialah : memperbaiki lapangan terbang Ulin, lapangan terbang Maluka (Pelaihari), lapangan terbang di Kanres daerah Dayu Ampah, membuat perlindungan di daerah lapangan terbang Ulin, Pelaihari, membuat bendungan untuk pengairan, menggali sungai untuk pengairan sawah atau untuk sawah pasang surut, membuat bangunan bagi tukang.

Perlakuan Jepang terhadap tenaga *Kenrohoshi* ini pun sama dengan perlakuan terhadap romusya, yaitu dengan cara perintah yang tidak bisa dibantah, pukulan bagi yang malas atau sakit. Makan yang disuguhkan Jepang adalah nasi yang penuh dengan *antah* (padi) dan apabila ketahuan memakan memilih-milih akan dipukul oleh Jepang. Barak-barak yang merupakan tempat tinggal sangat darurat, lantainya hanya batang galam yang disusun, tanpa tikar dan tanpa kelambu dan tanpa obat-obatan. Yang penting bagi Jepang harus kerja dengan tidak memperdulikan bagaimana tenaga yang bekerja tersebut. ⁴⁰⁾

Pada bagian akhir pemerintahan Jepang di Kalimantan Selatan pada sekitar bulan Februari - Agustus 1945 di wilayah ini berada dalam garis perang aktif. Pemboman hampir setiap hari terjadi. Ke sengsaraan meningkat, kehidupan rakyat mengalami kegoncangan hebat, tidak ada ketentraman, rakyat bertambah gelisah.

Setelah Balikpapan jatuh dipermulaan bulan Februari 1945, dimulailah serangan Sekutu secara besar-besaran atas wilayah Kalimantan Selatan. Yang menjadi sasaran adalah lapangan terbang Ulin, kapal-kapal sungai, galangan kapal *Koonan Kaiyoon*, antenne radio, pabrik Hoktong dan lain-lain. Menjelang permulaan Agustus 1945, serangan itu semakin kuat, oleh B 17, B 25, B 26, P 38 dan P 51, ⁴¹⁾.

Angkatan udara Jepang yang kecil itu musnah. Dalam serangan terakhir Sekutu, lebih dari 80 buah pesawat yang menyerang Banjarmasin. Semua tentara Jepang sudah berada di gunung-gunung Pegunungan Meratus.

Sebelum Jepang kalah, pada bulan Juli 1945 Dr. Muhammad Hatta berada di Banjarmasin. Pada pertemuan yang direncanakan dimana Bung Hatta akan mengucapkan pidatonya bertempat di gedung bioskop Ria, mengalami kegagalan. Dan baru berhasil pada jam 24.00 bertempat di halaman rumah besar tempat Sekretariat NU sekarang. Isi pidatonya ialah mengajak perjuangan ditingkatkan untuk menuju Indonesia merdeka. ⁴²⁾

Dalam rangka memperbaiki politik pertahanannya, Perdana Menteri Koiso Kuniski, pengganti Perdana Menteri Toko yang terasingkar karena jatuhnya Pulau Saipan tanggal 9 Juli 1944 ke tangan Sekutu dan sidang Parlemen ke 85 tanggal 5 September 1944 men-

jelaskan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 8 September 1944 majalah resmi Pemerintah Jepang Kan Bo Nomor 51 mengumumkan izin pemasangan bendera Merah Putih di samping Hi-No-Maru dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesudah Kimigayu di dalam upacara. Untuk Kalimantan dilaksanakan tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan Tentyo Setsu (ulang tahun Kaisar Hirohito) 43)

Klimaks dari serangan Sekutu tiba-tiba terhenti, seperti diam yang menakutkan. Borneo Simboen memberitakan tentang serangan bom atom atas Jepang, dan ternyata tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

CATATAN

1. M. Idwar Saleh, Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan di Kalimantan Selatan, Vidya Karya no. 1 tahun I September - Oktober 1970 FKg-Unlam, Banjarmasin, tahun 1970, hal.13.
2. M. Idwar Saleh, Ibid, hal. 14.
3. Wawancara dengan H.A.A. Hamidhan, jalan Kalimantan tanggal 4 September 1979 di Banjarmasin.
4. Wawancara dengan Yusni Antemas, tanggal 16 September 1979 di rumah beliau, jalan Sungai Karias Amuntai.
5. Syarifuddin, Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan, Priode 1945 sampai 17 Agustus 1950, Tesis, FKg-Unlam, Banjarmasin, tahun 1974, hal. 76.
6. Wawancara dengan H.Idar pada tanggal 15 September 1979 bertempat di Kandep P.K. Kab. Tabalong Tanjung.
7. Wawancara dengan Yusni Antemas, op.cit.
8. Syarifuddin, op.cit, hal. 76.
9. Wawancara dengan Pak.H.A.A. Hamidhan, op.cit.
10. Wawancara dengan Haji Salman, di rumah beliau jalan Darma Barabai, tanggal 13 September 1979.
11. M. Idwar Saleh, op.cit, hal. 15.
12. Syarifuddin, op.cit, hal.74.
13. Syarifuddin, Ibid, hal. 79.
14. Wawancara dengan Pak.H.A.A. Hamidhan, op.cit.
15. Wawancara dengan Amat tukang kopiah "Sedang" Barabai, bertempat di toko Sedang, Jln. Pasar Barabai, tanggal 13 September 1979.
16. Wawancara dengan H. Salman, op.cit.
17. Wawancara dengan Amat Barabai, op.cit.
18. Wawancara dengan Yusni Antemas, Amuntai, op.cit.
19. Wawancara dengan Patih Kare (pensiunan), di rumah beliau, jalan Antasari Barabai, tanggal 13 Sept. 1979.
20. Wawancara dengan Pak Lamberi Bustani, di rumah beliau, Jln.

Telaga Barabai, tanggal 14 September 1979.

21. Wawancara dengan H.M. Yakub Amin, di rumah beliau jalan Sungai Jingah, Banjarmasin, tanggal 2 September 1979.
22. Wawancara dengan Amat, Barabai, op.cit.
23. Loc. cit.
24. Kodam X/LM, Membangun Banjarmasin, tahun 1962, hal. 586.
25. Ibid, hal. 590.
26. Syarifuddin, op.cit, hal. 282.
27. Kodam X/LM, op.cit, hal. 614.
28. Wawancara dengan M.Hanafiah (pensiun guru) di rumah beliau komplek Mulawarman, pada tanggal 5 Sept. 1979.
29. Syarifuddin, op.cit. hal. 83.
30. Wawancara dengan Gusti Abdul Muis, di rumah beliau kampung Melayu komplek Mesjid Muhammadiyah Banjarmasin, pada tanggal 11 September 1979.
31. Wawancara dengan Amat Barabai, op.cit.
32. Wawancara dengan Lamberi Bustani, op.cit.
33. Wawancara dengan Patih Kare, Barabai, op.cit.
34. Wawancara dengan Yusni Antemas, Amuntai, op.cit.
35. Wawancara dengan Patih Kare, Barabai, op.cit.
36. Hasil wawancara dengan Pak.H.A.A. Hamidhan 4 kali, tanggal 4 September 1979, 11 September, 18 September dan 10 Desember 1979.
37. Syarifuddin, op.cit, hal. 86.
38. Ibid, hal. 79.
39. Kesuma Sekarsih, Wanita Banjar, sebuah tinjauan singkat mengenai kedudukan dan peranannya dalam pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan sampai tahun 1950, Tesis, FKg-Unlam, Banjarmasin, tahun 1977, hal. 169.
40. Wawancara dengan Paman Raban dan Paman Buamin (ex. Romusya) di rumah beliau komplek Mulawarman, pada tanggal 9 Oktober 1979.
41. Idwar Saleh, op.cit, hal. 19.
42. Kesuma Sekarsih, op.cit, hal. 170.

43. Syarifuddin, *op.cit*, hal. 87.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEGIATAN MASYARAKAT PADA AWAL REVOLUSI

1. Peristiwa-peristiwa menjelang Proklamasi

Pengumuman Pemerintah Jepang melalui Majalah "*Kan-Po*" No.51 tanggal 8 September 1944 yang berisi tentang izin pemasangan bendera Merah Putih di samping *Hi-no-Maruo* serta menyanyikan lagu Indonesia Raya sesudah lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dalam suatu upacara, telah sampai pula beritanya ke Kalimantan Selatan. Pelaksanaan upacara seperti ketentuan tersebut di atas untuk daerah Kalimantan Selatan yang pertama kali diadakan pada tanggal 29 April 1945, yakni dalam melaksanakan Tentyo-Setso upacara hari ulang tahun Kaisar Hirohito.¹⁾

Rakyat Kalimantan Selatan yang sempat dan dapat mengikuti perkembangan keadaan pada waktu itu belum dapat berbuat banyak, kendatipun telah ada berita bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Segala sesuatu tetap diatur dan diawasi dengan ketat oleh Jepang. Kekejaman dan kesewenangan tentara Jepang di daerah ini membuat rakyat selalu merasa ketakutan dalam menghadapi ataupun menemui sesuatu masalah yang kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Sehubungan dengan hal itu rakyat waktu itu merasa lebih aman dengan bersikap "bodoh" dan berbicara hati-hati.

Perasaan takut yang meliputi suasana pada masa-masa kehancuran Jepang ini dialami oleh seorang penduduk di Banjarmasin yang secara kebetulan menemukan sebuah surat selebaran di dekat pelabuhan lama Banjarmasin. Percampuran rasa antara takut dan *patriotik*, menyebabkan penemu selebaran tersebut terpaksa menyimpannya dengan hati-hati sekali. Surat selebaran yang diduga disebarkan lewat kapal laut itu dibuat di Jakarta tanggal 10-7-05, di tanda tangani oleh Soekarno-Hatta. Surat selebaran tersebut ditujukan kepada Rakyat Borneo. Isi selengkapnya surat tersebut adalah :

RAKYAT BORNEO

Dengan dentoeman meriam serta gemoeroehnja tank dan mesin terbang, sekarang ini sedang ditoelis sedjarah tanah toempah-darah dan rakjatmoe kedalam boekoe sedjarah doenia.

Kamoe sekalian sekarang menghadapi saat tegak berdiri atau hantjoer-leboernja warisan nenek moejangmoe.

Timboel atau tenggelamnja rakjat dan tanah-airmoe sekarang tergantoeng kepada kesigapanmoe oentoek pembela warisanmoe itoe didalam kantjah peperangan ini. Kewadjibanmoe sekarang tidak lain, ialah : menoendjoekkan dalam sedjarah doenia itoe, bahwa kamoe tetap berdjoeng oentoek memiliki tanah-air Borneo sebagai bagian dari tanah air Indonesia bagi rakjat Borneo sebagai bagian dari pada Rakjat Indonesia.

Kita dilain-lain bagian dari pada tanah-air kita Indonesia sekarangpoen berdjoeng sekoeat tenaga oentoek mewoedjoetkan Negara Indonesia Merdeka bagi Rakjat. Di dalam keadaan jang bagaimanapoen kita haroeslah menolak tiap-tiap serangan jang hendak memisahkan kita antara kita. Ingatlah kepada tjita-tjita kita jang senantiasa kita dengoeng-dengoengkan sedjak api Pergerakan Kebangsaan kita menjoeloehi seloeroeh alam tanah-air kita Indonesia. Djiwa partai Nasional Indonesia jang melipoeti seloeroeh Indonesia dari Atjeh hingga ke Papoea, sekarangpoen menjala-njala dan berkobar-kobar dalam dadamoe. Kita tetap berdjoeng oentoek mendirikan Negara Indonesia Merdeka jang bersatoe. Kita tetap berjoang oentoek Kaulatan Rakjat Indonesia.

Djakarta, 10-7-'05

*Soekarno
Hatta. 2)*

Karena pemakaian radio milik rakyat yang sebelumnya telah di "lak" oleh Jepang masih tetap dilarang, sedangkan koran yang ada beredar sepenuhnya menyuarakan kepentingan Pemerintah Jepang, maka rakyat umumnya tetap menunjukkan sikap ragu-ragu dan tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Namun demikian ada bebera-

pa tokoh pergerakan di kota Kandangan, 135 km dari kota Banjarmasin, yang mencoba datang kepada pejabat Jepang untuk menanyakan perkembangan Perang Pasifik yang terakhir. Tokoh-tokoh masyarakat itu adalah H.M. Arsyad, almarhum H.Zafry Zamzam dan Hamli Tjarang. Mereka menghadap Tuan Kanda (pejabat setingkat Bupati) yang menjabat sebagai penguasa tertinggi di kota Kandangan tersebut. Dalam pertemuan itu pejabat Jepang tersebut dengan "menangis" menyatakan secara terus terang bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun pejabat Jepang tersebut mengharapkan supaya berita yang telah disampaikannya itu dapat dirahasiakan. 3)

Sementara itu pada tanggal 15 Agustus 1945 di Banjarmasin, Borneo *Menseibo Hayakawa Cokan* memanggil tokoh-tokoh pergerakan rakyat di daerah ini. Mereka itu adalah Hadharyah M., Mr. Rusbandi dan Pangeran Musa Ardikesuma. Dalam pertemuan itu *Menseibo Hayakawa Cokan* juga memberitahukan bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Bahwa dalam waktu dekat tentara Sekutu akan tiba di Banjarmasin. Dalam kesempatan pertemuan itu pula *Menseibo Hayakawa Cokan* menyarankan agar di daerah ini didirikan suatu partai politik.

Partai yang didirikan atas anjuran *Menseibo* tersebut kemudian dikenal dengan P R I yaitu Persatuan Rakyat Indonesia. Kepengurusannya telah disusun oleh Mr. Rusbandi, sebagai berikut :

Ketua	: Pangeran Musa Ardikesuma
Wakil Ketua	: A. Ruslan.
Sekretaris I	: Hadharyah M.
Sekretaris II	: Abubakar
Bendahara	: H. Abd. Latief.
Pembantu	: Amir Hasan Bondan.

Susunan kepengurusan P R I tersebut disyahkan pada tanggal 16 Agustus 1945 bertempat di *Osaka Gekijo* (gedung bioskop Ria). Bertindak sebagai protokol adalah Aidan Sinaga dan dihadiri beratus-ratus rakyat serta beberapa tokoh terkemuka.

Selanjutnya oleh Pengurus Besar P R I tersebut dibentuk cabang-cabang P R I di daerah Martapura, Rantau, Kandangan dan Amuntai dengan ketuanya masing-masing dipegang oleh *Gunco*

(Wedana) dan dibantu oleh tokoh-tokoh pergerakan. Di Banjarmasin jabatan ketua dipegang oleh Dr. Suranto dan jabatan sekretaris dipegang oleh S. Handuran.

PRI yang telah lahir di Kalimantan Selatan ini kemudian membentuk organisasi bagian pemuda dan organisasi bagian wanita sebagai penunjangnya. Yang menjadi anggota PRI bagian pemuda adalah mereka yang dahulu tergabung dalam *Seinendan dan Bo Ei Tai Sin Tai*, sedangkan yang menjadi anggota PRI bagian wanita adalah bekas anggota *Fu jin kai*.⁴⁾

2. Berita Proklamasi Kemerdekaan dan Sikap Pasukan Jepang

Peristiwa penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu yang terjadi tanggal 15 Agustus 1945 tidak begitu saja dapat diketahui oleh masyarakat. Pejabat-pejabat Jepang yang ada di daerah pada umumnya sangat merahasiakan peristiwa itu. Namun bagi rakyat yang selalu mengikuti perkembangan keadaan waktu itu, dapat melihat adanya tanda-tanda bahwa Jepang sudah tidak berdaya lagi. Tanda-tanda yang menunjukkan ketidakberdayaan Jepang lagi pada waktu itu adalah :

- a. Kubu meriam penangkis udara milik Jepang yang terletak di Sungai Jingah Banjarmasin, tidak lagi menembaki pesawat-pesawat pembom Serikat yang pada tanggal 15 Agustus 1945 terbang berputar-putar sambil menyebarkan ribuan surat selebaran di atas kota Banjarmasin.
- b. Tersebarinya surat selebaran dari Sekutu di kota Banjarmasin, yang berisi permintaan supaya Pemerintah Jepang menyerah. Surat selebaran yang banyak dan jatuh di sekitar rumah rakyat tersebut dapat dimiliki dan diketahui rakyat isinya, walaupun karena itu sebenarnya dapat berakibat kematian.
- c. Dilakukannya pembongkaran kubu meriam penangkis udara di kota Banjarmasin oleh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan menghubungkannya dengan isi surat selebaran sehari sebelumnya, maka jelaslah bahwa tentara Jepang sudah kalah.⁵⁾

Seperti halnya peristiwa tentang penyerahan Jepang kepada

Sekutu tersebut di atas, maka begitu pula tentang peristiwa berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, tidak begitu saja dapat diketahui oleh rakyat yang berada di Kalimantan Selatan.

Seorang tokoh daerah bernama A.A. Hamidhan yang pada masa penjajahan Jepang memegang jabatan sebagai Pemimpin Redaksi Surat Kabar *Borneo Simboen*, pada tanggal 13 Agustus 1945 telah berangkat dengan kapal terbang Jepang ke Jakarta lewat Surabaya. A.A. Hamidhan diberangkatkan oleh Jepang ke Jakarta selaku Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari daerah Kalimantan, untuk ikut serta dalam rapat yang direncanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 dalam rangka pelaksanaan "Kemerdekaan Indonesia". Namun karena para pemuda telah bertindak menculik Bung Karno dan Bung Hatta serta semua anggota PPKI sampai pada waktu yang ditetapkan tersebut, maka rencana sidang PPKI waktu itu menjadi gagal. Sebagai anggota PPKI utusan dari Kalimantan. A.A. Hamidhan ikut hadir dalam penyusunan teks Proklamasi pada malam 16 ke 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda, serta turut menyetujui usul salah seorang pemuda yang hadir pada malam itu agar teks Proklamasi yang telah dikonsep oleh Bung Karno hanya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. ⁶⁾

A.A. Hamidhan sebelum tiba kembali di Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1945 telah mengikuti sidang-sidang PPKI dalam rangka menetapkan UUD 45, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta mengusulkan Ir. Pangeran M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan pertama, di samping mengusulkan Mr. Rusbandi dan Dr. Susudoro sebagai Ketua KNI Daerah dan Ketua Partai Nasional Indonesia di daerah.

Sebagai tokoh masyarakat dari Kalimantan Selatan yang mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memproklamasikan kemerdekaan Tanah Air Indonesia, A.A. Hamidhan datang ke Banjarmasin membawa dua surat keputusan tentang penunjukkan Mr. Rusbandi sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah, dan penunjukkan Dr. Susudoro sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia Daerah. Di samping itu sempat pula dibawa ke Banjarmasin surat kabar Asia Raya pimpinan B.M. Diah, yang memuat teks Proklamasi Kemerdekaan, teks Pembukaan UUD 45 dan isinya, serta berita-berita tentang kemerdekaan lainnya. Tetapi karena setibanya A.A.

Hamidhan di Banjarmasin, kemudian mendapat pengawasan ketat dan tidak dibolehkan menerima tamu siapapun oleh Jepang maka satu-satunya sumber resmi yang dapat memberikan kejelasan tentang "kemerdekaan" Indonesia, tidak dapat berfungsi tepat pada waktunya. 7)

Peristiwa mengenai Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta tersebut di atas sebenarnya pada tanggal 20 Agustus 1945 telah menjadi pembicaraan hangat di kota Kandangan, sebuah kota yang terletak 135 km dari Banjarmasin. Pada hari tersebut *Borneo Simboen* yang terbit di kota Kandangan di bawah pimpinan A. Basuni, telah memuat berita kemerdekaan Indonesia berupa teks Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Malahan sehubungan dengan adanya berita kemerdekaan Indonesia tersebut, di Kandangan dilangsungkan "Pasar Malam Kemerdekaan" yang berlangsung mulai tanggal 20 sampai 30 Agustus 1945. 8)

Berita kemerdekaan yang diterima dan dijadikan dasar penyiaran oleh *Borneo Simboen* Edisi Kandangan tersebut adalah berita yang diterima oleh beberapa tokoh perjuangan melalui radio "gelap", yakni radio yang dimiliki rakyat dan dapat dipakai untuk mendengarkan siaran-siaran berita secara sembunyi-sembunyi. Karena pada waktu Jepang berkuasa semua radio rakyat dilak atau dirusak oleh Jepang. 9)

Kalau kegiatan A.A. Hamidhan di Banjarmasin dalam usaha menyampaikan berita-berita tentang kemerdekaan telah mendapat pengawasan ketat dari Jepang, maka keberhasilan dan kenekadan yang ditempuh oleh tokoh-tokoh pejuang di Kandangan tersebut di atas, sedikit banyaknya ditentukan juga oleh latar belakang keadaan di Hulu Sungai, khususnya di daerah Kandangan yang pada zaman Pergerakan dahulu sudah merupakan kota sumber kegiatan politik di Kalimantan Selatan. 10)

Kegiatan tokoh-tokoh pergerakan bersama dengan para pemuda di daerah Kandangan itu ternyata tidak banyak mendapat hambatan-hambatan. Sehubungan dengan itu berkat kegiatan para pemuda yang sudah lama mencita-citakan kemerdekaan, maka Sang Merah Putih berkibar dengan megah di mana-mana. Lagu Indonesia Raya pun telah berkumandang menggantikan lagu *Kimigayo*. Bersa-

maan dengan itu disebarkan pula selebaran yang isinya menyerukan agar rakyat mempertahankan dan menegakkan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan itu. Bahkan untuk kenang-kenangan bukti telah menyalanya api kemerdekaan pada waktu itu oleh Hamli Tjarang didirikan sebuah tugu berbentuk "lilin menyala" di muka gedung/kantor kepala pemerintahan di kota Kandangan. Tetapi tugu api kemerdekaan itu telah dihancurkan oleh NICA ketika mereka dapat berkuasa kembali di daerah ini.¹¹⁾

Di Banjarmasin sebenarnya juga terdapat radio gelap. Malahan di kota ini pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui radio milik Sunar yo dan milik Syahrul dapat diketahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu.¹²⁾ Karena itu selain di kota Kandangan, sebenarnya di Banjarmasin juga telah dapat diterima berita tentang Proklamasi Kemerdekaan tersebut melalui radio gelap.¹³⁾ Namun berita tersebut hanya sempat berkembang sampai kepada bisik-bisik di antara tokoh-tokoh pergerakan di kota tersebut. Sehingga keadaan di Banjarmasin selama minggu pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan tersebut, sama keadaannya dengan di daerah-daerah seperti Martapura, Plaihari, Marabahan, Kotabaru dan beberapa kota lainnya di Hulu Sungai yang pada waktu itu tidak sempat menerima berita kemerdekaan melalui radio langsung dari Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan yang ada di daerah-daerah tersebut baru dapat mengetahui tentang Proklamasi Kemerdekaan sesudah mendengar adanya kegiatan seperti yang dilakukan rakyat di Kandangan, atau sesudah dimuatnya berita kemerdekaan tersebut di surat kabar *Borneo Simboen* Banjarmasin.

Terlambatnya penyiaran berita Proklamasi Kemerdekaan di Banjarmasin disebabkan sikap dan tindakan Jepang yang pada saat itu menjadi hambatan terhadap usaha penyiaran berita kemerdekaan tersebut. Tindakan Menseibo melarang dan menjaga ketat rumah A.A. Hamidhan, untuk tidak dapat menerima tamu, sekembalinya anggota PPKI ini dari Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1945, jelas merupakan hambatan bagi beliau untuk mengambil langkah-langkah yang hendak dilakukan.

Tindakan-tindakan Jepang yang "bersikap melarang" terhadap kegiatan-kegiatan baik dalam rangka penyebaran berita kemerdekaan maupun terhadap langkah-langkah lebih lanjut dengan adanya kemerdekaan tersebut, mengakibatkan :

- a. Penyiaran berita kemerdekaan di Banjarmasin baru dapat dilakukan melalui surat kabar Borneo Simboen Banjarmasin terbitan tanggal 26 Agustus 1945. Berita kemerdekaan yang dimuat dalam harian Borneo Simboen Banjarmasin di bawah Pimpinan Redaksi A.A. Hamidhan pada terbitan No. 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 itu tentang Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan tentang Bentuk Indonesia Merdeka. Berita-berita itu selengkapnya berbunyi :

- 1). Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka Ir. Soe - karno dan Drs. Mohammad Hatta,

MAKLOEMAT

Kepada seloeroeh Rajat Indonesia.

Dengan ini dimakloemkan, bahwa Pembangoenan Negara Indonesia Merdeka jang dikehendakkan oleh Rakjat sekalian waktoe ini sedang didjalankan dengan saksama.

Beberapa tenaga jang berani bertanggoeng djawab terhadap Rakjat ikoet serta didalam Pembangoenan ini.

Segala hal-hal yang perloe oentoe pembangoenan Negara Repoeblik Indonesia sedang diselenggarakan dan akan selesai diwaktoe jang pendek.

Diharap sekalian Rakjat Indonesia dari segala lapisan tinggal tenteram, tenang siap sedia, dan memegang tegoh disiplin.

Djakarta, 18 Agoestoes 2605

SOEKARNO - HATTA.

- 2). **Bentoe Indonesia Merdeka.**
Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia.

Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnja pada tanggal 18 boelan 8, tahoen 2605 di Djakarta.

- I. **Telah menetapkan Oendang-oendang Dasar Negara Re publik Indonesia.**

II. Telah memilih sebagai Presiden Republik Indonesia Pt.Ir. Soekarno dan sebagai Wakil-Presiden Pt.Drs.Moh. Hatta.

III. Pekerjaan Presiden oentoeok sementara waktoe dibantoe oleh Seboeah Komite Nasional. ¹⁴⁾

- b. Sampai dengan datangnya Sekutu (tentara Australia dan ikut serta membonceng orang-orang *NICA*) pada tanggal 17 September 1945, keadaan di Banjarmasin khususnya dan di Kalimantan Selatan pada umumnya, tetap berlangsung dengan "tenang". Tidak ada aksi-aksi rakyat baik berupa kegiatan-kegiatan ke arah suatu pembentukan Pemerintahan sendiri di daerah, apalagi kegiatan-kegiatan yang merencanakan akan merebut kekuasaan dari Jepang yang masih bercokol menjalankan Pemerintahan waktu itu. Dapat disiarkannya berita kemerdekaan di harian *Borneo Simboen* pada tanggal 26 Agustus 1943 itupun setelah melalui proses tawar menawar antara A.A. Hamidhan dengan *Menseibo*. Sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo Simboen* yang banyak berhubungan dengan pemimpin-pemimpin Jepang, oleh *Menseibo* dianjurkan agar A.A. Hamidhan pergi kembali ke Pulau Jawa. Anjuran tersebut diterima oleh A.A. Hamidhan dengan usul timbal-baliknya dibolehkan memuat berita tentang kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada hari an *Borneo Simboen*. Usul timbal balik ini diterima oleh *Menseibo*, dengan ketentuan bahwa yang disiarkan tersebut "bukan teks Proklamasi". Atas dasar kesepakatan itulah sehingga pada tanggal 26 Agustus 1945 di *Borneo Simboen* Banjarmasin No. 851, dimuat berita tentang Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan tentang Bentuk Indonesia Merdeka. Sementara itu A.A.Hamidhan seorang anggota PPKI dari daerah Kalimantan yang banyak mengetahui peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta dan yang kepemimpinannya diharapkan di daerah ini, telah berangkat dengan kapal terbang Jepang ke Jakarta melalui Surabaya. Selanjutnya beliau aktif membantu Mr. Kasman Singodemejo yang menjabat sebagai Kepala Keamanan Daerah Jakarta ¹⁵⁾

3. Hambatan-hambatan dan partisipasi masyarakat

Hambatan-hambatan yang dimaksudkan di sini adalah hambatan-hambatan yang menyebabkan terlambat dan terhambatnya penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Kalimantan Selatan. Hambatan-hambatan tersebut umumnya berlatar belakang pada sikap dan tindakan penguasa Jepang di daerah ini.

Seperti disebutkan di muka, Jepang memang pernah bersikap simpati terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat di daerah ini. Namun dapat diduga bahwa sikap simpati itu berhubungan erat dengan maksud agar rakyat di daerah ini bersedia bersama-sama dengan Jepang untuk mempertahankan daerah ini terhadap serangan-serangan Sekutu. Atau setidaknya agar rakyat di daerah ini bersedia menolong orang-orang Jepang tersebut pada saat-saat kekalahan dan kehancuran mereka nantinya. Dan setelah merupakan suatu kenyataan bahwa Pemerintah Jepang di Tokyo menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang berarti bahwa daerah ini tidak akan diserang atau dihancurkan lagi oleh Sekutu tetapi hanya akan terjadi serah terima kekuasaan saja, apalagi ada perintah dari Sekutu bahwa Jepang harus mempertahankan status quo sampai dengan datangnya tentara Sekutu, maka simpati Jepang terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat di daerah ini telah menjadi luntur.

Demikianlah bila diinventarisir maka akan dapat dikemukakan sejumlah hambatan yang menyebabkan terhalang dan terlambatnya penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan secara bebas dan meluas di seluruh daerah Kalimantan Selatan waktu itu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a. Tindakan penguasa Jepang melarang A.A. Hamidhan yang baru kembali dari Jakarta selaku anggota PPKI untuk mengambil langkah-langkah sehubungan dengan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah RI di Jakarta. Tugas tersebut secara *implicit* dapat disimpulkan atas :
 - 1). Menyampaikan berita Proklamasi Kemerdekaan kepada rakyat di Kalimantan (Selatan).
 - 2). Membentuk Komite Nasional Daerah Kalimantan dan sekaligus menyampaikan surat keputusan Pemerintah RI ten-

tang penunjukan Ketua K N I Daerah tersebut.

- 3). Membentuk Partai Nasional Indonesia Daerah Kalimantan sekaligus menyampaikan surat keputusan Pemerintah R I tentang penunjukan Ketua P N I tersebut.
- b. Tindakan penguasa Jepang memindahkan atau memberi kesempatan untuk pindah kepada beberapa tokoh rakyat baik yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan sendiri maupun yang memang berasal dari daerah luar, untuk bertolak ke Pulau Jawa atau ke daerah asal mereka ¹⁶⁾ Akibatnya orang-orang yang diharapkan akan menjadi pelopor dan penggerak massa rakyat di daerah Kalimantan Selatan menjadi langka sekali. Secara *de facto* kekuasaan Jepang waktu itu masih berlangsung. *Kaigun* Jepang masih utuh dengan perlengkapan senjatanya.
 - c. Kekejaman dan kebiadaban orang-orang Jepang yang sering disaksikan atau dirasakan sendiri oleh rakyat di daerah ini pada waktu itu menyebabkan keraguan dan kekhawatiran para pemimpin rakyat untuk melakukan sesuatu kegiatan. Peristiwa hukum tembak mati terhadap Dr. Haga dan anggota komplotannya yang dinyatakan melawan pemerintahan Jepang. ¹⁷⁾ dan banyak peristiwa fitnah yang mengalirkan darah rakyat di daerah ini menyebabkan *charisme* Jepang waktu itu masih ditakuti.
 - d. Adanya sikap untuk acuh rakyat akibat dari pemboman-pemboman oleh Sekutu yang banyak menimbulkan kerusakan dan korban pada masa menjelang menyerahnya Jepang. Rasa ketakutan yang memburu-buru dan melemahkan semangat tersebut baru reda dan mampu menggugah partisipasi rakyat lagi terhadap perjuangan setelah melihat banyak tantangan-tantangan baru ketika *NICA* pada bulan September telah menyusun siasat untuk dapat berkuasa kembali di daerah ini.
 - e. Mass-media yang ada di Kalimantan Selatan waktu itu yakni surat kabar Borneo Simboen Banjarmasin dengan cabangnya di Kandangan masih dikuasai Jepang. Walaupun Pimpinan Redaksinya orang Indonesia sendiri, tapi diawasi dengan ketat oleh penguasa Jepang. Pemuatan berita yang dianggap merugikan Pemerintahan Pendudukan Jepang diancam dengan hu-

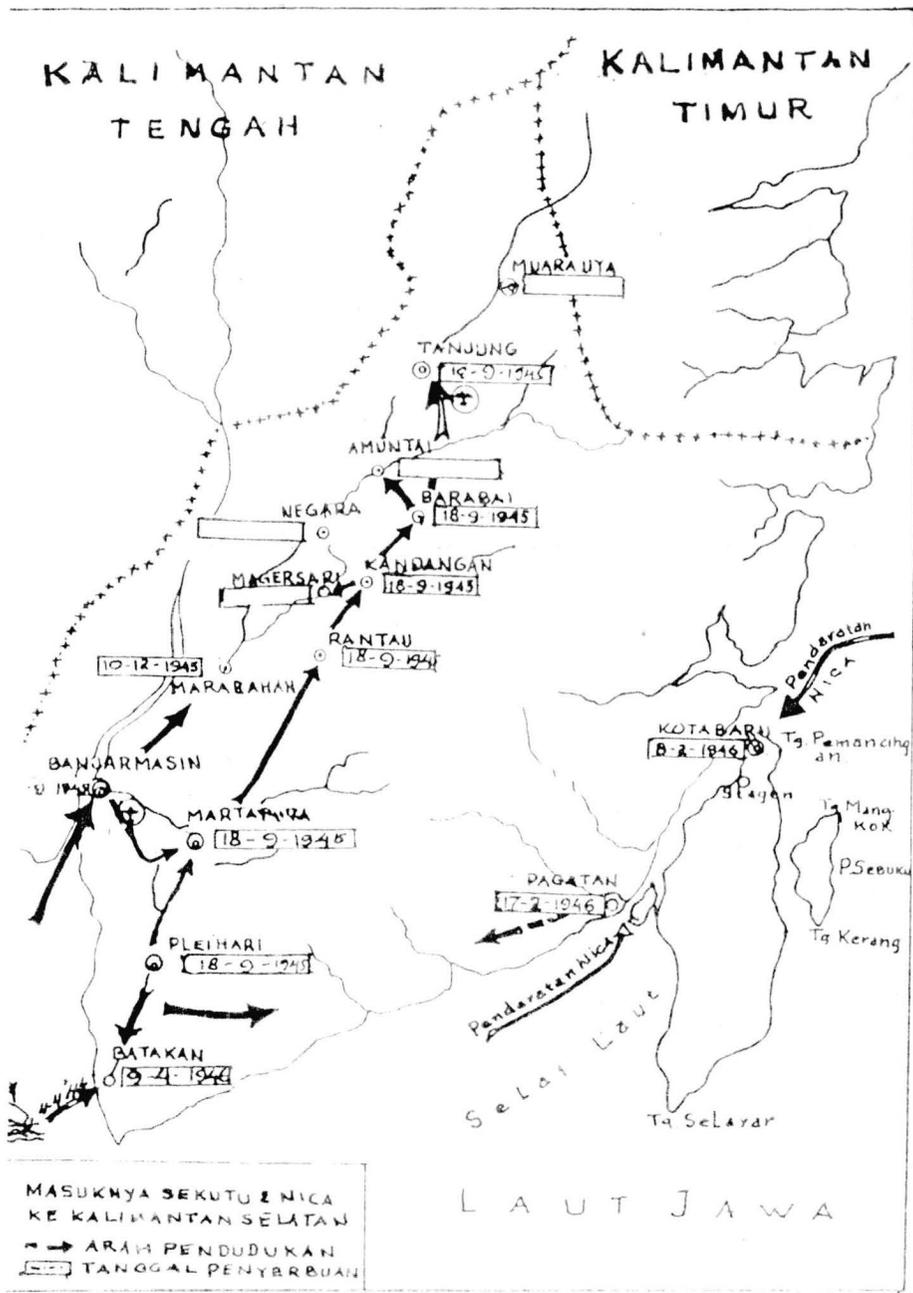
kuman yang berat. ¹⁸⁾ Karena itu pemuatan berita tentang kemerdekaan seperti yang dilakukan Ahmad Basuni pada tanggal 20 Agustus 1945 di harian *Borneo Simboen* Kandangan tentu saja dengan modal pengorbanan dan keberanian yang hebat.

Berita yang disiarkan berupa pengangkatan Kepala Negara dan Bentuk Indonesia Merdeka pada tanggal 26 Agustus 1945 ini, dalam waktu yang relatif singkat telah tersebar ke pelosok kota dan ke Hulu Sungai. Di Banjarmasin khususnya berita tersebut mendapat sambutan hangat dari rakyat yang cinta kepada kemerdekaan dan kebebasan. Pada umumnya penduduk kota Banjarmasin hari itu memasang bendera Merah Putih di halaman rumah mereka. Ada yang terbuat dari kain dan lebih banyak lagi yang dibuat dari "kertas minyak" berwarna merah dan putih. Ada yang berukuran besar dan banyak lagi yang berukuran sedang. Pemasangan bendera Merah Putih ini tampaknya tidak dilarang oleh tentara Jepang. Sehingga pada hari itu rakyat di Banjarmasin merasakan seperti telah benar-benar mendapatkan kemerdekaannya. Namun memasuki hari-hari berikutnya "sambutan hangat" dan "Merah Putih" tersebut semakin menghilang dari pembicaraan dan kegiatan kehidupan rakyat sehari-hari. ¹⁹⁾

Sampai pada priode ini keadaan di Kalimantan Selatan berjalan dengan tenang. Rakyat nampaknya diliputi keraguan dan rasa takut yang tidak beralasan. Penguasa Jepang yang masih ada dan bersiap-siap menunggu kedatangan Sekutu yang akan menggantikan kedudukan mereka di daerah ini kemudian tidak lagi memperlihatkan sikap kejam dan sewenang-wenang. Apalagi pada saat-saat itu memang tidak ada sesuatu yang perlu dilarang. ²⁰⁾

B. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN ORANG-ORANG NICA

Sejak penyerahan Jepang tanggal 15 Agustus 1945, oleh Sekutu diperintahkan agar Jepang tetap memelihara status quo sampai dengan datangnya wakil Sekutu untuk menggantikan kedudukan Jepang di Indonesia. Keharusan untuk mempertahankan *status quo* ialah yang menyebabkan Jepang yang sebelumnya merestui kemerdekaan Indonesia ini, kemudian bertindak melarang dan menghalang-halangi segala tindakan rakyat Indonesia yang berhubungan



dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan itu. Dan karena adanya perintah mempertahankan status quo ini pula sehingga pimpinan Jepang sampai dengan tibanya tentara Sekutu di Indonesia tidak pernah mau mengakui adanya Republik Indonesia. 21)

Tentara Australia yang datang pertama kali ke Kalimantan Selatan atas nama Sekutu dipimpin oleh Kolonel Rabson. Mereka tiba di Banjarmasin dengan menggunakan kapal terbang pada tanggal 17 September 1945. Ikut serta dalam rombongan itu orang-orang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di bawah pimpinan Mayor A.L. van Assenderp. 22)

Orang-orang NICA yang membonceng rombongan tentara Australia tersebut berjumlah 160 orang. Dan kemudian muncul 70 orang bekas KNIL melaporkan diri baik yang tadinya dipenjarakan oleh Jepang atau yang sudah kembali ke masyarakat. 23)

Kedatangan tentara Australia di Banjarmasin pada tanggal 17 September 1945 tidak banyak mengherankan masyarakat. Pada umumnya penduduk sudah mengetahui akan datangnya tentara Australia tersebut. Sebab sekitar seminggu sebelumnya sudah ada kapal terbang Sekutu menyebarkan selebaran di atas kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa Jepang telah kalah dan agar rakyat tetap tenang. 24). Isi selengkapnya surat selebaran itu berbunyi :

MA'LOEMAT

DARI

Djenderal Sir Thomas Albert Blamey GBE.KCB.CMG.

DSO.ED. Pemimpin Tertinggi Dari Tentara Australia.

KEPADA :

Semoea pendoedoek dari BORNEO, TIMOR, CERAM, AMBON, KAI, AROE, TANIMBAR, KEPOELAUAN dilaoetan ARAFOERA, PAPOEA, INGGERIS, NEW BRITAIN, NEW IRELAND, SOLOMONS, BOUGAINVILLE dan poelau2 dekatnja, OCEAN, NARU dan KEPOELAUAN BISMARCK

MENGINGAT bahwa dengan adanya soerat menjerah jang ditanda tangani di Takio pada hari kedoea boelan Septem-

ber 1945, atas perintah dan atas nama Kaisar Djepang, Pemerintah Djepang dan Pemimpin2 Oemoem dari tentara Keradjaan Djepang dan disetoejoei oleh Wakil2 dari Amerika Serikat, Repoeblik Tiongkok, Keradjaan Inggeris dan Roesia, telah dioemoemkan menjerahnja Pemimpin 2 Oemoem dari Keradjaan Djepang dan semoea tentara jang dikepalai oleh Djepang dimana sadja, pada Negeri2 Serikat terseboet diatas dengan tiada memakai djanji apa2 :

DAN MENGINGAT LAGI bahwa saja Djenderal Sir Thomas Blamey GBE DSO ED Pemimpin Tinggi dari tentara Australia telah ditoendoekkan oentoek menerima penjerabannja semoea tentara Djepang dan semoea tentara jang dikepalai Djepang di poelau2, daerah2 dan tempat2 terseboet diatas :

MENGINGAT POELA, bahwa telah dikeloearkan "Perintah Oemoem No.1 dari tentara Laoet dan Darat" oleh Pemimpin Oemoem dari tentara Keradjaan Djepang dimana sadja oentoek memerintahkan semoea tentara Djepang dan semoea tentara jang dikepalai Djepang, soepaja segera memberhentikan permoesoehan, meletakkan sendjatanja, tinggal dia ditempatnja sekarang dan menjerah dengan tiada memakai djanji2 apa2 pada Kepala2 tentara jang mewakili Negeri2 Serikat terseboet diatas :

Maka saja menjampaikan salam dan pemberian selamat pada TOEAN, semoea pendoedoek terseboet diatas dan terutama pada semoe TAWANAN PERANG dan lain-lain ra'jat Negeri Serikat jang sekarang ada di poelau2, daerah2 dan tempat2 jang terseboet berhoeboeng dengan akan segera datangnja kebebasan toean oleh Tentara Australia.

SAJA MEMERINTAHKAN PADA TOEAN OENTOEK MENOEROET Ma'loemat2, Perintah2 dan Pertoendjoek jang saja keloearkan oleh Kepala tentara Australia jang sadja toendoekkan boeat Poelau, Daerah atau Tempat toean2, SELANDJOETNJA SAJA MEMERINTAHKAN pada toean soepaja tinggal tenang2 sadja, pekerdjaan toean sehari-hari kerdjakanlah dengan baik2 dan berdiamlah pada tempat atau roemah toean sekarang oentoek menoenggoe Ma'loemat2, Perintah2 dan Pertoendjoek2 dari saja atau dari Wakil2 saja.

Tertanda pada hari kedoea boelan September 1945.

dt.

(tanda tangan)

Pemimpin Tinggi

dari

Tentara Australia.²⁵⁾

Menanggapi kedatangan tentara Australi itu, dengan disebut-sebutnya dalam surat selebaran tentang ucapan selamat dengan akan segera datangnya kebebasan yang diberikan oleh tentara Australia tersebut, maka rakyat pada umumnya menyambut kedatangan mereka dengan perasaan gembira sekali. Ditambah lagi dalam hati rakyat waktu itu terdapat rasa kecewa dan segala kepahitan hidup selama 3,5 tahun berada di bawah pendudukan Jepang.²⁶⁾

Sebenarnya rakyat pada umumnya tidak mengetahui dengan sesungguhnya bahwa tugas tentara Australia yang datang ke daerah ini adalah untuk :

1. menerima penyerahan dari tangan Jepang.
2. membebaskan para tawanan perang dan interniren Serikat.
3. melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian dipulangkan.
5. menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan Pengadilan Serikat.²⁷⁾

Yang terang dan tergambar bagi penduduk waktu itu mereka telah bebas dari tekanan ketakutan dan kesengsaraan seperti yang telah dialami sewaktu pemerintahan Jepang berlangsung di daerah ini.

Setibanya rombongan tentara Australia yang disusupi beberapa orang NICA tersebut di Banjarmasin, mereka menempati Grand Hotel, (kemudian dikenal sebagai Hotel Banjar di jalan Hasanuddin HM). Setibanya di sana mereka segera menaikkan bendera Australi.

Kemudian beberapa pemuda diperintahkan mereka untuk menjemput pengurus Jepang yang telah menyingkir ke danau Salak. Setelah *Somubutyo* Jepang yang dipanggil tersebut berada di Banjarmasin, maka diadakan upacara serah terima kekuasaan dan penaikan bendera Australia di halaman Gubernur sekarang.

Selanjutnya satuan-satuan tentara Australia itu sebagian di-berangkatkan ke Kandangan, Barabai dan Puruk Cahu, untuk menggantikan tentara Jepang yang sebelumnya menduduki pos-pos di tempat tersebut. Dan sejak itu pulalah dimulai penangkapan-penangkapan terhadap tentara/orang-orang Jepang di daerah ini untuk kemudian dikembalikan ke tanah air mereka, disamping dilakukan pula pembebasan terhadap tawanan-tawanan Sekutu yang ada di daerah ini.

Dapat dikemukakan bahwa pada saat-saat itu pula orang-orang *NICA* yang telah berada di Kalimantan Selatan ini mulai melakukan tindakan-tindakan dalam usaha menanamkan kembali kekuasaan mereka. Mula-mula mereka datang melihat-lihat ke kantor-kantor pemerintah yang pada masa peralihan itu berlangsung tidak begitu lancar. Sebenarnya mereka nampak ragu-ragu kalau-kalau pegawai di kantor-kantor tersebut tidak akan menerima mereka dengan baik. 29) Tetapi ternyata mereka kemudian bertambah berani setelah melihat kenyataan bahwa cukup banyak pegawai-pegawai yang telah bersikap menerima baik seruan Van Assenderp untuk bekerja sama dengan *NICA*. 30)

Usaha orang-orang *NICA* selanjutnya adalah melancarkan siasat untuk mengambil alih kekuasaan sepenuhnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, termasuk daerah Kalimantan Selatan. Surat pengumuman itu dibuat bertanggal 1 Oktober 1945 dan siap untuk disebarkan pada waktu yang setepat-tepatnya. Pengumuman itu dibuat dalam 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Ini selengkapnya berbunyi :

MA'LOEMAT

dari

Djenderal Sir Thomas Albert Blamey GBE, KCB, CMG, DSO, ED Pemimpin Tinggi dari Tentara Australia.

KEPADA : Pendoedok dari TIMOR, CELEBES, MANA-

DO, BORNEO, Residentie TERNATE, Afdeeling AMBON, Poelau AROE dan TANIMBAR ,
NEUW GIUNEA.

Tentara Serikat telah membinasakan segala kekeoatan Jepang, baik didarat, dilaoet, dan dioedara, dan Keradjaan dan bangsa Djepang seanteronja telah menjerahkan dirinya dengan tidak barang perdjandjian kepada kaoem Serikat. Angkatan2 dibawah perintah General Sir Thomas Blamey telah tiba dinegeri Toean dan telah menerima penyerahan tentara Djepang atas nama kaoem Sekoetoe. Mereka akan melindoengkan orang2 pendoeoek dan akan mendjaga keamanan sampai waktoe kembalinja Pemerintah Hindia Belanda yang sah.

Atas perintah General Sir Thomas Blamey, Pemimpin Agoeng kekeoatan Serikat dibahagian ini, maka Oendang2 Hindia-Belanda yang telah diketahoei oleh Toean2, akan dipakai dan didjalankan oleh opsir2 Nederlandsh Indische Cioeviele Administratie (NICA), yang sekarang berada di daerah Toean2, demikian djoega segala peratoeran2 yang dikeloearkan oleh Pemimpin Agoeng tentara Serikat oentoek mendjaga keamanan dan ketertiban.

Bertanda tangan hari satoe boelan October 1945

(tanda tangan)

Pemimpin tinggi

dari

Tentara Australia. 31)

Sementara itu tentara Australia berangsur-angsur diberangkatkan ke Balikpapan untuk selanjutnya dikembalikan ke tanah air mereka. Sebaliknya dari Balikpapan diangkut tentara NICA yang dikenal dengan nama KOMPI X ke Banjarmasin. Anggota Kompi X ini pada umumnya terdiri dari bangsa Indonesia yang tergabung dari bekas serdadu Belanda bekas *romusha*, bekas polisi, bekas orang-orang politik yang dibawa dari Australia. Kompi X inilah yang kemudian banyak memberikan bantuan kepada para gerilyawan di Kalimantan Selatan. 32)

Namun sampai pada saat itu surat pengumuman dari Sir Thomas Blamey yang telah disiapkan oleh NICA belum juga disiarkan.

Dan sementara NICA menunggu-nunggu saat yang tepat tersebut, di masyarakat telah timbul semangat baru. Peristiwa yang telah membangunkan kembali semangat *patriotisme* tersebut dimulai sejak 2 orang Australia yang masih tinggal di Banjarmasin, yakni Charles Foster dan Victor Little menyerahkan 7 lembar pamflet kepada Hamidhan M selaku anggota pengurus P.B.I. Kalimantan Selatan. Pamflet-pamflet tersebut dibuat dan dicetak oleh para politisi Indonesia yang tinggal di Australia dengan beralamatkan Metropfole Hotel Melbourne. Pamflet ini dicetak dalam bahasa Inggris. Isinya menyatakan bahwa :

1. Indonesia telah merdeka.
2. Mengajak segala lapisan masyarakat dan golongan pegawai, polisi, buruh dan rakyat umumnya untuk bersatu.
3. Supaya menolak kedatangan NICA.

Pamflet tersebut setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A.Afiat, kemudian diperbanyak kira-kira 400 lembar yang dicetak dalam tulisan Arab dan tulisan Latin. 33).

Penyebaran pamflet-pamflet itu disebarkan pada tanggal 1 Oktober 1945 ke seluruh daerah Kalimantan Selatan. Di kota Banjarmasin penyebaran pamflet itu dipelopori oleh Hadhariah M, F.Mohani, Hamli Tjarang dan Abdurrahman Noor. Bersamaan dengan itu dilakukan pula pencoretan terhadap rumah-rumah Belanda di Banjarmasin oleh para pemuda yang menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut milik Republik Indonesia. Di Kandangan dan Rantau penyebarannya dipelopori oleh H.M. Rusli dan Hasnan Basuki, sedangkan di Barabai dipelopori oleh H.Badrun. Sedangkan di daerah-daerah lainnya seperti di Martapura, Pelaihari, Marabahan dan Puruk Cahu dilaksanakan oleh tentara Australia yang bertugas melucuti tentara Jepang di daerah-daerah tersebut. 34)

Akibat kegiatan-kegiatan itu Hadhariah M. ditangkap untuk mempertanggung jawabkan penyebaran pamflet-pamflet di atas. Pengurus Besar P.R.I. melakukan protes atas penangkapan itu, sementara para pemuda dan rakyat umum mengancam akan menyerang ke kepolisian. Karena itu pada tanggal 2 Oktober 1945 malam Van Assenderp mengundang Hadhariah M. Oleh Van Assenderp di nyatakan bahwa apabila terjadi aksi-aksi permusuhan ataupun penganiayaan terhadap orang-orang NICA di Banjarmasin sepenuhnya

di atas tanggung jawab Hadhariah M. Pada tanggal 3 Oktober 1945 Hadhariah M. dibebaskan dengan ancaman akan ditangkap kembali.

Bersamaan dengan penangkapan terhadap Hadhariah M tersebut *NICA* menyebarkan surat-surat pengumuman. Isinya menyatakan tentang pengawasan dan pembatasan untuk bersidang atau berkumpul serta sebuah perintah supaya rakyat menyerahkan senjata api yang dimiliki kepada *NICA*.³⁵⁾

Sampai dengan peristiwa ini rakyat di Kalimantan Selatan khususnya para pemimpin dan para pemuda telah menyadari bahwa Belanda melalui suatu organisasi *NICA* yang secara berencana ikut membonceng bersama tentara Australia tersebut bermaksud untuk kembali berkuasa di daerah ini.

2. Akibat-akibat datangnya tentara *NICA*

Kedatangan orang-orang *NICA* ke Kalimantan Selatan dengan segala kegiatan dan tindakan-tindakannya ternyata melahirkan masalah yang menghadapkan rakyat di daerah ini pada beberapa pilihan, yakni :

1. Tidak mau menerima kedatangan *NICA* - Belanda dan meninggalkan daerah Kalimantan Selatan.
2. Dapat menerima kedatangan kembali Belanda-*NICA* dan bersedia (dapat) bekerja sebagai pegawai Belanda-*NICA*.
3. Menentang kedatangan kembali Belanda-*NICA* serta berjuang secara parlementer (legal).
4. Menentang dengan tegas kedatangan Belanda-*NICA*, sehingga sewaktu-waktu akan ditangkap dan dipenjarakan atau harus lari ke hutan bergerilya.³⁶⁾

Kelompok pertama pada umumnya adalah para pemimpin rakyat dan mereka yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan-kegiatan pergerakan atau menjadi anggota suatu organisasi. Mereka pergi ke pulau Jawa ke daerah Republik Indonesia dengan tujuan mencari "kekuatan" untuk kemudian dalam waktu yang tepat kembali lagi ke daerah. Pada umumnya demikianlah, seperti kelompok mereka yang meninggalkan Kalimantan Selatan setelah berlangsungnya Rapat Umum P R I di gedung Rex (Ria) dalam rangka menanggapi adanya "ralat" berita tentang kemerdekaan Indonesia seperti yang telah disiarkan oleh Surat Kabar Borneo Simboen Banjar-

masin pada tanggal 26 Agustus 1945, di mana dinyatakan bahwa berita itu dianggap "tidak ada". Kemarahan rakyat karena adanya ralat berita kemerdekaan yang dipaksakan dan dibuat-buat tersebut, sementara mereka menyadari tidak punya kekuatan apa-apa di sini, karena itulah mereka pergi ke daerah Republik di Jawa untuk mendapatkan kekuatan itu.³⁷ Walau tidak pula diingkari bahwa di antara mereka yang pergi ke Jawa itu ada pula yang karena tidak mau atau takut menanggung risiko.

Sementara itu pada kelompok kedua umumnya terdapat orang-orang yang sebelumnya telah bekerja di kantor-kantor pemerintah, baik sebelumnya sebagai pegawai Pemerintah Hindia Belanda ataupun sebagai pegawai pada zaman penjajahan Jepang. Tapi perlu dicatat pula bahwa memang ada di antara orang-orang yang menjadi pegawai *NICA*, namun punya sumbangan juga dalam perjuangan kemerdekaan ini.

Kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang politik atau orang-orang partai. Mereka berjuang secara *legal* melalui organisasi politik dan lembaga *parlementar*. Kelompok mereka inilah yang kemudian mendirikan partai-partai yang berhaluan Republikein, se seperti Serikat Kerakyatan Indonesia (*S K I*) dan Serikat Muslimin Indonesia (*SERMI*). Orang-orang yang menjadi anggota organisasi *legal* tersebut di atas pada umumnya juga menjadi anggota organisasi yang bersifat *illegal*. Apabila kerahasiaan dari fungsi rangkap mereka dalam menjalankan siasat perjuangan tersebut telah diketahui oleh pihak *NICA*, maka orang-orang ini lari ke pedalaman bergabung dengan para gerilyawan.

Sementara kelompok keempat adalah kelompok *revolusioner*, yang "di luar" melakukan kegiatan gerakan bawah tanah dan "di dalam" melakukan perang gerilya, Kelompok inilah yang disebut oleh orang-orang *NICA* sebagai orang *ekstremis*.

Selain akibat berupa sikap yang diambil oleh rakyat Kalimantan Selatan dalam menunjukkan reaksi ketidak senangan mereka terhadap kembalinya Belanda ke daerah ini, maka bersama ini pula timbul usaha-usaha yang bertujuan hendak melakukan kegiatan perlawanan bersenjata. Di Banjarmasin beberapa orang pemuda mulai melakukan kegiatan mengumpulkan senjata-senjata Jepang, yang sebelum mereka menyerah telah menyimpannya (menanam dalam tanah) di daerah dataran tinggi Mandiangin Kalimantan Selatan.

Demikian pula telah terjadi beberapa insiden berdarah yang dilakukan oleh penduduk baik perorangan atau kelompok terhadap orang-orang *NICA* yang datang secara licik hendak berkuasa kembali di daerah ini. Insiden-insiden itu antara lain :

- a. Di Banjarmasin terjadi penganiayaan terhadap seorang Belanda *NICA*. Ketika orang banyak sedang berkerumun memperhatikan sebuah pamflet yang tertempel di pertokoan Min Seng Pasar Baru Banjarmasin, Pada waktu itu datang 2 orang tentara Australia dan seorang Belanda *NICA* ketempat itu. Orang Belanda-*NICA* itu kemudian merobek pamflet tersebut. Tindakan Belanda-*NICA* ini ternyata mengundang luapan kemarahan rakyat. Melihat keadaan itu kedua orang tentara Australia yang juga ada di tempat itu meninggalkan tempat tersebut. Bersamaan dengan itulah beberapa orang penduduk kemudian melakukan pemukulan terhadap Belanda *NICA* itu. Orang Belanda tersebut berusaha melarikan diri ke arah Pasar Sudimampir, tetapi baru \pm 100 m (sampai di muka Jembatan Sudimampir sekarang) rakyat mencegatnya dan memukulinya beramai-ramai hingga pingsan. ³⁸⁾
- b. Di Pasar ikan Barabai seorang polisi *NICA* tewas ditikam seseorang yang tak dikenal. Peristiwa penikaman ini diawali oleh sikap kasar yang diperbuat oleh polisi *NICA* tersebut. Kebencian rakyat terhadap orang-orang Belanda ini, menyebabkan tindakan kasar seorang polisi *NICA* itu melahirkan peristiwa penikaman yang membawa maut. ³⁹⁾

Kebencian rakyat terhadap *NICA* ini berakibat sampai kepada timbulnya pertentangan sesama penduduk. Kebencian dan rasa dendam rakyat terhadap *NICA*-Belanda yang menumbuhkan hati dan perasaan penduduk negeri ini, lahir dalam bentuk tindakan-tindakan yang bersifat *illegal* baik ia dilakukan oleh perorangan atau berkomplot 2 sampai 3 orang. Kebencian rakyat ini telah menimbulkan banyak korban pembunuhan secara diam-diam terhadap orang-orang yang bersedia menjadi kaki tangan *NICA*-Belanda tersebut. Di daerah Kandangan sering terjadi peristiwa pembunuhan secara diam-diam ini. Masyarakat sering dihebohkan oleh peristiwa ditemukannya mayat seorang polisi *NICA* atau kaki tangannya, tergeletak di

tepi jalan atau hanyut di sungai, tanpa diketahui siapa pembunuhnya. 40)

Akibat-akibat kebencian rakyat terhadap orang-orang *NICA* dan kaki tangannya ini, telah melahirkan insiden-insiden pembunuhan yang cukup mencemaskan dan menghebohkan polisi-polisi *NICA*. Peristiwa-peristiwa ini tergolong akibat tidak senang terhadap setiap unsur yang membantu berkuasanya kembali Belanda di daerah ini. Tindakan yang sebenarnya didasari oleh perasaan *patriotisme nasionalisme*, yang dilakukan secara perorangan atau persepakatan 2 sampai 3 orang ini, merupakan peledakan rasa kebencian dan dendam yang menjadi isyarat bagi *NICA* bahwa rakyat di daerah ini menolak kedatangan mereka.

Peristiwa-peristiwa yang timbul dengan latar belakang akibat rasa benci terhadap *NICA* dan kaki tangannya itu antara lain :

- a. Peristiwa pembunuhan *resersi* Belanda di kampung Qadhi (sekarang Jalan Tri Kesuma) Barabai. Pembunuhan ini dilakukan pada malam hari oleh 3 orang bersaudara yang digerakkan oleh Nawawi Arif. Peristiwa berdarah ini telah menewaskan 2 orang dipihak *resersi* Belanda dan seorang adik dari Nawawi Arif. 41).
- b. Peristiwa pengrusakan oto *NICA*-Belanda di kampung Banna Padang Rantau, ketika oto tersebut ditinggalkan oleh pengendaranya. Dalam peristiwa ini telah gugur 2 orang penduduk bernama Tašan dan A.Panyi yang nekad dengan keris terhunus menghadang polisi-polisi *NICA* ketika mereka datang mengadakan penyerangan akibat pengrusakan oto tersebut. 42)

Insiden-insiden tersebut di atas ini terjadi pada bulan-bulan September sampai dengan awal Nopember 1945, yakni ketika rakyat telah menyadari adanya siasat licik *NICA* -Belanda yang berusaha hendak berkuasa kembali di daerah ini.

C. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN R.I. DAERAH KALIMANTAN SELATAN

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dimulailah

kegiatan-kegiatan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk berlangsungnya pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tanggal 18 ke 19 Agustus 1945 Presiden terpilih Ir. Soekarno memanggil wakil-wakil daerah dalam rangka penunjukan petugas pelaksana pemerintahan di daerah-daerah. Berdasarkan usul-usul yang disampaikan oleh A.A. Hamidhan selaku anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan pada pertemuan tersebut, maka ditetapkan Ir. Pangeran Moehammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan. Disamping itu telah ditetapkan pula Ketua K N I Daerah yakni Mr. Rusbandi serta Ketua P N I Daerah yaitu Dr. Susudoro. 43)

Seperti telah dikemukakan di muka A.A.Hamidhan tiba di Banjarmasin dari Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1945, dengan membawa surat keputusan tentang pengangkatan Ketua K.N I. Daerah dan Ketua P N I Daerah. Karena itu secara tidak langsung A.A.Hamidhan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta untuk memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga tersebut di atas. Namun seperti telah diuraikan di muka, A.A.Hamidhan kembalinya dari Jakarta ternyata tidak sempat melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan tugas yang dibawanya tersebut. Peranan yang dapat menjadikannya sebagai penggerak dan pelopor kegiatan-kegiatan di awal revolusi di daerah ini, karena tekanan-tekanan tentara Jepang, peranan kepeloporan tersebut hanya sampai dengan diperolehnya izin pemuatan berita tentang kemerdekaan pada surat kabar *Borneo Simboen* Banjarmasin. 44)

Demikian izin tentang pemuatan berita kemerdekaan dalam surat kabar *Borneo Simboen* itu begitu mahal, sehingga A.A.Hamidhan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memelopori kegiatan-kegiatan di daerah ini, ternyata diharuskan oleh Jepang untuk meninggalkan daerah ini pergi ke pulau Jawa. Dan bersamaan dengan waktu itulah banyak para pemimpin/pemuka masyarakat yang secara diam-diam telah menghilang pula ke pulau Jawa. Kosongnya tenaga kepemimpinan sesaat sesudah penyiaran berita resmi tentang kemerdekaan pada waktu itu di Banjarmasin, menyebabkan tertundanya pembentukan baik K N I Daerah Kalimantan maupun terbentuknya P N I Daerah tersebut di atas.

Sementara itu berita-berita kemerdekaan yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Jakarta sudah sering pula diterima. Kekuasaan sudah berpindah pula ke tangan Sekutu, yang diwakili

oleh tentara Australia di mana terdapat orang-orang *NICA* Belanda. Rakyat di daerah ini juga sadar bahwa kemerdekaan negara yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 perlu dibela kelangsungannya. Tokoh-tokoh "baru" yang pada umumnya adalah para pemuda mulai tampil dengan tindakan-tindakan mereka yang *revolutioner*.

Ketika berita pengangkatan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan oleh Pemerintah RI, dapat diterima di Banjarmasin, para pemuda tersebut mendesak PB PRI untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan. Dan pada rangka menghadiri rapat penyusunan pemerintahan baru di bawah *NICA* yang diadakan oleh Van Assenderp, pada kesempatan itu pulalah PB PRI mengundang para Kiai tersebut yang secara *otomatis* adalah juga Ketua-ketua Cabang di daerah untuk menghadiri rapat penyusunan pemerintahan baru di bawah *NICA* yang diadakan oleh Van Assenderp, pada kesempatan itu pulalah PB PRI mengundang para Kiai tersebut yang secara *otomatis* adalah juga Ketua-ketua Cabang di daerah untuk menghadiri rapat yang berlangsung di Jalan Andalas (Pasar Lama sekarang). Demikianlah dalam rapat yang berlangsung sekitar tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 1945 tersebut telah dibicarakan tentang diangkatnya Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan, karena itu perlu pula segera dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan. ⁴⁵⁾

Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah :

1. Mengangkat Ketua PB PRI yaitu Pangeran Musa Ardikusuma sebagai Residen Kalimantan.
2. Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan di Banjarmasin, dengan susunan pengurus :

Ketua : A. Ruslan
Penulis I : Hadhariah M
Penulis II : F.Mohani.⁴⁶⁾

Keputusan mengenai pengangkatan Pangeran Musa Ardikusuma sebagai Residen RI untuk Daerah Kalimantan dan adanya K.N I Daerah dengan kepengurusannya itu kemudian diproklamirkan secara resmi dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Mayor van Assenderp dan pemimpin tentara Australi yang ada di daerah itu

serta dihadiri juga oleh para Kiai dari beberapa daerah di Kalimantan yang diundang khusus untuk keperluan itu. 47)

Adanya pengangkatan Residen RI dan pembentukan KNI Daerah Kalimantan ini, nampaknya tidak ada reaksi apa-apa baik dari pihak tentara Australia maupun dari orang-orang NICA. Tidak ada tindakan larangan terhadap KNI Daerah yang baru dibentuk itu, demikian juga terhadap keputusan pengangkatan Residen yang telah diproklamirkan tersebut. Dengan berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang baru berlalu tersebut harapan-harapan rakyat di daerah ini untuk mendapatkan kemerdekaan yang diidam-idamkan itu mulai timbul kembali.

2. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pada masa Jepang masih berkuasa di Indonesia, pernah disiarkan izin tentang pemasangan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang *Hino Maro*. Di Kalimantan Selatan pemasangan kegiatan bendera Merah Putih ini di samping bendera *Hino Maro* ini pernah dilakukan pada tanggal 29 April 1945, yakni pada hari ulang tahun Kaisar Hiro Hito. 48)

Selanjutnya kegiatan masyarakat memasang bendera Merah Putih secara bersama pernah pula dilakukan di kota Banjarmasin pada hari disiarkannya berita kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar *Borneo Simboen* Banjarmasin, tanggal 26 Agustus 1945. Pengibaran bendera saat itu hanya berjalan satu hari, selanjutnya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pemasangan bendera-bendera tersebut. Kalau dalam waktu 2 sampai 3 hari sesudahnya masih terlihat kertas-kertas minyak berwarna merah putih, maka itu bekas pemancangan yang secara sengaja dibiarkan saja terpancang di pelataran depan rumah-rumah penduduk. 49)

Peristiwa pemancangan bendera-bendera Merah Putih tersebut di atas semuanya berlangsung pada masa Jepang masih menjalankan pemerintahan di daerah ini. Pengibaran bendera Merah Putih di rumah-rumah penduduk pada waktu adanya berita kemerdekaan di surat kabar *Borneo Simboen* itu, sebenarnya waktu itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Tetapi karena sampai pada saat itu tentara Sekutu belum datang mengambil alih kekuasaan di daerah Kalimantan Selatan, maka praktis kekuasaan masih berada di tangan tentara Jepang.

Seperti halnya disebutkan di muka bahwa pemuatan berita kemerdekaan di surat kabar Boerneo Simboen Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah merupakan hasil persetujuan antara A.A.Hamidhan dengan pihak penguasa Jepang di bawah ini. Sehubungan dengan itulah kiranya sehingga segala kegiatan penduduk Banjarmasin melakukan pemancangan dan pengibaran bendera di rumah-rumah mereka tidak dilarang oleh penguasa Jepang waktu itu. Tentara Jepang waktu itu diduga sudah mulai bersikap masa bodoh. Bukanlah apabila tentara Sekutu datang nasib mereka pun ditentukan oleh penguasa baru ini ?

Peristiwa selanjutnya dalam perjuangan mengibarkan bendera Merah Putih ini, berlangsung pada waktu tentara Australia yang bertindak atas nama Sekutu sudah berkuasa menggantikan orang-orang Jepang di daerah ini. Pada waktu itu *NICA* yang sebelumnya datang membonceng tentara Australia sudah mengadakan kegiatan-kegiatan pula dalam usaha mereka hendak berkuasa kembali di daerah ini.

Para pemuda yang pada sekitar minggu pertama bulan Oktober 1945 telah berhasil mendesak tokoh-tokoh pergerakan di daerah ini agar membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan serta menetapkan seorang Residen Republik Indonesia Daerah Kalimantan, selanjutnya mengadakan persiapan-persiapan hendak mengadakan suatu upacara resmi tanda berdirinya Pemerintahan R.I Daerah Kalimantan tersebut. Persiapan-persiapan ini dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam "Barisan Pemuda Republik Indonesia" yang dipimpin oleh F.Mohani, Abdurrahman Noor, Abdul Mutahalib Syukur, Hamli Tjarang, Hanafiah, Abdul Kadir Uan, M. Amin Effendi, M.Aminuddin, dan lain-lain. 50)

Rencana upacara peresmian dan perayaan berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Kalimantan dan pembentukan KNI Daerah tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1945 bertempat di halaman Gedung Pemerintahan (halaman Kantor Gubernur sekarang). Acara yang akan dilangsungkan adalah :

1. Menurunkan bendera Belanda.
2. Menaikkan bendera Merah Putih.
3. Pawai membawa bendera Merah Putih keliling kota.

Acara yang sama akan dilangsungkan pula di daerah-daerah

Hulu Sungai. Untuk keperluan itu oleh PBPRI dibuat sebuah surat instruksi agar di daerah-daerah Hulu Sungai melakukan acara yang sama dan serentak pada tanggal 10 Oktober 45 tersebut. Surat instruksi itu akan dibuat oleh PBPRI maka ia merupakan instruksi dari Pemerintah RI Kalimantan, karena Ketua PRI adalah Residen RI, demikian pula Ketua KNI dan Sekretarisnya adalah anggota PB PRI.

Instruksi untuk daerah-daerah di Hulu Sungai tersebut secara langsung disampaikan kepada para Kiai yang juga sebagai Cabang PRI di daerah yang sampai tanggal 7-8 Oktober 1945 masih menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh PB PRI. Para Kiai ini pada tanggal 9 Oktober 45 semuanya sudah kembali ke daerah masing-masing. 51)

Di samping itu oleh PB PRI dikirim pula seorang kurir bernama Asnawi R pada malam menjelang tanggal 10 Oktober 1945 itu untuk menyampaikan instruksi yang sama kepada Pengurus PRI Daerah yang ada di Hulu Sungai. 52).

Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 sejak pagi sudah terlihat dari beberapa jurusan rakyat datang dengan berbaris dengan didahului seorang pembawa bendera Merah Putih bergerak menuju halaman Kantor Pemerintahan (Kantor Gubernur sekarang). Barisan-barisan rakyat tersebut sesampainya di halaman Kantor tersebut ternyata menemui beberapa orang tentara Australia yang sudah siap dengan senjata di tangan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Melalui pimpinan tentara Australia dan ancaman senjata yang siap di tangan tersebut, NICA telah berhasil menggagalkan upacara peresmian berdirinya Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kalimantan dan KNI Daerah Kalimantan sesuai rencana yang disiapkan pada hari itu. Mereka ditugaskan untuk mencegah tindakan-rakyat yang bermaksud menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atas tiang di depan Kantor tersebut.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka wakil-wakil rakyat yang tergabung dalam PB PRI mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Kolonel Rabson yang atas desakan NICA telah mengundang mereka. Hasil dari perundingan tersebut adalah :

1. Pada hari tersebut rakyat dibolehkan mengadakan pawai de-

ngan membawa bendera dan lencana Merah Putih.

2. Di daerah-daerah Hulu Sungai rakyat boleh menaikkan/memasang bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 53)

Melihat kenyataan bahwa upacara penurunan bendera Belanda dan penaikan Sang Merah Putih seperti yang direncanakan semula ternyata tidak dapat dilangsungkan, maka sebagian rakyat yang hadir waktu itu kecewa sekali. Hanya sebagian kecil rakyat yang dapat menahan emosi mereka yang berusaha meneruskan dan mengikuti pawai keliling kota dengan membawa bendera Merah Putih, sebagai tanda Pemerintah R I Daerah Kalimantan sudah terbentuk.

Peristiwa pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 10 Oktober 1945 itu, seperti telah diinstruksikan oleh PB PRI akan dilangsungkan pula secara serentak di daerah-daerah Hulu Sungai. Namun karena adanya larangan yang diumumkan oleh Komandan Tentara Australia pada peristiwa di Banjarmasin, maka upacara yang sedianya akan dilangsungkan pada jam 10.00 di kota-kota di Hulu Sungai juga terpaksa mengalami penundaan.

Di Barabai, pada tanggal 10 Oktober 1945 itu telah berlangsung pula pawai membawa bendera Merah Putih berkeliling kota. Kegiatan pawai berkeliling kota itu digerakkan oleh tokoh-tokoh rakyat di daerah ini, antara lain Hadiseputra, Haji Hasan, dan lain-lainnya. Rombongan pawai berkumpul dan mulai bergerak dari Simpang Lima di pusat kota Barabai, berkeliling kota dan kembali lagi ke tempat semula. 54) Peserta pawai ini kurang lebih 300 orang dan berlangsung dengan tertib. Tentara Australia di sini menunjukkan sikap yang netral dan bertindak tak acuh menghadapi adanya kegiatan rakyat tersebut. Malahan mereka tidak bereaksi apa-apa ketika mobil mereka yang berpapasan dengan barisan rakyat ini, ditemplei merah putih oleh rakyat. 55)

Di Amuntai bentuk perayaan berdirinya Pemerintahan R.I. Daerah Kalimantan yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1945 itu juga berupa pawai membawa bendera Merah Putih berkeliling kota. Kegiatan pawai ini diorganisir oleh Muhammad Anwar, H Maksud, Adenan, H. Amir dan lain-lain. 56)

Sementara itu di Kandangan, yang pada waktu itu berkedudukan sebagai ibu kota Hulu Sungai, segala bentuk kegiatan yang ber-

hubungan dengan perayaan Pembentukan Pemerintahan RI Daerah Kalimantan pada tanggal 10 Oktober 1945 itu secara resmi mula-mula dilarang oleh Tentara Australia atas nama NICA. Di daerah ini kegiatan pawai membawa bendera Merah Putih, baru dapat dilangsungkan setelah ada pemberian izin kemudian. 57)

Kegagalan untuk melaksanakan acara pada tanggal 10 Oktober 1945 seperti yang direncanakan para pemuda dan tokoh-tokoh pergerakan di Banjarmasin tersebut di atas, sebenarnya tidak mengejutkan mereka. Sebelum tiba hari upacara itu, yakni pada tanggal 9 Oktober 1945 beberapa tokoh pergerakan rakyat di bawah pimpinan Hadharyah M. telah menemui Kolonel Rabson Komandan Tentara Australia di Banjarmasin. Rencana para pemuda tersebut rupanya sudah diketahui oleh Van Assenderp pimpinan NICA di daerah ini. Sehingga tokoh-tokoh pergerakan itu datang ke tempat Kolonel Rabson, mereka menemui Van Assenderp sudah berada lebih dahulu di tempat itu. Dan nampak pada sikap Kolonel Rabson, bahwa dia telah diperalat oleh pimpinan NICA itu. Karena itu ketika tokoh-tokoh pergerakan tersebut mengemukakan tentang rencana rakyat pada tanggal 10 Oktober 1945 itu, ternyata Kolonel Rabson menyatakan bahwa ia tidak mengakui adanya Pemerintahan RI di daerah ini. Karena itu rencana mereka untuk mengadakan peresmian dan perayaan berdirinya Pemerintahan RI Daerah Kalimantan itu tidak dapat dibenarkan. Barulah setelah terjadi suatu dialog antara Hadharyah M dan kawan-kawan dengan Kolonel Rabson selaku Pimpinan Tentara Australia di daerah ini, izin untuk mengadakan perayaan berdirinya Pemerintahan RI Daerah Kalimantan tersebut dapat diberikan. Tetapi izin yang diberikan itu hanya mengadakan pawai dengan memakai bendera Merah Putih pada tanggal 10 Oktober 1945 tersebut. 58)

Tindakan tentara Australia dengan senjata siap di tangan pada peristiwa 10 Oktober 1945 di halaman Kantor Pemerintah (Kantor Gubernur) itu, merupakan tindakan berjaga-jaga yang dilakukan oleh tentara Australia kalau-kalau rakyat bertindak juga menukarkan bendera Belanda yang sedang berkibar di halaman Kantor tersebut. Tentunya tentara Australia merasa berkewajiban untuk mempertahankan kehormatan orang Belanda, yang bersama-sama Australia tergabung dalam satu kelompok "negara-negara Sekutu".

Peristiwa kegagalan menaikkan bendera di halaman Kantor

Pemerintahan (Kantor Gubernur sekarang) pada tanggal 10 Oktober 1945 itu, selanjutnya menjadi pelajaran bagi para pemimpin rakyat di daerah ini. Menurut Hadharyah M. kegagalan tersebut disebabkan pada saat itu kita masih kurang pengalaman dan pengetahuan dalam soal soal bernegara apalagi soal-soal politik Internasional. Sebenarnya rakyat dapat melakukan upacara peresmian, berdirinya Pemerintahan RI Daerah Kalimantan dengan acara penaikan/pengibaran bendera tersebut, seandainya dalam upacara itu tidak dikaitkan dengan tindakan menurunkan lebih dahulu bendera Belanda.

Tetapi walaupun peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1945 itu tidak berlangsung seperti yang direncanakan oleh para pemuda dan tokoh-tokoh pergerakan di daerah ini, namun karena kegiatan arak-arakan/pawai dengan membawa Merah Putih tersebut, telah dilakukan secara serentak di beberapa kota di Kalimantan Selatan ini, maka rakyat di daerah ini telah bangun secara serentak serta menyadari bahwa kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menuntut pengorbanan-pengorbanan yang lebih berat. Sementara itu telah jelas bahwa Belanda melalui organisasi *NICA*nya itu hendak melanjutkan penjajahannya kembali di bumi Indonesia ini.

Besarnya peranan *NICA* dalam peristiwa 10 Oktober 1945 tersebut, dimana pimpinan tentara Australia nampaknya menaati sepenuhnya kemauan-kemauan Van Assenderp, hal ini karena seperti telah diuraikan di muka bahwa pada tanggal 1 Oktober 1945 sudah ada keputusan tentang penyerahan kekuasaan daerah Kalimantan dari tentara Australia kepada *NICA*. Tetapi karena pada waktu itu diperhitungkan oleh pihak *NICA* belum tepat waktunya, maka surat pengumuman tentang penyerahan kekuasaan itu ditunda penyebarannya. Dan barulah kemudian pada tanggal 24 Oktober 1945, ketika *NICA* sudah merasa kuat dan telah mendapat dukungan dari segelintir pejabat yang tidak berani menanggung risiko perjuangan, maka surat pengumuman pelimpahan kekuasaan dari tentara Australia kepada *NICA* yang ditandatangani oleh Sir Thomas Albert Blamey itu disebarkan di seluruh daerah Kalimantan Selatan. 59) Karena itulah sehingga pada waktu terjadinya peristiwa 10 Oktober 1945 di Banjarmasin tersebut, *NICA* telah menunjukkan peranannya dalam menentukan segala keputusan yang diambil ketika dia-

dakannya perundingan-perundingan antara tokoh-tokoh pergerakan di daerah ini dengan pimpinan tentara Australia, sebab sebenarnya sejak tanggal 1 Oktober 1945 kekuasaan atas daerah Kalimantan Selatan ini sudah berada dibawah *NICA*.

D. PEMBENTUKAN ORGANISASI-ORGANISASI PERJUANGAN

1. Timbulnya organisasi-organisasi kelasykaran dan satuan ekspedisi dari pulau Jawa

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disiarkan melalui radio di Jakarta dapat diterima di Kalimantan Selatan, rakyat di daerah ini kemudian membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang bertujuan hendak mewujudkan kemerdekaan yang diproklamkan itu di daerah ini sekaligus berusaha mempertahankannya.

Di Banjarmasin, berita kemerdekaan yang sayup-sayup itu hanya tersebar melalui bisik-bisik dari mulut ke mulut di antara tokoh-tokoh pergerakan dan para pemuda umumnya. Dari berita yang masih samar-samar itu, para pemuda yang rindu akan kemerdekaan tersebut, telah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya juga di daerah ini. Untuk itu pada tanggal 20 Agustus 1945 beratus-ratus pemuda dari Seinendan, Bo Ei Tan Sin Tai, Kenkoku Dosikai, Fuzinkai, Kepanduan dan lain-lainnya berkumpul di gedung Bioskop Banjarmasin. Mereka membentuk organisasi Pemuda Republik Indonesia (P R I) Dalam pada itu telah dibentuk pula team-team yang bertugas mengkonsolidasi kekuatan di daerah-daerah. ⁶⁰⁾ Organisasi ini bersifat legal, tetapi dalam tindakannya menjadi pelopor dalam mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kelompok pemuda inilah yang mendesak tokoh-tokoh pergerakan di daerah ini agar membentuk K.N.I. Daerah Kalimantan. Demikian pula merekalah yang memelopori rencana upacara Penaikan Bendera tanggal 10 Oktober 1945 di Halaman Gubernur Banjarmasin.

Sementara itu di Kandangan, di mana berita tentang kemerdekaan yang dapat ditangkap melalui radio tersebut telah dimuat di Borneo Simboen Edisi Kandangan tanggal 20 Agustus 1945. Tindakan patriotik yang dilakukan tokoh-tokoh pergerakan tersebut, yakni memuat berita tentang kemerdekaan tanpa seizin Jepang

yang masih berkuasa itu, selanjutnya diikuti dengan didirikannya suatu organisasi yang bersifat kelasykaran dengan nama *GERMERI* (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia).⁶¹⁾ pada tanggal 23 Agustus 1945.⁶²⁾ Mereka yang tergabung dalam organisasi itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan Pasar malam selama 7 hari dengan thema merayakan kemerdekaan dan mendirikan tugu dengan bentuk "lilin menyala" di halaman Kantor Bupati (sekarang rumah dinas dan Balai Pertemuan Pemda) Kandangan. Tokoh-tokoh pimpinan *GERMERI* ini adalah Baseri alias Hasnan Basuki, Baderun alias Bayam S, H.A. Jingga, Masdar, Amir Kasan dan lain-lain. Organisasi ini tumbuh dari berbagai gerakan rahasia yang terdapat pada masa sebelum Proklamasi dengan maksud menghadapi orang-orang Jepang yang sangat dibenci rakyat pada waktu itu. Dan sesudah gerakan rahasia yang berusaha menggagalkan setiap usaha *NICA* untuk berkuasa kembali di daerah ini.⁶³⁾

Di Banjarmasin para pemuda yang umumnya tergabung dalam organisasi Pemuda Republik Indonesia, ketika kekuasaan sudah berpindah dari Jepang kepada Sekutu, beberapa gelintir pemuda tersebut berusaha mengumpulkan senjata-senjata Jepang yang telah mereka sembunyikan di hutan di luar kota. Beberapa pemuda yang melakukan kegiatan mengumpulkan senjata-senjata Jepang itu antara lain M. Amin Effendi, Sardol, Thalib, Abdurrahman dan Masran. Pemuda-pemuda itu mengumpulkan senjata-senjata Jepang yang telah disembunyikan mereka di daerah Mandiangin dan di daerah Danau Salak.⁶⁴⁾

Kelompok pemuda yang giat melakukan pengumpulan senjata tersebut kemudian membentuk suatu organisasi rahasia bernama *BPRIK* (Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan). Organisasi itu resminya didirikan pada tanggal 19 September 1945 dengan tujuan mempercepat berdirinya Pemerintahan RI Daerah Kalimantan dan mengkoordinir tenaga perlawanan rakyat menentang gerak usaha pihak *NICA*/Belanda.⁶⁵⁾ Para pemuda yang tergabung dalam *BPRIK* inilah yang mengancam para Kiai ketika mereka mengadakan rapat-rapat pada awal bulan Oktober 1945 di Banjarmasin. Para pemuda waktu itu menuntut agar tokoh-tokoh rakyat Kalimantan tersebut segera membentuk *KN I* Daerah dan menetapkan seorang Residen RI Daerah dan menetapkan seorang Residen RI Daerah Kalimantan.

Setelah peristiwa upacara penaikan bendera seperti yang direncanakan oleh para pemuda dalam rangka peresmian berdirinya Pemerintahan R I Daerah Kalimantan dan berdirinya K N I Daerah, pada tanggal 10 Oktober 1945 di Banjarmasin menemui kegagalan, maka timbullah rasa kecewa dan benci di hati rakyat terhadap orang-orang *NICA* yang dengan segala kelicikannya telah berhasil menunjukkan peranannya yang menentukan pula di daerah ini. Kekecewaan ini bertambah lagi ketika Residen R I Daerah Kalimantan Pangeran Musa Ardikusuma telah menerima kerja sama dengan *NICA*. Ia ternyata lebih menerima kerja sama dengan *NICA*. Ia ternyata lebih mementingkan menjalankan pekerjaannya sebagai *Districts-Hoofd NICA*, dan meninggalkan jabatannya sebagai Residen R I 66). Sehubungan dengan itu maka Pemuda PRI merencanakan suatu Kongres Pemuda dalam rangka pencabutan jabatan Pangeran Musa Ardikusuma sebagai Residen R I dan akan mengangkat A.Ruslan (Ketua K N I Daerah Kalimantan) sebagai penggantinya. 67)

Sementara itu pula untuk meningkatkan perjuangan dalam menghadapi kegiatan-kegiatan *NICA*, maka di samping organisasi P R I (Persatuan Rakyat Indonesia) sebagai suatu wadah perjuangan yang bersifat legal, maka oleh tokoh-tokoh pergerakan di Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk BBM-BPRIK (Barisan Berani Mati-Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan). 68) Pimpinan-pimpinan organisasi ini adalah A.Ruslan, Hadhariah M., Hasan Amir, Ahmad Benyamin, Mahlan S.B., M.Amin Effendi, Aminuddin, dan lain-lain. 69)

Tokoh-tokoh organisasi kelasykaran ini segera menyusun kelompok-kelompok dan mengatur penjagaan-penjagaan serta mengu sahakan senjata api. Dan karena penangkapan-penangkapan mulai dilakukan oleh *NICA*, maka markas perlawanan pada tanggal 20 Oktober 1945 dipindahkan ke Pengambangan, sebelah timur kota Banjarmasin. Keadaan semakin bertambah panas karena dari Alabio (Hulu Sungai Utara) diterima kabar bahwa pada tanggal 26 Oktober 1945 Kiai H.Hasbullah Yasin, telah dibunuh oleh seorang mata-mata *NICA*. 70)

Kemarahan rakyat terhadap *NICA* sudah menjadi-jadi. Insiden pemukulan terhadap seorang Belanda *NICA* yang merobek pamflet di Pasar Baru Banjarmasin pada tanggal 1 Nopember 1945, berlan-

jut dengan aksi penyerangan ke tempat-tempat yang telah ditetapkan pada malam harinya. Obyek-obyek yang hendak diserang antara lain: pelabuhan, rumah sakit, untuk menawan tentara Belanda yang sedang sakit, penjagaan polisi, untuk merebut senjata mereka. Dilakukannya penyerangan ke pelabuhan tersebut sehubungan dengan adanya berita yang diterima dari Gusti Mayur, dari Badan Pembantu Usaha Gubernur (BPOG) di Jawa, bahwa sekitar tanggal 2 Nopember 1945 akan ada pengiriman senjata dari Jawa dengan menggunakan kapal Palang Merah. ⁷¹⁾

Penyerangan dilakukan oleh rakyat yang tergabung dalam BBM-BPRIK ini cukup terorganisir. Penyerangan dilakukan pada malam tanggal 1 ke 2 Nopember 1945. Kelompok Pasar Baru mempunyai kekuatan ± 60 orang dipimpin oleh M.Amin Effendi dan Akhmad Jarkasi Yusuf, dengan persenjataan terdiri dari empat "karabijn" Jepang dan senjata-senjata tajam lainnya. ⁷²⁾

Penyerangan ini gagal karena komando dikaitkan dengan kedatangan kapal yang diberikan akan datang malam itu. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak datang, karena itu komando tak kunjung tiba. Selain itu dari pihak komando juga telah diterima kabar bahwa NICA sudah mengetahui akan adanya pemberontakan malam itu, dan mereka akan menjalankan siasat busuk bahwa "apabila serangan tersebut terjadi, mereka akan membunuh perwira-perwira Australia, di mana pemuka-pemuka rakyat dan tokoh-tokoh revolusioner akan difitnah". ⁷³⁾ Walaupun demikian pada waktu itu sekelompok pemuda menyerang sebuah pos polisi NICA dan berhasil merampas sebuah karabijn. ⁷⁴⁾

Aksi penyerangan rakyat yang tergabung dalam Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) tersebut di atas, oleh pihak NICA dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan-penangkapan terhadap rakyat dan tokoh-tokoh perjuangan yang dicurigai. Di antara yang tertangkap adalah Mahlan S.B., seorang tokoh pimpinan BPRIK dengan beberapa orang kawan.

Adanya penangkapan-penangkapan tersebut tambah menjadikan kebencian rakyat terhadap orang-orang NICA yang secara resmi sejak tanggal 24 Oktober 1945 telah menerima penyerahan kekuasaan atas daerah ini dari pimpinan tentara Australia. ⁷⁵⁾ Rakyat berusaha mengadakan hubungan dengan *Kompi X* dan polisi-polisi NICA berbangsa Indonesia yang menyatakan berpihak kepada

perjuangan bangsa Indonesia.

Kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan penyerangan kedua pada tanggal 9 November 1945, sebagai lanjutan dari penyerangan tanggal 1 November 1945 yang gagal dahulu. Penyerangan kedua ini dikoordinir oleh tokoh-tokoh seperti A.Ruslan, Hadhariah M., M.Saberi, dengan titik kumpul di Markas Pengembangan.⁷⁶⁾ Sedangkan pimpinan penyerangan dipegang oleh M.Amin Effendi, Aminuddin dan Pak Halid.⁷⁷⁾ Penyerangan akan dilakukan pada siang hari atas usul kelompok Pak Halid, dengan alasan untuk dapat membedakan antara orang-orang NICA/KNIL dengan tentara Australia. Kenekadan dari kelompok Pak Halid ini didasari atas keyakinan an bahwa mereka telah memiliki ilmu kebal.⁷⁸⁾

Fase pertama dari aksi ini adalah merebut/mengambil senjata api di Tangsi Polisi, sesuai dengan hasil persepakatan dengan anggota-anggota KOMPI X dan Polisi NICA yang memihak perjuangan. Sedangkan sasaran umum sebenarnya adalah : Asrama Tatas, Pelabuhan, Rumah Sakit Ulin, dan lain-lainnya. Dalam serangan ini dikerahkan ± 250 orang pemuda dari dalam kota dan ± 100 orang dari luar kota, dengan persenjataan 4 buah karabijn, 2 pistol, sejumlah granat dan senjata-senjata tajam lainnya.⁷⁹⁾

Tetpi rencana penyerangan tersebut rupanya sudah bocor, sehingga anggota-anggota Kompi X dan polisi-polisi NICA lainnya yang bersedia membantu para pemuda, ternyata telah dipindahkan oleh atasan mereka sebelumnya. Bahkan pasukan Lapis Baja NICA telah siap menyerang para pemuda yang sudah rapat mengepung dan mulai bergerak mendekati Tangsi Polisi.⁸⁰⁾

Dalam penyerangan nekad yang terjadi pada tanggal 9 November 1945 itu telah gugur 9 orang kesuma bangsa anggota BPRIK. Mereka itu adalah : Baderan, Baderun, Utuh, Umar, Pain, Jamain, Tipa, Dullah dan Ma'rufi. Untuk memperingati peristiwa bersejarah ini telah didirikan sebuah Tugu 9 November bertempat di kampung Pengembangan. Sementara itu untuk mengenang pengorbanan dan keheroikan ke 9 orang kesuma bangsa tersebut, telah didirikan pula tugu peringatan bertuliskan nama-nama para pemuda yang telah gugur tersebut, bertempat di Jalan Jawa dekat Tangsi Polisi di mana peristiwa dahulunya terjadi.

Peristiwa 9 November 1945 yang dicetuskan BPRIK ini, meru-

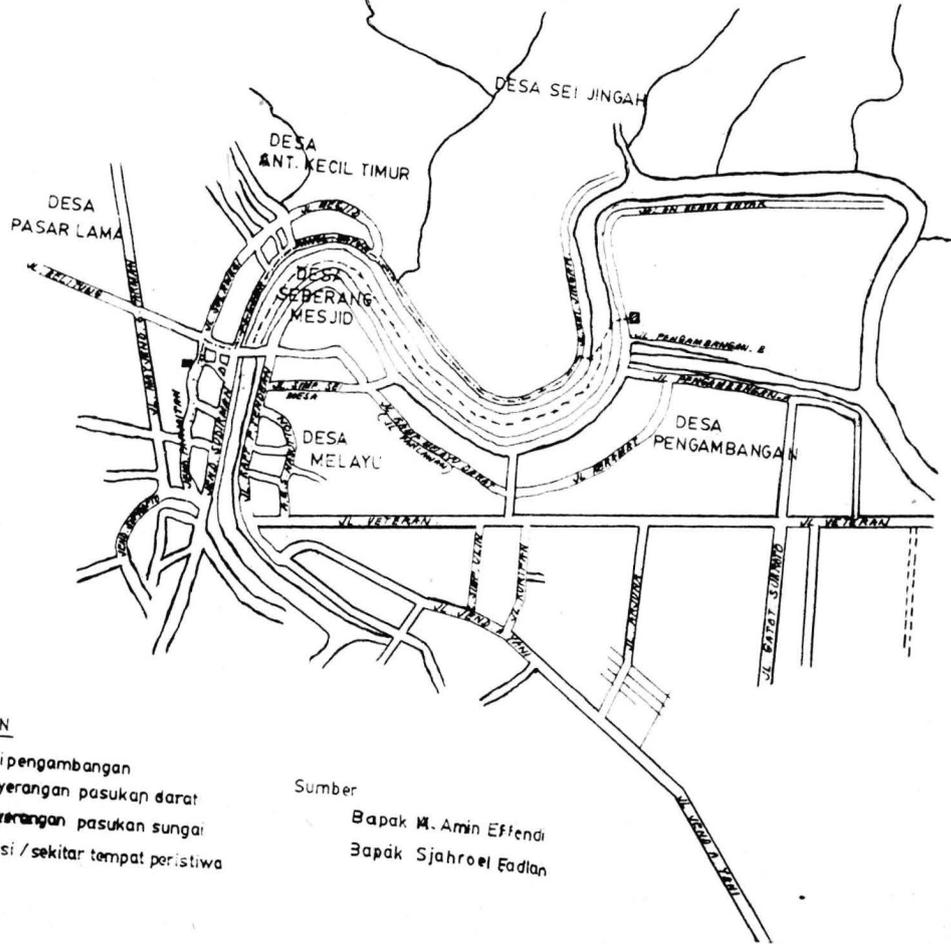
pakan batas kegiatan perjuangan yang sebelumnya bergerak di daerah pusat pemerintahan dan kekuatan NICA di Kalimantan ini kepada kegiatan yang berlangsung di daerah-daerah yang jauh dari Banjarmasin. Peristiwa 9 November 1945 yang menyebabkan gugurnya 9 (sembilan) kesuma bangsa itu, selanjutnya diikuti dengan aksi NICA untuk menangkapi para pemuda dan tokoh-tokoh perjuangan di daerah ini. M.Amin Effendi berhasil ditangkap oleh polisi NICA di daerah Martapura ketika sedang berusaha melarikan diri. Kemudian NICA menyerang Markas Gerilya di Pengambangan dan menguasainya. A.Ruslan, Hadhariah M, Aminuddin, Abdulkadir, juga berusaha melarikan diri dan menjadi orang burunan NICA. 81)

Sementara itu di Banjarmasin berlangsung kegiatan-kegiatan pemuda dalam aksi-aksi melakukan perlawanan terhadap NICA, di daerah-daerah juga telah terbentuk organisasi-organisasi kelasykaran yang bertujuan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan menentang kekuasaan NICA.

Di Marabahan pada tanggal 1 September 1945 berdiri PPRI (Pemuda Persatuan Rakyat Indonesia) di bawah pimpinan M. Ruslan, M.Bahauddin, dan M.Arpan. Pada tanggal 5 Desember 1945 dengan kerja sama antara PPRI dan Rombongan IX Pelopor BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) yang dipimpin oleh H. Ahhmad Hasan dan Jaderi sebagai (sorang Kiai dan sejumlah pembantu) utusan dari Bung Tomo, Marabahan dapat direbut dari tangan NICA. Daerah ini dinyatakan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Bendera Belanda telah diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih. NICA mendatangkan tentaranya dari Kandangan sebanyak 3 perahu. Tetapi ketiga perahu tersebut terpaksa menuju ke Margasari karena mendapat perlawanan hebat. Menyusul pada tanggal 6 Desember 1945 Belawang dapat diambil dengan secara kekerasan. Asisten Kiai B.Babu dapat disingkirkan. Tetapi belum sempat para pemuda memperkuat diri, pasukan Belanda yang sebelumnya didatangkan dari Kandangan kemudian dibantu oleh pasukan dari Banjarmasin yang datang menumpang kapal Hap Gyan, yang kemudian menyerang Marabahan dari dua jurusan. Walaupun setelah melalui perjuangan sengit, Pemuda PRI dan Rombongan IX Pelopor BPRI terpaksa meninggalkan daerah tersebut. 82)

Markas BPRI yang semula bertempat di Pengambangan sekarang sudah berpindah ke Sampit. Di sini Merah Putih masih

P E T A
 PENYERANGAN 9. NOPEMBER 1945
 DI KOTA BANJARMASIN
 Skala 1:15.000



KETERANGAN

- : markas di pengambangan
- : route penyerangan pasukan darat
- - - : route penyerangan pasukan sungai
- : tangsi polisi / sekitar tempat peristiwa

Sumber
 Bapak M. Amin Effendi
 Bapak Sjahroel Eadlan

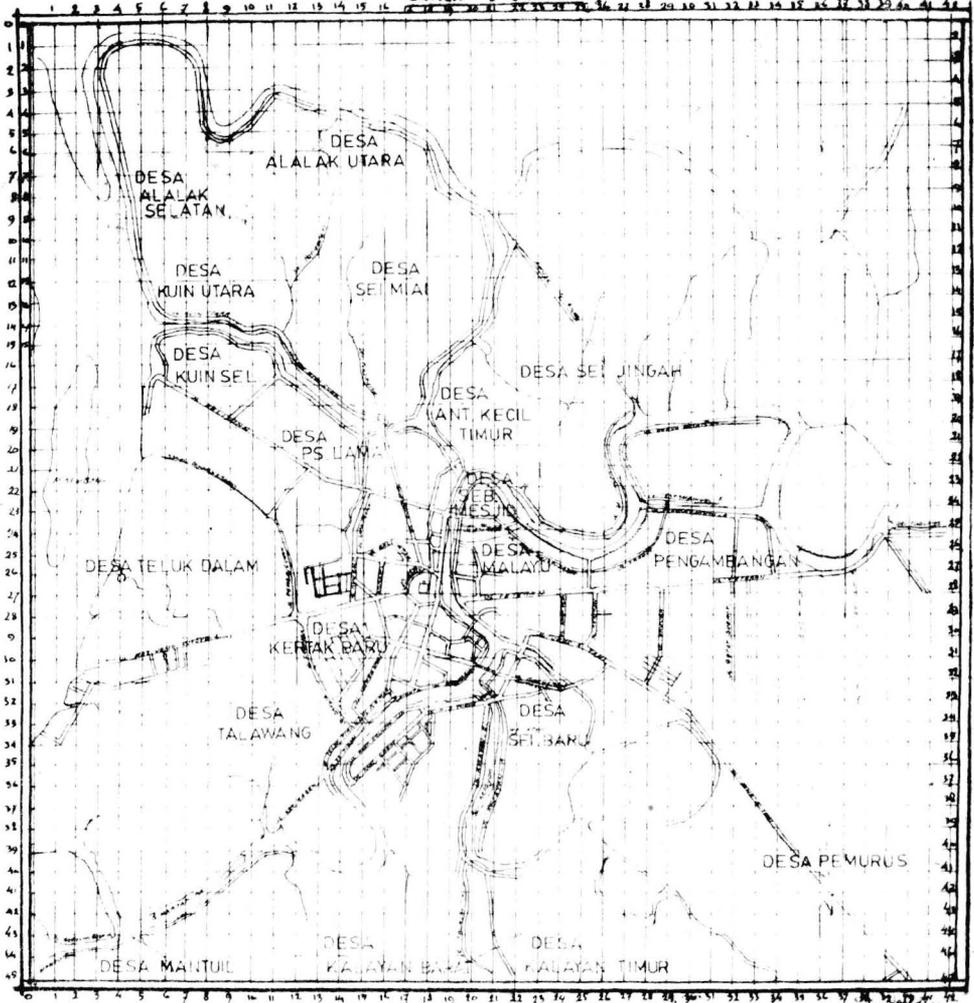
Sumber PEMDA Tingkat I KAL SEL

Tahun 1976

PETA KOTAMADYA BANJARMASIN



SKALA 1:30.000



berkibar. Hadhariah M juga pergi meninggalkan ibu kota Propinsi Kalimantan, menuju Hulu Sungai untuk terus ke Kalimantan Tenggara. Beberapa peristiwa yang terjadi di daerah Kalimantan Tenggara, dapat dikemukakan antara lain : Peristiwa penggempuran oleh NICA terhadap kota Pagatan pada tanggal 7 Februari 1946. Akibatnya banyak yang gugur dan Pagatan diduduki NICA. Sebenarnya daerah ini karena rakyat terkecoh ketika melihat kedatangan kapal berbendera Merah Putih, yang dikira kapal rombongan bantuan dari pulau Jawa, tapi ternyata kemudian terjadi penembakan terhadap rakyat yang menyambutnya, dan bendera Merah Putih tersebut ternyata kemudian mereka ganti dengan bendera Merah Putih Biru. ⁸³⁾

Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1946 Kotabaru diduduki tentara NICA, bahkan hampir tanpa perlawanan. Peristiwa ini menyebabkan Hadhariah M, Abdulkadir, M.Asnawi, Aminuddin dan Al Hamdi, meninggalkan Kotabaru kembali lagi ke Hulu Sungai. ⁸⁴⁾

Akhirnya pembersihan yang dilakukan NICA terus sampai ke daerah Sampit dan Kotawaringin. Pertempuran di sini terjadi antara NICA dengan tentara Ekspedisi dari Pemerintah R I yang dipimpin oleh Husin Hamzah dan Firmansyah. Kapal NICA yang berisi tentara pada waktu menuju Sampit Kotawaringin, telah dicegat oleh para pemuda di daerah Teluk Bogam di mana dipancangkan Merah Putih. Ketika motor boot yang ditumpangi tentara NICA menuju pantai, maka terdengarlah tembakan bren dan tembakan senapan lainnya dari para anggota ekspedisi. Empat puluh serdadu NICA tewas dalam peristiwa ini. Namun dalam pertempuran selanjutnya di daerah Sungai Rengas, Husin Hamzah telah gugur. Penggantinya sebagai pimpinan adalah Firmansyah yang mengambil kesimplan untuk kembali ke pulau Jawa. ⁸⁵⁾

Seperti telah disebutkan di muka bahwa pada tanggal 23 Agustus 1945 di Kandangan telah berdiri organisasi kelasykaran bernama GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia) di bawah pimpinan Hasnan Basuki, dengan segala kegiatan-kegiatannya pada masa awal revolusi Kemerdekaan di daerah itu. Kemudian pada sekitar akhir bulan Agustus 1945 itu pula di Kandangan berdiri lagi sebuah organisasi kelasykaran yang disebut *B P P K I* (Barisan Pelopor Pembenrontak Kalimantan Indonesia) di bawah pimpinan M.Yusi, H.Sibli Imansyah, Bihman Villa, Jantera, A.Kudusi dan H.Maki. ⁸⁶⁾ Gerakan kelasykaran ini meliputi daerah-

daerah Kandangan (termasuk daerah Rantau sekarang), Barabai, serta disebarluaskan sampai ke Amuntai dan Tanjung. Di Martapura berdiri juga B P P K I di bawah pimpinan Gusti Rusi, selaku perwakilan Gubernur Kalimantan. Pembentukan B P P K I Martapura ini berdasarkan instruksi Ir. Pangeran Muhammad Noor, Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Jogjakarta. Organisasi tersebut kemudian menggabungkan diri dengan B P P K I yang berpusat di Kandangan.⁸⁷⁾

Sementara itu di Birayang (ibu kota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah), setelah gagalnya perayaannya Pemerintahan R.I. Daerah Kalimantan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang lalu, maka oleh beberapa tokoh pergerakan di daerah itu didirikan sebuah organisasi kelasykaran bernama *GERPINDOM* (Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka). Gerakan itu dipimpin dan dipelopori oleh Abdurrahman Karim (A.R.Hakka), H.Aberani Sulaiman, Anwaruddin, H.Ruslan, Buseri Rantauan, Japeri Rantauan, Bunyamin Karym, H.Abdullah Rangas, Hairul Rangas, H.Rasydi Hawang, H.Bustani, Abulhasan Limbar, Akhmad Utut, Utuh Dabut, Saberan Effendi dan lain-lain. Sedangkan sebagai penasehat diangkat : H.Mukeri Umar, H.Akhmad Yahya, Supangat, Uria dan H. Iskandar.⁸⁸⁾

Demikian pula di Amuntai pada tanggal 20 Nopember 1945 berdiri juga organisasi kelasykaran yang bernama *GERPINDOM*, (yakni Gerakan Rakyat Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka). Gerakan tersebut dipimpin dan dipelopori oleh Abdulhamidhan, Yusni Antemas, M.Idris, Leweh, Arjan, Ruslan, Abdul Azis alias Tamjid, Abdul Kadir, Herman dan lain-lainnya.⁸⁹⁾ Anggota organisasi ini pada umumnya adalah bekas *Haiho* yang tersebar dari Banjarmasin sampai ke Barabai dan Tanjung. Setiap anggotanya diangkat dengan sumpah, yakni "menjunjung Al Qur'an dan membuat cap jempol dengan darah sendiri".⁹⁰⁾

Kegiatan-kegiatan organissi kelasykaran yang terbentuk hampir di seluruh daerah Kalimantan Selatan itu pada umumnya mempunyai tujuan "ingin merdeka, bebas dari penjajahan Belanda". Kegiatan-kegiatan itu seperti yang dilakukan oleh anggota-anggota BPPKI seperti mengadakan pembakaran-pembakaran di Kandangan dan Barabai. Tujuan aksi-aksi itu adalah untuk mengambil perhatian Belanda bahwa di daerah ini ada perlawanan.⁹¹⁾ Demikian

pula GERPINDOM yang ada di Amuntai telah melakukan sabotase-sabotase, antara lain membakar kapal Belanda yang membawa karet ke Banjarmasin, karena dengan penjualan karet tersebut dapat memungkinkan kuatnya perekonomian Belanda. 92)

Di samping organisasi-organisasi kelasykaran seperti yang telah disebutkan di atas, di daerah Kalimantan Selatan ini terdapat banyak lagi organisasi-organisasi kelasykaran yang didirikan/diprakarsai secara perorangan dan kemudian mendapat dukungan dari rakyat. Organisasi-organisasi ini ada yang didirikan oleh mereka yang sebelumnya tergabung dalam Badan-badan atau Kelasykaran-kelasykaran yang dibentuk di Pulau Jawa oleh tokoh-tokoh pendukung Gubernur Kalimantan Ir. Fangeran Muhammad Noor, atau didirikan oleh tokoh pejuang yang karena merasa bertanggung jawab terhadap bumi Ibu Pertiwi atau karena pada waktu itu selalu dikejar-kejar oleh Polisi NICA sehingga merasa tidak aman dan memutuskan untuk menyusun perlawanan terhadap NICA. Organisasi-organisasi yang tumbuh dari perorangan tersebut, antara lain :

1. Lasykar Saifullah

Organisasi ini dibentuk di sebuah desa bernama Haruyan, di bawah pimpinan Hassan Basri dan Gumberi Mansyah alias Atmawaty, pada tanggal 5 Mei 1946. Hassan Basry adalah seorang bekas anggota *PRIK* (Pemuda Republik Indonesia Kalimantan) di Surabaya, yang mendapat tugas (sukarela) dari Badan Pembantu Usaha Gubernur (BPOG) Kalimantan, untuk menyiapkan penyambutan ekspedisi militer ke Kalimantan. Hassan Basry berangkat dari Jawa menuju Kalimantan pada akhir bulan Oktober 1945. Lasykar Saifullah yang dibentuknya itu kemudian menjelma menjadi *Banteng Indonesia* yang dipimpin oleh H.M.Rusli, dan berpusat di Kandang an. 93)

2. **PETER** (Pembantu Tentara Republik). Organisasi ini didirikan di Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah pimpinan Abdul Hamid Rizal. 94)

3. Banteng Borneo

Organisasi kelasykaran ini didirikan di daerah Rantau oleh M.Hammy AM. Dalam perkembangan kemudian organisasi ini menggabungkan diri dengan *Lasykar Hisbullah*, suatu organisasi

kelasyakaran yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1945 di daerah Martapura. ⁹⁵⁾

4. M N 1001/M T K I

M N 1001 mempunyai pengertian Muhammad Noor (Gubernur Kalimantan), dengan 1001 macam usaha untuk merebut Kalimantan dari tangan penjajah. ⁹⁶⁾ Sedangkan M T K I adalah singkatan dari Menunggu Tentara Kemerdekaan Indonesia. ⁹⁷⁾

Organisasi kelasyakaran ini dibangun oleh Tjilik Riwut yang tiba di Banjarmasin dari Pulau Jawa pada bulan Februari 1946. Pembentukan organisasi tersebut dilakukan setelah anggota ekspedisi M N 1001 A. Mukran berhasil sampai di Banjarmasin, dan kemudian bersama Tjilik Riwut melakukan pembentukannya di daerah Tambak Kurau. Dari tempat itulah Tjilik Riwut kemudian mengadakan pembentukan markas-markas M N 1001 di daerah Kalimantan Selatan. Dan setelah Tjilik Riwut kembali lagi ke Jawa, Pimpinan Organisasi ini dipegang oleh A. Mukran. ⁹⁸⁾

Sebenarnya masih banyak lagi organisasi-organisasi kelasyakaran yang dibentuk oleh perorangan dalam rangka melawan tentara NICA yang hendak berkuasa kembali di daerah ini. Organisasi-organisasi tersebut telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit artinya bagi Republik ini.

Selanjutnya dalam rangka perjuangan mempertahankan Pemerintahan Republik Indonesia Daerah Kalimantan yang dikoordinir oleh BPOG dari Pulau Jawa, telah dibentuk pula satuan-satuan ekspedisi lintas laut, yang dikirimkan langsung dari BPOG di Jogjakarta untuk memperkuat dan memberi arah perjuangan menegakkan Indonesia. Ekspedisi-ekspedisi yang dari Jawa yang datang di Kalimantan Selatan itu adalah :

a). *Ekspedisi BPRI-9 Pelopor*

Ekspedisi ini berasal dari BPRI Surabaya yang dipromotori oleh Bung Tomo. Anggota rombongan ekspedisi ini berjumlah 9 orang, dipimpin oleh H. Akhmad Hasan dan Jaderi. Mereka berangkat dari Surabaya pada tanggal 7 Nopember 1945 melalui Panarukan, dan dengan kapal layar pada tanggal 18 Nopember 1945 ekspedisi ini berhasil mendarat di Samuda (Sampit). Selanjutnya rombongan

an ekspedisi melanjutkan perjalanan menuju Marabahan (Kalimantan Selatan). Dalam perjalanan itu disetiap tempat yang disinggahi dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Daerah setempat dengan acara penaikan bendera Merah Putih. Rombongan Ekspedisi BPRI-9 Pelopor ini pada tanggal 7 Desember 1945 di Marabahan terlibat pertempuran dengan tentara NICA. Peristiwa tersebut menyebabkan kehancuran rombongan ekspedisi, sementara sisa rombongan yang selamat berusaha kembali ke Pulau Jawa. 99)

b). *Ekspedisi Mustafa Idehan-A. Kadir Jailani*

Ekspedisi ini dipromotori oleh Ikatan Perjuangan Kalimantan (dikenal dengan perjuangan Sabilillah Kalimantan) di bawah pimpinan H. Gusti Abdul Muis. Rombongan ini berangkat dari Surabaya pada bulan Februari 1946 setelah mendapat restu dari Gubernur Kalimantan. Pada tanggal 7 April 1946 terlihat pertempuran melawan tentara NICA di Batakan. Dalam pertempuran itu gugur 4 orang anggota rombongan, antara lain Abdul Kadir Jailani sendiri. Sisanya sebagian kembali ke Pulau Jawa dan sebagian lagi membentuk pasukan baru di bawah pimpinan Ijuh Akhmad. Tetapi pasukan ini akhirnya dapat dihancurkan pula oleh tentara Belanda. 100)

c). *Ekspedisi M N 1001 pimpinan Mayor Tjilik Riwut*

Rombongan ekspedisi ini terdiri atas : Tjilik Riwut, A. Mukran, Reynot Sylvanus, Willem Batu, Nazaruddin, M. Saleh Abdis, H. Darham Hidayat dan Hamdi Gafar. Ekspedisi dilaksanakan atas perintah Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Jogjakarta. Bersama-sama dengan rombongan Husin Hamzah/Firmansyah, rombongan ini pada tanggal 10 Januari 1946 tiba di Pekalongan, dan berangkat ke Tegal pada tanggal 4 Februari 1946. Kalau rombongan Husin Hamzah - Firmansyah pada tanggal 4 Februari 1946 itu juga terus berlayar menuju Kalimantan, dan pada tanggal 17 Februari 1946 tiba secara menyebar di Kalimantan Barat Daya, maka pada waktu itu Rombongan M N 1001 terpaksa tertunda keberangkatannya. Rombongan itu kemudian kembali lagi ke pelabuhan an Pekalongan. Dan dari sanalah kemudian ekspedisi ini diberangkatkan ke Pulau Kalimantan. Setibanya di Sampit (Kotawaringin) pada bulan Februari 1946 itu juga, rombongan kemudian terpecah

menjadi dua. Kelompok Nazaruddin, M.Saleh Abdis, H.Darham Hidayat dan Hamdi Gafar menggabung kepada rombongan Husin Hamzah. Sedangkan yang lainnya segera mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Daerah Kotawaringin di bawah pimpinan Reynot Silvanus. Setelah mendapat serangan NICA, R.Silvanus menggabung kepada rombongan Husin Hamzah, sedangkan Willem Batu telah gugur dalam pertempuran. Sementara itu Tjilik Riwut dan A.Mukran berusaha melarikan diri hingga sampai ke Kasungan, kota kelahiran Tjilik Riwut dan A.Mukran berusaha melarikan diri hingga sampai ke Kasungan, kota kelahiran Tjilik Riwut. A.Mukran dengan dibantu Norman Atak terus berusaha melanjutkan perjalanan hingga berhasil sampai di Banjarmasin. Setelah itu baru disusul oleh Tjilik Riwut, yang kemudian bertempat di daerah Tambak Kurau membentuk organisasi kelasykaran bernama M N 1001/ M T K I 101)

Selain dari ekspedisi Husin Hamzah-Firmansyah dengan anggota yang berjumlah 96 orang, yang dikirim oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tiba di Kalimantan Barat Daya pada tanggal 17 Februari 1946 itu, sebenarnya lebih dahulu dari itu sudah ada ekspedisi resmi yang dikirimkan oleh Pemerintah R I ke daerah Kalimantan Barat. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Rahadi Usman dengan 43 orang pemuda Kalimantan Barat. Rombongan ini berangkat pada tanggal 23 Nopember 1945, dan pada tanggal 30 Nopember 1945 sebagian dari rombongan ada yang mendarat di Sungai Sirih (20 Km dari Katapang). Setelah terjadi beberapa kali pertempuran dengan NICA, yang berakhir dengan gugurnya Rahadi Usman sendiri, maka sebagian dari anggotanya ada yang kembali ke Jawa ada pula yang terus melakukan gerilya di hutan-hutan. 102)

Di samping ekspedisi-ekspedisi yang langsung menuju daerah Kalimantan Selatan, seperti : Ekspedisi BPRI-9 Pelopor, Ekspedisi Mustafa Ideham; atau yang menuju ke daerah Kalimantan Tengah tetapi sampai juga ke daerah Kalimantan Selatan, seperti Ekspedisi M N 1001, atau juga ekspedisi-ekspedisi yang menuju daerah Kalimantan Barat seperti Ekspedisi Rahadi Usman dan Ekspedisi Husin Hamzah, maka banyak lagi ekspedisi-ekspedisi lain, baik yang dilakukan secara perorangan dengan menumpang kapal layar dagang atau oleh beberapa orang pemuda atas kemauan sendiri dan sekedar mendapat izin/restu dari Gubernur Kalimantan atau B P O G yang

ada di Jawa. Ekspedisi-ekspedisi itu antara lain :

- Ekspedisi Hassan Basry dari Surabaya, mendarat di Banjarmasin pada tanggal 18 November 1945.
- Ekspedisi Kapten Mulyono dari PMC / TRI-Fr. Ekspedisi yang pertama tiba di Kuala Pembuang pada tanggal 1 Januari 1946 dengan anggota sebanyak 10 orang. Kemudian ekspedisi kedua dengan jumlah anggota yang sama yakni 10 orang, juga tiba di Kuala Pembuang dan terus ke Kalimantan Selatan pada tanggal 4 April 1946.
- Ekspedisi Jon A/Rahasia dari ALRI D-4 dari Jatim dibawah pimpinan Letnan Asli Zuhri tiba di Batakan pada tanggal 10 Oktober 1946. Ekspedisi Letnan Asli Zuhri yang kedua juga mendarat di daerah Batakan pada tanggal 17 Agustus 1947.
- Ekspedisi-ekspedisi lainnya dapat disebutkan antara lain : Ekspedisi Alwi, Rusli, Asli Nor, Kapten Dumai Agam, Syukur Rahim, Letkol N. Sumardi, Dhomber, dan lain-lain.
- Selain itu ada ekspedisi-ekspedisi yang gagal karena disergap oleh patroli-patroli Angkatan Laut Belanda atau tidak berhasil menuju arah Kalimantan Selatan, antara lain : Ekspedisi A. Zaidi, Gt.Hilmi (dari ALRI), A.Hamid dari Sabilillah, Gt. Berahim, dan lain-lain. 103)

Ekspedisi-ekspedisi tersebut sesuai dengan misisonnya apabila berhasil sampai di daerah tujuan segera menghubungi Badan-badan Perjuangan yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Ekspedisi yang bertujuan memperkuat perjuangan di daerah yang umumnya merupakan tempat kelahiran para anggota rombongan setiap ekspedisi ini, dilakukan atas kesadaran dan tanggung jawab, tekad dan ketabahan dengan mempertaruhkan jiwa raga selama berada di perahu mengarungi lautan sambil menghindari pengejaran Patroli-patroli Angkatan Laut Belanda.

Demikianlah ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan atas kebijaksanaan Gubernur Kalimantan dengan BOPG nya yang berkedudukan di Jogjakarta, sekaligus adanya kesadaran dan kesediaan berkorban para pemuda asal Kalimantan pada umumnya yang berada di Pulau Jawa waktu itu, besar sekali peranannya dalam menambah dorongan, memperkuat dan melengkapi kegiatan-kegiatan perjuangan di daerah ini. Semua organisasi-organisasi kelasykaran yang ada

di Kalimantan Selatan pada waktu itu, baik yang lahir dari prakarsa tokoh-tokoh rakyat di daerah ini atau yang lahir dari hasil ekspedisi yang datang dari Pulau Jawa, semua organisasi-organisasi itu kemudian dikoordinir dalam satu batalyon Rahasia (A) ALRI Div.IV Pertahanan Kalimantan yang berkedudukan di Tabat-Haruyan (Hulu Sungai Tengah), dengan Komandan Batalyon Hassan Basry bekas pimpinan Banteng Indonesia dan diberikan pangkat Kapten (L) oleh Markas Besar Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan. 104) Peresmian berdirinya Batalyon Rahasia ALRI Div.IV itu dilangsungkan pada tanggal 18 Nopember 1946. Penanda tangan pembentukan Batalyon Rahasia tersebut dilakukan oleh Letnan dua A.Asli Zuhri sebagai wakil Markas Besar ALRI Divisi IV dan Komandan Batalyon Kapten Hassan Basry, disaksikan oleh Letnan Muda M. Mursid, H. M. Rusli, Hasnan Basuki, Ma'rufi Utir, Bidin (Setia Budi), dan lain-lain.

Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan itu sendiri adalah sebuah Divisi Angkatan Laut Indonesia yang pembentukannya dilakukan atas dasar usul Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) dalam Kongresnya di Surabaya melalui Gubernur Kalimantan kepada Markas Besar ALRI di Lawang. Melalui Ketua Umum IPK.H.Gusti Abdul Muis, yang ditunjuk sebagai formatur oleh Markas Besar ALRI Lawang dengan mendapat saran dari Gubernur Kalimantan, maka dibentuklah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan dengan Panglimanya Let.Kol.Zakaria Madun dan Kepala Staf Mayor Firmansyah. Pelantikan Div.IV ALRI Pertahanan Kalimantan dilantik pada tanggal 4 April 1946 bertempat di Palace Hotel Malang.

Selanjutnya pada bulan Oktober-Nopember 1946 oleh Markas Besar Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan yang berkedudukan di Mojokerto, seperti yang direncanakan oleh Kepala Bagian I dan Kepala Bagian Ketenteraan, yakni Kapten A.Zaidi dan Kapten Anang Peter Pasha dibentuk 4 Batalyon Rahasia, terdiri atas :

1. Batalyon Rahasia ALRI Div.IV (A), berkedudukan di Kalimantan Selatan, dengan Komandan Batalyon Hassan Basry;
2. Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (B), berkedudukan di Kalimantan Barat dengan komandannya Dr.Soeharto;
3. Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (C), berkedudukan di Ka-

- limantan Timur dengan komandan Batalyon Kasmani;
4. Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (D) yang berkedudukan di daerah Riau. 105)

2. Perjuangan politik dan partisipasi rakyat

Seperti telah disinggung di muka bahwa P R I (Persatuan Rakyat Indonesia) mempunyai peranan yang besar pada awal Revolusi Kemerdekaan di daerah Kalimantan Selatan ini. Organisasi inilah yang memelopori pembentukan K N I Daerah Kalimantan, dan berusaha para pemudanya merencanakan penaikan bendera di muka Gubernur sebagai tanda berdirinya Pemerintahan R I Daerah Kalimantan. Kegagalan peristiwa 10 Oktober 1945 yang disusul dengan insiden 9 Nopember 1945, di mana tokoh-tokoh pimpinan P R I terlibat di dalamnya, merupakan masa-masa akhir dari organisasi ini. Tokoh-tokoh pimpinan P R I seperti A. Ruslan dan Hahdhariah M. terpaksa menghindarkan diri ke pedalaman untuk menghindari penangkapan polisi NICA.

Demikianlah kekosongan perjuangan melalui bidang politik menjelang awal tahun 1946 telah dirasakan oleh pemuka masyarakat pada waktu itu. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan bahwa dirasa perlu adanya perjuangan politik yang bersifat legal, di samping perjuangan militer yang bersifat illegal, maka tanggal 19 Januari 1946 oleh dr.D.S.Diapari, A.A.Rivai, A.Sinaga dan kawan-kawan lainnya yang sepaham dibentuk sebuah organisasi politik bernama S K I (Serikat Kerakyatan Indonesia). Organisasi ini dinyatakan sebagai lanjutan dari P R I, dengan tujuan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui perjuangan parlementer. 106) Melihat dari tujuannya maka S K I merupakan wadah perjuangan orang-orang *Republikein* di daerah Kalimantan Selatan, yang dalam masa-masa perjuangan di daerah ini telah menyebabkan gagalnya idee federalisme van Mook dalam usahanya mendirikan Negara Kalimantan. 107)

S K I dalam perjuangannya telah bekerja bahu membahu dengan sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh tokoh *Republikein* yang berasal dari golongan agama. Gagasan pembentukan organisasi politik yang bersifat keagamaan ini sebagai reaksi dari usaha-usaha Pemerintahan NICA yang hendak memecah belah gerak-

an nasionalisme dengan mempergunakan agama. Sehubungan dengan itulah pada tanggal 8 Desember 1946 berdiri pula di daerah ini sebuah organisasi politik dengan nama *SERMI* (Serikat Muslimin Indonesia).¹⁰³)

Badan Koordinasi yang kemudian terbentuk antara S K I dan *SERMI* dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menentang idee federalisme van Mook mempunyai kesepakatan untuk menjalankan taktik perjuangan, ikut dalam Dewan Banjar yang dibentuk oleh van Mook, untuk berusaha secara parlementer menggagalkan rencana pembentukan Negara Bagian Kalimantan. Siasat ini di rasa perlu ditempuh karena Belanda telah berhasil menarik Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin yang juga memegang jabatan Ketua *SERMI* dan dengan bantuan Belanda pada tanggal 2 Juli 1947 membentuk organisasi baru bernama S R I (Serikat Rakyat Islam).¹⁰⁹)

Demikianlah ketika Dewan Banjar akan dibentuk juga oleh Belanda, Badan Koordinasi S K I *SERMI* menganggap bahwa satu-satunya jalan yang menguntungkan ialah bersikap pro sambil berjuang secara legal. Cara ini ditempuh karena dengan dukungan partai S R I pemerintahan NICA seolah-olah telah mendapatkan persetujuan rakyat untuk pembentukan Dewan Banjar tersebut.¹¹⁰) Sebagai seorang aktifis S K I pada waktu itu A.Sinaga menerangkan bahwa dukungan dan kesediaan ikut serta dalam pembentukan Dewan Banjar tersebut dilakukan atas dasar keyakinan bahwa melalui Dewan itu mereka akan dapat menggagalkan atau setidaknya membelokkan apa yang menjadi tujuan Belanda. Persetujuan itu diberikan setelah cukup pertimbangan dan perhitungan. Bahkan A.Sinaga, A.A.Rivai dan E.S.Handoeran sebagai orang-orang Republikain di daerah ini telah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Siasat dan syarat yang akan diperjuangkan oleh Badan Koordinasi S K I - *SERMI* dengan ikut serta menyusun peraturan pemilihan, akan menyebabkan Dewan tersebut lebih akan menguntungkan perjuangan Republikain. Atas dasar keyakinan bahwa siasat dan syarat ini akan berhasil diperjuangkan maka Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta yang menerima utusan Badan Koordinasi S K I - *SERMI* waktu itu menganjurkan : " bentuklah Dewan itu dan sedapat mungkin peraturan pemilihan harus diperjuangkan, agar partai turut menyusunya.¹¹¹)

Dan rakyat Kalimantan Selatan berbangga hati bahwa Dewan Banjar yang dibentuk dengan beslit tanggal 14-1-1948 No.14 dan beslit tambahan tanggal 24 Juni 1948 No. 2 stbl. 1948 No. 124 yang anggota-anggotanya dilantik tanggal 3 Juli 1948 di *Societeit de Kapel Banjarmasin*(sekarang ex Gedung R R I) itu, ternyata berkat kesatuan antara mereka yang berjuang dalam bidang politik dan militer, ternyata gagal mewujudkan Negara Kalimantan. Demikianlah ketika golongan Republikein dalam Dewan telah kehilangan kekuatannya, sehingga idee federalisme van Mook akan terwujud, maka golongan militer yang tergabung dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan telah berhasil menunda-nunda pelaksanaannya dengan melakukan penculikan dan ancaman-ancaman terhadap setiap anggota Dewan yang berusaha melaksanakan putusannya. Tindakan golongan militer ini menyebabkan para anggota Dewan pada umumnya bersikap pasif. Keadaan tersebut berlangsung sampai dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar, yang kemudian diikuti dengan penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia. 112).

4.2. Partisipasi masyarakat

Masa Revolusi merupakan masa persatuan yang tumbuh ikhlas di hati masyarakat pada umumnya. Perasaan yang sama, seperti gandrung akan kemerdekaan, *heroik-isme* yang meluap-luap di samping sadar akan beratnya tugas para gerilyawan yang selalu diburu maut, telah meruntuhkan "keakuan" sebagai seorang putera Indonesia pada masa-masa Revolusi Fisik tersebut.

Partisipasi rakyat yang lahir atas kesadaran yang mampu merasakan besar dan beratnya pengorbanan pemuda-pemuda kita tersebut, umumnya tergambar dari senantiasa adanya kesediaan penduduk menerima pejuang-pejuang yang datang kekediaman atau ke desa mereka. Rakyat desa yang penuh kesederhanaan dan berkekurangan itu selalu menyediakan diri bersedia memberikan apa yang mampu mereka berikan.

Banyak peristiwa yang menggambarkan besarnya kesatuan antara rakyat dan pejuang pada masa revolusi tersebut. Tokoh-tokoh rakyat yang dikejar-kejar polisi *NICA*, umumnya dibela sepuhnya oleh rakyat di mana saja mereka berada. Banyak ceritera-

ceritera dari para pejuang yang menggambarkan kesukadukaan mereka pada masa perjuangan tersebut, sementara setiap orang yang ditemui serasa saudara sependeritaan. Pejuang yang dalam perjalanannya singgah di suatu desa, dirahasiakan demi keselamatannya, disediakan makanan, diizinkan mengisap dengan senang hati, dan lain sebagainya. 113)

Apabila rakyat mengetahui bahwa yang mereka terima sebagai tamu tersebut adalah "orang penting" dalam perjuangan, si ayah dan si ibu umumnya rela menyerahkan/menugaskan puteranya apakah sebagai penunjuk jalan, apakah sebagai *tukang kayuh* perahu untuk mengantarkan orang penting tersebut ke tempat tujuan, semamata sebagai tanda keikutsertaan dalam revolusi ini. 114)

Di Kalimantan Selatan kepalangmerahan pada zaman revolusi dikenal secara sederhana. Dengan dua atau 3 orang pejuang yang sebelumnya pernah menjadi mantri/perawat Rumah Sakit, dan dengan obat-obat sumbangan/kiriman dari kota, jadilah satu Palang Merah yang siap mengikuti satuan gerilya yang berjuang mengusir Belanda.

Segalanya berlangsung dengan kesederhanaan dan keterbatasan. Dan perlu pula dikemukakan bahwa alam dan tumbuhan di hutan tempat para pemuda bergerilya umumnya menyediakan obat-obatan tradisionil yang cukup memadai. Mereka yang terluka atau terpisah dari pasukannya dalam suatu insiden adalah kewajiban penduduk untuk merawatnya.

Di markas-markas para gerilyawan, hanya dikenal istilah dapur umum secara sederhana. Dengan 2 atau 3 orang laki-laki yang rajin dan penuh kesetiaan, makanan para pemuda tersedia setiap hari dengan segala kesederhanaannya. Untunglah untuk setiap keperluan pokok gerilyawan, telah mengalir bantuan dari kota. Para pedagang dan pengusaha bangsa Indonesia, Cina dan Arab secara sembunyi-sembunyi menyampaikan keperluan anak-anak revolusi ini dalam kegiatan perjuangannya menempuh perjalanan yang cukup jauh, maka dimana mereka tiba dan melapor pada salah satu Markas Pangkalan, dan begitu penduduk mengetahui kedatangan mereka, berdatanganlah beras, ikan dan lauk pauk kiriman rakyat untuk dimasak guna menyuguhi pejuang-pejuang ini. 115)

Demikianlah revolusi berjalan, karena ia dilaksanakan dan

didukung oleh rakyat. Revolusi milik rakyat karena itu segala-galanya tentu berasal dari rakyat.

CATATAN :

1. Syarifuddin, *Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kal.Sel, Priode 1945-17 Agustus 1950*, Tesis, FKG Unlam, Banjarmasin, 1974, hal. 87.
2. *Ibid*, hal. 326.
3. *Ibid*, hal. 87.
4. *Ibid*, hal. 94.
5. Hasil wawancara dengan H.M.Yakub Amin.
6. Hasil wawancara dengan A.A.Hamidhan.
7. Hasil wawancara dengan A.A.Hamidhan.
8. Kodam X/LM *Membangun*, Penerbit Kodam X/LM, Banjarmasin 1962, hal. 456.
9. H. Ramli Nawawi, *Dewan Banjar*, Skripsi, FKg Unlam Banjarmasin 1972, hal. 3.
10. Kodam X/LM, *Op.cit*, hal. 456.
11. *Loc.Cit*.
12. Hasil wawancara dengan P. Arya.
13. H.Ramli Nawawi, *Op,cit*, hal. 3.
14. *Borneo Simboen*, No.851, 26 Gatsoe 2605.
15. Hasil wawancara dengan A.A.Hamidhan.
16. Hasan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan*, Jajasan Lektur LM Banjarmasin, 1961, hal.8.
17. *Borneo Simboen* No. 324, 21 Desember 2603 (1942).
18. Hasil wawancara dengan A.A.Hamidhan.
19. H.M.Yakub Amin, *Nostalgia Proklamasi Kemerdekaan R.I.*, tgl 14 Agustus 1979.
20. Hasil wawancara dengan P. Arya.
21. Sartono K., *Sejarah Indoensia VI Dep.P dan K Jakarta*, 1977, hal.31.
22. Hasan Basry, *Op,cit*, hal.11.
23. Hasil wawancara dengan P. Arya.
24. Hasil wawancara dengan Lamberi Bustani.
25. Lihat lampiran.

26. Hasan Basry, *Op.cit*, hal.12.
27. Sartono K. *Op.cit*, hal.32.
28. Sem Dam X/LAM, *Sejarah Singkat Kodam X/LAM, Waja Sampai Kaputing*, hal. 17.
29. Hasan Basry, *Op.cit*, hal.12.
30. Hasil wawancara dengan P.Arya.
31. Lihat lampiran.
32. Hasan Basry, *Op.cit*, hal 15.
33. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.96.
34. Hasan Basry, *Op.cit*, hal.16.
35. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.98.
36. H.A.H.Budhigawis, *Laporan Perjuangan dari Munggu Raya, Martapura*, 1968, hal.3.
37. Hasil wawancara dengan Gt. Aman, hal. 19.
38. Hasil wawancara dengan M.Amin Effendi.
39. Hasil wawancara dengan H. Salman,
40. Hasil wawancara dengan M.Muhni.
41. Hasil wawancara dengan H.M.Zaini Yusuf.
42. Syarifuddin, *Op.cit*. hal.109.
43. Hasil wawancara dengan A.A.Hamidhan.
44. *Loc.cit*.
45. Syarifuddin, *Op.cit*. hal.98.
46. Hassan Basry, *Op.cit*. hal.18.
47. *Loc.cit*.
48. Syarifuddin, *Op.cit*. hal. 87.
49. Hasil wawancara dengan H.M.Yakub Amin.
50. Hassan Basry, *Op.cit*. hal.18.
51. Hasil wawancara dengan M.Amin Effendi.
52. Syarifuddin, *Op.cit*., hal.100.
53. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.19.
54. Hasil wawancara dengan M.Zaini Yusuf.
55. Hasil wawancara dengan H.Salman.

56. *Hasil wawancara* dengan Yusni Antemas.
57. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.19.
58. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.100.
59. H.Ramli Nawawi, *Op.cit*, hal.9.
60. Sem Dam X/Lam, *Op.cit*, hal.14.
61. *Loc.cit*.
62. Gt.Aman, *Route Gerilya*, sebuah paper, hal.19.
63. Hassan Basry, *Op.cit*. hal.23.
64. *Hasil wawancara* dengan M.Amin Effendi.
65. M.Amin Effendi, *Cukilan Riwayat Pemberontakan 9 Nopember 45 di Banjarmasin*, sebuah uraian/pidato sambutan.
66. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.23.
67. *Loc.cit*.
68. Semdam X/LAM, *Op.cit*, hal.18.
69. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.23.
70. Kodam X/LAM membangun, *Op.cit*, hal.458.
71. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.105.
72. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.30.
73. M.Amin Effendi, *Op.cit*,
74. Semdam X/Lam, *Op.cit*, hal.19.
75. *Loc.cit*.
76. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.108.
77. *Loc.cit*.
78. *Ibid*, hal.107.
79. Sem Dam X/Lam, *Op.cit*, hal.19.
80. *Loc.cit*.
81. *Hasil wawancara* dengan M.Amin Effendi.
82. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.33.
83. *Loc.cit*.
84. *Loc.cit*.
85. *Ibid*, hal.36.
86. *Ibid*, hal.23.

87. *Loc.cit.*
88. *Ibid*, hal.29.
89. *Loc.cit.*
90. *Hasil wawancara* dengan Yusni Antemas.
91. *Hasil wawancara* dengan H.Salman.
92. *Hasil wawancara* dengan Yusni Antemas.
93. Hasan Basry, *Op.cit*, hal.86.
94. *Ibid*, hal.79.
95. *Loc.cit.*
96. *Ibid*, hal.48.
97. *Hasil wawancara* dengan Lamberi Bustani.
98. Hasan Basry, *Op.cit*, hal.49.
99. *Ibid*, hal.44.
100. *Loc.cit.*
101. *Ibid*, hal.44.
103. Semdam X/LAM, *Op.cit*,hal.21.
104. Gt.Aman, *Route Gerilya*.
105. Hassan Basry, *Op.cit*, hal.93.
106. Kementerian R.I. *Kepartaian Indonesia*, Pepora 8, hal.230.
107. H. Ramli Nawawi, *Op.cit*, hal.51.
108. *Ibid*, hal.25.
109. *Ibid*, hal.27.
110. *Ibid*, hal.72.
111. *Ibid*, hal.34.
112. *Ibid*, hal. 83.
113. *Hasil wawancara* dengan Lamberi Bustani.
114. Sebuah paper "*Markas Besar Alam Roh*", anonim, hal.18.
115. *Hasil wawancara* dengan P. Arya.

BAB IV

PERJUANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I

Politik Belanda sebagai negara kolonial bertujuan untuk menjajah Indonesia selama-lamanya. Untuk mencapai tujuan itu pemerintah Belanda menggunakan siasat, "*divi de et empera*" atau *verdeel enheers* yang berarti memecah belah untuk tetap berkuasa dan sikap tidak mempercayai bumi putera memegang senjata. ¹⁾

Untuk melaksanakan tujuan ini Belanda melakukan beberapa kali konferensi yang dihadiri oleh daerah-daerah dengan tujuan untuk melahirkan negara-negara bagian seperti Konferensi Malino 16-12 Juli 1946, Konferensi Denpasar 18-24 Desember 1946, Konferensi golongan peranakan Cina, Arab dan Belanda di Pangkal Pinang 1-12 Oktober 1946. ²⁾

Konsepsi negara Borneo lahir dari Konferensi Malino. Konsepsi tata negara Borneo terdapat pada pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut :

Permoesyawaratan di Malino berpendapat bahwa federatie jang akan dibentoeek oentoeek seloeroeh Indonesia haroes terdiri dari empat bagian jaitoe, Djawa, Soematera, Borneo dan Timoer Besar dengan djandji, bahwa berhoeboeng dengan kepoetoesan² didaerah jang bersangkoetan dan dengan mandat wakil-wakilnya, nanti lebih landjoet akan dibitjarakan tentang :

- a). Penggaboengan Kepoelauan Soenda Ketjil dengan Timoer Besar Ataoe pembentoeekan dalam kepoelaoean Soenda Ketjil dari Satoe ataoe lebih dari federatie (negara²).
- b). Penggaboengan zelfbestuur² di Borneo Timoer dengan Borneo.

memperingatkan bahwa Bangka, Belliton dan Riow dalam menoennggoe kemoengkinan penggaboengan dengan Soematera akan diatoer sebagai daerah-daerah autonoom yang berdiri sendiri (zelfbestuurdige autonome rasorten) dan mende-sak soepaja daerah jang pendoedoeknja hingga perhatian kepingtingan² pendoedoek itoe terdjamin dan kekoerangan dalam hal ketjerdasan itoe selekas moengkin dihilangkan. ³⁾

Konferensi ini menjadi dasar bagi Pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan negara-negara bagian sebagai siasat untuk mendiskreditkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan secara berangsur-angsur akan menghapuskan Republik Indonesia. Dekrit yang dikeluarkan oleh Dr.H.J.van Mook sebagai Gubernur Jenderal berturut-turut melahirkan Negara Sumatera Timur (25 Desember 1947) dengan Dr.Mansyur sebagai Wali Negeranya, Negara Madura (20 Februari 1948) dengan Tjakraningrat sebagai Kepala Negara, Negara Pasundan dengan Wiranatakusuma sebagai Wali Negara (24 April 1948), Negara Sumatera Selatan dengan wali negeranya Abdul Malik (30 Agustus 1948), Negara Jawa Timurr dengan Kusomo Ngoro sebagai kepala Negara (26 Nopember 1948).

Tokoh-tokoh pejuang Kalimantan Selatan dihadapkan dengan suatu kenyataan bahwa pemerintah Nica-Belanda telah mempunyai kekuatan yang diperlihatkannya dengan penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh pejuang tersebut. Pada waktu itu pemimpin-pemimpin di Kalimantan dihadapkan dengan 4 macam alternatif :

- a). mereka yang berjiwa Republikan dan sama sekali tidak dapat menerima kedatangan *Nica*-Belanda kembali menjajah, dipersilahkan untuk evakuasi ke daerah Republik Indonesia di Jogya.
- b). mereka yang dapat menerima baik kedatangan Belanda kembali dipersilahkan tinggal menetap atau bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda *NICA*.
- c). mereka yang mau berjuang secara legal dan parlementer dipersilahkan dan sudah barang tentu sepanjang ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah Belanda. Tokoh pemimpin yang memilih jalan legal seperti ini diperbolehkan membentuk partai politik.
- d). mereka yang menentang dan tidak dapat menerima segala cara yang tersebut di atas tidak ada pilihan kecuali ditangkap, dipenjarakan atau terpaksa memilih lari ke hutan bergerak bergerilya, yang oleh pemerintah Belanda dikenal sebagai *extremis* ⁴⁾

Dengan situasi demikian maka perjuangan di Kalimantan Selatan mengenal bentuk perjuangan secara legal atau parlementer dan perjuangan secara illegal yang bergerak bergerilya di hutan-hutan.

Yang memilih perjuangan secara legal dan parlementer segera membentuk partai-partai politik yaitu : Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Serikat Muslimin Indonesia (SERMI), Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI).

Tokoh pemimpin yang memilih berjuang secara *illegal* bergelora di hutan-hutan segera membentuk organisasi perjuangan atau kelasykaran, seperti BPRIK (Barisan Pemuda Republik Indonesia Kalimantan), Gerpindom Amuntai (Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka), TRI (Tentara Kebangsaan Indonesia) merupakan penyusunan dari Jawa yang dibawa oleh Dr. Soenardi Letkol TRI, berkembang di Ampah dan Kelua, Germeri (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia di Kandangan, Lasykar Syaifullah di Haruyan yang dipimpin oleh Hassan Basry, Banteng Indonesia di Kandangan, Peter (Pembantu Tentara Republik) di Negara, Benteng Borneo di Rantau, MN-1001, D-21. ⁵⁾

Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di Kalimantan Selatan ternyata bahwa perjuangan *legal* selalu berhubungan dan bekerja sama dengan gerakan *illegal* yang bergerilya, sehingga perjuangan selalu searah dan sejalan. ⁶⁾ Dengan lahirnya kekuatan perjuangan yang legal dan *illegal* ini maka arena perjuangan di Kalimantan Selatan khususnya menjadi hangat dan berkobar-kobar.

Organisasi kelasykaran ini kemudian terhimpun menjadi satu kekuatan yang diberi nama Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan sebagai bagian dari ALRI Divisi IV yang bermarkas besar di Mojokerto Jawa Timur. Markas Besar ALRI Divisi IV ini dibentuk di Hotel Place Malang dan pelantikannya dilakukan oleh Komodor M. Nazir. ALRI Divisi IV (A) Kalimantan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Zakaria Madun. ⁷⁾

Letnan Satu Asli Zuhri yang mewakili Markas Besar ALRI Divisi IV di Mojokerto yang sudah berada dan berkumpul dengan pejuang bersenjata di Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Nopember 1946 mengadakan pertemuan di Tabat Haruyan Hulu Sungai Tengah. Dalam pertemuan itu hadir antara lain tokoh-tokoh pejuang gerilya : Hassan Basry, H.M. Rusli (alm), Hasnan Basuki, Marufi Utir, Salman Bidinsyah alias Setia Budhi, Gazali Ahim, Ibas S, dan lain-lain. Di dalam pertemuan inilah Lts Asli Zuhri menguraikan tentang maksud missinya ialah untuk membentuk kesatuan ALRI di Kali-

mantan, dengan Markas Besarnya di Mojokerto dengan pimpinan Let.Kol Zakaria Madun.

Setelah semua rampung dan sepakat ditetapkan sebagai berikut :

- a). Organisasi ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan di susun dengan tingkat kesatuannya Batalyon, disebut Gerakan Rahasia ALRI Div.IV (A) Pertahanan Kalimantan. Komandan Batalyon Hassan Basry, bekas pimpinan Lasykar Syaifullah, sedang anggota bekas Lasykar Syaifullah ini menjadi intinya.
- b). Kedudukan resmi Batalyon Rahasia ALRI Div.IV (A). Pertahanan Kalimantan ini adalah Kandang.
- c). Let. Asli Zuhri dan Letda Mursyid meresmikan dan melantiknya dan disebutkan dalam Anggaran Dasarnya dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan perjuangan ini.⁸⁾

Jadi secara organik ketentaraan ALRI Div IV (A) Pertahanan Kalimantan ini berdiri dan diresmikan pada tanggal 18 Nopember 1946.

Gerpindom yang dipimpin oleh H. Aberani Sulaiman, Banteng Borneo yang dipimpin oleh M.HammyAM, Badan Pemberontakan Indonesia yang dipimpin oleh Hamdi Budhigawis mengabung dan melebur organisasinya ke dalam Gerakan Rahasia ALRI Div.IV (A) Pertahanan Kalimantan. Organisasinya telah lebih dahulu menggabungkan ke dalam kesatuan perjuangan ini.

Situasi gerakan gerilya menjelang aksi Militer I di Jawa, telah mempunyai kekuatan dan kesatuan yang kokoh. Seluruh kesatuan kelasykaran telah menggabungkan diri kecuali MTKI yang pada tahun 1947 belum menggabungkan dan belum melebur organisasinya.

Perjuangan *legal* melewati Partai-Partai Politik ternyata mempunyai garis yang sama dengan perjuangan *illegal*. Partai Politik yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan berusaha untuk menggabungkan dengan pemerintah Republik Indonesia di Jogja adalah S.K.I (Serikat Kerakyatan Indonesia) di bawah pimpinan dr. Diapari, A. Sinaga, A.A.Rivai menolak segala aktivitas pemerintah Belanda untuk membentuk negara Borneo. SKI pernah mengutus

A.A.Rivai/A.Sinaga dan F.S.Handuran ke Jogja untuk menyokong dan menyatakan tetap berdiri di belakang pemerintah RI di Jogja. 9)

Suatu semangat yang bergelora dengan berlangsungnya Kongres Pemuda di Kandangan tanggal 17 Maret 1947 melahirkan Gabungan Pemuda Pemuda Indonesia Kalimantan (GAPPIKA). Kongres ini dipimpin oleh tokoh-tokoh H.M.Rusli (alm), Basri, merupakan kesempatan untuk bertemunya para pemimpin dari seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Mereka sempat pula mengadakan pertemuan di belakang layar untuk memadamkan tekad mengatur langkah perjuangan bersama. 10) SKI yang dapat mengkoordinasikan semua badan atau gerakan terbuka, meneruskan kegiatannya membahas politik Belanda dan menguatkan semangat pembelaan RI Rapat-rapat umum SKI terus membakar semangat rakyat di samping mereka bergerak secara gerilya.

Meskipun tampaknya berpisah jalan antara gerakan legal dan ilegal, namun ternyata setujuan dan bergerak seirama. Malahan kebanyakan tokoh-tokoh mereka itu adalah anggota SKI/PPI/GAPPIKA, ia pula anggota gerakan rahasia.

B. PENGARUH AKSI MILITER BELANDA I DI KALIMANTAN SELATAN DAN PERIODE PERANG GERILYA

Pemerintah Belanda sejak semula sudah berusaha dengan keras agar Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dihancurkan. Oleh karena itu diusahakanlah segala siasat untuk melenyapkannya dengan siasat politik divide et empera. Karena itu maka perjanjian Linggarjati yang ditanda tangani pada bulan Maret 1947 adalah merupakan usaha Belanda untuk memecah belah kesatuan negara Indonesia yang dicitakan berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus '45. Belanda hanya mengakui de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatera sedangkan daerah lainnya adalah di luar defacto RI tersebut, dan ini berarti tetap di bawah penjajah Belanda.

Sejak semula Belanda menilai di daerah Kalimantan Selatan sebagai daerah rawan mengingat kondisi dan situasi daerah terdiri dari hutan-rawa, alang-alang yang tidak menguntungkan logistik bagi kegiatan gerilya dan kurangnya sarana jalan untuk hubungan

membawa perbekalan serta jarangnyanya penduduk, maka Belanda beranggapan tidak memerlukan tentara yang banyak untuk menguasainya. Sebagian besar kekuatannya di tempatkan di daerah-daerah gawat di Jawa dan Sumatera.

Dari 7 kompi *KNIL* yang digabungkan dalam SWPC, Belanda hanya *mendrop* beberapa kompi yang terus digabungkan menjadi kurang lebih 1 Batalyon BS untuk seluruh Kalimantan Selatan (waktu itu juga termasuk Kalimantan Tengah sekarang) dan lebih kurang 1 Batalyon Polisi Nica bentukan baru yang disebut Polisi Kilat. Tetapi kemudian ketika ternyata perlawanan dari gerilyawan makin gencar dan lagi pasukan ekspedisi dari Jawa berhasil masuk ke Kalimantan, Belanda terpaksa mendatangkan bantuan Polisi Kilat dari Jawa. 11)

Pada saat Batalyon Rahasia ALRI Div IV (A) Pertahanan Kalimantan dibentuk tanggal 18 Nopember 1946, Belanda mulai melancarkan operasi kolonialnya ke daerah pedalaman Hulu Banyu. Dan menjelang bulan-bulan agresi militer Belanda di Jawa dan Sumatera, di Kalimantan Selatan tentara dan polisi Nica Belanda melancarkan aksi pembersihan terhadap satuan gerilya yang berkedudukan di sekitar lapangan terbang Samsudin Noor (antara Banjarmasin Martapura) dan Belanda berusaha menggagalkan usaha sabotase yang dilancarkan pasukan gerilya kota di sekitar pelabuhan Banjarmasin. 12)

Dengan demikian maka kekuatan bersenjata *NICA* di Kalimantan Selatan terikat dan dugaan bahwa perlawanan rakyat akan gawat, tidaklah meleset. Kesatuan *NICA* yang terbatas ini, sibuk dikerahkan kian kemari untuk menjebak pasukan-pasukan ekspedisi yang berhasil mendapat kemenangan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Pemerintah Belanda berusaha mempengaruhi rakyat dan pejuang-pejuang Kalimantan Selatan dengan mendatangkan Van Der Plas, seorang Belanda yang ahli agama Islam, tetapi ternyata usaha Belanda seperti ini tak ada hasilnya.

Persetujuan Linggarjati yang ditanda tangani pada bulan Maret 1947 mempunyai akibat yang tersendiri bagi Kalimantan Selatan, yaitu mempunyai akibat bagi perjuangan illegal yang bergerak bergerilya di hutan-hutan dan bagi perjuangan parlementer

yang berjuang lewat partai-partai politik.

Persetujuan Linggarjati menetapkan bahwa Belanda hanya mengakui de facto Republik Indonesia atas Jawa-Madura dan Sumatera, sedangkan daerah lainnya termasuk Kalimantan Selatan tetap berada dalam penjajahan Belanda.

Akibat politik dari persetujuan ini ialah bahwa Kalimantan Selatan terputus hubungannya dengan Republik Indonesia Jogja, dan karena Kalimantan Selatan berada di luar Republik Indonesia maka peraktis kedudukan Gubernur Kalimantan yang dijabat oleh Bapak Ir. Pangeran Noor dihapuskan. Dengan demikian perjuangan di Kalimantan Selatan bergerak sendiri dan menentukan jalannya sendiri.

Batalyon Rahasia ALRI Div. IV (A) Pertahanan Kalimantan yang telah dibentuk pada tanggal 18 Nopember 1946 juga terputus hubungannya dari R I, dan terputus dari Markas Besar ALRI Div. IV yang ber-markas di Tuban Jawa Timur. Markas Besar ALRI Div. IV ini kemudian dibubarkan dan kemudian menjelma menjadi Brigade XVI dari seberang dengan komandannya Mayor Firmansyah Tujan. 13) Dengan situasi demikian maka tokoh-tokoh pejuang gerilya Kalimantan Selatan hanya mempunyai satu pilihan yaitu harus mampu mengorganisir kekuatan sendiri, kalau tidak akan dihancurkan oleh musuh. Begitu pula pejuang parlementer yang melewati partai politik harus menggagalkan rencana Belanda mendirikan Negara Kalimantan sebagai bagian yang terpisah dari R I Jogja.

Pada tahun 1947 terbentuklah Markas Besar yang berkode RX-8 ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dengan pusat markas besarnya di Birayang, hal ini merupakan pertumbuhan yang meningkat dari perjuangan bersenjata di Kalimantan Selatan. Dengan adanya atau terbentuknya Markas Besar ini, perjuangan ditingkatkan, faktor yang melemahkan perjuangan dihindarkan seperti pembersihan mata-mata atau kaki tangan Belanda. Hassan Basry sebagai komandan Batalyon dan H. Aberani Sulaiman sebagai Kepala Staf berhasil mengkonsolidasikan Batalyon buat merangkul kekuatan di luar A L R I dengan menetapkan siasat operasinya dengan membentuk Organisasi Gabungan yaitu : Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK). Markas Besar SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dengan kode tetap RX-8.

Organisasi Markas Besar RX-8 ini dipimpin oleh Hasan Basry sebagai komandan Batalyon, sedangkan Kepala Stafnya dipegang oleh H.Aberani Sulaiman.. Komandan-komandan pasukan yang berfungsi sebagai komandan sektor adalah : Daeng Ladjida sebagai komandan sektor Daerah "Z-61" di Pagat, Pasukan Hamzah Arifin sebagai komandan Daerah Sektor "0-12" di Telaga Langsung dan Haruyan, Pasukan Daeng Gidul Tololio langsung berada di Markas Besar "R-27" di Birayang. Satu pasukan pengawal pribadi komandan Batalyon Rahasia (A) SOPIK/ALRI Divisi IV, komandan pasukan pengawal ini dipegang oleh H.Damanhuri. 14)

Persenjataan diperoleh dari rombongan yang dibawa oleh Herman Raturambi dan Johan Masael menjadikan Batalyon Rahasia dengan SOPIK nya menjadi kuat dan menyebabkan Markas Besar ini mempunyai kekuatan yang cukup ditakuti oleh Belanda. 15).

Kegiatan operasional militer dari Markas Besar SOPIK/ALRI Divisi IV, dimulai dengan melakukan pencegahan terhadap iring-iringan (*konvoi*) truk militer Belanda di Hambawang Pulasan. Pertempuran ini langsung dipimpin oleh Kepala Staf H.Aberani Sulaiman dan merupakan pertempuran yang terbanyak mendatangkan korban dari pihak Belanda. Sebuah truk dari konvoi tersebut dapat ditembak dan jatuh terbalik masuk jurang yang mengakibatkan semua tentara Belanda dalam truk itu sekali gus tewas. Seorang pasukan dari ALRI yang baru saja bergabung yang berasal dari pasukan Herman Raturambi bernama Made Kawis tewas dalam pertempuran itu. Dari pasukan Daeng Ladjida mengorbankan seorang anggota pasukannya setelah tertangkap oleh Belanda yang langsung ditembak mati oleh Belanda.

Setelah pertempuran di Hambawan Pulasan ini, Markas Besar SOPIK/ALRI Divisi IV selalu dibuntuti oleh Belanda. Haruyan sebagai pusat Markas Besar mendapat serangan dari Belanda, tetapi Belanda tidak berhasil merebut Markas Besar tersebut, meskipun Markas Besar SOPIK/ALRI mengorbankan beberapa orang anggota pasukannya. Sebagai balasan pasukan ALRI menyerbu Jatuh yang di tujukan terhadap kekuatan Polisi Kilat Belanda. Kemudian setelah Markas Besar dipindah ke Pagat, Haliau dan Hantakan terjadi lagi pertempuran yang berlangsung hampir tiga hari. Pada pertempuran ini gugur seorang anggota pasukan ALRI yang bernama Bachtiar.

Taktik yang dipergunakan dalam setiap penyerangan adalah

taktik gerila, dengan cara menyerang tiba-tiba dan kemudian menghilang, penyergapan musuh dengan tiba-tiba berupa penghadangan atau dikenal dengan istilah penyanggulan. Begitu pula kedudukan Markas Besar juga sering berpindah-pindah kalau dianggap bahwa keamanan di tempat itu mengkhawatirkan. Dengan demikian di mana ada Pimpinan Umum atau Kepala Staf, di situlah kedudukan Markas Besar. 16).

Penyusunan dan penyempurnaan kekuasaan territorial terus dilaksanakan sambil membersihkan dari unsur-unsur mata-mata Belanda. Pada tiap lingkungan dibentuklah *SEKSI* yang bertugas mengurus lingkungannya. Kepala Seksi adalah juga komandan pasukan, karena tiap *Seksi* mempunyai pasukan bersenjata disebut *Riwas*. Dengan demikian kekuasaannya meliputi bidang sipil dan militer.

Beberapa Seksi digabungkan menjadi *Pangkalan*. Markas Pangkalan inipun mempunyai pasukan yang namanya pasukan pengempur yang dalam hal ini meliputi suatu territorial, sehingga Pangkalan memiliki kekuasaan territorial di wilayahnya.

Markas Pangkalan ini kemudian digabungkan menjadi sebuah Markas yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yang disebut Markas Daerah. Markas Daerah menguasai semua Pangkalan di wilayahnya. Markas Daerah juga mempunyai kekuasaan militer yang lebih besar. 17)

Dalam perkembangannya kemudian setelah daerah Selatan terbentuklah "Sektor X-18" yang mula-mula berkedudukan di Malutu di pimpin oleh Lukman. Kemudian berpindah lagi lebih ke Selatan yaitu Padang Batung. Setelah Lukman tewas dalam pertempuran di Anjir Serapat, pimpinan dipegang oleh Ma'rufi Utir. Kemudian setelah perkembangannya lebih luas lagi, diangkatlah Hasnan Basuki menjadi Kepala Staf Muda yang memimpin Markas Besar Selatan dengan kedudukan Padang Batung Kandangan.

Daerah-daerah seperti 0-12 Haruyan, Z-61 Pagat, B-27 Bi-rayang menjadi daerah Utara yang meliputi Amuntai dan Tanjung. Dan pada saat diresmikan 2 September 1949, seluruh daerah Kalimantan Selatan, termasuk Kalimantan Tengah, berjumlah 30 buah Markas Daerah dan sebuah Markas Besar Selatan yang meliputi daerah Banjarmasin, Kalimantan Tengah dan Timur.

Demikianlah perjuangan bersenjata pada tahun 1947 sebagai suatu pengaruh dari persetujuan Linggarjati.

Seperti sudah dijelaskan pada bagian di muka bahwa perjuangan bersenjata seirama dengan perjuangan legal yang berjuang secara parlementer melewati partai politik dan organisasi massa. Sehubungan dengan itu marilah kita tinjau perjuangan parlementer melewati Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan SERMI (Serikat Muslimin Indonesia), pada tahun 1947 sebagai pengaruh dari persetujuan Linggarjati.

Persetujuan Linggarjati sesungguhnya adalah ceasefire belaka, karena keputusan yang dihasilkan dari konferensi tersebut mengandung interpretasi yang berbeda-beda. Belanda menganggap dengan pengakuannya *de facto* terhadap RI ini berarti bahwa kedaulatan seluruh Nusantara tetap berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, sedangkan RI berpendapat bahwa kedaulatan di daerah RI tetap berada pada RI.

Serangan Belanda terhadap RI yang dikenal sebagai Aksi Militer Belanda I (1947) mendapat pengaruh yang besar bagi politik luar negeri Indonesia, sebab Indonesia mendapat simpati dari negarane-negara di dunia. Jawaban spontan terhadap Aksi Militer I, Batalyon Rahasia/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan menganjurkan agar rakyat menghentikan pengeluaran getah asap.¹⁸⁾ Meskipun penjualan getah asap merupakan sumber penghidupan rakyat, namun demi perjuangan anjuran ini ditaati rakyat, hal ini mempunyai arti besar sebab melumpuhkan ekonomi Belanda melewati penjualan getah asap, salah satu hasil yang besar untuk daerah Kalimantan Selatan.

Perjuangan *legal* tidak kalah pentingnya dengan perjuangan *illegal* atau perjuangan gerilya, keduanya saling mengisi dan seirama. Di bidang politik Belanda berhadapan dengan SKI dan SERMI dan organisasi lain yang berhaluan Republik. Hubungan antara kedua kekuatan ini, yaitu kekuatan gerilya yang bersenjata dan kekuatan partai politik berjalan dengan harmonis, bahkan sebagian besar anggota SKI dan SERMI adalah juga pimpinan Markas Gerilya.¹⁹⁾

Dengan segala siasat Belanda berusaha melemahkan kekuatan SKI dan SERMI tersebut. Dengan usaha yang gigih Belanda berhasil menarik H. Abdurrahman Siddik Ketua SERMI untuk mendukung

usaha Belanda mendirikan negara Kalimantan. H. Abdurrahman Siddik adalah seorang pejabat pemerintah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Banjarmasin. Beliau adalah seorang ulama yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Sebagai pejabat pemerintah H. Abdurrahman Siddik telah berkenalan dengan Eisenberger tokoh federalis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk membujuk tokoh-tokoh Kalimantan mendirikan negara Kalimantan. Tokoh lain dari rencana pembentukan negara Kalimantan ini ialah Sultan Hamid II yang ditugaskan Belanda dengan maksud yang sama dengan Dr. Eisenberger. Bujukan ini menyebabkan H. Abdurrahman Siddik berpindah dari seorang "Republiken" menjadi seorang tokoh *federalist*.²⁰⁾ H. Abdurrahman Siddik yang sebelumnya adalah Ketua SERMI, mendirikan S R I (Serikat Rakyat Islam) pada 2 Juli 1947 di Banjarmasin, yang kemudian mengadakan Kongres S R I di Kandangan tanggal 15 Nopember 1947 yang memutuskan untuk mendirikan negara Kalimantan. 21) Sehubungan dengan itu SERMI mengambil sikap tegas yaitu mengeluarkan H. Abdurrahman Siddik dari SERMI.

S K I dan SERMI yang pada mulanya *non-kooperasi*, kemudian merubah sikap karena situasi yang tak menguntungkan. Serikat Rakyat Islam (S R I) sebagai partner Belanda dalam menciptakan pembentukan Negara Kalimantan mempunyai pengaruh yang besar bagi sikap S R I dan SERMI.

Dalam Konferensi Kilat di Banjarmasin, tanggal 15 Juli 1947 memutuskan sebagai berikut :

SERMI menyetujui pembentukan Daerah Otonom Banjar dan Hulu Sungai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. daerah otonom Banjarmasin - Hulu Sungai/Dewannya harus dibentuk sedemokratis-demokratisnya.
2. Ketua Dewan harus orang Indonesia.
3. anggota dewan ditentukan dengan pemilihan.
4. Banjarmasin dan Hulu Sungai tetap satu daerah.
5. dewan harus mempunyai kekuasaan yang seluas-luasnya.²²⁾

Meskipun tidak seluruh tuntutan tersebut berhasil, tetapi banyak pengaruhnya terhadap pembentukan Dewan Banjar kemudian.

Kalangan pemuda tidak ketinggalan memberikan andilnya terhadap perjuangan bergabung dengan RI dengan terbentuknya GAPPIKA (GABUNGAN PERSATUAN PEMUDA PEMUDI INDONESIA KALIMANTAN) yang merupakan hasil Kongres Pemuda tanggal 17 Maret 1947 di Kandangan. GAPPIKA menentukan sikapnya terhadap Pemerintah Belanda dengan mengeluarkan maklumatnya, tertanggal 10 Nopember 1947 yang berisi mendukung sikap S K I dan SERMI dan menyetujui pembentukan Dewan Banjar yang meliputi wilayah Banjarmasin- Hulu Sungai dengan cara yang demokratis. ²³⁾

Dalam taktik perjuangan S K I , SKI membentuk beberapa organisasi yang merupakan anak organisasi S K I yang dikamuplase sebagai organisasi sosial. Tujuan dari organisasi tersebut adalah sebagai kawan berjuang, yang jika pada suatu saat S K I mendapat tekanan Belanda, bahkan dibubarkan, S K I masih mempunyai kekuatan yang dapat melanjutkan perjuangan tersebut.

Organisasi yang dibentuk itu adalah sebagai berikut :

- a). PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia).
- b). PPI (Persatuan Pemuda Pemudi Indonesia).
- c). PERPI (Persatuan Pemudi Indonesia).
- d). PK D I (Persatuan Kaum Dagang Indonesia). ²⁴⁾

Tidak kurang pentingnya peranan kaum wanita Kalimantan Selatan yang ikut berjuang di samping SKI dan SERMI. Aktivitas wanita tersebut terlihat pada kegiatan organisasi wanita yang tergabung dalam Perwani.

Kegiatan yang telah dilakukan Perwani, menangani masalah sosial terutama mencari dana untuk perjuangan. Untuk mengumpulkan dana ini, Perwani mengadakan pasar amal bertempat di rumah Dr. Suranto di Simpang Tiga Jalan Loji Kertak Baru. ²⁵⁾

Sesudah pasar amal ini Perwani berdiri sendiri dalam perjuangan, tidak terikat lagi dengan S K I , namun secara terselubung tetap merupakan anak Partai SKI.

Perwani berdiri pada 17 Desember 1946 yang mempunyai Pengurus Besar di Banjarmasin. Pengurus Besarnya terdiri dari :

Ketua I : Ny.Norsehan Djohansyah.

Ketua II : Ny.dr.Soeranto.
Penulis I : Ny.Syarifah Muzenah Assegaf.
Penulis II : Nn.Sariyana
Pembantu : Ny.Siti Aisyah
Ny. M.Rasyid
Ny.Sa'ban

Seksi Keputerian :

Ny.Hadijah Bahrn

Nn.Maryani. 26)

Dalam perkembangan organisasi ternyata PERWANI mempunyai banyak pengikut dengan terbukti munculnya cabang-cabang Perwani mulai dari Banjarmasin hingga mencapai Kelua Tanjung.

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat kelasyakaran wanita, tetapi secara perseorangan kaum wanita juga aktif di front terdepan seperti : Hadijah H.Hasyim, Masfah, Maiti, Basiah, Norma Ariati. Tugas yang mereka pikul seperti dapur umum, kepalangmerahan dan bahkan ikut brtempur memanggul senjata, seperti yang dilakukan oleh Aluh Idut.

Untuk meningkatkan perjuangan maka dirasa perlu menyatukan semua gerakan wanita yang ada yaitu antara PERWANI dengan Muslimat Serikat Muslimin Indonesia dan unsur wanita dari GAP-PIKA (GABUNGAN PEMUDA PEMUDI INDONESIA KALIMANTAN). Untuk membentuk badan koordinasi dari organisasi wanita tersebut diadakanlah Kongres Wanita se-Kalimantan Selatan. Kongres tersebut diadakan pada tanggal 16-18 Juni 1947 di Banjarmasin dan dihadiri oleh semua organisasi wanita Kalimantan Selatan, serta dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia Jogja seperti Ny. Soekeri, Ny.Soerasto, Ny.Herawati Diah. 27)

Kongres ini dipimpin oleh Ny. Norsehan Djohansyah, Ny.F.Mohani dengan mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :

- a). mendukung tuntutan S K I tentang status Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indoensia.
- b). mendesak Pemerintah Belanda dan R I untuk mengadakan gencatan senjata dan menyelesaikan tawanan poli-

tik.

- c). membentuk satu badan koordinasi dari beberapa organisasi wanita Indonesia yang disingkat PERTIWI dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua I : Ny. Norsehan Djohansyah.
Ketua II : Ny.Margaritha Hamli Carang.
Penulis I : Ny.Gusti Mastoto.
Penulis II : Ny.Syarifah Muzenah Assegaf.
Pembantu : Ny. dr.Soeranto.
Ny.Katharina Mahar. 28)

SERMI terus meningkatkan perjuangan di samping S K I Untuk menggalang ummat Islam guna membulatkan sikap dalam perjuangan menghadapi kolonialist Belanda. Untuk itu SERMI mengadakan Kongres Umat Islam Kalimantan di Amuntai pada tanggal 15 Juni 1947. 29) Belanda mengadakan tekanan-tekanan terhadap Kongres tersebut dengan melarang membicarakan masalah yang menyangkut politik. Di samping itu menangkap beberapa tokoh yang hadir pada Kongres tersebut. Tokoh-tokoh yang ditangkap menjelang Kongres itu ialah : Danil Bangsawan, Zafry Zamzam dan H.Rusli, sedangkan yang ditangkap pada saat Kongres berlangsung antara lain : H. Marzuki, sedang yang diancam untuk ditangkap seperti : M. Hasan Suni yang kemudian memilih lari kepedalaman bergerilya memanggul senjata menghadapi Belanda.

Tekanan lain terhadap peserta Kongres ialah penggeledahan setiap peserta dan memata-matai kegiatan Kongres. Inilah yang menyebabkan kegagalan Kongres untuk menggalang ummat Islam. 30)

Usaha Belanda bukan hanya sampai di sini, segala daya dan kekuatan dikerahkannya. Untuk menghancurkan kekuatan ummat Islam tersebut Belanda mendatangkan seorang ahli dalam agama Islam tetapi bukan seorang Islam ialah Ch.O. van der Plas seperti yang telah disebutkan di muka. Usaha Belanda ini berhasil membentuk S R I (Serikat Rakyat Islam) dengan pimpinannya H. Abdurrahman Siddiq yang sebelumnya adalah Ketua SERMI. Usaha Belanda diteruskan dengan menggabungkan ummat Islam Kalimantan

dengan membentuk MADJLIS OEMAT ISLAM (M O I) pada tanggal 13 Oktober 1947 di Kandangan dengan maksud yang sama dengan S R I Belanda berhasil membentuk M O I tersebut, tetapi tidak berhasil menggabungkan ummat Islam untuk mencapai tujuan Belanda yaitu membentuk Negara Kalimantan. Para ulama yang tergabung dalam M O I menggunakan segala dana yang diberikan oleh Belanda dan kemudian menyalurkannya untuk dana perjuangan gerilya dan memberikan sumbangan terhadap sekolah-sekolah yang dibina oleh pergerakan.³¹⁾ Salah satu contoh ialah meminta 5/sen dari se tiap meter kain yang dibagikan dan dari supply kain ini terkumpul uang 55.000,- Gulden, yang kemudian disalurkan untuk dana perjuangan.³²⁾

C. PENGARUH AKSI MILITER BELANDA II DI KALIMANTAN SELATAN

1. Aksi perlawanan bersenjata

Kalau kita meneliti kembali apa yang telah berlalu tentang perkembangan kekuatan bersenjata dari pejuang gerilya dapatlah kita ringkaskan sebagai berikut : tahun 1945 timbulnya kesatuan kelasykaran yang sifatnya *illegal*. Masing-masing kesatuan ini berdiri sendiri-sendiri dengan pimpinannya masing-masing. Tahun 1946 kesatuan kelasykaran tersebut berhasil disatukan dengan satu komando dengan nama Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dan kemudian dirubah dengan Markas Besar SOPIK (Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan) / ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Perubahan ini terjadi tahun 1947. Pada tahun 1948 berhasil memperluas kekuasaan dan pembagian wilayah teritorial dengan pemecahan kekuatan menjadi Sektor Utara dan Sektor Selatan dari Markas Besar RX-8- SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Tahun 1948 kekuatan bertambah pula dengan penggabungan MTKI/MN 1001.³³⁾

Sektor Utara dipegang langsung oleh Kepala Staf Markas Besar SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan H. Aberani Sulaiman dan Sektor dipegang oleh Ma'rufi. Di samping pemecahan kekuatan itu sesuai dengan perluasan organisasi perjuangan diangkat pula Kepala Staf Muda Hasnan Basuki dengan mengambil tempat kedudukan Sektor Selatan.

Susunan pucuk pimpinan Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan sebagai berikut :

Pimpinan Umum : Hassan Basry
Wakil merangkap sebagai
Kepala Staf : H. Aberani Sulaiman
Kepala Staf Muda : Hasnan Basuki
Direksi Perjuangan : M. Hamy A.M.
Komisariat Gerakan : Budhigawis S.S
Kepala Sekretariat : M. Adil
Kep. Keuangan/Tata Usaha : Djaperi
Kepala Sektor Utara : H. Aberani Sulaiman
Kepala Sektor Selatan : Ma'rufi
Komandan Pasukan Pengempur : Martinus
H. Damanhuri
Daeng Ladjida
Pembelah Batung
Bung Hasan
Ibnu Hanjar
Abdurrahman L. 34)

Ketika persetujuan Renville ditandatangani maka ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan mengumumkan keputusan sikapnya mengenai persetujuan Renville tersebut pada tanggal 16 Mei 1948.

Isi pengumuman tersebut adalah :

- a). memberitahukan kepada Belanda bahwa ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan adalah bagian dari Angkatan Perang RI.
- b). ALRI Divisi IV tidak bisa hijrah ke daerah R.I di Jawa dan tetap berada di Kalimantan, karena komunikasi sangat sukar.
- c). ALRI Divisi IV berjanji tidak akan mengadakan gerakan dan pelanggaran penghentian tembak menembak menurut

persetujuan Renville, kecuali untuk mempertahankan diri.

- d). Menyarankan kepada Belanda agar mengosongkan kota Barabai agar kota itu dapat dijadikan pos hubungan antara ALRI Div. IV dengan Belanda, guna membicarakan segala macam persoalan yang timbul dalam hubungan kepentingan kedua belah pihak.

Empat hari kemudian, Belanda menjawab pengumuman ALRI Divisi IV itu dengan pengumuman pula yang memerintahkan agar komplotan pemberontakan Hassan Basry segera menyerahkan diri dalam batas waktu yang ditentukan. Ketika sejak bulan Oktober 1947 ALRI Divisi IV mulai mengadakan pembersihan terhadap spion-spion NICA, sehingga sangat membatasi gerakan Belanda, maka Belanda merestui pembentukan sebuah gerakan rahasia yang bernama Partai Anti Indonesia Merdeka (PAIM) dengan barisannya yang bernama "Barisan Parang Bungkul". PAIM ini diketuai oleh Kiai Besar Nadalsyah dan ditujukan langsung untuk menghadapi gerakan ALRI Divisi IV.

Anggota PAIM bertugas sebagai petunjuk jalan dari gerakan NICA yang menyusup ke pegunungan Meratus untuk mencari Markas Besar ALRI Divisi IV. Dalam sejumlah operasinya hanya dua kali yang berhasil, yang pertama di Janggar di kaki gunung Menteng pada bulan Desember 1947 dan yang kedua di kaki gunung Ambilik pada bulan Mei 1948.

Untuk memperbanyak jumlah persenjataan Pimpinan Umum Hassan Basry menginstruksikan pasukan berjibaku untuk merebut senjata dari Belanda. Setiap regu terdiri dari dua atau tiga orang anggota, bertugas di pasar dan tempat-tempat ramai secara terbuka merebut senjata itu. Hasil yang diperoleh dari pasukan berjibaku ini cukup lumayan.

Tim Penerangan ALRI Divisi IV dengan giat menjelaskan kepada masyarakat untuk membangkitkan semangat perjuangan. Sebuah siaran kepada rakyat dari ALRI Div. IV berbunyi antara lain :

- a). bahwa rakyat harus tenang dan sabar, tetapi tiap jiwa harus siap dan waspada,
- b). bahwa NICA telah menjanjikan dalam persetujuan Renville untuk menyerahkan tanah air Indonesia kepada Pemerintah RI pada tanggal 1 Januari 1949,

- c). bahwa kita taat kepada Pemerintah RI dan pimpinan perjuangan di Kalimantan akan mengeluarkan perintah pada waktunya.

Untuk tambah mengobarkan semangat perjuangan diperintahkan untuk mulai merebut pos-pos NICA yang terpencil dengan pasukan yang terlatih. Mula-mula sekali direncanakan untuk merebut Talusi di Kalimantan Tenggara, karena daerah ini menghasilkan beras. Rencana ini kemudian berubah dan diganti dengan rencana penyerbuan Bungkukan. Penyerangan ini berhasil baik dengan memperoleh 10 senjata dan 2 orang pihak NICA tewas. Dengan berhasilnya Bungkukan diserang, mulailah serangan selanjutnya di intensifkan dan aksi Bungkukan ini ingin menunjukkan bahwa ALRI Divisi IV itu ada dan merupakan bagian dan tentara RI. Untuk membalas kekalahan di Bungkukan ini Belanda memusatkan pasukannya di Barabai untuk menyerang Hawang yang diperkirakan Belanda merupakan pusat Markas Besar ALRI Divisi IV Hulu Sungai di Barabai. Dalam pertempuran di hutan Hawang ini pasukan gerilya ALRI Divisi IV mempergunakan taktik pertempuran yang menyebabkan antara pasukan pengepung Belanda terjadi tembak menembak sesamanya.

Pada tanggal 1 Januari 1949 setelah Belanda menduduk Jokya dalam agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 kembali ALRI Divisi IV mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa :

- a). NICA telah mungkir pada janjinya menyerahkan tanah air kepada Indonesia kepada RI
- b). agar rakyat bertindak di bawah pimpinan ALRI Divisi IV.
- c). kita ingin damai tapi kita lebih cinta kepada kemerdekaan.

Maklumat ini lebih ikut merangsang semangat perjuangan rakyat. Belanda menggunakan siasat baru dengan jalan mempersempit komunikasinya, pos-pos terpencil ditarik dan dipusatkan di kota.

Hal lain yang menjadi perhatian ALRI Divisi IV ialah bahwa ALRI tidak dapat membenarkan lahirnya organisasi perjuangan di luar ALRI. Ketika MTKI yang sudah lama menghilang muncul kembali dan membentuk pangkalan tandingan di samping pangkalan ALRI Divisi IV, maka hal itu merupakan yang perlu segera disele-

saikan karena bertentangan dengan program ALRI sendiri. Di samping itu MTKI dicurigai termasuk aliran Cabang Komunis Internasional yang berpusat di Bangkok. Untuk Kalimantan Selatan gerakan ini berpusat di Kuala Kapuas dipimpin oleh Philip Riwayat. Pimpinan Umum Hassan Basry segera mengundang pimpinan MTKI Hulu Sungai dan mengadakan musyawarah pada bulan April, di mana MTKI melebur ke dalam ALRI.

Disamping menghadapi NICA, ALRI Div. IV menghadapi pula pasukan yang terkenal dengan nama Pasukan Kucing Hitam yang dipimpin oleh seorang jago kampung Jatuh, yaitu Pembekal Haji Hasyim.

Pasukan yang kedua yang dihadapi ALRI ialah Pasukan Suku Dayak dari Dusun Timur Tamiyang Layang, terkenal dengan sebutan "Pasukan Laung" dipimpin oleh Camat Coonraad. Daerah ini terkenal sejak Perang Banjar akan kesetiannya kepada Belanda terutama dari keluarga Tumenggung Suta Ono yang berkubur di Tambak Emas di kampung Telang 20 Km dari Tamiyang Layang.

Berdirinya pasukan ini karena siasat dan hasutan Belanda yang mengatakan bahwa gerombolan extremist itu akan bergerak merampok harta benda dan jiwa orang Dayak dan orang Kristen. Karena itulah mereka bersedia dipersenjatai untuk mempertahankan diri dari serangan yang dikabarkan oleh Belanda tersebut. Untuk mendamaikan golongan Islam dan Kristen dikirim suatu Tim penerangan. Pasukan Martinus yang ditarik kembali diperintah untuk menghancurkan Pasukan Kucing Hitam Pembekal Haji Hasyim, sehingga jago ini terpaksa mengungsi ke kota Barabai.

Dengan makin meningkatnya kekuatan perjuangan bersenjata di Hulu Sungai dan sehubungan dengan dilancarkan aksi militer Belanda ke 2 yang dilancarkan di Jawa dan Sumatera, maka NICA di Kalimantan Selatan menyatakan bahwa daerah Hulu Sungai sejak tanggal 16 Desember 1948 dalam keadaan Staat van Oorlog (S.O.B.) Inilah tindakan pemerintah NICA Belanda sehubungan dengan Aksi Militer Belanda II yang menyerbu pemerintahan R.I. di Jogya tanggal 18 Desember 1948. Selanjutnya Belanda melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh pejuang dan tokoh pimpinan yang oleh Belanda dicurigainya. Begitu pula terhadap wartawan yang pro Republik Indonesia, surat kabarnya dila -

rang penerbitannya. 35) Jumlah tahanan politik sehubungan dengan penangkapan Belanda sebanyak 75 orang sebagian besar ditahan dalam penjara Banjarmasin.

Untuk menandingi sikap Belanda tersebut Pimpinan Umum Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Kalimantan pada tanggal 25 Desember 1948 memerintahkan serangan umum serentak tanggal 1 Januari 1949 sebagai hadiah Tahun Baru untuk Belanda. Sebagai pelaksanaan dari perintah serangan umum tersebut, beberapa kesatuan mengadakan penyerangan terhadap pos-pos terpencil guna mendapatkan modal persenjataan, seperti terhadap onderneming Hayup tanggal 27 Desember 1948, Amuntai 28 Desember 1948, Paringin 29 Desember 1948, dan serangan umum dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1949, berturut-turut, tanggal 1 Januari serangan atas Haruwai, Negara 2 Januari 1949, Tanjung 3 Januari, Ampah dan Tamiyang Layang 4 Januari 1949, Lapangan Kandis 9 Januari 1949, Sungai Tabuk 9 Januari 1949, Wawai 14 Februari '49, Tebing Rimbah 17 Februari 1949, dan di tempat-tempat lainnya. Penyerangan atau penghadangan terhadap konvoi militer Belanda di Tungkup Rantau yang banyak menimbulkan korban kedua belah pihak. Gerakan sabotase diperhebat, penculikan terhadap kaki tangan Belanda dan langsung mengadakan pengadilan militernya.

Untuk menanggulangi jumlah persenjataan, diadakan paberik senjata darurat yang membuat senapan "domdom", pistol dan granat tangan. Paberik senjata darurat ini terdapat di Kandangan, Amuntai, Negara, Ulin dan lain-lain. Umumnya ahli pembuat senjata ini adalah orang yang berasal dari Negara yang umumnya pandai besi.

Akibat tekanan yang gencar dari gerilyawan bersenjata ini, Belanda mulai menarik pos-pos militernya yang terpencil di daerah-daerah tiap kabupaten. Tindakan ini sangat menguntungkan perjuangan bersenjata. Dari segi moril menimbulkan rasa sikap bangga atas hasil perjuangan dan dari segi penyusunan kekuatan juga menguntungkan, sebab dengan demikian perjuangan lebih dapat diperluas dan pemerintahan daerah dapat dijalankan di desa-desa di mana Belanda tidak memasuki lagi.

Tahun 1949 membuka jalan bagi kemenangan perjuangan ber-

senjata di Kalimantan Selatan. Disamping pos-pos terpencil dari Belanda ditarik, juga ikut ditarik Assisten Kiai (Camat) mereka sebagai pemegang pemerintahan sipil, hal ini membawa artikekosongan pemerintahan, dan bagi rakyat hal ini berarti bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Belanda.

Dari situasi yang sangat dan berkobar-kobar ini dapatlah disaksikan betapa semangat rakyat untuk berjuang dan hanya dengan senjata yang sederhana berupa parang dan tombak, mereka berduyun-duyun mengikuti pasukan gerilya yang bersenjata untuk bersama-sama berperang, menyanggul dan merusak alat-alat perhubungan Belanda.

Di sini terbukti pula bahwa perjuangan kemerdekaan ini benar-benar mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh lapisan rakyat. Bantuan berupa bahan makanan dan uang mengalir, begitu pula informasi tentang keadaan kota serta kegiatan dan rencana aksi militer Belanda selalu dapat diterima dan diketahui oleh markas gerilya.

2. Proklamasi 17 Mei 1949 Gubernur Tentara ALRI

Di tengah-tengah berkecamuknya perang kolonial ke II yang berjalan bersamaan dengan adu kegesitan diplomasi yang membawa Konferensi Meja Bundar (KMB), Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan berhasil meningkatkan kekuatan dengan membentuk 2 Resimen kecil masing-masing di Utara dan Selatan. *Korektor Susunan* Gt. Abdurrahman (Gt. Aman) ditunjuk oleh Pimpinan Umum untuk memperbaiki organisasi Markas Besar. Korektor Susunan mempunyai wewenang di mana perlu dapat bertindak atas nama/mewakili Pimpinan Umum. Tenaga yang diperlukan, selain daerah Kalimantan Selatan (A), juga mengikut sertakan Daerah Kalimantan Timur (B) dan Daerah Kalimantan Barat (C).

Markas besar RX-8 SOPIK/ALRI memperlebar pula sayap berkembangnya kekuatan dengan membentuk/meningkatkan Sektor Utara dan Sektor Selatan dengan jalan membentuk Resimen Utara yang dipimpin oleh H. Damanhuri dan Resimen Selatan dipimpin oleh Daeng Ladjida. Kedudukan Sektor, komandannya diperbantukan pada MB RX-8. Hal ini sejalan dengan rehabilitasi Divisi IV

ALRI (A) Pertahanan Kalimantan dengan usaha yang dijalankan oleh Korektor Susunan merubah sistem Pimpinan menjadi disentralisasi mengingat adanya 3 sumber pokok pimpinan yaitu Pimpinan Umum sebagai kekuatan pokok, Kepala Staf sebagai pimpinan operasi dan Korektor Susunan secara langsung mengintegrasikan perencanaan dalam membuat persiapan rehabilitasi Divisi IV ALRI tersebut. Perkembangan ini sejalan dengan taktik pembinaan wilayah yang digariskan oleh Panglima Besar Jendral Sudirman di Jawa, dengan perang rakyat semesta jangka panjang.³⁶⁾

Korektor Susunan berhasil membuat basis dengan membentuk Markas Daerah PS-14 di pedalaman Limamar Martapura. Pada saat itu telah tersusun organisasi territorial dengan Markas Daerah dengan hampir 20 Markas-markas Pangkalan serta Seksinya, serta 3 Resimen kecil. Pembentukan Resimen dari kekuatan pasukan yang berada di sekitar Martapura dan Banjarmasin pada saat pembicaraan rehabilitasi dan mengangkat Rustam Kasmimbar sebagai formator.

Gt. Abdurrahman (Gt. Aman) mengajak Munir untuk berangkat ke pedalaman dalam tugasnya sebagai Korektor Susunan membawa konsep rehabilitasi Divisi IV ALRI (A) Pertahanan Kalimantan. Dalam perjalanan ke daerah Sektor Selatan mereka bertemu dengan Kepala Staf Muda dan Sekretaris Markas Besar dan membahas secara langsung konsep rehabilitasi tersebut. Dalam pembicaraan itu jelas memang sangat perlu sekali adanya rehabilitasi organisasi Divisi IV ALRI tersebut karena perkembangannya yang sangat pesat. Penyerangan terhadap pos-pos NICA dan pencegahan terhadap konvoi Belanda selalu terjadi secara bergiliran sehingga ada kesan bahwa kekuatan ALRI sangat besar. Pencegatan sepanjang jalan raya Banjarmasin - Hulu Sungai selalu terjadi.

Kekuatan yang telah ada dapat diketahui dari adanya Resimen Utara dipimpin oleh Martinus di Amuntai, Batalyon persiapan yang berkedudukan di Pagat/Hantakan (Barabai) dipimpin oleh Daeng Digul Tololio, Said Karli dan Bakhtiar yang tewas dalam pertempuran, Batalyon Ibnu Hajar, persiapan Batalyon Aliudindan A. Roba di Resimen Selatan yang berkedudukan di Padang Batung dan Gadung Rantau, ditambah dengan Resimen persiapan Rustam / Kasmimbar di Martapura, Banjarmasin, dan terakhir persiapan Batalyon H. Yu-

nus Atak cs. 37)

Pada pertengahan bulan Februari 1949 diadakan rapat antara pimpinan-pimpinan gerilya ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dengan mengambil tempat di Ilung. Pada rapat tersebut semua pimpinan hadir.

Dalam rapat itu dibicarakan soal-soal organisasi, susunan pucuk pimpinan dan rencana atau taktik perjuangan selanjutnya. Keputusan yang diambil waktu rapat itu adalah sebagai berikut :

a). Organisasi

Di samping pasukan - pasukan tempur yang mobil (Pasukan Penggempur) harus ada dan disusun pula pasukan teritorial yang berwilayah dan menguasai rakyat. Untuk itu harus dibentuk Markas Daerah yang membawahi Markas Pangkalan. Sistem teritorial yang dimaksud adalah untuk menguasai wilayah-wilayah dengan menunjuk pimpinan dari Markas Daerah dan Pangkalan Daerah yang akan menghimpun bantuan-bantuan berupa apa saja, keterangan apa saja tentang musuh, serta selalu bersedia memberikan bantuan pasukan yang mobil geraknya. Tiap Markas Daerah dan Markas Pangkalan ini mendapat nomor kode dan nama yang baru bagi daerah tersebut, contohnya seperti Berangas dinamakan Markas Daerah Bantam Raya, Sungai Lulut disebut Alam Roch dan lain-lain.

- b). Bentuk Markas Daerah, Markas Pangkalan Daerah ini pada dasarnya merupakan susunan pemerintahan karena di situ juga terdapat bagian-bagian penerangan agama, hakim pengadilan dan lain-lain lagi yang kesemuanya mengatur masyarakat daerah itu. Tiap Pangkalan terdiri lagi dari Seksi-seksi sebagai wilayah lingkungan terkecil.

Pasukan yang mobil dengan bentuk regu, peleton, kompi dan batalyon yang selalu bergerak dan melakukan serangan-serangan, sedangkan pada tiap Markas Daerah dan Pangkalan dibentuk dan disusun pula pasukan teritorial yang disebut tentara riwas. 38)

Secara Skematis sistem teritorial yang dimaksud adalah sebagai berikut :



- c). Di dalam rangka taktik dan perjuangan selanjutnya, supaya seluruh kesatuan yang bersenjata yang terdiri dari bermacam organisasi (yang belum meleburkan ke dalam ALRI) harus bersatu di bawah satu pimpinan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Untuk itu seluruh kesatuan bersenjata itu harus diundang kepada rapat untuk membicarakan rakannya.

Aksi-aksi yang harus dijalankan :

- pembersihan terhadap kaki tangan Belanda NICA berupa penyelidik-penyelidik yang terdiri dari siapa-pun juga.
- penyanggulan/penghadangan terhadap patroli/konvoi Belanda.
- penyerangan terhadap pos Belanda, militer atau polisi yang terkecil dan terpencil untuk merebut senjatanya.
- berusaha memutuskan hubungan perbekalan militer Belanda dan selalu berusaha dengan segala macam gangguan.
- untuk membiayai perjuangan ini harus didapat dari sumbangan penduduk dan di tiap Markas Daerah dan Pangkalan Daerah diwajibkan untuk mengaturnya, yang hanya boleh mempergunakan kwitansi yang ditandatangani oleh Pimpinan Umum dan Kepala Urusan Keuangan/Tata Usaha.

Juga diperkenankan mempergunakan hak milik, harta rampasan dari kaki tangan Belanda, tetapi hanya berlaku seizin Pucuk Pimpinan

Tiap Daerah diwajibkan menimbun bahan makanan

sewaktu-waktu dapat menerima dan memberi makan kepada Pasukan Penggempur yang singgah dan melintas atau berhenti di daerahnya.

Berusaha mengadakan hubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Darurat di Sumatera dengan jalan apapun juga.

Demikian antara lain beberapa keputusan yang diambil dalam rapat di Ilung tersebut.

Sebagai realisasi dari keputusan rapat tersebut, pada bulan Maret 1949 diadakan rapat dengan pimpinan MTKI Hulu Sungai dengan mengambil tempat di Berangas - Birayang.

Pihak ALRI Divisi IV (A) P.K. hadir lengkap dan diwakili dalam segala pembicaraan oleh Pimpinan Umum Hasan Basry. Tokoh-tokoh lain dari ALRI adalah H. Aberani Sulaiman, M Hammy AM, M. Adil, Djaperi dan beberapa tokoh lainnya. Sedang dari pihak pimpinan MTKI Hulu Sungai diwakili oleh H. Kaderi, Idjun Saidi, H. Nur'ai dan Gusti Berahim.

Di dalam rapat tersebut didapat kata sepakat bahwa MTKI Hulu Sungai melebur organisasinya ke dalam ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan, dengan catatan bahwa tindakan pimpinan MTKI harus pula diikuti oleh kesatuan lainnya yang bersenjata.

Pada bulan Maret itu juga (1949) oleh Pimpinan Umum Hassan Basry memerintahkan kepada Budhigawis bersama Hasnan Basuki Kepala Staf Muda dan Ma'rufi komandan Resimen Selatan untuk berangkat ke Selatan yaitu Kandangan dengan tugas :

- a). Memberikan penerangan kepada Pimpinan setempat Markas Daerah dan Markas Pangkalan Daerah serta rakyat pada umumnya, tentang keadaan yang terakhir serta langkah-langkah yang telah diambil di dalam perjuangan, se sesuai dengan keputusan rapat di Ilung dan Rangas.
- b). Meninjau organisasi dan susunan Markas Daerah dan Markas Pangkalan yang berada di daerah Selatan.
- c). Membentuk dan menyusun Pasukan Penggempur untuk daerah Selatan, dalam arti kata menambah dan menyempurnakan yang sudah ada.

Sesuai dengan rencana, maka disiapkanlah rapat-rapat umum

terutama untuk mengumpulkan dan menghubungi Kepala-kepala Markas Daerah dan Markas Pangkalan serta Komandan Pasukan Penggempur. Rapat ini merupakan rapat yang terbesar yang diadakan di Melutu. Dalam rapat itu hadir utusan-utusan dari daerah-daerah : Kandangan, Rantau, Muara Muning, Negara, Margasari, Simpur, Haruyan dan beberapa daerah yang lain lagi. Yang hadir tak kurang dari 300 orang peserta rapat. Diantara utusan ada pula yang langsung membawa perbekalan senjata dan peluru.

Dalam rapat itu Budhigawis sebagai Komisariat Gerakan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan mengenai organisasi, susunan, dan rencana perjuangan selanjutnya. Secara resmi dalam rapat tersebut diserahkan pula surat keputusan pengangkatan Kepala-kepala Markas Daerah dan Markas Pangkalan disertai dengan instruksi serta Anggaran Dasar perjuangan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan.

Pada waktu daerah perjuangan masih terbatas di Hulu Sungai, Markas Besar Rahasia ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan mulanya bertempat di daerah Birayang/Pagat. Sekitar bulan Maret 1949 Markas Besar tersebut dipindahkan ke Padang Batung. Dalam bulan Mei 1949 datanglah rombongan PS 14 Riwan Kiwa ke kota Seribu Daya yang meliputi komplek Pagar Haur, Jelatung, Durian Rabung dan Padang Batung. Di sinilah waktu itu berada Markas Besar ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Maksud kedatangan PS 14 yang dipimpin oleh Gusti Aman (Gusti Abdurrahman) Ltm (L), perwira penghubung yang ditugaskan dari Markas Besar ALRI di Tuban untuk mengadakan hubungan dengan ALRI Divisi IV (A) Kalimantan. Seperti telah dijelaskan bahwa Gusti Aman ditugaskan oleh Pimpinan Umum Hassan Basry sebagai Korektor Susunan, yang bermaksud membicarakan perluasan perjuangan di bidang politik dan ekonomi. Selain itu dimaksud pula untuk mendirikan suatu partai politik yang akan menjadi tulang punggung Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah, dan pendukung pejuang gerilya dengan nama PARIKA (PERTAI REPUBLIK INDONESIA KALIMANTAN). Rapat diadakan di Padang Batung di rumah H. Abdul Kadir dan dipimpin oleh H. Aberani Sulaiman, menghasilkan persetujuan pokok untuk memperluas bidang perjuangan, tapi belum bisa disusun rumusan pembicaraan.

Pada tanggal 3 Mei 1949 terjadilah pertemuan antara : Budhi-

gawis, P. Raya nama samaran dari Munir Sutan Tumenggung dan Gusti Aman di Melutu. Di sini terjadi pertukaran pikiran dan pendapat. Budhigawis mengemukakan perlunya memperlebar dan memperluas usaha teritorial dan penerangan. P. Arya mengarahkan tentang ekonomi nasional dalam bentuk koperasi, sedangkan Gusti Aman mengemukakan masalah de facto dan gerilya Kalimantan dalam perjuangannya. 40)

Pada tanggal 9 Mei 1949 Senin pagi, rapat tak bisa dilangsungkan karena serbuan tentara Belanda ke Seribu Daya, serangan mana sejak hari Jum'at sampai dengan Minggu dari 3 jurusan. Rombongan PS 14 dan tokoh lainnya yang hadir pada rapat itu segera menghindar, kota Seribu Daya dikosongkan, alat-alat kantor, tawanan dan sebagainya dipindahkan. Setelah serangan ini reda perundingan diteruskan lagi di sebuah rumah antara Amboton dan Telaga Langsat. Diputuskan untuk membuat surat kepada delegasi pemerintah RI di Jakarta, melaporkan bahwa di Kalimantan Selatan dibentuk Pemerintahan Darurat dan diminta agar ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan diakui sebagai pejuang Republik Indonesia dengan territorialnya Kalimantan Selatan.

Dengan dasar pikiran yang dikemukakan di atas, mulailah disusun program kerja perjuangan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Untuk menyusun rencana kerja ini diperlukan rapat lengkap dengan Pucuk Pimpinan, Budhigawis meminta dan mengusulkan agar Pimpinan Umum Hasan Basry dan Kepala Staf H. Aberani Sulaiman berhadir di Padang Batung guna membicarakan rencana kerja tersebut.

Pimpinan Umum Hassan Basry dan Kepala Staf H. Aberani Sulaiman pada tanggal 9 ke 10 Mei 1949 tiba di Padang Batung (Durian Rabung). Rapat diadakan yang dihadiri oleh : Pimpinan Umum Hassan Basry, Kepala Staf H. Aberani Sulaiman, Korektor Susunan Gusti Aman, P. Arya, Setia Budhi dan R. Sukadani. Rapat tersebut dijaga dengan pengawasan yang ketat. Di sinipun terjadi lagi kontak bersenjata dengan Belanda, tetapi karena dalam penyerangan tersebut tentara Belanda lebih kuat, terpaksa pasukan gerilya mengundurkan diri ke Pagat Batu.

Di Pagat Batu inilah diputuskan (10 Mei 1949) supaya mengambil siasat memecah berpisah dahulu untuk menghindari serang-

an ulangan Belanda. Sebelum rombongan berpisah Pimpinan Umum mengamanatkan beberapa petunjuk penting yaitu agar segala sesuatu yang telah direncanakan dan telah dimulai perencanaan program perjuangan dan program perbaikan bagi ALRI Divisi IV tersebut, perencanaannya diteruskan dimana saja berada, setiap ada waktu dan kesempatan, dan apabila telah menjadi keputusan/keputusan pendapat supaya dibawa kepada Pimpinan Umum di Niih untuk mendapatkan keputusan terakhir.

Kelompok yang berpisah terdiri tiga yaitu :

- a). Kelompok Pimpinan Umum Hassan Basry menuju Niih.
- b). Kelompok H.Aberani Sulaiman Kepala Staf beserta Budhigawis menuju ke Kalinduku dengan tujuan seterusnya Telaga Langsat dan Haruyan.
- c). Kelompok Korektor Susunan Gusti Aman, P.Arya dan Hassan Basuki menuju Mandapai dengan tujuan seterusnya Telaga Langsat dan Haruyan.

Daeng Ladjida, Setia Budi dan R.Sukadani bertugas mengkonsolidasikan pasukan yang terpecah sesudah kontak bersenjata menghadapi tentara Belanda, dan menyiapkan serangan balasan langsung ke kota Kandangan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai pada malam hari. Di Kalinduku H.Aberani Sulaiman bersama Budhigawis mengeluarkan sebuah pengumuman yang isinya melarang kepada orang yang akan pergi naik haji ke Mekah.

Tujuan dan dasar pengumuman itu ialah :

- a). Untuk membuktikan kepada daerah di luar Hulu Sungai khususnya, Kalimantan pada umumnya, bahwa di Kalimantan ada gerilya bersenjata ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan yang lebih berkuasa dari Pemerintah Belanda NICA,
- b). agar uang rakyat jangan mengalir ke Pemerintah Belanda NICA.

Dengan dasar pikiran dan tujuan yang sederhana ini, secara politis tujuannya tercapai, sebab akhirnya semua orang mengetahui bahwa ada larangan dari pihak ALRI. Pengecualian terhadap larangan naik haji ini diberikan kepada H.Abdulhadi yang pergi ke Mekah untuk membawa laporan tentang perjuangan ALRI Divisi IV (A)

Pertahanan Kalimantan yang dialamatkan kepada wakil R I di Saudi Arabia Dr.H.Rasyidi dan diteruskan pada wakil R I di PBB. ⁴¹⁾

Rombongan Gt.Aman, P.Arya dan Hasnan Basuki meneruskan perjalanan ke Pedalaman Ambarawa (Telaga Langsat). Disinilah program kerja disusun kembali. Susunan pemerintahan berbentuk Gubernur Tentara, yaitu pemerintahan berbentuk militer sesuai dengan situasi perang. Pada saat itu sudah diketahui pula tentang Pemerintahan Darurat di Sumatera dan rencana Pemerintahan pelarian di New Delhi India telah diketahui pula.

Dari situasi demikian timbullah keinginan untuk melahirkan sebuah pernyataan tentang ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dengan dasar pikiran sebagai berikut :

- a). Untuk menyatakan kepada masyarakat dan Pemerintah R I serta dunia umumnya, bahwa gerilya ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan yang berada di Kalimantan benar-benar ada dan mempunyai kekuatan serta kemampuan untuk menyusun suatu pemerintahan dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia, meskipun sekarang de facto di bawah penjajahan Belanda.
- b). Menyatukan pimpinan dan organisasi perjuangan ke dalam suatu pimpinan yang berbentuk Pemerintahan Gubernur Tentara.
- c). Sesudah Clash kedua terjadi, menyatakan sebagai persiapan menghadapi gagalnya Pemerintahan Darurat di Sumatera serta gagalnya Pemerintahan Pelarian di New Delhi India Kalimantan dipersiapkan untuk dijadikan pusat pemerintahan Republik Indonesia sebagai usaha kelanjutan perjuangan merebut kemerdekaan.
- d). Mempersatukan seluruh potensi dan rakyat Kalimantan untuk merubah struktur perekonomian kolonial dengan membangun perekonomian nasional.
- e). Di samping itu telah menjadi kenyataan vacuumnya pemerintahan karena Assisten Kiai Belanda (Camat) ditarik dari pemerintahan kecamatan, sehingga rakyat benar-benar tidak mempunyai pemerintahan. ⁴²⁾

Tanggal 15 dan 16 Mei 1949 rapat terus diadakan untuk

merumuskan beberapa hal yang menyangkut teks proklamasi yang diinginkan, personalia pemerintahan, program kerja bidang politik dan ekonomi yang akan dijalankan nanti. Hadir dalam rapat tersebut H.Aberani Sulaiman Kepala Staf, Gusti Aman Korektor Susunan, Budhigawis, Maxim le Miaty (samaran dari P.Arya) serta sekretaris Romansi. Perundingan tersebut bertempat di Telaga Langsat yang terkenal sebagai Ambarawa, serta mendapat penjagaan ketat dari pasukan pengawal yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Rapat berakhir tanggal 16 Mei 1949. Pada saat itu terdapat keputusan bersama bahwa batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dijadikan Divisi dengan 3 Resimen :

- a). Resimen I berkedudukan di Amuntai dengan komandan Martinus.
- b). Resimen II berkedudukan di Barabai, Kandangan dengan komandan Gusti Aman.
- c). Resimen III untuk daerah besar Selatan, yaitu Martapura, Banjarmasin dan Pelaihari, komandannya dijabat oleh W.Dharma. 43)

Untuk memimpin, mengarahkan divisi itu dibentuk pemerintahan Gubernur Militer dengan daerah seluruh Kalimantan Selatan yang meliputi daerah Banjar, Dayak Besar dan Kalimantan Tenggara. Daerah Kalimantan Selatan dibagi dua, yaitu daerah sebelah utara, yaitu daerah Barabai, sampai Tanjung dipimpin oleh H.Aberani Sulaiman, serta daerah yang dinamakan Daerah Besar Selatan, yaitu Kandangan, Rantau sampai ke Selatan dipimpin oleh P.Raya. Daerah ini kemudian berkembang sampai ke Kalimantan Barat dan Timur. (Kalimantan Tengah waktu itu tergabung dalam Kalimantan Selatan).

Tek Proklamasi disusun oleh Maxim le Miaty, H.Abrani Sulaiman dan Budhigawis. H.Abrani Sulaiman menambahkan kata-kata : "Kalau perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan". Jadi Proklamasi itu dilahirkan oleh para pemimpin ALRI Divisi IV, H.Abrani Sulaiman sebagai Kepala Staf, Budhigawis sebagai Kepala Penerangan, dari Baalyon Gusti Aman Korektor Susunan merangkap Komandan PS-14 Martapura dan Maxim le Miaty dari Banjarmasin.

Proklamasi itu harus ditandatangani oleh Pimpinan Umum,

tetapi tidak diketahui dimana tempatnya. Atas petunjuk Kepala Staf H.Aberani Sulaiman berangkatlah ke Jambu Hulu berhenti di rumah Idar, dan bertemu dengan Hasan Basuki Kepala Staf Muda Batalyon.

Pagi-pagi tanggal 17 Mei 1949 Teks Proklamasi dan susunan Pemerintahan dibawa oleh Gusti Aman, Maxim le Miaty, Hassan Basuki dan seorang pembantu bernama Dahlan menuju Niih tempat persembunyian Pimpinan Umum Hassan Basry. Pukul 5 sore rombongan tiba di Niih dan berjumpa dengan Pimpinan "Umum Hassan Basry yang didampingi oleh ajudannya Tobelo.

Semua dokumen yang dibuat di Telaga Langsung diserahkan ke pada Pimpinan Umum Hassan Basry untuk dipelajari. Atas permintaan Pimpinan Umum Hassan Basry Teks Proklamasi itu dibacakan oleh Maxim le Miaty. Di hadapan Pimpinan Umum Hassan Basry dan pimpinan ALRI lainnya, proklamasi Gubernur Tentara ALRI dibacakan oleh Maxim le Miaty.

Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut :

MERDEKA

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara dari ALRI melindungi seluruh daerah Kalimantan menjadi bagian dari Republik Indonesia memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945, yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan.

TETAP MERDEKA.

Kandangan, 17 Mei IVRep.

Atas nama Rakyat Indonesia
di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara
ttd.

(Hassan Basry) 40

Proklamasi 17 Mei tidak ditandatangani pada tanggal 17 itu, mungkin 3 hari kemudian dengan acara selamat yang sederhana, Hasan Basri sendiri lupa tanggalnya yang tepat. Selain Teks Proklamasi yang harus ditandatangani oleh Pimpinan Umum Hasan Basri juga ditandatangani surat-surat penting antara lain surat kepada Delegasi Pemerintah R I di Jakarta, surat kepada pucuk Pimpinan ALRI Divisi IV di Jawa, surat kepada anggota Dewan Banjar yang dianggap progressif dan 20 lembar kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Tentara. 45)

Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan pembangkangan terhadap Persetujuan Linggarjati dan Renville, artinya pembangkangan terhadap pembuat-pembuatnya yaitu Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda berikut saksi-saksinya wakil negara-negara Sekutu, juga terhadap wakil PBB. 46)

Tanggal 7 Mei 1949 pihak-pihak yang membuat perjanjian Linggarjati dan Renville menyatakan akan berunding kembali dan perundingan itu merupakan kelanjutannya, di mana Pemerintahan Republik Indonesia telah/sudah mengakui kekuasaan Belanda atas Kalimantan. Perundingan itu akan diadakan di Den Haag Negeri Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Kalau Konferensi nanti akan menghasilkan sama seperti yang ditetapkan dalam Linggarjati dan Renville ini berarti bahwa Proklamator 17 Mei 1949 merupakan tokoh pemberontakan dan RI tidak berdaya untuk menolongnya.

Dalam bentuk Pemerintahan Gubernur Tentara ini disusunlah personalia dari Gubernur Tentara tersebut.

- a). Gubernur Tentara/Panglima Divisi : Hassan Basry.
- b). Kepala Staf : H.Aberani Sulaiman.
- c). Kep. Departemen Urusan Umum : Hamdi Budhigawis,
kemudian diganti oleh
P.Arya.
- d). Kep. Departemen Urusan Pertahanan : M. Hammy AM
- e). Kep. Departemen Urusan Penerangan : Hamdi Budhigawis.
- f). Kep. Departemen Urusan Tata
Pemerintahan : H.Aberani Sulaiman

kemudian ditetapkan

Gt. Aman.

- g). Kep. Departemen Urusan Kemakmuran : Maxim Le Miaty
Wakil : Hasnan Basuki
- h). Kep. Departemen Persenjataan : Djaperi
Wakil. : Tobelo. 47)

Garis besar rencana perjuangan adalah sebagai berikut :

- menjalankan pemerintahan Gubernur Tentara,
- membagi Kalimantan Selatan menjadi 2 daerah besar, yaitu :
 - Daerah Utara meliputi Barabai dan Amuntai dikepalai oleh H.Aberani Sulaiman,
 - Daerah Selatan meliputi Kandangan, Rantau dan daerah sebelah Selatannya dikepalai oleh P.Arya,
- membentuk 3 Resimen :
 - Resimen I di Utara
 - Resimen II bagian Tengah
 - Resimen III Selatan.
- memperbanyak persenjataan
- memperluas penerangan
- mendirikan Partai Rakyat Indonesia Kalimantan (PRIK)
- membentuk KNI Daerah.
- memajukan kehidupan bersama
- mengatur keuangan dan perekonomian rakyat dengan cara :
 - menghancurkan perekonomian Belanda
 - mengusahakan pembiayaan perjuangan
 - memperkuat perekonomian rakyat atas dasar sistem koperasi.
 - melepaskan petani dari penghisapan lintah darat dan penghisapan pedagang.
 - menghidupkan perusahaan karet untuk kepentingan perjuangan.
- menguasai/mengatur keuangan rakyat, mengedarkan CRI (Orang Republik Indonesia). 48)

- seluruh anggota ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan Selatan akan ditetapkan pangkatnya dan jabatannya, untuk yang paling tinggi Gubernur Tentara/Panglima Divisi berpangkat Letnan Kolonel. Pemakaian pangkat militer baru terjadi bulan Agustus 1949. Romansi adalah yang belum menerima pangkat kemiliteran. Sebelumnya Hassan Basry hanya dipakai sebagai Pimpinan Umum.

Pangkat serta jabatan pimpinan lainnya antara lain sebagai berikut :

- a). H.Aberani Sulaiman Kepala Staf merangkap komandan daerah Utara berpangkat Mayor. (L).
- b). P.Arya dengan samarannya Maxim le Miaty komandan daerah Besar Selatan berpangkat Mayor (L).
- c). Martinus komandan Resimen I menguasai daerah utara berkedudukan di Pasar Arba Tanjung, berpangkat Letnan Satu (L).
- d). H.Damanhuri, komandan Resimen II bagian tengah menguasai Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan di Padang Batung Kandangan, berpangkat Letnan Satu (L).
- e). Rustam, komandan Resimen III daerah Selatan menguasai Kotapraja Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kapuas, Sampit dengan kedudukan Sungai Lulut Banjarmasin, berpangkat Letnan Satu.

Pendidikan dan pengadilan diserahkan kepada Kepala Departemen Agama yang waktu itu dijabat oleh Hakim Natsir dan Departemen yang kedua yang ditambah dari personalia di atas ialah Departemen Infiltrasi dan Tenaga Potensi yang dijabat oleh M. Nurdin. Hakim Natsir dan M. Nurdin adalah nama-nama dari P.Arya sendiri.

Dengan ditandatanganinya Teks Proklamasi dan Dokumen lainnya di Niih, lahirlah Gubernur Tentara dan Pemerintahan Daruratnya. Upacara itu sangat sederhana, tanpa upacara formal tanpa penyempahan, hanya sekedar diramaikan penduduk Niih dengan jamuan ketan. Tugas ini cukup berat. Yang menjadi problema adalah bagaimana mempertumbuhkan/meembangkan pemerintahan Gubernur Tentara menjadi suatu kenyataan di tengah peme-

rintahan resmi yang dikemudikan Residen A.G.Deelman, Dewan Banjar, Dewan Dayak Besar dan Dewan Kalimantan Tenggara.

Tanggal 21 Mei 1949 rombongan Gubernur Tentara beserta ibu naik ke atas rakit (dua buah), turun ke Mandapai. Di Batantangan rombongan berpisah, Gusti Aman Kapten. Maxim le Miaty dan Hasnan Basuki bergerak menuju Sungai Paring.

Tanggal 22 Mei 1949 ditempelkan selebaran tentang Proklamasi Gubernur Tentara ALRI di pasar Kandangan oleh Tarsan dengan demikian Proklamasi itu diketahui oleh seluruh masyarakat.

Dari Sungai Paring rombongan terus ke Tanjak, di situlah diperbanyak Teks Proklamasi, Program Perjuangan, Susunan Pimpinan Gubernur Tentara, dan instruksi yang akan dikirim kepada tiap-tiap Kepala Markas Daerah dan Markas Pangkalan seluruh Kalimantan Selatan. Kepada 40 orang anggota Dewan Banjar dikirim surat agar meninggalkan Dewan tersebut dan membentuk K N I Daerah.

Berita tentang perletakan senjata telah diketahui. Bagi gerilya ALRI Divisi IV yang telah memproklamasikan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Jogja dengan tentara TNI, merasa berkewajiban untuk menaatinya.

Dalam hubungan pelaksanaan gencatan senjata ini Kepala Departemen Urusan Penerangan Budhigawis/Lts mengeluarkan siaran berupa pernyataan yang isinya :

“Kami tunduk dan taat terhadap putusan Pemerintah Pusat Republik Indonesia tentang gencatan senjata yang diperintahkan oleh Panglima Tertinggi/Presiden Republik Indonesia. Pelaksananya hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jogja dengan pengawasan Komisi Tiga Negara “.

Untuk menghadapi/mengatur persiapan dalam pelaksanaan gencatan senjata ditentukan Kepala Komisi Umum merupakan Komandan setempat yang berkekuasaan penuh :

- a). Kepala Komisi Umum Tanjung Amuntai : M.Hammy AM/
Kapten
- b). Kepala Komisi Umum Barabai : H.Aberani Sulaiman/
Mayor.
- c). Kepala Komisi Umum Negara “ Budhigawis/Lts.

- d). Kepala Komisi Umum Kandangan-Rantau. : Gt. Aman/Kapten kemudian diganti oleh Budhigawis merangkap Negara.
- e). Kepala Komisi Umum Martapura-Banjara. : P.Arya/Mayor. Wakil Hasan Basuki, kemudian ditetapkan Hasan Basuki.

Kepala-kepala Komisi Umum ini ditunjuk dan ditetapkan di samping tugasnya dan jabatannya yang ada. Kedudukan Komisi Umum tidaklah mengurangi kekuasaan Kepala Markas Daerah dan Pangkalan ataupun Komandan Pasukan Pengempur.

3. Markas besar Alam Roch. 49)

Nama Alam Roch adalah nama sandi untuk Markas Besar Selatan yang berkedudukan di Sungai Lulut-Banjarmasin. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa kekuatan gerilya dibagi menjadi dua buah wilayah besar yaitu Markas Besar Utara, dipimpin langsung oleh Kepala Staf H.Aberani Sulaiman/Mayor, sedangkan Markas Besar Selatan yang pada mulanya berkedudukan di Kandangan kemudian dipindahkan ke Banjarmasin, dipimpin oleh P.Arya/Mayor.

Dalam perjuangan gerilya Kalimantan, kedudukan daerah Selatan ini sangat penting, sebab di sinilah letak pusat pemerintahan Belanda di mana Residen Veenendal berkuasa.

Markas Besar Alam Roch didirikan pada tanggal 6 Juni 1949 jam 16.00. Pembentukannya hanya berlangsung beberapa menit. Anggota pertama adalah H.Arif bin Montot dan anaknya Asra bin H.Arif, kemudian H.Baseri yang menjadi komandan Detasemen, menyusul MS Rusman, Burhan Seniman, letnan Rusdi, Suroto dari kepolisian.

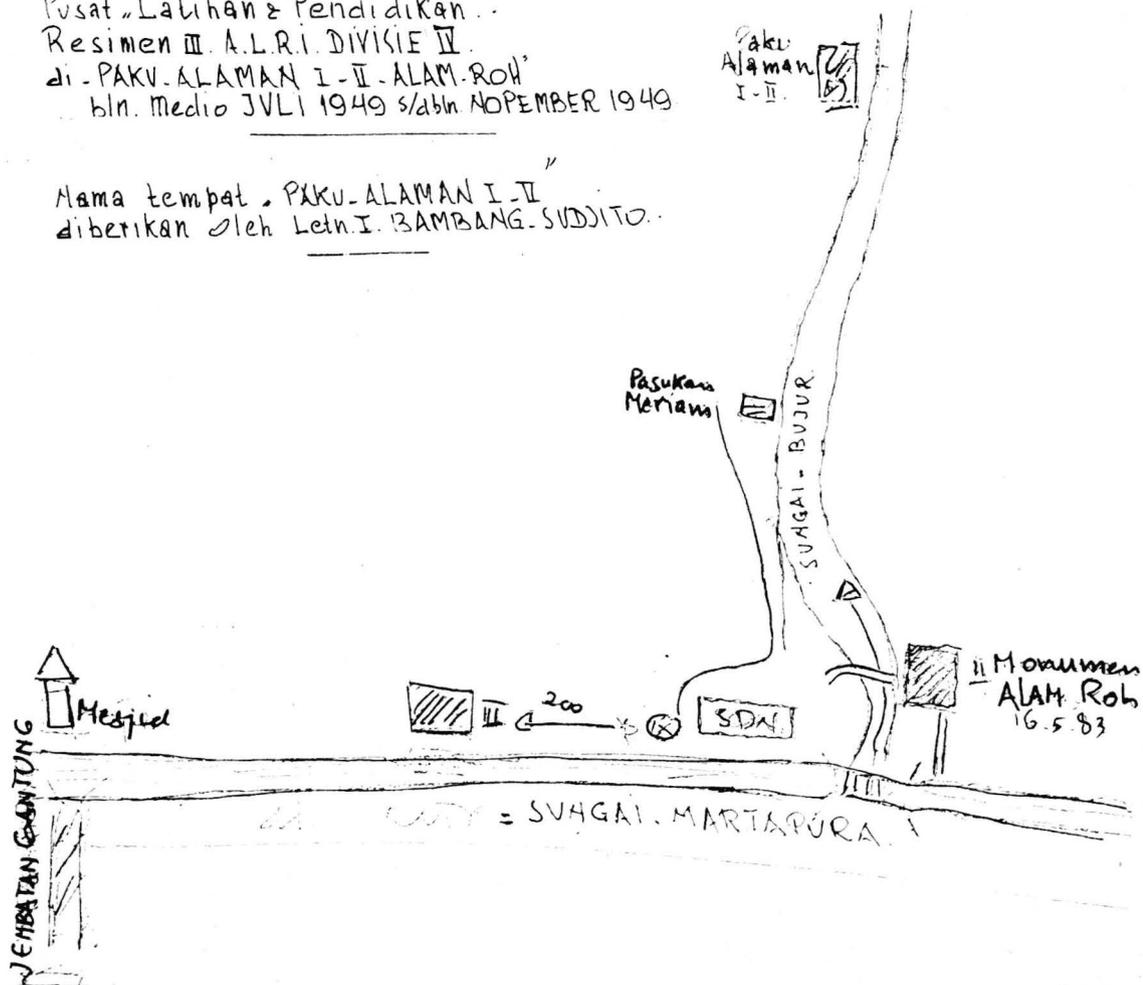
Markas Besar Alam Roch berumur hanya kurang lebih 100 hari, sejak berdiri tanggal 6 Juni 1949 sampai dengan Cease Fire di Minggu Raya 2 September 1949, tetapi sumbangannya terhadap perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan perjuangan untuk menggabungkan dengan RI di Jogja mempunyai arti yang sangat besar.

Dalam suatu perjalanan setelah penandatanganan Teks Proklamasi, P.Arya bersama Gusti Aman berangkat menuju daerah selatan. Antara Gusti Aman dan P.Arya terjadi pertukaran pendapat

Pusat "Latihan & Pendidikan".
Resimen III A.L.R.I. DIVISIE II.
di - PAKU-ALAMAN I-II - ALAM-ROH
bln. Medio JULI 1949 s/d bln. NOPEMBER 1949

Mama tempat "PAKU-ALAMAN I-II"
diberikan oleh Letn. I. BAMBANG-SUDITO.

Paku
Alaman
I-II.



antara merebut Kandangan sebagai pusat Markas Besar Selatan, dengan merebut Banjarmasin.

P.Arya berpendapat bahwa apabila berhasil merebut Banjarmasin akan mempunyai arti yang sangat besar daripada berhasil merebut Kandangan. Dari pertukaran pendapat disetujui untuk memusatkan perhatian pada ibu kota pusat kekuasaan Belanda Banjarmasin, karena itu tanggal 31 Mei 1949 berangkatlah Gt.Aman dan P.Arya menuju daerah Selatan dengan melintasi : melalui Simpung, Matang Karanggan, Kalumpang, Gadung, Paul Parigi, Kepayang, Pandulangan, daerah danau Kalambu dekat Binuang, Paku, Cinta Puri, Kampung Baru, Galam Rabah, Antasan Suton Tabing Rimbah, Lok Baintan yaitu daerah rawa yang penuh dengan nyamuk, di beberapa tempat terdapat ular dan buaya. Setiap ada kesempatan dalam perjalanan selalu diadakan rapat atau pertemuan untuk menjelaskan tentang perjuangan.

Perjalanan sampai di Banjarmasin, setelah berjalan selama 125 jam non stop.

P.Arya semestinya menjalankan kekuasaan di Kandangan, tetapi yang dituju adalah Banjarmasin pusat kekuasaan Belanda NICA, P.Arya harus pergi ke Banjarmasin, tanpa berunding, tetapi kemudian disetujui. Setelah beberapa hari di Banjarmasin, Kandangan mengirim bantuan antara lain Bung Henry, ajudan Gubernur Tentara Tobelo dan Daeng Ladjida. Daeng Ladjida menamakan daerah ini, daerah Sungai Lulut dan Lok Baintan dengan nama sandi "Alam Roch". Pusat pemerintahan Alam Roch berada dimana pimpinan umum itu berada. Umumnya Pimpinan Umum itu berada di rumah H. Baseri muara Sungai Lulut dan di rumah Arifin Montot di Pamurus. Pusat militernya di Gudang Hirang.

Daerah Alam Roch itu yaitu daerah yang tidak pernah diganggu oleh Belanda, mulai dari Sungai Jingah dan sepanjang Sungai Martapura dan jalan Martapura Lama, dari jembatan besi Sungai Bilu sampai ke Martapura.

Penduduk Kota Banjarmasin dan sekitarnya dan seluruh rakyat di Kalimantan Selatan umumnya akan digerakkan untuk mendukung dan mempertahankan Proklamasi Gubernur Tentara 17 Mei 1949.

Penduduk bangsa asing Eropah dan Timur Asing boleh ikut

membantu, setidaknya-tidaknya jangan mengganggu perjuangan ALRI Divisi IV dalam segala lapangan perjuangan. Supaya diikuti seluruh golongan dan lapisan rakyat Kalimantan Selatan, gerak itu harus memasuki segala bidang kehidupan, bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan agama, ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan akan menyertai dan memimpin gerak itu, ALRI harus berfungsi multi kompleks dan berdwifungsi.

Sebagai suatu kesatuan tentara yang terlepas dari induknya sebagai akibat dari Persetujuan Linggarjati dan yang dikuatkan lagi dalam perjanjian Renville, ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan terlepas dari induk pasukannya di Jawa, ALRI berada dalam negara asing, meskipun wilayah negara itu adalah kampung halamannya sendiri. Negara itu harus dirubah menjadi negara sendiri dalam bentuk kesatuan, bersatu kembali dengan negara Republik Indonesia, seperti yang terkandung cita-cita Proklamasi 17 Mei dari Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Semuanya ini harus terlaksana sebelum perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) berakhir.

Gerakan rakyat daerah selatan ini dikenal sebagai Markas Besar Daerah Selatan yang menggunakan nama Sandi Alam Roch yang akan mengendalikan perjuangan yang dicitakan. Nama ini diberikan oleh Daeng Ladjida/Lts, suatu nama yang membayangkan kesucian dan kerahasiaan, tapi menakutkan.

Pengendalian Alam Roch dipimpin oleh P.Arya, yang oleh rakyat akan disangka berasal dari salah satu keluarga kerajaan di Indonesia. Sebagai seorang Pangeran dari Jawa, P.Arya berhasil bertemu dengan Sribaginda Sultan Kotawaringin dan Permaisuri di rumah Kiai (Camat di jalan Kalimantan berseberangan dengan rumah AA.Hamidhan. Pertemuan dan pembicaraan tentang perjuangan dimana P. Arya mengharap agar Sribaginda Sultan tidak berkeberatan menjadi pemimpin perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan di daerah Kesultnan Kotawaringin. Pembicaraan berjalan lancar karena kedua tokoh ini berasal dari kaum bangsawan. Begitu pula ketika P.Arya berkesempatan bertemu dengan Sribaginda Sultan Kutai, P.Arya mengaku berasal dari keluarga bangsawan Kotawaringin, sehingga komunikasi berjalan lancar.

Dalam penyamaran P.Arya sering mempergunakan nama-nama yang berlainan. Sebagai contoh P.Arya memperkenalkan Abdul



Pimpinan Umum Divisi IV ALRI Kalimantan Selatan Letkol H. Hasan Basry (memegang bunga) beserta perwira staf. Diapit Mayor H. Abrani, Sulaiman Kepala Staf (nomor 1 dari kanan) dan Mayor P. Arya (nomor 2 dari kiri)

Hadad alias Tobelo alias Abdurrahman yang berkulit putih kuning sebagai P.Arya, begitu pula terhadap seorang pemuda yang berkulit hitam pejuang berasal dari Banua Kupang. Dengan demikian rakyat umum mengenal P.Arya dengan bentuk warna kulit serta umur yang berlainan.

Lembaga-lembaga yang dipakai untuk menggerakkan rakyat adalah sebagai berikut :

- a). Departemen Urusan Umum : P.Arya. Kep.Departemen.
- b). Departemen Kemakmuran/Keuangan : Maxim le Miaty Kepala Departemen.
- c). Departemen Tata Pemerintahan : P.Arya, Kepala Departemen.
- e). Departemen Infiltrasi dan Tenaga Potensi : M.Nurdin, Kepala Departemen.
- f). Markas Besar Daerah Selatan, yang meliputi Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah sekarang dan Kalimantan Timur : Maxim le Miaty, Kepala Markas.
- g). Resimen III/Resimen Selatan : Wilhelmus Bernard, Komandan Resimen.

Resimen III/Resimen Selatan ini berkembang menjadi 6 Batalyon yang masing-masing dijabat oleh komandan Batalyon dengan territorialnya masing-masing.

Batalyon tersebut adalah :

- a). Batalyon I Martapura dipimpin oleh Rustam.
- b). Batalyon II Alam Roch dipimpin oleh MS.Rusman
- c). Batalyon III Kalimantan Tenggara dipimpin oleh Azidin-nor.
- d). Batalyon IV Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dipimpin oleh Abdullah Rivai.
- e). Batalyon V Kalimantan Timur dipimpin oleh Mr. Seneru wakilnya adalah Daeng Kucinta Gidul Tololio.
- f). Batalyon VI Batalyon Pelajar dipimpin oleh Fakhurrazi Adil dari H.Aberani Sulaiman Kepala Staf. Tokoh-tokoh Batalyon Pelajar ini antara lain seperti Kolonel Syamsir Alam, Kolonel Maskun Rivai, Letkol Dislansyah.

Taktik dan strategi yang dijalankan Markas Besar Alam Roch dari tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 2 September 1949, yaitu saat cease fire di Munggu Raya, adalah sebagai berikut :

a). *Bidang militer*

Markas Besar Alam Roch adalah suatu markas perjuangan yang meletakkan taktik strateginya kepada kekuatan non-militer untuk melumpuhkan Belanda. Sebagai pangkalan besar daerah Selatan ini adalah pusat Resimen III dengan wakil komandan Rustam.

Latihan militer diadakan sekitar Gudang Hirang untuk mendidik calon prajurit. Akhirnya Gudang Hirang tidak mampu menampung calon Prajurit yang jumlahnya lebih dari 1000 (seribu) orang. Komandan latihan adalah, Letnan Satu Bambang Sugito, wakil komandan latihan Letnan Tahir alias Bambang Subarjo dan wakil ke dua adalah Daeng Kian. Jadi latihan dipimpin oleh 3 orang perwira, 2 orang dari Jawa yang masuk ke Kalimantan.

Kekuatan yang ada satu Resimen ditempatkan di Handil Bujur yang merupakan tempat latihan kedua setelah Gudang Hirang tidak mampu menampung calon prajurit.

Jabatan komandan tentara Resimen III ini dalam rapat ditetapkan adalah Nafiah, seorang keluaran Akademi Militer Jogja, tetapi orangnya tak pernah muncul, akhirnya jabatan tersebut dipegang oleh Wilhelmus Bernard. Pembantunya adalah Kepala Markas Daerah P.S.VI Bantam yaitu M.S.Rusman, yang kemudian menjadi wakil Kepala Markas Besar Daerah Selatan. Pembantu yang lain adalah H.Baseri Komandan Detasemen Alam Roch, bekas pegawai Kotabesar Banjarmasin.

Daerah Besar Selatan ini yang selanjutnya disebut Alam Roch meliputi pula daerah Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Koordinasi daerah yang seluas ini dimulai dengan sebuah Proklamasi.

Pada sekitar seminggu sebelum 17 Agustus 1949, dikeluarkan sebuah Proklamasi susulan yang maksudnya untuk daerah perjuangan keluar dari wilayah Kalimantan Selatan.

Proklamasi itu berbunyi :

“Merdeka !

Kami Gubernur Tentara Kalimantan Selatan dengan ini membuka pintu Kalimantan Selatan bagi rakyat Indonesia di Kalimantan Timur dan Barat untuk bersama-sama memperjuangkan masuknya Kalimantan ke dalam Republik Indonesia.

Tetap merdeka”.

Kandangan 17 Agustus V Rep.

Teks Proklamasi ini disusun di Sungai Madang pada tanggal 26 Juli 1949 untuk menghadapi pembunuhan massal yang direncanakan oleh Letnan Kolonel Veenendal. Tetapi karena birokrasinya di Kandangan Proklamasi itu terlambat dikeluarkan, dari tanggal 26 Juli 1949 menjadi 17 Agustus 1949.

Sebelum Proklamasi itu diumumkan ke kedua daerah itu yaitu ke Kalimantan Timur dan Barat dikirim kekuatan bersenjata. Kekuatan bersenjata yang dimaksudkan adalah :

- a). Daeng Kucinta Gidul Tololio, dikirim ke Kalimantan Timur dengan pesan harus sudah berada di daerah itu sebelum tanggal 17 Agustus 1949.
- b). Ke Kalimantan Barat dengan melalui sungai Kahayan dikirim Daeng Mastilo alias Abdullah Rivai, anak buahnya berpencah ke daerah Kotawaringin, Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu.
- c). Ke Kalimantan Tenggara dikirim ekspedisi yang dipimpin oleh Azidin Noor (sekarang purnawirawan Letkol).

Ketiga orang itulah sebagai Kepala Batalyon dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tenggara.

Inilah yang sempat dilakukan untuk menghubungkan kedua atau ketiga daerah tersebut, sedangkan hubungan dalam pemerintahan belum sempat dilakukan. Tetapi karena semangat revolusi hal ini menggugah semangat dan mendapat sambutan yang baik, antaranya Bambang Aflus dari Kalimantan Timur.

Pada waktu Alam Roch didirikan senjatanya hanya *parang bongkol (parang besar)*, sedangkan senjata api baru akan diambil

dari orang-orang pegawai Belanda yang dipersenjatai Belanda dari perkebunan Belanda.

Dalam hal ini pertama kali diadakan surat edaran kepada penduduk Eropah dalam kota Banjarmasin.

Surat edaran itu berbunyi sebagai berikut :

“Pasukan Tuan sedang melakukan perbuatan terror waktu ini menganiaya penduduk laki-laki dan perempuan tanpa membedakan orang yang sudah jompo, dan anak-anak.

Perbuatan itu sangat banyak dan kami banyak menerima permintaan untuk membalas perbuatan tersebut dengan terror pula, sehingga terjadilah perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti pembunuhan orang-orang Belanda diperkebunan Danau Salak dan Panyiuuran.

Oleh karena itu kepada orang Belanda supaya berhati-hati pada malam hari dan berkumpul di tempat perlindungan bersenjata, terutama dibagian kota yang belum sempat dikuasai oleh pemerintah kami.

Banjarmasin 25 Juni 1949

Markas Besar Alam Roch.

ttd : P. Arya/Mayor.

Jadi edaran ini seolah-olah P. Arya melindungi orang Belanda. Sesudah edaran ini disebar, maka orang Belanda di Sungai Bilu, di Kuin Selatan diserbu. Yang pada mulanya dianggap isapan jempol saja, ternyata suatu kenyataan.

Surat edaran ini menimbulkan sedikit kebencian pegawai Indonesia yang bekerja pada Pemerintah Belanda karena teror Belanda tersebut, dan Residen Deelman mendapat protes dari Pemerintah Belanda yang berjiwa kemanusiaan.

Setelah terkumpul senjata kira-kira 30 buah senjata, dimintalah dari Hulu Sungai pejuang pilihan untuk menggempur kota Banjarmasin, yaitu objek-objek militer, seperti rumah Territorial Komandan, rumah Residen Delman, asrama KL9 (bekas Kodam) asrama Tatas (sekarang Mesjid Raya Sabilal Muhtadin), pos militer di Ujung Murung, Troepen Commando (bekas Kodamar), kompleks MP di Teluk Tiram, Kompi X di Kelayan, kompleks MP di Sungai Acan

(Pekapuran) dan asrama KNIL di Pacinan (komplek bekas P dan K).

Penyerangan dipimpin oleh Komandan Resimen III Wilhelmus Bernard bersama Rusman.

Sebelum penyerangan dipersiapkan lebih dahulu dengan mengkosongkan lanting-lanting (rumah rakit) yang terdekat di sepanjang sungai Martapura. Begitu pula terhadap kaum WTS diperalat untuk mencari informasi dalam segi informasi tentara Belanda.

Komandan Resimen I Martinus menyerang dari jembatan Coen ke hilir. Komandan Batalyon Alam Roch MS Rustam menyerang Kampung Gedang ke hulu.

Perintah serangan ditetapkan jam 10.00 secara serentak terhadap sasaran yang akan diserang.

Di rumah Residen Deelman sedang berlangsung rapat dan kelihatannya panik dengan situasi yang gawat. Rapat bubar sebelum jam 10.00, sedang diseberang sungai telah tersusun senapan untuk menembak. Tetapi karena pasukan itu taat kepada komando, mereka tidak menembak meskipun banyak yang sangat ingin menembak.

Serangan itu berlangsung sekitar bulan Agustus 1949 setelah cease fire di Sumatera. Serangan ini ditentang oleh A. Ruslan (Ketua KNI Daerah tahun 1945) yang mengatakan bahwa cease fire itu berlaku juga terhadap Kalimantan, tetapi P.Arya berpendapat bahwa cease fire itu hanya untuk daerah de facto Republik Indonesia, sedang Kalimantan belum termasuk daerah Republik Indonesia.

Penyerangan terhadap kota seperti ini diulangi sampai tiga kali, tetapi tidak lagi dipimpin oleh Wilhelmus Bernard, tetapi oleh MS Rusman sendiri sebagai komandan Batalyon.

Penyerangan ke kota ini bukanlah dengan maksud pembunuhan tetapi suatu peragaan kekuatan, bahwa ALRI sudah mempunyai kekuatan. Teknik penyerbuan itu dilakukan oleh satu regu yang menembak hanya berselisih beberapa sekon, sehingga bunyinya seperti senjata otomatis.

Taktik penyerbuan ini berhasil, sebab setelah penyerbuan tersebut orang yang ragu-ragu, menjadi pengikut Republik dan orang yang anti menjadi ketakutan. Pengikut Republik menjelang bulan September lebih dari 99 %, hal ini ternyata kemudian terlihat hilangnya semua pegawai bangsa Indonesia dan lari ke Markas Alam

Rokh, sehingga praktis pemerintahan Belanda tidak dapat berjalan.

b). *Bidang politik*

Kekuatan politik Belanda harus dipecahkan dengan kekuatan politik pula. Persoalan Kalimantan Selatan tidak boleh dibiarkan menjadi soal dalam negeri pihak Belanda saja, kalau kita ingin menang. Sebab itu diambil beberapa tindakan :

- a). melumpuhkan organisasi pemerintahan Belanda ke dalam.
- b). menjadikan persoalan Kalimantan Selatan soal nasional dan internasional.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk tindakan diatas, maka disusunlah pemerintahan Alam Rokh yang meliputi wilayah seperti telah disebutkan di atas, dikurangi Kandangan, karena Kandangan dimasukkan ke dalam daerah Utara.

Pucuk pimpinan Alam Rokh adalah Kepala Markas Besar Selatan dibawahnya terbagi atas beberapa buah Markas Daerah. Jumlah Markas Daerah makin bertambah banyak sesuai dengan hasil perjuangan yang diperoleh. Tiap Markas Daerah membawahi beberapa Markas Pangkalan dan tiap Markas Pangkalan mengkoordinir beberapa Seksi. Begitulah susunan pemerintahan Alam Rokh, yang dalam hal ini sama dengan apa yang telah dijalankan oleh Markas Besar Utara.

Setelah Wali Daerah Banjar M. Hanafiah dimasukan ke dalam perjuangan dan menetap di Markas Alam Rokh maka sejak itu dijalankan pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil Alam Rokh yang dijalankan oleh Wali Daerah M. Hanafiah, dibantu oleh bekas Kiai Besar (Bupati) Belanda Kiai Raden, Kiai Kepala (Wedana) Basuni. Petugas pemerintahan sipil lainnya adalah : Kiai H. Abdul Muluk, Kiai H. Horman, yang kemudian pernah menjabat Wali Kota Kotamadya Banjarmasin, Kiai Gusti Hidayat, Camat Kota, bekas Kiai Besar Belanda (Bupati) Kiai Besar Yusran. Inilah tokoh pemerintahan sipil Alam Rokh dengan diawasi oleh Kepala Markas Besar Selatan/Alam Rokh. Pemerintahan sipil ini dimulai sekitar tanggal 10 Agustus 1949, yaitu setelah Alam Roch didirikan tanggal 6 Juli 1949. Pemerintahan Sipil tersebut di bawah kontrol atau pengawasan Komite Nasional Indonesia Kalimantan (KNI Kalimantan), yang semula dipimpin oleh Kiai Ahmad Ruslan, unsur KNI di tahun 1945.

Atas anjuran Kepala Markas Besar Selatan, Ketua KNI Kalimantan itu diserahkan dari A. Ruslan kepada ketua baru Mr. Burhanuddin. Di samping tugasnya sebagai ketua KNI Kalimantan Mr. Burhanudin juga menjalankan politik luar negeri dengan menghubungi K M B antara lain perjuangannya menyatakan bahwa KNI Kalimantan menarik wakil-wakil Dewan Banjar ke K M B tersebut.

Penarikan itu didasarkan pada status Dewan Banjar yang merupakan organ Pemerintah Belanda dan bukan mewakili rakyat Kalimantan yang tergabung dalam Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan, dan selanjutnya menyerahkan urusan ini kepada ketua delegasi Dr. Moh. Hatta.

Mr. Burhanuddin sebelumnya adalah kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dari pemerintahan Belanda, tapi dari penyelidikan Departemen Infiltrasi dan Tenaga Potensi diketahui bahwa dia adalah berjiwa Republikan. Dalam tugasnya sebagai pegawai Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri, dia pernah mewakili Hindia Belanda pada Konferensi Internasional tentang masalah gula di Havana. Mr. Burhanuddin lari bergabung ke Markas Besar Alam Rokh adalah dengan kesadarannya sendiri.

Sebelum terbentuknya KNI Kalimantan oleh Markas Besar Alam Rokh, Alam Rokh telah menjalankan politiknya untuk merapatkan persaudaraan antara golongan agama Kristen dan Islam, dan juga telah menarik sebagian besar golongan Kiai atau pamong praja yang waktu itu terkenal sebagai golongan BB (Binnenlands Bestuur). Untuk mengumpulkan golongan BB ini diadakan acara berbuka puasa bertempat di rumah Kiai Besar Dayak Besar Mohran Ali. Acara ini dibiayai oleh Markas Besar Alam Rokh dalam rangka untuk mengumpulkan pegawai golongan BB dari pemerintah Belanda. Mereka yang diundang yang diperkirakan mempunyai simpati atau setidak-tidaknya tidak menghalang-halangi rencana perjuangan. Tokoh-tokoh yang hadir pada acara itu ialah Maxim le Miaty sebagai wakil dari P. Arya, Iberahim Sedar dari RECOMBA Pemerintah Belanda, Kiai Besar Raden, Kiai Besar Basuni, Kiai Ahmad Ruslan, Ahmad Hudari dan Mr. Burhanuddin.

Acara berbuka puasa itu mempunyai dua tujuan :

- Merapatkan hubungan persaudaraan antara Kristen Dayak dengan suku Banjar Islam.

Dalam pembicaraan itu diminta agar Kiai Besar Dayak Besar mempergunakan pengaruhnya supaya permusuhan antara suku Dayak dengan suku Banjar yang beragama Islam dapat dihentikan. Seperti diketahui saat itu Belanda membentuk "pasukan laung" yang terdiri dari suku Dayak Maanyan yang menteror daerah Hulu Sungai yang sedang panen, di sekitar Klandis, Danau Panggang dan Babirik.

Dalam pembicaraan kekeluargaan itu, Kiai Besar Dayak Besar menyanggupi untuk menghentikan permusuhan tersebut. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan agar golongan BB ialah para Kiai agar sedapatnya mengikuti paham kemerdekaan tersebut, kalau tidak sekurang-kurangnya simpatisan. Dalam acara itu terdapat unsur-unsur pamong praja yaitu para Kiai, unsur Dewan Dayak Besar, unsur Dewan Banjar dan dari pemerintah Belanda (Recomba).

Siasat psywar ditujukan kepada pegawai Indonesia yang bekerja dikantor pemerintah Belanda, begitu pula terhadap tentara KNIL, bahkan siasat psywar juga ditujukan kepada Residen Deelman.

Surat terhadap Residen Deelman sepanjang 4 foliotik yang isinya ialah :

"..... bahwa pesan Residen Deelman yang disampaikan lewat Kiai Besar Moh. Said di Kandangan berisi anjuran untuk menyerah belum sempat kami pikirkan karena orang-orang kami sedang sibuk menggali tanah untuk menguburkan korban-korban berbaju hijau repot menebang bambu untuk mengasramakan gadis-gadis yang tercemar dan kepada tuan Residen nanti kalau waktu bersenang-senang menikmati masa pensiun sekali-kali bersembahyang untuk gadis yang tercemar itu. Sekali-kali coba bayangkan kalau seandainya gadis tuan berada dalam pelukan lelaki kasar."

Surat tersebut dilemparkan di muka rumah Residen. Residen naik pitam menerima surat itu. Sementara itu memang berita dari Hulu Sungai tertutup, sehingga orang mengira berita itu semuanya benar.

Kemudian disusul pula surat kedua yang berbunyi :

"..... dari seorang penghianat kulit putih kami mendapat

bahan, tuan tidak mempunyai hak untuk mengampuni Hassan Basry dan kawan-kawan, sedangkan ke Kiai Besar Said, tuan menyampaikan pesan akan memberi ampun. Rupanya Tuan bohong besar akan memberikan yang Tuan tidak punya, karena menurut hukum Belanda bahwa pengampunan penghianatan tersebut hanya dapat diberikan oleh Ratu Yuliana, dengan perantaran Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta.....”

Psywar ini menyebabkan pegawai Indonesia yang bekerja pada Pemerintah Belanda merasa timbul kebencian terhadap Belanda, sebab Belanda telah melakukan banyak kekejaman terhadap bangsa Indonesia. Kebencian ini nanti yang menimbulkan rasa persatuan dan senasib untuk bersama-sama memperjuangkan negara Indonesia merdeka.

Menjelang bulan September terbukti kelumpuhan Pemerintah Belanda, aparat pemerintah tidak dapat berjalan lagi, hal ini disebabkan golongan BB yaitu para Kiai semua menghilang ke pedalaman Markas Besar Alam Rokh. Bagi pemerintahan Belanda hal ini merupakan putusannya hubungan dengan rakyat sedangkan lembaga yang diciptakannya yaitu Dewan Banjar tidak menjalankan fungsi yang dikehendakinya.

Untuk meningkatkan persoalan Kalimantan Selatan menjadi masalah nasional diadakan pula tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Mengirim surat-surat untuk delegasi RI di Jakarta, dan laporan kepada pucuk pimpinan ALRI Divisi IV Letkol Jakaria Madun, ex pimpinan ALRI Divisi IV.
- Keputusan Gubernur Tentara tentang pembubaran Dewan-Dewan Banjar, Kalimantan Tenggara dan Dayak Besar yang ditan-datangani oleh Wk.Kepala Departemen Urusan Umum atas nama Gubernur Tentara.
- Larangan naik haji bagi rakyat Kalimantan Selatan, karena dari jumlah calon 1200 orang yang akan naik haji itu mengakibatkan daerah Kalimantan Selatan kerugian 3 juta gulden sebagai kekayaan yang diserahkan kepada Pemerintah Belanda.
- Seorang calon jemaah haji yang dikecualikan adalah H.Abdulhadi bin H. Mugeni Marwan yang pergi ke Mekah dengan tugas memberi laporan perjuangan ALRI Divisi IV (A) Per-

tahanan Kalimantan yang dialamatkan kepada wakil RI di Saudi Arabia Dr.H.Rasyidi dan diteruskan pada wakil pemerintah RI di PBB.

Dikeluarkan Proklamasi kedua seperti yang telah diuraikan di muka yang ditujukan kepada rakyat Indonesia di Kalimantan Timur dan Barat. Isi Proklamasi 17 Agustus V Rep, yang melalui surat kabar "Kalimantan Berjuang" diketahui pula di Jogja dan oleh Letkol Jakaria Madun ex Komandan ALRI Divisi IV, kemudian diteruskan ke PBB melalui kantor berita UP dan AP.

c). *Bidang Sosial*

Untuk menggerakkan masyarakat Islam, diperlukan pula tenaga pemimpin yang menanganinya. Di bawah pimpinan Hasan Mugni Marwan yang memberikan ceramah-ceramah di mesjid dan langgar dianjurkan supaya setiap para khatib memimpin acara sembahyang gaib untuk para arwah gerilya yang menjadi korban. Juga di Mesjid Jami Banjarmasin, dilakukan acara sembahyang gaib, hal ini menyebabkan orang bertanya-tanya tentang keadaan gerilya.

Di Mesjid Sungai Lutut Hasan Mugeni Marwan pernah berceramah mulai jam 10.00 menjelang saat sembahyang Jum'at tentang perjuangan merebut kemerdekaan dipandang dari segi agama Islam. Para muballigh dan muballighah dikerahkan untuk memberi penerangan kepada massa umat Islam, antara lain ialah muballighah Syarifah Muzenah Assegaf dan Khatib Syarbaini dan isteri beliau muballighah H.Hamdah.

Untuk maksud yang sama menggerakkan segala lapisan masyarakat terutama golongan Cina, untuk ini diperlukan pula penggerak yang berasal dari warga Cina itu sendiri. Untuk masyarakat Cina A Tong yang kemudian disusul oleh Go She He adalah tokoh dari pengurus Tionghoa Weg Wan. Begitu pula Kim Hong dan Kim Hue.

Untuk menggerakkan golongan Kristen adalah saudara angkat dari Munir, yaitu Brunau Sandang kemudian F.Mahar dan Iduar Kamis. Mereka menggugah umat Kristen dengan mengambil intisari dari sejarah umat Kristen dahulu, yaitu perjuangan rakyat Asia Kecil terhadap penjajah Romawi. Perjuangan ini bukanlah mengadakan pembunuhan tetapi melepaskan diri dari belenggu penjajah tersebut.

Pertemuan antara P.Arya dengan Sri Sultan Kotawaringin seperti yang telah dijelaskan di muka, adalah dengan maksud untuk mengajak Sri Sultan berserta permaisuri untuk menjadi pemimpin dari masyarakat Kotawaringin untuk berjuang merebut kemerdekaan dan menggabungkan dengan RI di Jogja. Sri Sultan menyanggupi, tetapi karena baginda sedang bepergian ke Solo sebab permaisuri dari Solo, Sultan menunjuk Pangeran Mangkubumi mewakili Sri Sultan sebagai pemimpin rakyat untuk daerah Republik. Dengan Pangeran Musa bekas Residen R.I. 1945, P.Arya pernah setengah memaksa agar beliau ikut menanggulangi perjuangan rakyat dan mendapat jawaban beliau menyanggupi. Untuk menggabungkan golongan bangsawan di Kalimantan Timur melalui Bambang Aflus. Golongan cendekiawan dikoordinir oleh Mr. Burhanuddin, sehingga masuklah kepihak gerilya Dr. Seneru, Dr.Suwarti dan Dr. Sunarti. Golongan atau kelompok pendatang diurus oleh kelompoknya masing-masing, seperti masyarakat Timur diurus oleh Maxim le Miaty, masyarakat Ambon oleh Tamaasela, golongan Belanda-Indo oleh Albert Breder, golongan Cina oleh Kim Hong dan Kim Hue.

Pada bulan Agustus 1949 H. Usyaransyah dan Anang Dinar, masing-masing administratur dan pejabat Apoteker Rumah Sakit Ulin, membentuk PMI Dua orang suster, yaitu Sophi dan Marhanah ditugaskan di Markas Besar Alam Rokh. Untuk menyaingi PMI dr.Gambiro dan Kiai Besar Raden, dibentuklah PMI Nasional.

d). *Bidang Ekonomi.*

Masalah ekonomi yang pertama diurus adalah masalah bahan makanan, sebab bahan makanan adalah tulang punggung perjuangan gerilya.

Pada sekitar bulan Mei daerah Rantau (sekarang Kabupaten Tapin) sedang panen, sedangkan daerah Kandangan sedang menderita kekurangan bahan makanan akibatnya rusaknya sawah tidak terurus karena seringnya gangguan Belanda. Banjarmasin sendiri sedang paceklik. Bahan makanan tersebut dilarang dibawa ke Banjarmasin dengan maksud untuk blokade ekonomi bahan makanan ke Banjarmasin.

Setelah Departemen Kemakmuran mulai aktif di Banjarmasin dengan mendirikan Markas Besar Alam Rokh oleh H.Arifin Montot

komandan armada Dukuh dilaksanakan larangan pemasukan sayur-sayuran ke kota Banjarmasin. Pos-pos penjagaan ada di sungai-sungai antaranya di Sungai Lulut untuk barang dagangan yang berasal dari Martapura dan Keliling Benteng, pos Sungai Andai untuk yang berasal dari Alalak, dan pos di Kelayan untuk produksi pangan daerah di hulunya. Yang diperbolehkan keluar masuk Banjarmasin hanyalah barang untuk koperasi dari dalam kota atau dari luar kota.

Koperasi desa dibentuk sebagai alat memperkuat daya ekonomi baik untuk pengumpulan produksi desa, maupun penyaluran penyebaran bahan-bahan yang didatangkan dari luar. Sedangkan export import dilakukan dengan kerjasama dengan badan dagang nasional. Di tiap desa diharuskan mendirikan koperasi primair yang bertugas sebagai koperasi pembelian dan penjualan. Barang dari kota boleh masuk melalui koperasi. Produksi rakyat termasuk juga hasil pertanian diurus oleh jaringan koperasi, begitu juga perdagangan export.

Terhadap rakyat giat diadakan propaganda, penerangan dan cara-cara ekonomi kolonial dan sistem pemasarannya, sehingga dengan itu ditimbulkan pula perangsang perjuangan.

Koperasi Sungai Lulut menjadi koperasi sentral. Ikan, kayu api, padi menjadi objek perkoperasian produksi. Keuntungan koperasi, mendorong pembentukan koperasi jasa yang akhirnya menjadi koperasi pusat. Dengan cara ini pula pengawasan lalu lintas barang makanan ke Banjarmasin dapat diawasi. Blokade bahan makanan ke Banjarmasin menjadi salah satu tugas Seksi Selidik yang mengkor dinir pedagang-pedagang sayur dan pedagang bahan makanan yang berdagang pulang balik Banjarmasin- Martapura. Koperasi bergerak sampai ke dalam kota Banjarmasin dengan anggota antara 10.000 sampai 20.000 orang. Koperasi ini juga bergerak untuk memudahkan pembelian beras.

Untuk membantu Pemerintah Gubernur Tentara dalam hal keuangan didirikan NV Bank Dagang Indoensia.

Untuk meningkatkan usaha koperasi ini didirikan SKDI (Sentral Koperasi Dagang Indonesia) yang anggotanya antara lain Husin Razak, Husin Nafarin dan dengan bekerjasama dengan Martin Dengas Pongoh Direktur NV Kinibalu berhasil mengkoperasikan penjualan karet Kalimantan Selatan.

Export karet yang dibeli oleh SKDI tersebut dilakukan oleh NV

Kinibalu bekerja sama dengan salah satu Firma di Jakarta. Dengan demikian NV Kinibalu bertindak sebagai agen dari koperasi karet. Sebelum koperasi karet menjalankan perannya harga karet di Banjarmasin Rp 0,45 (empat puluh lima sen) per kg. Setelah NV Kinibalu ikut dalam pembelian karet harga karet menjadi Rp.0.90,- per kg, dan akhirnya mencapai Rp.1.00,- (satu rupiah) per kg. Harga yang melonjak dari karet rakyat ini hanya terjadi pada minggu-minggu pertama dari adanya koperasi karet itu menjalankan kegiatannya. Pada saat itu harga karet di Banjarmasin stock ready export Rp 1,10 per kg, dengan demikian NV Kinibalu masih mempunyai keuntungan.

Dari hasil penjualan karet tadi diambil 20% sebagai deposito untuk Pemerintah Gubernur Tentara ALRI. Hasil Deposito minggu pertama mencapai jumlah 2 juta gulden. Uang sebanyak ini membiayai Pemerintahan dan membiayai tentara ALRI. Untuk biaya lauk pauk tentara dalam dua bulan hanya menghabiskan sebanyak F.135.000(135.000 gulden) untuk Daerah Utara. Dengan beroperasi koperasi karet yang tergabung dalam SKDI tersebut, menyebabkan tengkulak-tengkulak Cina lumpuh sama sekali.

Usaha lain ialah rencana mengedarkan uang ORI (Oeang Republik Indonesia) dan menarik peredaran uang merah (uang Belanda) yang waktu itu beredar di Kalimantan Selatan sekitar 40 Juta gulden. Uang Belanda ini maksudnya ditahan sebagai divisa, tetapi perdamaian terlalu cepat sehingga yang sempat beredar hanya 40.000 ORI saja.

Tentang usaha dalam bidang perkayuan, hanya sempat dalam tingkat perdagangan intersuler saja, jadi belum sempat export tetapi inipun juga lumayan sebab harga kayu gergajian di Banjarmasin Rp 25,- per kubik, sedangkan harga pembelian di Banjarmasin Rp 22,5,-per kubik, jadi keuntungannya sudah cukup lumayan.

Terhadap penjualan kayu ditarik cukai kayu terutama penjualan kayu keluar daerah. Cukai pertama yang diserahkan oleh petugas cukai sebesar Rp 10.000,- (gulden) dan uang tersebut diinstruksikan dimasukkan ke dalam Bank Dagang Indonesia yang dibentuk oleh ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Bank Dagang ini dibentuk oleh Martin Dengas Pongoh, Husin Razak, Husin Nafarin dan lain-lain.

Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Markas Besar Alam Rokh dalam rangka meningkatkan bidang ekonomi ialah :

- Peningkatan produksi bahan pangan, agar produksi melebihi keperluan sendiri.
- Pengendalian/pembatasan lintah darat.
- Pembagian tanah Cultuur MIG Kelayan dan Sungai Madang milik Tuan-Tuan tanah Cina.
- Pengumpulan yuran dan sumbangan untuk pembiayaan perjuangan.

Tokoh-tokoh penggerak Markas Besar Alam Rokh lainnya selain Kepala Departemen Kemakmuran yang merangkap menjadi Kepala Markas Besar Alam Rokh P.Arya, terdapat pula beberapa tokoh lain yang bersama-sama berjuang demi suksesnya perebutan kemerdekaan antara lain ialah :

- a). Mukhtar alias Raden Mukhtar Sipahit Lidah - nama baru ini berasal dari nama kenalan Munir di Sumatera Selatan, umur 20 tahun, jabatan pengawal pribadi Kepala Markas Besar Alam Roch.
- b). Muhammad Syahrane alias MS Rusman, umur 30 tahun, pekerjaan sopir. Jabatan Wakil Kepala Staf, merangkap Wakil Kepala Daerah Besar Alam Roch, merangkap ajudan Komandan Batalyon II, merangkap Kepala Markas Daerah P.S 6 ST Bantam.
- c). Maswi Rusdi umur 25 tahun bertugas bidang penerangan, inteligen dan persenjataan.
- d). Suriansyah, umur 35 tahun, bekas resersi PID/Polisi Belanda alias Tan Malaka alias Cikroaminoto, jabatan Kepala Keamanan Umum.
- e). Daeng Ladjida, umur 30 tahun, bekas komandan Resimen II, jabatan Kepala Keamanan, pengganti Tan Malaka.
- f). Abdul Hadad alias Abū. Rahman alias Tobelo bekas Heiho Jepang, umur 25 tahun, pelarian sopir Jawatan Kehutanan Nica bekas ajudan Pimpinan Umum ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan, jabatan ajudan Markas Besar Alam Roch.

- g). Chr. Henry, umur 35 tahun, petugas keamanan. Inilah pembantu tetap selain yang telah disebutkan di atas.

D. CEASE FIRE MUNGGU RAYA, 2 SEPTEMBER 1949

Menjelang cease fire di Munggu Raya ada beberapa hal yang telah dilakukan Markas Besar Alam Rokh yang mempercepat kemenangan bagi ALRI. Kejadian yang penting itu adalah :

Penarikan *BB Ambtbaar*, yaitu penarikan para Kiai yang bekerja sebagai pegawai Belanda sebagai pamong praja. Hampir seluruh para pegawai dari berbagai jawatan di kota Banjarmasin telah menerima surat selebaran yang dikirim dengan perantaraan pos, dalam surat mana isinya memberikan ancaman kepada mereka yang bekerja pada pihak Belanda. Surat edaran itu di tanda tangani oleh P.Arya/Mayor atas nama Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Surat edaran itu tertanggal 28 Agustus 1949.

Surat edaran itu selengkapnya berbunyi :

“No.48-PK-V

Pokok : PINDAH KERJA

Dengan ini dianjurkan kepada seluruh bangsa Indonesia yang bekerja pada Belanda di lapangan pemerintahan dan perekonomian, supaya mulai hari Selasa tanggal 30 Agustus 1949 tinggal di rumah masing-masing, dan mencari perhubungan dengan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI atau tinggal diam sampai perundingan dengan Jenderal Mayor Soeharjo dan UNCI berhasil memuaskan.

Kepada seluruh rakyat yang menaati anjuran ini, diucapkan terima kasih terlebih dahulu, karena itu berarti suatu pengorbanan perjuangan kemerdekaan yang sejati dan berisi. Hanya dengan inilah pengorbanan dilanjutkan dapat dibatasi.

Banjarmasin 28 Agustus V Rep.

Komisaris Umum Banjarmasin

ttd :

P. ARYA/Mayor ALRI. 50)

Dengan adanya surat edaran dari Gubernur Tentara ALRI ini, menyebabkan seluruh pegawai di Kalimantan Selatan, tidak bekerja sebagai pegawai Belanda dan lari ke pedalaman.

Situasi bulan Agustus 1949 merupakan puncak kegiatan perjuangan ALRI. Perasaan tak senang terhadap Belanda sudah berani dilahirkan, hal ini juga disebabkan karena keyakinan mereka terhadap perjuangan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Pemerintah Belanda lumpuh, pemerintahannya macet, pembantu pejabat pemerintah orang Indonesia menghilang, perekonomian mandek, polisi melarikan diri. Dalam hal ini yang bekerja hanya kantor pos dan telegraf dan telepon, rumah sakit, PID, dan sekolah-sekolah.

Untuk menanggulangi hal ini terpaksa Belanda memanggil kembali pegawainya terutama kepada kepala-kepala jawatan di seluruh Kalimantan Selatan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

No. Fiz-06-32.

“RM RDS RDO 21 April jl.no.pz-211-03 indien ambtennren vanwege bedreiging werk neerleggen wordtgeen herhael geen salaris uitbetaald stop achteraf kan berhal dan als nog salaris uitbetaal dindien hiertoe in individueel te beoor delen gevallen aanleiding blijkt te bestaan.”

Rs. Banjarmasin

voor deze :

De Secretaris,

ttd : J.D.N. de Fremery

terjemahannya kira-kira demikian :

“Jika para pegawai oleh karena ancaman tidak bekerja, maka gajinya tidak dibayar. Dan kemudian hari kemungkinan akan dibayar gajinya, jika secara individuil ternyata ada alasannya”. 51)

Di antara tokoh politik dari Partai S K I (Serikat Kerakyatan Indonesia) dan tokoh-tokoh Dewan Banjar yang lari ke pedalaman adalah :

- a). R.Sya'ban, Kepala Waterleiding Banjarmasin (sekarang PAM) dan Ketua Koordinasi Partai-partai dan Organisasi. Kedatangannya ini bersama-sama Camat Gusti Hidayat Asisten Kiai (Camat) Kota Banjarmasin dan Dr. Gambiro.
- b). H.Hasan Basri dari Dewan Banjar juga datang menemui Kepala Markas Besar Alam Rokh, yang menyarankan agar revolusi Kalimantan itu jangan memakai senjata ekonomi dan sosial, supaya mengkhususkan saja menggunakan tentara.

Hal ini bertentangan dengan Maxim le Miaty yang menjelaskan bahwa ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan menggunakan segala bidang perjuangan. Revolusi sosialnya tentu tidak sama dengan revolusi sosial Sumatera Utara, dimana raja-raja dan kaum bangsawan dibunuh.

- c). Zafri Zamzam, tokoh SKI dan anggota Dewan Banjar, seorang yang pro Republik, juga datang ke Markas Besar Alam Rokh.

Hal lain yang dilakukan oleh Markas Besar Alam Rokh menjelang cease fire adalah pembentukan KNI Kalimantan, yang diketuai oleh Mr. Burhanuddin seperti yang telah dijelaskan di muka. Pembentukan KNI ini merupakan penyempurnaan organisasi pemerintahan sebagai suatu persiapan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Belanda nanti. Pembentukan KNI Kalimantan ini didahului dengan pembubaran Dewan-Dewan Banjar, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar dan Kalimantan Timur oleh Gubernur Tentara ALRI dan diganti dengan KNI Kalimantan di mana di dalamnya duduk sebagai anggota wakil-wakil partai Politik dan organisasi, militer dan unsur-unsur golongan masyarakat.

Siasat *penghadangan* dan penggeranatan, pembakaran diteruskan. Serang menyerang waktu malam hari terjadi di mana-mana terhadap alat kekuasaan Belanda. Korban-korban kedua belah pihak silih berganti, tetapi semangat perjuangan rakyat semakin hangat, sehingga kota Kandangan pusat kekuasaan Belanda di Hulu Sungai dapat dikurung oleh gerilya. Peraktis kekuasaan Belanda hanya di kota-kota saja, sedang di luar kota berjalan pemerintahan Gubernur

Tentara ALRI. Kegiatan gerilya ALRI semakin menghebat meliputi Hulu Sungai-Banjarmasin, bahkan seluruh Kalimantan Selatan.

Memang pemerintah Belanda selalu berusaha menutupnutupi pemberitaan tentang kegiatan gerilya di Kalimantan, supaya mendapat kesan bahwa di daerah kekuasaan Belanda, karena Kalimantan tidak termasuk wilayah de facto Republik Indonesia, suasana aman dan tentram. Tetapi situasi yang hangat Belanda akhirnya tidak dapat menutupi keadaan ini. Surat kabar "Kalimantan Berjuang" yang pada mulanya terbit di Kandangan, kemudian memindahkan kedudukannya di ibu kota Kalimantan selalu memberitakan tentang terjadinya kegiatan gerilya dan kemenangan yang telah dicapainya, hingga menakutkan hati pihak pemerintah Belanda dan membesarkan hati rakyat. Dengan ini orang mengetahui hebatnya perjuangan rakyat dan sudah hampir dapat merebut seluruh kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan. Surat kabar "Kalimantan Berjuang", waktu itu dipimpin oleh Zafry Zamzam alm, tokoh SKI dan seorang berjiwa Republikan.

Suasana menjadi keruh dan selalu tegang akibat adanya dua macam "pemerintahan" di Kalimantan Selatan, dan dalam persaingan ini ternyata yang lebih ditaati oleh rakyat adalah pemerintah an Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Belanda hanya mempunyai kekuasaan di kota dan terhadap pegawai pemerintah Belanda di kota.

Kegiatan gerilya ditingkatkan dengan blokade ekonomi terhadap kota, penculikan pembesar-pembesar, pegawai polisi. Dewan Banjar tidak menjalankan fungsinya, pembakaran meningkat, surat kabar "Kalimantan Berjuang" turut mendesak perhatian Jakarta dan Jogja terhadap pergolakan di Kalimantan Selatan. 52)

Dalam situasi yang demikian dimana Pemerintah Belanda tidak bisa menjalankan pemerintahannya, terpaksa pemerintah Belanda mengajukan usul untuk mengadakan cease fire itu hanya terjadi antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia. Meskipun Kalimantan bukanlah termasuk daerah de facto Republik Indonesia seperti yang termuat dalam perjanjian Linggarjati dan Renville, Belanda terpaksa mengikuti dan mengajukan usul *cease fire* dengan melewati Komisi Tiga Negara (KTN) di Jakarta.

Sehubungan dengan usul pemerintah Belanda tersebut, peme-

rintah Republik Indonesia mengutus Jenderal Mayor Soeharjo dan Kapten Zainal Abidin ke Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 1949. Jenderal Mayor Soeharjo mengadakan pertemuan dengan Resi den Borneo Selatan dan Teritorial Komandan Borneo Selatan dan Timur tentang pelaksanaan cease fire yang direncanakan.

Hasil pertemuan tersebut dimuat dalam sebuah pengumuman yang disiarkan oleh pers, isinya sebagai berikut :

“Semufakat dengan majelis Pengurus Harian dari Dewan Banjar dan Dewan Dayak Besar, dengan ini kami dalam perembukan bersama dan berdasarkan atas penuh percaya mempercayai, berpendapat sudah mencapai suatu pemecahan soal, sehingga dalam waktu yang pendek permusuhan yang ada sekarang akan dihentikan. Tentang pelaksanaan dari pemecahan soal ini masih perlu beberapa pembicaraan-pembicaraan. Juga selesainya sesudah nyaterdapat persesuaian penuh terhadap pelaksanaan ini, kami akan memberi pengumuman lebih lanjut kepada pers. Disebarkan dalam pers tentang kedatangan dari Jenderal Mayor Soeharjo bermacam kabaran telah disiarkan, kami merasa perlu untuk mengumumkan, bahwa Jenderal Mayor Soeharjo datang ke Banjarmasin adalah atas perintah dari pemerintah beliau. Jenderal Mayor Soeharjo, Resi den Borneo Selatan; Teritorial Komandan Borneo Selatan dan Timur. 53)

Untuk mengadakan hubungan dengan Gubernur Tentara ALRI, Inspektur Jenderal, Jenderal Mayor Soeharjo mengadakan selebaran yang berisi pemberitahuan lewat kapal terbang sekitar Martapura dan Hulu Sungai. Isi pemberitahuan itu agar Hassan Basry mengirim kurir ke Lokpaikat pada tanggal 1 September 1949 untuk menerima surat dari Jenderal Soeharjo yang dibawakan oleh Kapten Zainal Abidin.

Isi pemberitahuan itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pemberian tahu”

Kepada Tuan Hassan Basry Komandan ALRI Divisi IV dari TNI yang berada di Kalimantan.

1. Hari Rebu tanggal 31 Agustus 1949, Jenderal Ma

yor Soeharjo akan kirim kapiten Zainal Abidin sebagai kurir, membawa surat untuk Tuan Hassan Basry. Jam 12.00 siang akan menunggu diperbatasan Hulu Sungai - Banjarmasin.

2. Tuan Hassan Basry supaya pada hari tersebut mengirimkan seorang kurir untuk menerima surat tersebut. Jam 10.00 pagi supaya menunggu di Pasar Lokpaikat, untuk dijemput oleh seorang anggota panitia penghubung saudara Ahmad Hudari dengan oto tentara yang memakai ben dera putih, guna di bawa ke perbatasan Hulu Sungai - Banjarmasin.
3. Oto tentara yang mengantarkan kurir Jenderal Soeharjo yang akan menjemput kurir Tuan Hasan Basry masing-masing dikawal dengan 2 oto pengawal (militaire dekking) melulu untuk menjaga keamanan.
4. Kepada semua rakyat diminta bantuannya :
 - a). supaya suka menyampaikan isi pemberian tahu kepada Tuan Hassan Basry.
 - b). supaya kurir baik dari Jenderal Mayor Soeharjo, maupun dari Tuan Hassan Basry dan juga yang akan menjemput ke Lokpaikat jangan dapat gangguan, bahkan diberi pertolongan secukupnya.

Banjarmasin, 30 Agustus 1949.

ttd :

Jenderal Mayor Soeharjo.

Belanda sudah beberapa kali menjebak Gubernur ALRI Hassan Basry, tetapi belum berhasil, oleh karena itu pemberitahuan yang disebarkan lewat kapal terbang inipun dikira suatu jebakan lagi, itulah sebabnya kurir yang dimaksudkan atau yang diminta menunggu di Lokpaikat tidak ada. Dalam situasi demikianlah P. Arya selaku Kepala Departemen Kemakmuran dan selaku Kepala Markas Besar Alam Rokh memberanikan diri ke Banjarmasin untuk menjumpai Letkol Veenendal dan menawarkan sebagai utusan

menemui Gubernur Tentara ALRI Hassan Basry di Markas Besarnya di Telaga Langsat. Kurir yang dikirim Jenderal Mayor Soeharjo yaitu Kapten Zainal Abidin terpaksa menunggu sampai malam di pos militer di Binuang, menunggu hasil diperoleh P.Arya.

P.Arya dari Markas Besar Alam Rokh Sungai Lulut berangkat dengan sebuah Jeep dengan melewati Gambut. P.Arya memakai tanda pangkat Mayor (L) disertai ajudan Tobelo berpangkat Letnan Satu (L) dan sopir Sersan (L) Sayuti. (tanda pangkat yang belum resmi). Di tengah jalan berjumpa dengan tentara Belanda setelah mengadakan dialog, kemudian tentara Belanda membiarkan mereka lewat.

P.Arya singgah di Sekolah Guru Km 5, dari sana menelepon ke Tropen Komando langsung diterima oleh Letkol Veenendal. Dari percakapan telpon tersebut, Letkol Veenendal mengirim kurir yaitu Kapten Van der Meulen untuk menjemput Mayor (L) P.Arya. Pertemuan berjalan dengan lancar dan dengan pengertian untuk membantu memperlancar cease fire, Letkol Veenendal memberi surat perintah jalan terhadap rombongan P.Arya/Mayor (L).

Rombongan Mayor P.Arya dikawal oleh tentara Belanda dengan memakai bendera putih dan malam tanggal 31 ke 1 September 1949 tiba di Padang Batung. Tanggal 1 September rombongan terus ke Karang Jawa dan disambut tentara KNIL di bawah komandan Kapten Verdeck. Di Karang Jawa bertemu dengan Nunci (sekarang Kolonel alm) yang bertindak sebagai kurir Hasan Basry.

Secara kronologis apa yang telah dilakukan oleh Inspektur Jenderal, Jenderal Mayor Soeharjo dalam rangka mengadakan cease fire yang diminta oleh Belanda adalah :

a). Tanggal 30 dan 31 Agustus 1949.

Dengan pesawat terbang, pemberian tahu dari Jenderal Soeharjo, Residen Borneo Selatan dan Territorial Komandan Borneo Selatan dan Timur, disebarkan di atas Martapura - dan Hulu Sungai.

b). Tanggal 31 Agustus.

Kapten Zainal Abidin sebagai kurir dari Jenderal Soeharjo berangkat dari Banjarmasin ke perbatasan Hulu Sungai. Konvoi militer yang membawa Tuan A.Hudari dari Markas dan Panitia Penghubung sesudah melewati Binuang di Km 93 bagian kam-

pung Pulau Pinang dengan susah payah menyingkirkan pohon kayu yang melintang di jalan, yang ditebang oleh kaum gerilya. Dengan alat penarik dimana militer KL bekerja keras sampai 7 Km dan baru dapat dilalui dalam waktu 7 jam pula. Jam 4.00 lewat baru rombongan dapat melewati Rantau, dan baru jam 4.30 sampai di Lokpaikat, kurir Hassan Basry yang dimaksudkan ternyata tidak ada. Rombongan meneruskan perjalanan ke Kandangan, mengadakan hubungan dengan pihak militer dan Kiai Besar yaitu Tuan Nunci dan Abdulmajid yang ditanya bersedia menjadi perantara dan selanjutnya menjadi penghubung dengan gerilya dibawa menemui kapten Zainal Abidin yang menunggu sampai malam di pos militer di Binuang. Setelah menerima surat-surat, masing-masing kembali ke Banjarmasin dan ke Kandangan.

c). Tanggal 1 September 1949.

Rombongan Jenderal Mayor Soeharjo bersama kedua ajudannya Kapten Zainal Abidin dan Kapten Budiarto, seorang peninjau KTN dengan juru bahasanya, Wakil Residen Borneo Selatan Ass. Residen Hollman, Wakil Territorial Komando Borneo Selatan dan Timur Kolonel Muller. Panitia Penghubung dari Dewan Dayak Besar dan Dewan Banjar Tuan-Tuan Dr. Soeranto, A. Hudari, A. Ruslan, Markasi dan Zafry Zamzam tiba di Kandangan. Dalam rombongan tersebut ikut pula wartawan dari Suara Kalimantan, Ipphos, Warta Berita, Kalimantan Berjuang serta wakil Antara.

d). Tanggal 2 September 1949.

Rombongan tersebut jam 10.00 pagi telah menunggu di Munggu Raya termasuk bagian kampung Sungai Raya 7 Km dari Kandangan menuju Rantau, yaitu suatu tempat peristirahatan yang ditentukan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin kaum gerilya ALRI. Letnan Kolonel Hasan Basry dengan stafnya Mayor P. Arya, Kapten Gusti Aman, Mayor H. Aberani Sulaiman dan lain-lain bersenjata lengkap, dijemput oleh sepasukan KL di Karang Jawa di bawa ke Munggu Raya. Jam 10.20 oleh Jenderal Mayor Soeharjo dengan didahului menyatakan peresmian Divisi ALRI Kalimantan atas nama Panglima Besar dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang R I , memerintahkan

kepada komandannya Letnan Kolonel Hasan Basry supaya mulai hari ini menghentikan permusuhan antara ALRI dan militer Belanda di Kalimantan. Perintah tersebut berlaku 2 minggu sesudah diucapkan, yaitu tanggal 16 September 1949 Letkol Hasan Basry menyambut dan berjanji patuh melaksanakan apa yang diperintahkan.

Jam 11.00 lewat, semua rombongan dengan dikawal KL menuju Karang Jawa 2 Km ke Utara di luar Kandangan. Dengan melalui "garis perbatasan" yang di atas *palangnya* tergantung bendera merah putih dan di jalanan dijaga oleh anggota ALRI bersenjata, seterusnya pasukan kehormatan menanti di muka rumah kepunyaan Alm.H. Mufti H.Barki yang merupakan tempat untuk ramah tamah. Ribuan rakyat turut hadir. Kini umum menyaksikan, melihat Hasan Basry yang tadinya dikenal namanya. Kaum gerilya dan militer Belanda yang selama ini bermusuhan dekat berhadap-hadapan, yang walaupun sama bersenjata, tapi tidak menembak lagi.

Jenderal Soeharjo memberi amanat supaya rakyat tetap bersatu dan memujikan tenaga pemuda dalam perjuangan serta memperingatkan agar mereka jangan salah langkah, sebab kesalahan langkah pemuda mengakibatkan kerugian dan keruntuhan bangsa.

Jam 12.00 pertemuan berakhir, semua orang pulang.

Dengan konvoi militer rombongan ke Banjarmasin, berangkat dari Kandangan jam 13.00 dan sampai dengan selamat di Banjarmasin jam 16.30.

e). Tanggal 3 September 1949.

Jam 10.00 pagi Jenderal Mayor Soeharjo cs dengan pesawat terbang kembali ke Jakarta. ⁵⁴⁾

Pertemuan di Munggu Raya tersebut bukan saja pelaksanaan cease fire antara Belanda dan ALRI semata, tapi bagi ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan sangat penting artinya sebab sejak tanggal 2 September 1949, ALRI diakui sebagai TNI, pangkat yang dipergunakannya disahkan dengan komandan Letkol Hasan Basry.

Cease Fire yang dimaksud harus sudah selesai 14 hari setelah tanggal 2 September 1949. Untuk pelaksanaan cease fire tersebut

Letkol Hasan Basry telah menunjuk Mayor P. Arya selaku ketua perundingan nanti menghadapi Belanda .

Secara lengkapnya pengumuman bersama hasil pertemuan Minggu Raya tersebut adalah :

"PENGUMUMAN BERSAMA".

Pada hari Jum'at tanggal 2 September 1949 jam 10.00 pagi, Paduka Tuan Jenderal Mayor Soeharjo di Minggu Raya (Kandangan) telah mengadakan pertemuan dengan Tuan Hasan Basry dan 9 (sembilan) orang staf beliau.

Jenderal Mayor Soeharjo diiringi oleh 2 orang ajudannya seorang militer observer, juru bahasa, Wakil Paduka Tuan Residen, Wakil Territorial Commandant dan 5 orang anggota dari panitia penghubung. Juga serta wakil ketua dari Dewan Banjar, Tuan M. Said.

Kepada Letkol Hasan Basry dipertanggung jawabkan pula pemberhentian permusuhan tersebut atas organisasi-organisasi atau golongan-golongan yang bersenjata yang berada di Kalimantan Selatan.

Kepada Letkol Hasan Basry diperintahkan buat menunjuk wakilnya untuk perhubungan, dan selanjutnya perundingan dengan local autoriteiten buat pelaksanaan penghentian permusuhan.

Penghabisan Jenderal Mayor Soeharjo memberi perintah kepada Letkol Hasan Basry supaya menghentikan permusuhan ini selambat-lambatnya harus dilakukan dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari ini (2 September 1949). Sesudah itu Letkol Hasan Basry menyatakan bahwa beliau telah menerima perintah penghentian permusuhan dan sanggup melaksanakannya.

Sebagai perwakilan beliau menunjuk Mayor P. Arya selaku ketua dan nama anggota lainnya akan menyusul.

Sebagai penjelasan Jenderal Mayor Soeharjo menegaskan supaya penghentian permusuhan ini dijalankan selekas-lekasnya.

Banjarmasin, 2 September 1949

t.t.d.

1. Jenderal Mayor Soeharjo

2. Deelman

Residen Borneo Selatan

Terr.Cdt.Kal Sel dan Timur 55)

Sikap Belanda sesudah diberikan perintah cease fire di Munggu Raya tanggal 2 September 1949, sangat disesalkan sebab Belanda masih melakukan penangkapan-penangkapan dan banyak senjata dari pihak ALRI yang dirampas. Semenjak cease fire di Kalimantan Selatan masih datang bantuan polisi istimewa Belanda dari Jakarta dan kapal "Manokwari" membawa senjata, amunisi dari Jawa.⁵⁶⁾ Para tahanan dari unsur pimpinan ALRI masih belum dibebaskan Belanda termasuk diantaranya Ketua KNI Kalimantan Mr. Burhanuddin. Sedangkan sikap pimpinan ALRI sangat taat terhadap perintah pelaksanaan cease fire tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan cease fire ini, Letkol Hasan Basry disertai staf beliau yaitu Kapten Gusti Aman dan Letnan Subandi pada tanggal 13 ke 14 September telah berada di Banjarmasin untuk mengadakan hubungan dengan Residen Borneo Selatan Deelman. Pertemuan ini sebagai pembicaraan pendahuluan untuk perundingan tentang pelaksanaan cease fire di Kalimantan Selatan. Mayor P. Arya menggabungkan diri dengan rombongan Letkol Hasan Basri. Dalam pertemuan itu P. Arya minta agar keamanan di Kalimantan Selatan dijaga oleh ALRI Divisi IV, dimana orang Belanda dijamin keamanannya dan perdagangan boleh berjalan seperti biasa. Belanda jelas menolak usul tersebut.

Pegawai pemerintah Belanda yang selama menjelang perintah cease fire mogok kerja, sebagai suatu sikap taat pada instruksi Gubernur Tentara tanggal 29 Agustus 1949, masih melakukan sikap mogok kerja. Para pegawai di Hulu Sungai, yaitu Kandangan, Rantau dan Negara bukan saja sekedar mogok kerja, tetapi menentukan sikap keras yaitu berhenti bekerja. Para pegawai yang menandatangani lebih dari 150 orang pegawai.

Mereka mengambil sikap berdasarkan atas keyakinan dan pertimbangan yang cukup, memperhatikan suasana sekarang Mereka

bersedia mengambil resiko dan menerima akibatnya dengan tulus sebagai suatu sumbangan bagi perjuangan bangsa yang sudah amat menderita. Menurut mereka tidak ada jalan yang lebih tepat harus diambil, yaitu dengan memperkuat barisan perjuangan kemerdekaan bangsa sendiri.

Sikap pegawai pemerintah Belanda tersebut dalam bentuk sebuah pernyataan yang berbunyi sebagai berikut :

•
"Pernyataan
Merdeka.

Kami bekas pegawai (buruh) bangsa Indonesia pada pemerintah Belanda di daerah Kandangan, Rantau dan Negara.

- a). Berpendirian bahwa yang dijalankan oleh kekuasaan Belanda di daerah ini terhadap mereka yang berjuang untuk kemerdekaan tanah air kami, tidak dapat disetujui.
- b). Merasa perlu menentukan sikap yang tegas terhadap politik yang merugikan perjuangan tanah air kami itu.

Memutuskan :

- a). Meletakkan dan meninggalkan pekerjaan kami pada tiap-tiap jabatan dan perusahaan yang kami anggap merugikan perjuangan kemerdekaan kami.
- b). Menyatakan dengan tegas bahwa mulai sekarang ini kami merasa tiada sedikitpun mempunyai perhubungan dan sangkut paut dengan pemerintah Belanda.
- c). Mempertahankan pendirian sampai Konferensi Meja Bundar (KMB) berakhir selesai.

Tetap merdeka

Sebagai pelopor gerakan ini di Kandangan adalah : A.Wahab (Kiai), Ibas (Terrein ambtenar blastingen), M.Yusri (Jaksa Magistraat), M.Saleh (Landbouwkundig ambt) dan lain-lain.⁵⁷ Pernyataan ini tertanggal 16 September 1949.

Dalam rangka pelaksanaan cease fire, pemerintah Republik Indonesia mengirim utusan ke Kalimantan Selatan sebagai delegasi Militer Republik Indonesia yaitu Letnan Kolonel Sukanda Brata-

manggala, yang bertugas untuk mengorganisir ALRI Divisi IV yang sudah dijadikan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada tanggal 4 Oktober 1949 lahirlah Maklumat ALRI Divisi IV no.1 dan Maklumat Delegasi Militer

No.1 berbunyi sebagai berikut :

Maklumat ALRI Divisi IV.no.1.

Dimaklumkan, bahwa :

- a). Mulai sekarang setempel-setempel yang bertanda ALRI Divisi IV bentuk bundar, baik dari pusat maupun dari daerah tidak berlaku lagi.
- b). Tanda-tanda (setempel) yang sah akan diumumkan kemudian.

Dikeluarkan di Banjarmasin, tanggal 4 Oktober 1949. Pengumuman itu ditanda tangani oleh Comandan ALRI Devisi IV Hasan Basry.

Sedangkan maklumat dari Delegasi Militer RI berbunyi sebagai berikut : Delegasi Militer RI sesudah ada permufakatan dengan Komandan ALRI Divisi IV bersama ini memaklumkan :

- a). Semua surat-surat kuasa dan atau surat edaran yang ada waktu yang lampau dijalankan atas nama ALRI Divisi IV terhadap masyarakat tidak berlaku lagi.
- b). Sesudah dikeluarkannya maklumat ini, maka surat-surat tersebut harus diketahui dahulu oleh delegasi militer R.I.
- c). Peraturan ini berlaku mulai dikeluarkan maklumat ini.

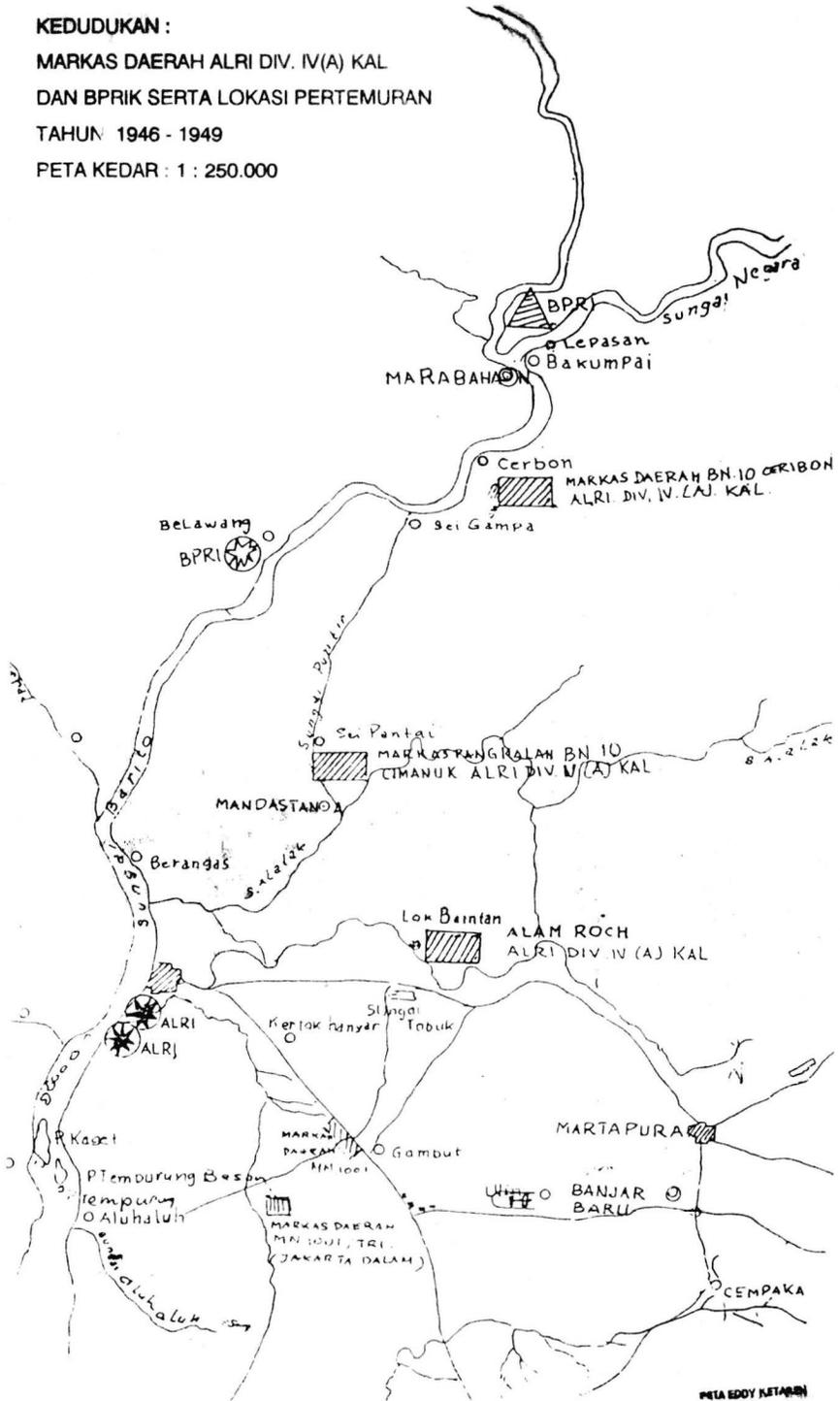
Dikeluarkan di Banjarmasin, tanggal 4 Oktober 1949 dan ditan-datangani oleh Delegasi Militer R.I. Letkol Sukanda Bratamanggala.

Dalam hal ini pemerintah Belanda berangsur-angsur membebaskan tawanan politik dan yang terakhir dibebaskan sebanyak 75 orang pada tanggal 8 Oktober 1949.

Nama-nama mereka yang dibebaskan itu adalah :

Masran guru Amuntai, HM Nawawi, Sabri Tobing, Zulkifli Tanjung, Kandar Tanjung, Durauf Kelua, Jakfar Kelua, Sakerani, Sade-

KEDUDUKAN :
MARKAS DAERAH ALRI DIV. IV(A) KAL
DAN BPRIK SERTA LOKASI PERTEMURAN
TAHUN 1946 - 1949
PETA KEDAR : 1 : 250.000



PETA EDDY NETAPAN

ri, Saberan Kelua, H.Rasyidi Tanjung, H.Baseran, Bakar H.Arsyad Tanjung, Amat, H.Jabir, Abdullah, Sellamat, Usman Kelua, Antung Narang Haruai, Effendi Batumandi, Kurdi, Basuni Taufik, Amberah, H.Hasan Barabai, Amir Hamzah, H.Sulaiman, Ibas guru, H.M. Rusli Kandangan, Merah Danil Kandangan, H.Busra Hajar Batumandi, Djuri Kalua, H.Basuni HA Aziz, Idar, HA Utuh, Abdul Markis, Abu hanafiah, Nafiah, Dulhalim, Tarsad, Umar, Tahallah, Erman, Asnawi, H.Ideris, H.Sukeri, Amberan, Saberun, H.Taberi Majun, Anang Julai, Abdulrazak, H.Jalil, Ibak, Idar, Rasyidi, Muhammad, HA. Basuni, Baseri, Aini dan Mahlan.

Perkembangan ALRI Divisi IV selanjutnya ialah setelah tanggal 1 Nopember 1949 Divisi IV ALRI, diganti kesatuannya menjadi Divisi Lambung Mangkurat. Dengan demikian yang pada mulanya sebagai TNI Angkatan Laut, sekarang diubah menjadi TNI Angkatan Darat. Pada tanggal 10 Nopember 1949, dengan suatu upacara resmi di Kandangan oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala, Ketua Delegasi Militer Republik Indonesia, yang bertindak sebagai wakil Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indoensia, ALRI Divisi IV dilebur menjadi satuan Angkatan Darat, diberi nama Divisi Lambung Mangkurat dengan Letkol Hasan Basry sebagai panglimanya, sedang wilayahnya dibagi atas daerah-daerah komando Daerah Utara (Hulu Sungai Utara), Komando Daerah Tengah (district Kandangan, Negara, Rantau; Komando Daerah Selatan. 58)

Dengan ini dimulailah diatur kembali anggota Territorial dari pemerintahan ALRI Divisi IV yang hingga saat itu belum mempunyai kedudukan yang tegas. Kepala-kepala daerah dari Pemerintahan Militer ALRI Divisi IV ketika itu diresmikan menjadi Komandan-komandan *Onderdistrict* dari administrasi Belanda saat itu. 59) Kepala-kepala Pangkalan, yaitu saingan dari Kepala-kepala Kampung Belanda ketika itu, dijadikan komandan dari P K R (Pembantu Keamanan Rakyat) di kampungnya masing-masing, yang mana anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota ALRI Divisi IV sewaktu gerilya. Tugas yang diberikan kepada Komando *Onderdistrict* Militer pada waktu itu adalah meneruskan tugasnya sewaktu gerilya yaitu mengumpulkan pemberian-pemberian rakyat untuk bahan makanan anggotanya. Bersamaan dengan diserahkan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, oleh Pimpinan Angkatan Perang Pusat, Kalimantan dijadikan satu Territorium, di sebut

Territorium VI, dengan Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala sebagai Panglimanya. Tentang Divisi Lambung Mangkurat dengan sendirinya ditiadakan dan Letnan Kolonel Hasan Basry, ditunjuk sebagai Komandan Sub Territorium Militer II (Brigade B) Kalimantan Selatan.

Beberapa masalah timbul menyusul, terutama yang berhubungan dengan peleburan organisasi kelasykaran ini menjadi Tentara Nasional (TNI) yang mengganggu ketentraman umum. Salah satu contoh di antaranya ialah masalah, atau Go Tong Pu. Divisi yang menyebut kesatuannya "Divisi Tengkorak Putih" mengadakan kecauan di Hulu Sungai, mengadakan penculikan terhadap golongan rakyat yang menurut pendapat mereka adalah bekas kaki tangan Belanda. Di Banjarmasin, kesulitan itu berujud pada penyerangan perseorangan, konvoi-konvoi dan asrama KNIL yang kesemuanya mengganggu ketentraman umum. Keberadaan Go Teng Pu, pada dasarnya adalah atas restu dari Pimpinan ALRI Div. IV, karena melihat kenyataan bahwa Belanda tidak menaati atas Cease fire 2 September 1949. Tentara Belanda merasa bebas memasuki daerah-daerah ALRI Div. IV dan bahkan merampas senjata milik pasukan ALRI Div. IV. Sebaliknya pihak ALRI Div. IV tidak dapat berbuat apa-apa, karena menaati perintah cease fire. Kejengkelan terhadap sikap Belanda ini, melahirkan "Go Teng Pu", yang berada diluar ALRI Div. IV.

Setelah beberapa kali usaha penyelesaian yang selalu dihasikan dengan kegagalan, akhirnya sebagian dari "Tengkorak Putih" diresmikan menjadi TNI sebanyak satu Kompi di tempatkan di Hulu Sungai. Sedangkan untuk daerah Banjarmasin, setelah mengalami beberapa kali kegagalan pula, berhasil pada bulan Februari 1950 diresmikan satu kompi dan dimasukkan dalam formasi Batalyon 605. Disamping itu masih banyak pejuang yang belum merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari pasukannya yang akhirnya tidak taat kepada ketetapan pemerintah dan mencari jalans endiri, yang dikenal nanti sebagai gerombolan bersenjata. 60)

E. SIKAP RAKYAT KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PERISTIWA KONFERENSI MALINO, BFO, LINGGARJATI, RENVILLE, DIVIDE ET EMPERA VAN MOOK

Sesudah Perang Dunia kedua politik Pemerintah Belanda ter-

hadap jajahannya Hindia Belanda mengalami perubahan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sebagai suatu siasat menghadapi lahirnya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Prinsip jajahan tetap dipertahankan yaitu prinsip *di-
vide et empera*, tetapi disesuaikan dengan situasi.

Letnan Gubernur Jenderal van Mook menetapkan garis-garis besar politiknya dengan mengeluarkan sebuah memorandum politik pada tanggal 15 Nopember 1945 yang isinya antara lain ialah :

Supaya tidak mengganggu keadaan yang telah berlaku di Jawa, sebaiknya konstruksi Indonesia menjadi sebuah *Commonwealth* atau Negara Indonesia Serikat (The United States of Indonesia), dengan pembentukan daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri. Sebagai reaksi apa yang telah dikeluarkan van Mook se-
bagai garis besar politiknya, Kerajaan Belanda mengeluarkan se-
buah Deklarasi tanggal 10 Februari 1946, yang isinya akan melahir-
kan sebuah Negara Indonesia Serikat sebagai partner dari Kerajaan
Belanda. Sebagai realisasi dari politik Pemerintah Belanda terhadap
jajahannya Hindia Belanda tersebut, terlaksanalah beberapa konfe-
rensi, yaitu : Konferensi Malino tanggal 16-24 Juli 1946, Konferensi
Den Pasar 18-24 Desember 1946, Konferensi golongan minoritas di
Pangkal Pinang tanggal 1-12 Oktober 1946. Konperensi ini melahir-
kan ide tentang pembentukan negara-negara bagian nanti, dan deng-
an dasar dari konferensi ini lahirlah beberapa buah negara di
dalam negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tang-
gal 17 Agustus 1945 itu.

Konferensi Linggarjati yang ditanda tangani pada 25 Maret 1947, merupakan cease fire dari persengketaan antara RI dengan Belanda, tetapi persetujuan Linggarjati ini juga merupakan penge-
sahan tertulis tentang batas RI dan daerah yang tetap di bawah
jajahan Belanda. Dengan ini berarti pula bahwa pemerintah Belanda
dengan leluasa membentuk negara-negara bagian yang memang tel-
ah menjadi policy pemerintahnya. Persetujuan di atas kapal Ameri-
ka Renville (17 Januari 1948) tidak banyak mengalami perubahan
bahkan lebih mundur dari apa yang telah dicapai dalam Linggarjati.
Dari kenyataan yang ada di atas, maka Kalimantan adalah termas-
uk daerah di luar RI yang *de jure dan de facto* berada di bawah
penjajahan pemerintah Belanda.

Situasi yang ada ini melahirkan sikap tertentu bagi rakyat di Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya. Sikap rakyat tersebut dalam menghadapi politik pemerintah Belanda terbagi atas 3 golongan :

- a). Golongan yang pro Belanda, yang merasa berhutang budi terhadap Belanda, yang merasa tergantung nasibnya kepada Belanda, ataupun memang merasa perlu setia kepada Belanda. Golongan ini terdiri dari golongan *feodal* yang merasa mendapat keuntungan dari sistem ini. Mereka mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan secara turun temurun sebagai hadiah dari sistem pemerintahan Belanda. Para pegawai pemerintah Belanda, termasuk ke dalam golongan ini pula, terdiri dari para Kiai, Kiai Kepala dan Kiai Besar, dan pegawai Pamong Praja lainnya. Golongan minoritas yang mendapat fasilitas dari pemerintah Belanda terutama golongan Cina yang mendapat fasilitas dalam bidang perdagangan. Ada lagi yang termasuk ke dalam golongan ini ialah berupa pasukan bersenjata yang bahkan memerangi sesama bangsa yang menginginkan negara merdeka . Pasukan itu ialah : Pasukan Kucing Hitam yang dipimpin oleh Haji Hasyim jago kampung Jatuh Barabai. Pasukan Laung yang dipimpin oleh Camat Coenraad, merupakan rakyat yang dipersenjatai Belanda karena kesetiaannya kepada Belanda. Bahkan ada satu partai yang namanya Partai Anti Indonesia Merdeka (PAIM) yang dipimpin oleh Kiai Besar Merah Nadalsyah dengan pasukan yang dikenal "Pasukan Parang Bungkul"nya.
- b). Golongan federalisme, yaitu golongan yang mendukung ide pemerintah Belanda untuk mendirikan Negara Kalimantan di luar dari Negara Republik Indonesia. Mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai Kepala Negara sendiri, sebagai suatu bagian nanti dari Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk kemudian. Semua rakyat yang termasuk golongan yang pro Belanda adalah pendukung utama dari cita-cita Belanda tersebut, yang merasa tidak terganggu karenanya. Organisasi yang sengaja dibentuk Belanda yang merupakan partai politik yang mendukung cita-cita federalisme tersebut ialah Partai Serikat Rakyat Islam (S.R.I). Partai inilah yang diharapkan Belanda menjadi tulang punggung dalam dewan yang membela ide Belanda. Par-

tai ini di pimpin oleh H.Abd. Rahman Siddik ulama besar yang pada mulanya adalah Ketua SERMI, partai yang mempunyai ide kesatuan yaitu negara yang tidak tepisahkan dengan RI.

- c). Golongan Unitarisme, ialah cita-cita ke arah negara kesatuan yang pemerintahannya dipusatkan, yang merupakan lawan dari golongan federalisme. Unitarisme ini mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan bercita-cita bahwa Kalimantan adalah merupakan bagian atau propinsi dari negara kesatuan RI. Golongan ini terdiri dari petani, nelayan, pedagang, para ulama, gerilyawan yang tergabung dalam ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan yang kemudian menjelma menjadi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, para terpelajar yang merupakan tokoh penggerak dari cita-cita unitarisme ini. Mereka dikenal sebagai golongan Republikan-Unitarisme. Untuk mencapai cita-cita unitarisme ini rakyat Kalimantan terbagi menjadi dua golongan lagi yang keduanya selalu sejalan dan saling berkomunikasi. Golongan itu adalah :

- c.1.) golongan yang berjuang secara *illegal* bergerilya di hutan-hutan, golongan bersenjata yang menentang politik Belanda dengan kekerasan bersenjata. Golongan ini adalah yang paling menakutkan Belanda karena mengganggu ketentraman pemerintahan Belanda. Akibatnya ialah Belanda hanya berkuasa di kota-kota besar dan sepanjang jalan raya, selebihnya Belanda tidak mempunyai daya sama sekali. Para Gerilya ini tergabung dalam pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, mereka dikenal non koperasi.
- c.2) Golongan yang kedua adalah, para pimpinan Partai Politik yang berjuang secara *legal*, melewati saluran politik, terdiri dari Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan Partai Serikat Muslimin Indonesia (SERMI). Golongan ini dikenal berjuang secara kooperatif. Di luar Dewan kedua Partai ini mempelopori pembentukan Badan Koordinasi untuk menghimpun golongan unitarisme bersama organisasi lain yang sehaluan.
- c.3) Begitu pula kelompok wanita menggalang persatuan yang berhaluan Republikan-Unitarisme, yang bernama Pertiwi

(Persatuan Tindakan Wanita Indonesia), yang wakilnya duduk dalam Dewan Banjar. Ketiga golongan ini merupakan sebuah fraksi Republikan Unitarisme yang berjuang bersama-sama.

Kalau kita tinjau kembali apa yang telah dilakukan oleh Partai yang mempunyai ide Republikan-Unitarisme ini, dapat kita lihat dari hasil perjuangan yang dilakukan Partai SKI dan SERMI, dalam usahanya menentang rencana pemerintah Belanda untuk membentuk negara Kalimantan.

Hasil Konferensi Malino dijelaskan oleh Pemerintah Belanda kepada seluruh masyarakat Hulu Sungai oleh sebuah Team yang terdiri dari : A.Asyikin Noor, Ibrahlim Sedar dan Dr.Eisenberger dari tanggal 8 sampai 15 Oktober 1946. Untuk menghadapi Tim ini, SKI mengadakan Rapat Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 1946 di Banjarmasin, yang dihadiri oleh 45 utusan seluruh Kalimantan Selatan yang mewakili 7141 anggota dengan keputusan sebagai berikut : bahwa SKI tidak menyetujui rencana Belanda mengadakan Konferensi Denpasar yang merencanakan mendirikan Negara Kalimantan, dan memberi peringatan yang keras terhadap anggota yang berani melanggar keputusan tersebut. Keputusan SKI ini juga disampaikan kepada Pemerintah Belanda, dan R I di Jogja. Sebuah sikap yang tegas dikeluarkan setelah Naskah Linggarjati diumumkan, dimana saat itu SKI mengutus tiga orang pimpinan dari Pengurus Besar SKI yang terdiri dari : A.A.Rivai, A.Sinaga dan E.S.Handuran untuk menghadap Yang Mulia Perdana Menteri R I dan mengeluarkan sebuah pernyataan yang isinya :

- a). bahwa Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) tetap berdiri di belakang Republik Indoensia.
- b). bahwa Serikat Kerakyatan Indonesia berjanji akan menyokong R.I. dengan sekuat tenaga untuk mencapai Negara Indonesia yang bulat.

Pernyataan tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 1946 oleh ketiga utusan tersebut atas nama Pengurus Besar SKI.

Suatu bukti lagi bahwa rakyat tidak menyetujui rencana Belan-

da dan berusaha agar tetap bersatu dalam sebuah negara RI, terlihat dari sikap masyarakat setelah Persetujuan Linggarjati ditandatangani ialah :

- a). Rapat besar rakyat di Kotabaru pada tanggal 10 Maret 1947 yang menolak rencana pembentukan Dewan Pulau Laut, Dewan Pagatan dan Dewan Cantung Sempanahan.
- b). Diadakannya Kongres Pemuda yang menghimpun dalam berbagai organisasi pemuda pada tanggal 17 Maret 1947 di Kandangan memutuskan untuk mendesak agar Kalimantan dimasukkan ke dalam negara R.I. Jogya. Kongres ini berhasil meskipun mengalami tindakan keras dari pemerintah Belanda.

Partai Politik SERMI (Serikat Muslimin Indonesia) yang menghimpun umat Islam Kalimantan Selatan, mengadakan Kongresnya yang pertama kali di Banjarmasin pada tanggal 11 dan 12 April 1947. Konferensi ini berlangsung pembicaraan tentang masalah Persetujuan Linggarjati yang sedang hangatnya diperbincangkan antara pro dan kontra. Keputusan yang diambil dalam konferensi itu antara lain ialah :

- a). Bahwa SERMI dengan seluruh anggotanya tetap berdiri di belakang Republik Indonesia, dan mendesak agar Kalimantan sesegeranya dimasukkan ke dalam dan menjadi daerah Republik Indonesia.
- b). SERMI mengakui bahwa anggota yang sekarang duduk dalam KNIP menjadi wakil rakyat seluruh Kalimantan Selatan.

Suatu rapat luar biasa kedua SKI tanggal 11 Mei 1947 mendesak pada Pemerintah Belanda dan R.I. mengadakan suatu Mukhtar untuk menentukan status Kalimantan dan agar secepatnya menjadikan Kalimantan menjadi daerah R.I. Keputusan SKI ini mendapat dukungan dari Konferensi organisasi-organisasi wanita yang terdiri dari Perwani, Wanita SERMI dan PERPI di Banjarmasin tanggal 16-18 Juni 1947 di bawah pimpinan Ny. Johansyah dan Ny.F. Mohani dan dihadiri oleh Ny. Herawati Diah dari Jakarta. Konferensi ini pula melahirkan Pertiwi (Persatuan Tindakan Wanita Indonesia) yang merupakan gabungan dari semua organisasi wani-

ta di Kalimantan Selatan. SERMI tidak kalah gigihnya berjuang dengan mengadakan Kongres Umat Islam Kalimantan di Amuntai tanggal 15 Juni 1947, tetapi karena tindakan Belanda dengan menangkapi para utusan yang akan hadir ke Kongres tersebut, maka Kongres ini mengalami kegagalan.

Pemerintah Belanda tidak kurang gigihnya merealisasikan rencananya bersama-sama golongan federalismenya. Untuk itu pemerintah Belanda mendatangkan Sultan Hamid II Algadri dari Pontianak, untuk menghubungi tokoh-tokoh partai politik di Kalimantan Selatan dalam rangka pembentukan Negara Kalimantan. Begitu pula untuk menghadapi pejabat-pejabat pemerintah ditugaskan kepada Dr. Eisenberger supaya pejabat pemerintah mengerti maksud suci Belanda untuk mendirikan Negara Kalimantan. Sedangkan untuk umat Islam didatangkannya ahli agama Islam yaitu van der Plas dan dalam hal ini berhasil memikat Ketua Partai SERMI H.Abd. Rahman Sidik, untuk membantu Partai baru yang bercita-cita mendirikan Negara Kalimantan. Partai baru itu ialah Serikat Rakyat Islam (SRI), dibentuk pada tanggal 2 Juli 1947. Sebagai kelanjutan dari Partai SRI yang sudah berhasil dibentuk Belanda sebagai saingan dari Partai Politik SERMI, Pemerintah Belanda membentuk lagi Madjelis Oelama Islam (MOI) pada tanggal 13 Oktober 1947 di Kandangan, dengan tujuan yang sama dengan SRI sebagai partner dalam berjuang menghadapi SERMI-SKI.

Usaha pemerintah Belanda dengan menggunakan segala macam aparatnya, dengan tekanan, penangkapan dan hukuman, dan segala macam ancaman berusaha untuk merealisasikan rencananya untuk mendirikan Negara Kalimantan, dengan lebih dahulu membentuk Dewan Banjar dan Dewan-dewan lainnya di Kalimantan. Melihat situasi dan kondisi yang sedemikian, maka SKI - SERMI mengadakan pertemuan bersama pada tanggal 16 September 1947 dan merubah sikap non - nya menjadi Co . Tindakan ini juga mendapat persetujuan dari pihak ALRI Divisi IV yang bergerilya di hutan-hutan sebagai suatu siasat baru dalam menghadapi politik Belanda.

Dengan penetapan dari Pemerintah Belanda tanggal 14 Januari 1948 nomor 1 (Stbl No.14) tentang pembentukan Dewan Banjar dan mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 1948 dan kemudian dengan

penetapan Residen Kalimantan Selatan pada tanggal tersebut Np. 3/175/1/7, termuat pada pasal 2 ketentuan tentang Dewan Banjar tersebut sebagai berikut :

- a). Bahwa kekuasaan Pemerintah Daerah untuk sementara dijalankan oleh sebuah Dewan.
- b). Ketua Dewan untuk sementara dipilih/ditunjuk oleh Residen Kalimantan Selatan,
- c). Jumlah anggota sebanyak-banyaknya 45 orang.
- d). Cara pemilihan anggota ditetapkan oleh Residen demikian :
 - yang dipilih ialah 35 anggota wakil penduduk Indonesia.
 - 2 orang wakil golongan Cina yang diangkat Residen terdiri dari 2 orang wakil bangsa Belanda, dan sebanyak-banyaknya 6 orang dari penduduk yang tidak cukup terwakili.

Secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Kekuasaan Pemerintah Daerah buat sementara dijalankan oleh suatu Dewan, yang dalam susunannya yang pertama akan terdiri atas :

- I. Seorang ketua yang untuk sementara waktu ditunjuk oleh Residen Kalimantan Selatan, baik anggota ataupun bukan anggota, yang meletakkan jabatannya waktu kedudukan ketua itu ditempati oleh orang yang dipilih menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Dewan.
- II. Sebanyak-banyaknya 45 anggota.
 1. yang dipilih menurut aturan pemilihan sementara yang ditetapkan oleh Residen Kalimantan Selatan sesudah bermufakat dengan orang-orang yang terkemuka diantara penduduk :
 - a). 35 orang wakil oleh bahagian penduduk bangsa Indonesia.
 - b). 2 orang wakil oleh bahagian penduduk bangsa Tionghoa,
 2. dan yang diangkat oleh Residen :
 - a). 2 orang wakil oleh bahagian penduduk bangsa Belan-

da.

- b). sebanyak-banyaknya 6 orang wakil dari bahagian penduduk yang tidak dapat atau kurang cukup diwakili, dan begitu juga aliran-aliran dan kepentingan yang tidak dapat atau kurang cukup diwakilli dengan jalan pemilihan. 61)

Perjuangan selanjutnya yang dilakukan oleh SKI-SERMI ialah berjuang untuk merebut kursi sebanyak-banyaknya. Pengurus Besar SKI dan Pengurus Besar SERMI mengadakan kampanye ke seluruh Kalimantan Selatan untuk memperoleh wakil yang duduk dalam Dewan Banjar nanti. Pada pemilihan bulan April 1948 SKI dan SERMI berhasil memperoleh 60% dari kursi yang diperebutkan.

Perjuangan kaum federalisme tidak kalah gihnya untuk memperoleh kursi yang sebanyak-banyaknya pula. Melihat kenyataan bahwa kaum federalisme kalah, Pemerintah menetapkan penunjukan dan pengangkatan wakil-wakil yang sesuai dengan penetapan Residen Kalimantan Selatan. Akibatnya terbalik, yaitu Fraksi Republikan Unitarisme yang terdiri dari SKI-SERMI-PERTIWI hanya memperoleh 45 % dari jumlah kursi dalam Dewan Banjar. 62)

Daftar anggota Dewan Banjar itu ialah :

ALPHABETISCHE LIJST VAN LEDEN VAN DE DEWAN BANJAR

N a m a.	Gekozen in kies kring	Benoemd door de Res.v.Z. Borneo.
1. Amin - A.	9 - Kelajan	
2. Anwar - Gusti	27 - Amoentai Selatan	
3. Achmad - Gusti	35 - Haroewaij	
4. Achmad - Haji	7 - Gamboet	
5. Abdoerrahman-Haji	26 - Iloeng	
6. Abdoelmoeloek-Haji	16 - Rantau	
7. Abdoelhamid-Hadji	23 - Benoea Koepang	
8. Abdoerrachman		Voorzitter SRI

- Siddik Hadji.
9. Abdoellah Siddik Hadji.
10. Abdoellah alias Soenting.
11. Achmad Soegian Noor Gusti.
12. Abdoellah bin Hoe sin Alfaohar.
13. de Back R.
14. Djahri.
15. Djohan Arifin
16. Gani - A.
17. Go Tjoen Bin, Dr
18. Hasan Basrie bin Daroen.
19. Hoedari - A.
20. Hanafi Gobet, Hadji M.
21. Hasboellllah.
22. Hanafiah-M.
23. Hadisapoetera-S.
- Voorzitter MOI
Hulu Sungai
Kadi Kandangan.
Pembekal Ma.
Oeja.
wd. Directeur/
Hoofd redacteur
"Soeara Kali
mantan".
Handelaar, plv.
Kapitein der
Arabieren te
Bandarmasin.
Notaris tevens
Vendumeester
der 2e.klasse
de Bandarmasin
- 34 - Tandjoeng
- 33 - Kloea
- 21 - Negara
- Goov,Arts. te Mar
tapera; cerkozen
Vertegenwoordiger
v.d.Chin.gemeens
chap.
- 14 - Marabahan
- 13 - Andjir Moeara.
- 12 - Soengai Miai.
- 29 - Batoe Mandi.
- 3 - Karangintan te-
vens Voorz.v.d.
Dewan.
- 24 - Barabai.

24. Idham Chalid.	28 - Amoentai Otara.
25. Kho Ek Lin.	Vert.N.V. "Ammar" te Bandjarmasin; verko- zen vert.v.d.Chin.ge- meenschap.
26. Nadalsyah-Pangeran	20 - Angkinang.
27. Nevr.de.wed.Merah Djohansjah geb. Goesti Noersehan.	Voorzitter "PER TIWI" en "PERWA NI" te Banjarmasin.
28. Roeslan-A.	8 - Aloeh2
29. Rasjid-M.	32 - Alabio.
30. R a d e n.	5 - Martapoera.
31. Rivai A.A.	15 - Margasari
32. Sjairani-A.	1 - Plaihari
33. Samad - A.	6 - Soengai Taboek
34. Sinaga-A.	11 - Koewin Selatan
35. Sibeli - Hadji.	22 - Pantai Hambawang
36. Said - M.	18 - Djamboe Ilir.
37. Saberansjah.	31 - Babirik
38. Sa'ban - R.	10 - Banjarmasin.
39. Soeroto.	19 - Kandangan
40. Smies H.G.	Ambtenaar voor Sociale Zaken en Pl.Hoofd Burgerzorg te Bandjarmasin.

63)

Dari beberapa pembicaraan dalam Sidang Dewan Banjar, terlihat keberanian anggota yang berjiwa Republikan-Unitarisme untuk membelokkan Dewan ini ke arah Republik Indonesia, dan selalu berusaha menunda-nunda rencana Belanda membentuk Negara Kalimantan. Tetapi Belanda selalu waspada dan menjawabnya dengan penangkapan-penangkapan beberapa anggota Dewan yang dianggap berbahaya

Dari daftar tahanan politik yang dilepaskan pemerintah Belanda kemudian terdapat beberapa orang anggota Dewan Banjar, antara lain : Zafry Zamzam, H. Sibli Imansyah, S.Hadisaputra, Idham Chalid dan lain-lain.

Pada waktu Aksi Militer ke dua (1948), dimana Jogja ibu negara Republik Indonesia diduduki Belanda dan Presiden, Wakil Presiden serta pejabat-pejabat negara di tawan pemerintah Belanda, pada waktu itu situasi di Kalimantan Selatan sedang menghangatnya perjuangan bersenjata seperti yang telah dibicarakan pada bagian terdahulu. Mengenai hangatnya perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh ALRI Divisi IV, hal ini dapat diketahui pula dari surat Residen Borneo Selatan A.G.Deelman kepada Dewan Banjar sebagai berikut :

Banjarmasin, 20 December 1948.

No. 56/I/12.

Lampiran : 2

Pokok : Keadaan politik, pengatjauan dan extremismisme dalam Daerah Banjar.

Kepada

Ketoea Dewan Bandjar

Di Bandjarmasin.

Bersama ini dengan hormat diminta perhatian Padoeka Toean tentang hal yang berikut. Baik Toean maoepoen anggota2 dari Dewan Bandjar tentoe telah mengetahoei, bahwa di Hoeloe Soengai, dalam beberapa boelan yang terachir ini terdjadi keroesoehan dengan tjara besar2an, yang sedari permoelaan boelan Nopember yang lalu telah bertambah begitoe hebat. Tetapi Oemoem beloem mengetahoei, apa yang sebenarnya telah terdjadi. Agar Toean dan Anggota Dewan mengetahoei tentang perloenja diambil beberapa tindakan dengan ini saja lampirkan soeatoe tjatatan tentang pengatjaoean2 yang dilakoekan dan kenjataan2

jangan lainyadi Hoeloe Soengai dari tanggal 1 Nopember yang laloe. Sebagian besar dari pengatjaoean ini tenjata dengan terang bahwa hal ini dilakoekan oleh gerombolan bersedjata modern dan berpakaian uniform, jang bertindak atas nama Repoeblik Djokdja; sisanya dilakoekan oleh orang pendoeoek jang ikoet2an. Disamping Toean akan lihat soeato tjatatan dari orang2, teroetama siap soedah diambil tindakan2. Dari orang2 ini ternyata adanya kete rangan bahwa mereka telah memberikan pertolongan dan kerdjasama kepada gerombolan2 jang bertanggoeng dja-wab atas kekatjaoean di Hoeloe Soengai. Orang2 ini telah di internir. Soedah tentoe aksi dari kaoem pengatjaoe ini tidak dapat diterima dalam soatoe negara jang beradab, menimboelkan reaksi dari pembesar2 jang bertanggoeng jawab oentoeok keamanan dan ketentraman. Sekarang adalah tergantoeng dari sikap kaoem pendoeoek sendiri, tindakan2 apa yang haroes diambil selanjoeatnya.

Pengatjaoean seteroesnya tentoe akan memerloekan pe - nangkapan2 lebih lanjoet dan moengkin diambil tindakan2 jang lebih keras.

Residen Borneo Selatan
ttd : A.G.Deelman. 64)

Di sinilah letak kerjasama antara pejuang gerilya di hutan-hutan dan pejuang politik yang berusaha menggagalkan rencana Belanda mendirikan negara Kalimantan.

Pemerintah Belanda telah berhasil membentuk Dewan. Dewan-Dewan di Kalimantan dalam usahanya untuk mendirikan Negara Kalimantan. Daerah-daerah federal di Kalimantan itu ialah :

- a). Federasi Kalimantan Timur dengan ibu kotanya Samarinda.
- b). Daerah Banjar dengan Banjarmasin sebagai ibu kota.
- c). Daerah Dayak Besar dengan ibu kota sementara Banjarmasin.
- d). Daerah Kalimantan Tenggara dengan Kotabaru sebagai ibu kota.
- e). Daerah Kotawaringin dengan Pangkalan Bun sebagai ibu kota.
- f). Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri yang ditetapkan tanggal 12 Mei 1947.

Dengan demikian Kalimantan dipecah menjadi enam daerah federal, yang tergabung dalam B F O. (Bijeenkomst voor Federall Overleg). BFO ini bertugas melaksanakan berdirinya Negara Indonesia Serikat (NIS). Khusus Kalimantan Selatan, terdapat dua buah daerah federal, yaitu Kalimantan Tenggara dengan Dewan Daerah - nya sendiri, dan Dewan Daerah Banjar yang merupakan perwakilan dari daerah federal Banjar.

Dalam sidang Dewan Daerah Banjar, ditetapkan A.A. Rivai sebagai wakil Daerah Banjar dalam perundingan di Bandung dalam musyawarah BFO. BFO ini menghasilkan sebuah Piagam Persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan Untuk Permusyawaratan Federal (BFO). Isinya merupakan persetujuan untuk membentuk Pemerintahan Peralihan dalam realisasi RIS nanti. Sebelum Piagam Persetujuan antara RI dan BFO ini diputuskan dalam sidang-sidangnya di Negeri Belanda, di Kalimantan tokoh-tokoh Republikan-Unitarisme dengan gigih tetap berjuang untuk lahirnya negara kesatuan RI.

Pada tanggal 7 Juli 1949 dengan inisiatif Badan Koordinasi diadakan resepsi berkenaan dengan kembalinya pemerintahan RI di Jogja, dengan bertempat di gedung GPI (Gedung Pertemuan Indonesia) di dekat Pelabuhan Banjarmasin (pelabuhan lama). Resepsi itu dihadiri oleh utusan dari seluruh Kalimantan Selatan. Tokoh pimpinan yang hadir dalam resepsi itu ialah R.Sa'ban sendiri, ketua Badan Kordinasi, Wali Daerah M.Hanafiah (Ketua Dewan Daerah Banjar), H.Raden Kiai Besar Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin Masnur serta beberapa orang Belanda juga hadir.

Resepsi dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan gambar Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Moh.Hatta terpancang dalam gedung tersebut.

Inilah spontanitas rakyat untuk menyambut kembalinya RI ke Jogja yang dikordinir oleh pimpinan-pimpinan Republikan-Unitaris.

F. KEGIATAN MASYARAKAT KALIMANTAN SELATAN DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN

Perlu sekali lagi kita jelaskan tentang situasi Kalimantan Selatan sejak tahun 1945-1950 yaitu masa Revolusi Fisik. Sejak tahun 1945 pemerintah NICA-Belanda mengatur kembali pemerintahan-

nya di Kalimantan Selatan, yang pada mulanya membonceng tentara Australia sebagai bagian dari tentara Sekutu dalam rangka melucuti tentara Jepang. Setelah tentara Australia menyelesaikan tugasnya, maka pemerintahan selanjutnya dipegang oleh NICA-Belanda.

Perjuangan terus meningkat untuk membela Proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan negara Republik Indonesia. Kalimantan Selatan mengorganisir perjuangan dalam bentuk kesatuan bersenjata yang pada mulanya diorganisir oleh rakyat Kalimantan sendiri dalam bentuk kelasykaran-kelasykaran kemudian berhasil disatukan dengan bentuk kelasykaran yang diorganisir dari Jawa dalam kesatuan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Ketika terjadi persetujuan Linggarjati (1947), dan kemudian diperkuat kembali dalam persetujuan Renville (1948), maka status Kalimantan adalah termasuk daerah jajahan Belanda, dan diluar dari daerah kekuasaan Republik Indonesia.

Seperti telah kita jelaskan di muka, di Kalimantan Selatan terdapat "dua" buah pemerintahan yang satu dengan lain saling bertarung untuk merebut kekuasaan, yaitu pemerintahan NICA-Belanda yang secara *yuridis formal* berkuasa atas seluruh Kalimantan bekas jajahan Belanda sebelum Perang Dunia II. Pemerintahan yang kedua adalah Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan yang secara *yuridis-formal* juga tidak diakui oleh pemerintah Belanda dan juga tidak diakui oleh Republik Indonesia, tetapi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI ini tetap menganggap sebagai bagian dari Republik Indonesia dan hanya mengakui pemerintahan yang sah adalah Republik Indonesia sebagaimana yang dicitakan dalam Proklamasi 17 Mei 1949.

Secara kenyataan dapat dilihat bahwa Pemerintahan NICA-Belanda berkuasa di kota-kota sebagai pusat aparat pemerintah menjalankan tugasnya. Dengan demikian pemerintahan NICA-Belanda tetap mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, pendidikan, seni budaya, kehidupan beragama dan sebagainya, meskipun tidak selancar yang dikehendakinya. Begitu pula pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV berkuasa di seluruh Kalimantan Selatan kecuali di kota-kota tempat aparat pemerintahan Belanda menjalankan tugasnya. Pemerintahan ALRI mengatur kehidupan ekonomi, sosial, politik, militer dan menyusun pemerintahan seperti yang telah kita jelaskan pada bagian terdahulu.

Dengan pengertian di atas maka yang akan diuraikan di sini adalah kegiatan masyarakat yang berada langsung di bawah pemerintahan NICA-Belanda, sepanjang ada hubungan dengan perjuangan merebut kemerdekaan dan membela Proklamasi 17 Agustus 1945.

1. Kegiatan ekonomi.

Situasi kehidupan ekonomi pada masa Pemerintahan NICA-Belanda, jauh lebih maju dibandingkan dengan pada masa pendudukan Jepang, sebab hubungan dengan Jawa sudah bebas kembali seperti sebelum perang. Frekuwensi perdagangan jauh lebih besar lagi sebab Belanda mempunyai kapal pengangkut yang menghubungkan perdagangan antar pulau lancar kembali, bahkan waktu itu kesempatan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah sudah bebas kembali, biayanya saat itu hanya Rp 2.000,- (dua ribu rupiah Belanda).

Orang-orang Cina kembali memegang peranan perdagangan yang pada jaman Jepang tidak berperan karena situasi perang.

Orang-orang Banjar umumnya berjiwa dagang. Pada masa pemerintahan NICA-Belanda tersebut, orang-orang Banjar banyak membangun usaha perdagangan yang berbentuk Firma atau Perseoran Terbatas sebagai usaha untuk menyaingi usaha golongan Cina yang pada masa sebelum perang menguasai perdagangan di Kalimantan Selatan. Perusahaan perdagangan inilah yang nanti banyak membantu perjuangan dan mempunyai andil dalam melahirkan pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan.

Pengusaha-pengusaha yang banyak membantu perjuangan kemerdekaan antara lain : H. Djarksi dari NV.ODI (Oesaha Dagang Indonesia) yang bergerak dalam bidang perdagangan export-import dan perdagangan antar pulau, Oetoe Darham dari Firma Oetoe Darham yang bergerak dalam bidang pengangkutan umum dan menguasai pengangkutan umum yang terdiri dari bus-bus umum di seluruh Kalimantan Selatan dan berhasil menyaingi perusahaan bus NV Favourit kepunyaan orang Cina. H. Abdussamad dari NV SDB (Serikat Dagang Banjar), juga bergerak dalam perdagangan antara pulau dan export-import.

Martin Dengas Pongoh dari NV Kinibalu berhasil bertindak se-

bagai agen dari koperasi karet yang dibentuk oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV. Dengan adanya koperasi karet ini, harga karet dapat dinaikkan dari Rp.0,45 menjadi Rp.1.- per kg. Hasil export pertama dari NV Kinibalu ke Amerika berhasil dan dari harga tersebut di depositokan 20 % untuk pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV. Hasil deposito itu berjumlah Rp. 2.- juta uang Belanda.

Ardi dari Firma Ardi, Husin Nafarin dari NV Bapindo yang juga bergerak dalam perusahaan angkutan umum bus ke seluruh Kalimantan Selatan, A. Fatah dari NV Kalimantan, W.A. Narang dari NV Dayak.

Begitulah suasana perdagangan pada masa pemerintahan NICA-Belanda. Perkembangan angkutan darat yang pesat yang dikuasai oleh NV Bapindo dan Oetoe Darham, dengan bus-busnya sampai ke daerah terutara dari Kalimantan Selatan menyebabkan pengangkutan sungai terdesak. Akibatnya pengangkutan sungai dengan perahu-perahunya yang sebelumnya juga sampai ke Tanjung daerah paling utara dari Kalimantan Selatan, sekarang digantikan peranannya oleh pengangkutan darat.

Keadaan perekonomian ini kemudian mendapat gangguan lagi dari kegiatan perjuangan ALRI dengan aksi pemogokan buruh-buruh pelabuhan, pemogokan pegawai Belanda, sehingga melumpuhkan perdagangan bangsa Belanda.

2. Keadaan sosial.

Seperti sudah dijelaskan di atas pada bagian terdahulu, keadaan sosial/masyarakat di kota-kota mengikuti perkembangan pemerintahan NICA-Belanda, sedangkan di pedalaman mengikuti pemerintahan ALRI Divisi IV yang menguasai daerah pedalaman. Tetapi sebagian besar masyarakat terutama pedagang-pedagang yang hidup di kota membantu perjuangan kemerdekaan melewati petu gas tertentu yang bertugas mengumpulkan dana perjuangan.

Keadaan sosial waktu itu mengikuti perkembangan politik pemerintahan NICA-Belanda. Pemerintah Belanda sesuai dengan gagasannya dalam Konferensi-Konferensi Malino-Denpasar akan membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas beberapa negara bagian sebagai saingan dari Republik Indonesia yang nanti

berkedudukan sederajat dengan R.I. Sebelum negara bagian itu terbentuk, pemerintah Belanda lebih dahulu membentuk Dewan Daerah yang mewakili rakyat dalam menentukan sikap dalam pembentukan Negara Kalimantan nanti.

Untuk itulah lahir beberapa partai politik yang berusaha merebut jumlah kursi sebanyak mungkin dalam Dewan. Rakyat Kalimantan Selatan membentuk tiga buah partai politik, yang terdiri dari SERMI, SKI dan PERTIWI, SERMI atau Serikat Muslimin Indonesia adalah partai politik berkedudukan di Banjarmasin yang mempunyai cabang-cabangnya di seluruh Kalimantan Selatan terdiri dari golongan agama dan orang-orang yang lebih condong mendasarkan agama Islam dalam mengatur pemerintahan. Pengurus Besarnya bertempat di Banjarmasin.

S K I adalah Serikat Kerakyatan Indonesia terdiri dari orang-orang yang berjiwa nasionalisme, golongan intelektual hasil pendidikan Barat. Sedangkan PERTIWI adalah Persatuan Tindakan Wanita merupakan hasil konfomi di antara beberapa organisasi wanita di Kalimantan Selatan. Ketiga partai ini bersatu padu dalam Dewan untuk memenangkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Seperti juga telah kita jelaskan pada bagian sikap masyarakat terhadap pemerintah Belanda, masyarakat Kalimantan Selatan sebagian ada yang pro Belanda, yaitu menyetujui rencana Belanda untuk melahirkan Negara Kalimantan, golongan ini dikenal sebagai golongan federalisme. Golongan federalisme berhasil membentuk partai politik sebagai saingan dari SERMI yaitu S R I (Serikat Rakyat Islam) dan M O I (Madjelis Oemat Islam), yang juga ikut memperebutkan kursi dalam Dewan yang dibentuk pemerintah Belanda.

3. Keadaan pendidikan

Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV belum sempat menyusun dan mengatur bidang pendidikan, sebab situasi dalam keadaan perang, oleh karena itu pendidikan yang kita bicarakan di sini hanya pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah NICA-Belanda saja. Pendidikan tidak banyak terganggu sebab bukan merupakan musuh dari pihak gerilyawan, yang menjadi musuh adalah pemerintah Belanda dengan kaki tangannya. Perkembangan pendidikan jaman NICA-Belanda mengalami peru-

bahan dibanding dengan jaman pemerintahan Belanda sebelum perang. Sebagian besar pendidikan yang telah dijalankan oleh Jepang diteruskan kecuali beberapa buah yang dibubarkan seperti : Sekolah Pertanian, Sekolah Pelayaran.

Belanda berusaha mengembalikan kekuasaan melalui bidang pendidikan, tetapi ternyata kemudian usaha ini gagal, karena guru-guru dengan muridnya lebih mencintai kemerdekaan dari pada penjajahan.

Sekolah Rakyat yang pada mulanya bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan tingkat masyarakat yang berbeda-beda, sekarang hanya ada Sekolah Rakyat yang lama pendidikannya 6 tahun, meneruskan apa yang telah dilakukan Jepang.

Sekolah Guru cara baru setingkat dengan H I K zaman kolonial Belanda sebelum perang dibangun yang namanya Kweekschool Nieuwe Stijl, ditempatkan di Banjarmasin. Sekolah ini menerima tamatan Sekolah Menengah dan Sekolah Guru 4 tahun serta guru-guru yang berijazah Kweekschool cara lama. Hasilnya yang pertama baru keluar tahun 1950. Sekolah guru untuk menjadi guru Sekolah Rakyat masih ada yaitu CVO (Cursus Volk School) yang lamanya 2 tahun, sesudah Sekolah Rakyat, CVO ini kemudian pada tahun 1948/1949 diganti menjadi O V V O (Opleiding voor Volk Onderwizj) juga lamanya 2 tahun yaitu di Kandangan dan di Banjarmasin. Di Amuntai saat itu masih ada Sekolah Guru yang namanya Normal School yang lamanya 4 tahun sesudah Sekolah Rakyat. Pada tahun 1949/1950 Normal Scholl di Amuntai dan OVVO di Kandangan dilebur menjadi satu dengan bentuk baru yang namanya Sekolah Guru B.

Sekolah menengahnya namanya menjadi MULO Konkordant, yaitu MULO Belanda yang sama dengan di Negeri Belanda.

4. Keadaan Seni Budaya

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, keadaan ekonomi sangat merosot, menyebabkan kebudayaan klasik tidak berkembang, seperti wayang, topeng, lamut, syairan, tarian baksa. Pada masa pemerintahan NICA-Belanda, keadaan ekonomi mulai normal kembali hal ini memberi kesempatan untuk berkembang kembali beberapa jenis seni budaya yang pada masa Jepang tidak berkembang.

Wayang, lamut, madihin, mamanda, kuda gepang berkembang kembali, kecuali beberapa seni budaya klasik lainnya tetap menghilang seperti gandut, andi-andi. Kesenian ini merupakan kesenian rakyat sangat berkurang perkembangannya sebab terdesak oleh infiltrasi kebudayaan Barat berupa film-film Barat yang didatangkan Belanda sebagai hiburan bagi rakyat dan juga memasukkan unsur kebudayaan Barat diputar 3 kali sehari, hal ini menyebabkan sandiwara gulung tikar, tidak berdaya menangani film yang banyak penggemarnya. Sedangkan di pedalaman yang secara langsung dilanda revolusi dan terlibat dengan revolusi kesenian tak dapat berkembang.

5. Keadaan kehidupan beragama

Untuk menghadapi bidang agama, pemerintah Belanda sangat berhati-hati sekali, sebab apabila ummat Islam yaitu ummat beragama teringgung atau dihinakan oleh Belanda, maka Belanda otomatis tidak dapat menjalankan pemerintahannya. Karena itulah kaum ulama didekati Belanda, dan sebagian dapat dipikatnya memihak kepada Belanda, mendukung cita-cita Belanda untuk merealisasikan Negara Kalimantan. Yang terseret ke pihak Belanda ini ialah SRI dan MOI Kaum ulama yang sebagian besar tidak bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda, pemerintah Belanda tidak dapat memikat mereka. Mereka mendirikan partai yang mempunyai anggota meliputi seluruh rakyat Kalimantan Selatan dalam bentuk partai politik SERMI.

Kehidupan beragama tidak diganggu oleh Belanda, perjalanan haji bagi ummat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah tidak dihalangi Belanda. Perjalanan haji ini kemudian terhalang ketika memuncaknya perjuangan bersenjata, di mana pihak ALRI Divisi IV melarang perjalanan haji, dengan maksud untuk menghindarkan uang rakyat berpindah ke tangan perusahaan perkapalan Belanda yang mengangkut jemaah haji tersebut dan juga untuk menunjukkan bahwa pihak ALRI lebih ditaati rakyat.

Untuk menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tidak mengganggu perasaan ummat beragama terutama ummat Islam pemerintah Belanda mendatangkan ahli agama Islam ke Kalimantan Selatan yaitu Van Der Plas, yang bertugas untuk mendirikan Negara Kalimantan.

6. Bidang pers daerah

Surat kabar sebagai alat publikasi atau media massa sangat besar pengaruhnya bagi seluruh rakyat, berfaedah untuk semua golongan. Surat kabar adalah alat sosial servise yang bermaksud memuaskan para pembacanya. Selain itu surat kabar juga menjadi sumber pengetahuan, karena dalam waktu singkat orang dapat mengetahui apa yang telah terjadi di sebagian dunia ini.

Pengaruh positif surat kabar terhadap rakyat adalah memberikan berita aktual, baik nasional maupun internasional, mendorong rakyat untuk mencapai kemajuan serta partisipasi untuk mengadakan social kontrol.

Di Kalimantan Selatan persuratkabaran dipelopori oleh tokoh-tokoh politik. Mereka tidak mau memisahkan kepentingan surat kabar dengan kepentingan politik. Karena itu lewat surat kabar, rakyat diberi informasi tentang politik, sehingga sering surat kabar dianggap oleh Belanda sebagai tukang fitnah dan dikenakan sanksi dan pers briedel-ordonantie.

Contoh surat kabar seperti ini yang terbit di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan umumnya yang terbit pada masa pemerintahan Belanda sebelum perang antara lain : M.Ramli pemimpin surat kabar "Bintang Borneo" yang terbit tahun 1928 adalah tokoh politik yang berjiwa nasional, Usman Babu yang menerbitkan surat kabar "Suara Borneo" tahun 1927 adalah tokoh politik dan pemimpin suku Dayak, A.A.Hamidhan menerbitkan "Suara Kalimantan" tahun 1930 seorang yang melandaskan surat kabarnya pada anti penjajahan sehingga masa itu sangat terkenal karena keberaniannya. Merah Johansyah menerbitkan "Utusan Kalimantan" tahun 1930. Amir Hasan Bondan menerbitkan "Pembangunan Semangat" tahun 1938, Abd. Razak menerbitkan "Suara B I C/Bond Indonesia Chauffeur" tahun 1934, Surat Kabar ini menjadi pelopor perkembangan nasionalisme di Kalimantan Selatan. Dengan surat kabar tergugahlah hati sanubari rakyat untuk bergerak menentang ketidakadilan.

Pada masa Revolusi Fisik fungsi surat kabar memegang peranan penting, sebab surat kabar menjadi alat propaganda politik untuk mendukung perjuangan kemerdekaan atau mendukung pemerintah Belanda.

Sesudah lenyapnya Borneo Shimbun yang merupakan surat

kabar resmi pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, terbitlah surat kabar "Suara Kalimantan" Pimpinan Gusti A.Sugian Noor adalah seorang wartawan yang pada masa pendudukan Jepang ikut sebagai wartawan "Borneo Shimbun" yang dipimpin oleh H.A.A.Hamidhan. Nama "Suara Kalimantan" yang diterbitkan oleh Gusti A.Sugian Noor ini adalah nama surat kabar yang pernah terbit tahun 1930 yang dipimpin oleh H.A.A. Hamidhan. Surat kabar ini membawa suara pemerintah Belanda meskipun bukan surat kabar resmi pemerintah Belanda. Dalam sejarah persuratkabaran di Kalimantan Selatan surat kabar ini membawa aliran federalisme yaitu mendukung rencana pemerintahan Belanda untuk mendirikan Negara Kalimantan. "Suara Kalimantan" diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 1945, kemudian pada tahun 1950 yaitu setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda di bawah pimpinan Hadariah M, "Suara Kalimantan" diubah menjadi "Indonesia Merdeka".

Surat kabar yang juga mendukung suara pemerintah Belanda ialah "Sinar Hulu Sungai" terbit di Kandangan di bawah pimpinan Danel Bangsawan. Disamping itu juga ada surat kabar resmi pemerintah Belanda yang namanya "Santapan Rakyat" yang diterbitkan oleh Jawatan Penerangan pemerintah NICA-Belanda (RDP) di antara anggota staf redaksinya juga adalah Gusti A.Sugian Noor.

Sementara itu di Hulu Sungai terbit surat-surat kabar, yang bertujuan membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya Belanda. Pada masa itu wartawan merangkap sebagai geril yawan. Mereka adalah tukang propaganda, sambil berjuang, membawa dan mengambil berita. Hal ini yang merupakan perbedaan isi dari surat kabar yang membawa suara pemerintah Belanda.

Pers sebagai senjata nasional, sungguh menghadapi tugas berat, kadang-kadang harus membuat siaran gelap, dengan tujuan membuka rahasia yang disembunyikan Belanda, memupuk keyakinan rakyat dan sebagainya. Surat kabar yang membawakan suara perjuangan seperti ini dikenal sebagai "Trio surat kabar" yang paling berani zaman itu di Kalimantan Selatan yang menghantam kebobrokan penjajah NICA-Belanda yaitu Majalah "Republik" terbit di Kandangan pada tanggal 17 Agustus 1946 di bawah pimpinan Zafry Zamzam (alm), harian "Kalimantan Berjuang" terbit di Kandangan di bawah pimpinan A.Djebar dan harian "Trompet Rakyat" terbit di Amuntai pada tanggal 2 Desember 1946 di bawah pimpinan

Hamran Ambrie dan Yusni Antemas. Resiko yang harus diterima oleh wartawan-wartawan ini adalah rumah penjara, siksaan militer Belanda.

Kemudian ternyata menjadi bukti, bahwa wartawan-wartawan dari ketiga surat kabar ini seperti Zafry Zamzam (alm), Haspan Hadna, Hamran Amberie dan Yusni Antemas adalah tercatat sebagai "zwaarte journalist" (wartawan hitam) yang hidupnya keluar masuk tahanan Belanda dan selama 3 tahun menjadi langganan penjara dan tahanan Belanda. Ditangkap dan ditahan karena tulisannya yang membahayakan pemerintah NICA-Belanda.

Di Amuntai dimana tempat lahirnya gerakan rahasia GERPINDOM atau Gerakan Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka (1945) merupakan tempat kegiatan anti penjajah di daerah Hulu Sungai Utara. Anggota GERPINDOM adalah juga anggota Partai Politik SKI yang bergerak secara legal. GERPINDOM inilah yang melahirkan surat kabar "Trompet Rakyat" (1946) dan kemudian disusul oleh bulanan "Menara Indonesia", keduanya di bawah pimpinan wartawan Hamran Ambrie dan Yusni Antemas, Motto Surat Kabar "Trompet Rakyat" ini adalah : "Berhaluan mempertahankan Republik Indonesia" dengan penjaga pojoknya "Abang Betel", adalah motto yang cukup berani pada masa itu.

Nomor pertama dari penerbitan "Trompet Rakyat" diterbitkan pada hari Senin 2 Desember 1946, tepat pada saat sedang giatnya Belanda mempersiapkan Konferensi Denpasar yang merealisasikan politik divide et imperanya van Mook. Lima hari setelah penerbitan ini terjadilah peristiwa pembunuhan massal 40.000 rakyat di Makassar oleh Westerling.

Akibat penangkapan Belanda terhadap wartawan-wartawan yang berani menentang pemerintah Belanda mengakibatkan surat kabar tersebut terhenti penerbitannya, kecuali Kalimantan Berjuang yang dalam hal ini terpaksa hijrah ke Banjarmasin di bawah pimpinan Adonis Samad. Wartawan yang di tahan Belanda tersebut ialah: Haspan Hadna dari "Kalimantan Berjuang", Zafry Zamzam dari "Republik", Yusni Antemas dari "Trompet Rakyat". Ketiga wartawan ini setelah keluar dari tahanan, bersatu kembali dan memperkuat barisan redaksi "Kalimantan Berjuang" yang terkenal "Kabe". bersama-sama Adonis Samad, Zainal dan Mustafa.

Selain yang disebutkan di atas ada lagi penerbitan juga membe-
la Negara Republik Indonesia, yaitu seperti Bulletin SKI
"Kedaulatan" yang dipimpin oleh Fachruddin Mohani alm. Di Pantai
Hambawang terbit "Hisbullah".

Surat kabar yang berjiwa Republikan ini penyebarannya sam-
pai ke desa-desa sehingga dibaca oleh seluruh rakyat, sedangkan
surat kabar yang membawa suara pemerintah Belanda hanya dibaca
oleh pejabat pemerintah Belanda.

7. Pemerintahan

Seperti yang kita jelaskan di muka, pemerintahan yang di-
maksud adalah pemerintahan NICA-Belanda di Kalimantan Selat-
tan, sebagai pemerintahan yang de jure dan de facto berkuasa di
Kalimantan Selatan.

Kepala Pemerintahan tertinggi adalah Residen Borneo Selatan
yang saat itu dijabat oleh A.Deelman, yang meliputi Kalimantan
Tengah, Kalimantan Tenggara, daerah Banjar dan Hulu Sungai.

Sesuai dengan rencana pemerintah Belanda untuk membentuk
Negara Kalimantan sebagai realisasi dari politik *divide et empera*
van Mook, maka dibentuklah di Kalimantan Selatan Dewan Daerah
yang terdiri dari :

- a). Dewan Daerah Banjar yang meliputi daerah Banjar dan
Hulu Sungai.
- b). Dewan Daerah Kalimantan Tenggara yang meliputi daerah
Kota Baru Pulau Laut, Pagatan dan Cantung Sempanahan.
- c). Dewan Daerah Dayak Besar, yang meliputi Propinsi Kali-
mantan Tengah sekarang.
- d). Daerah ke Sultanatan Kotawaringin (Landschap)

Untuk Daerah Banjar, Dewan Daerahnya terdiri dari 41 ang-
gota terdiri dari 35 anggota berdasarkan pemilihan, yang dipere-
butkan oleh partai Politik SKI, SERMI, SRI dan MOI serta PER-
TIWI, 2 orang wakil golongan Cina, serta sisanya yang diangkat
oleh pemerintah Belanda.

Ketua Dewan Daerah ini untuk sementara ditunjuk/diangkat
oleh pemerintah Belanda yang waktu itu dijabat oleh Kiai Besar

M.Hanafiah dengan pangkat Wali Daerah.

Sesuai dengan keputusan Residen Borneo Selatan, kekuasaan atas daerah dipegang oleh Dewan Daerah yang diketuai oleh seorang Wali Daerah.

Sedangkan pemerintahan secara vertikal tetap seperti dahulu.

Setelah Residen, di bawahnya adalah Asisten Residen, sedangkan bangsa Indonesia yang memegang jabatan BB Ambtbaar adalah yang tertinggi : Kiai Besar, Kiai Kepala, Kiai dan yang terendah adalah Asisten Kiai (Camat).

CATATAN :

1. Susanto Tirtoprojo, *Sejarah Revolusi Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1963, hal.19.
2. Syarifuddin, *Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kal-Sel, Priode 1945 - 17 Agustus 1950*, Tesis, FKg - UNLAM, Banjarmasin, thn. 1974, hal.159.
3. Conferentie Permoesjawaratan Malino 15-24 Juli 1946, Resolutive en/dan Motie, hal.3.
4. HAH Budhigawis Letkol, *Laporan Perjuangan dari Munggu Raya*, Martapura, 1968, hal.3.
5. *Kodam X/LM, Membangun*, Penerbit Kodam X/LM, Banjarmasin, thn.1962, hal.462.
6. HAH Budhigawis, *Op.cit*, hal.4.
7. Wawancara dengan P.Arya, di rumah beliau di Sungai Lulut, pada tanggal 27 September 1979.
8. HAH Budhigawis, *Op.cit*, hal.4.
9. Kodam, *Op.cit*, hal.464.
10. *Loc.cit*.
11. Sejarah Singkat Kodam X/LM, "*Waja sampai kaputing*", diterbitkan oleh Kodam X/LM, Banjarmasin, thn.1970, hal.25.
12. *Loc. cit*.
13. HAH Budhigawis, *Op.cit*, hal.8.
14. Gusti Aman, Route Gerilya, naskah hasil wawancara di rumah beliau Gudang Hirang, pada tanggal 4 Nopember 1979.
15. Hasil wawancara dengan Guru Saberan Kalua, bertempat di Kandep P.K. Tabalong Tanjung, pada tanggal 15 September 1979.
16. Gusti Aman, *Op.cit*.
17. Hasil wawancara dengan Patih Kare, di rumah beliau jalan Antasari Barabai, pada tanggal 13 September 1979.
18. Jawatan Penerangan Kab. H.S.S., *Majalah Suluh Daerah Hulu Sungai Selatan*, Riwayat Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Div.IV, thn. I, no.7 Mei 1958, hal.6.
19. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.162.

20. H.Ramli Nawawi, *Dewan Banjar*, Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan UNLAM, Banjarmasin, th.1972, hal.65.
21. M.Sanit Seman, *Sejarah Politik Pendudukan Belanda dan Perlawanan Rakyat di Kal-Sel, 1945-1949*, Skripsi Jurusan Sejarah FKg-Unlam, Banjarmasin, 1972, hal.65.
22. H. Ramli Nawawi, *Op.cit*, hal.28.
23. M. Sanit Seman, *Op.cit*, hal.66.
24. Mugeni Junaidi, *Sejarah Singkat Bangkit dan Perkembangan Serikat Kerakyatan Indonesia, (SKI) di Kal-Sel*, Skripsi, Jurusan Sejarah, FKg-Unlam, Banjarmasin 1972, hal.24.
25. Kesuma Sekarsih, *Wanita Banjar*, sebuah tinjauan singkat mengenai kedudukan dan peranannya dalam Pergerakan Rakyat di Kal-Sel sampai tahun 1950, Tesis, FKg-UNLAM, Banjarmasin, thn.1977, hal.185.
26. *Loc.cit*.
27. *Ibid*, hal.187.
28. *Loc.cit*.
29. A. Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya menegakkan Rep. Indonesia di Kal-Sel (1945-1949)*, Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah Anthropologi FKIS-IKIP Malang 1968, hal.167.
30. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.167.
31. A. Gafuri, *Op.cit*, hal.78.
32. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.169.
33. Gusti Aman, *Op.cit*.
34. Kodam Membangun, *Op.cit*, hal.468.
35. Wawancara dengan Yusni Antemas di rumah beliau, jalan Sungai Karias Amuntai, pada tanggal 16 September 1979.
36. Gusti Aman, *Op.cit*
37. *Loc.cit*.
38. HAH. Budhigawis, *Op.cit*, hal. 9.
39. Wawancara dengan P.Arya, *Op.cit*.
40. Budhigawis, *Op.cit*, hal.12.
41. Wawancara dengan P. Arya, *Op.cit*
42. HAH Budhigawis, *Op.cit*, hal.14.

43. Wawancara dengan P. Arya, *Op.cit.*
44. Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, th. 1979, hal.120.
45. Anonim, Turun Ke Kota, Banjarmasin, hal.5.
46. *Ibid*, hal. 6.
47. Budhigawis, *Op.cit*, hal.14 dan wawancara dengan P.Arya, *Op.cit*
48. Wawancara dengan P.Arya, *Op.cit.*
49. Wawancara dengan P.Arya dan Gusti Aman, *Op.cit.*
50. Surat Kabar "*Kalimantan Berjuang*", Banjarmasin, tanggal 29 Agustus 1949.
51. *Ibid*, tanggal 30 Agustus 1949.
52. Kodam Membangun, *Op.cit*, hal.472.
53. *Sk. Kalimantan Berjuang*, tanggal 29 Agustus 1949.
54. *Ibid*, tgl. 3 September 1949.
55. Tjilik Riwut, *Op.cit*, hal.119.
56. *Sk. Kalimantan Berjuang*, tgl. 1 Oktober 1949.
57. *Ibid*, tgl. 17 September 1949.
58. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Kalimantan*, Jakarta, hal. 147.
59. *Loc.cit.*
60. *Ibid*, hal.149.

BAB V

KEADAAN DI KALIMANTAN SELATAN MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB

Seperti telah dijelaskan pada bagian perjuang bersenjata menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar atau pada saat konferensi itu sedang berjalan (23 Agustus - 2 Nopember 1949) di Negeri Belanda, suasana Kalimantan Selatan dalam keadaan memuncaknya perjuangan bersenjata. Ditingkatkannya perjuangan bersenjata dengan dicetuskannya Proklamasi 17 Mei 1949 yang melahirkan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV adalah suatu taktik perjuangan, supaya Belanda mengakui bahwa Kalimantan termasuk bagian dari Republik Indonesia di Jogja.

Setelah Aksi Militer Belanda ke II terhadap RI di Jogja, timbulah reaksi dunia yang menyebabkan Belanda terpaksa mengadakan gencatan senjata, yang baru ditaati Belanda setelah tercapainya Persetujuan Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949. Sejak persetujuan tersebut kembalilah pihak yang bermusuhan RI - Belanda berunding kembali.

Bagi ALRI Divisi IV merasa tidak terikat sama sekali dengan gencatan senjata tersebut, hal itu disebabkan bahwa Kalimantan tidaklah termasuk bagian RI yang diakui Belanda, karena cease fire itu hanya antara RI dan Belanda. Kalimantan adalah jajahan Belanda yang disahkan dalam Persetujuan Linggarjati dan kemudian tetap statusnya setelah persetujuan Renville. Pemerintah Belanda tetap menganggap bahwa ALRI Divisi IV adalah gerombolan yang tidak bertanggung jawab yang mengacaukan keadaan pemerintahan yang sah, seperti apa yang disebutkan dalam surat Residen Kalimantan Selatan kepada Ketua Dewan Banjar tanggal 20 Desember 1948.

Keadaan keamanan yang bergolak ini menyebabkan Pemerintah Belanda sangat lambat atau memperlambat realisasi policy Belanda dalam mendirikan Negara Kalimantan, sedangkan saat ini Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda akan segera dimulai.

Pihak Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, sebagai suatu peru-

bahan struktur organisasi sejak Proklamasi 17 Mei 1949, hanya tunduk kepada R I. di Jogja dan bukan pada pemerintah Belanda.

Sikap Gubernur Tentara ALRI Divisi IV ini diperkuat lagi oleh Badan Koordinasi dalam sebuah Mosi, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Koordinasi R. Sa'ban.

Mosi itu selengkapnya berbunyi :

MOSI BADAN KOORDINASI

Badan Koordinasi di Bandjarmasin jang terdiri dari perkoempoelan² politik, ekonomi, sosial, pemoeda dan pe-moedi, jakni terseboet dalam daftar A.

Disokong oleh :

Perkoempoelan golongan Tionghoa yakni yang terseboet dalam daftar C. Golongan Arab jakni jang terseboet dalam daftar D.

MEMPERHATIKAN ;

bahwa, gerakan kaoem gerilja jang sedjak tahoen 1948 melakoekan gerakan perdjoeangannja, jang di moelai dari Hoeloe Soengai seteroesnja mendjalar ke berbagai² daerah diseloeroeh Kalimantan Selatan, dan sekarang telah sampai di kota Banjarmasin, iboe kota Kalimantan Selatan, jang pada hari Senin malam tanggal 15 ke 16 - 8 - 49 telah moelai mengadakan tembakan² diberbagai tempat di dalam kota. Soerat selebaran dari pospat Pimpinan gerakan tersebut tgl. Kandangan, 5 - 8 - 1945 menjatakan dengan tegas, bahwa mereka taat pada persetoejoean penghentian tembak menembak, asal dengan perantaraan wakil Republik Indonesia.

Menimbang :

Soenggoeh penting dan sangat perloe lekas² dioesahkan terlaksananja penghentian tembak menembak.

Memutuskan :

Minta dengan hormat kepada UNCI dengan perantaraan Dewan Daerah Bandjar, Dewan Daerah Dayak Besar dan Dewan Daerah Kalimantan Tenggara, agar menjampaikan kepada jang berkewajiban oentoek segera mengatoer dan melaksanakan penghentian tembak-menembak diseloeroeh

Kalimantan Selatan.

Bandjarmasin, 17 Agustus 1949.

A.n. Koempoelan² terseboet seloeroehnja
Ketoea Badan Koordinasi di Bandjarmasin.
ttd. : R.Sa'ban. 1)

Surat Mosi ini diperkuat pula dengan beberapa surat kawat dari Gabungan Buruh Kalimantan, dari Pertiwi yang dialamatkan pada UNCI dan Wakil Tinggi Mahkota (HVK) di Jakarta. Pemerintah RI akhirnya mengirim utusannya ke Banjarmasin, Jenderal Mayor Soeharjo dengan diiringi rombongan yaitu Kapten Budiarjo dari AURI, Kapten Zainal Abidin dari Angkatan Darat, Kolonel Meels dari Australia dan beberapa peninjau UNCI.

Sebelumnya telah dibentuk panitia penyambutan yang terdiri dari Dr.Suranto sebagai ketua, R.Sa'ban dari Dewan Banjar, H.Kunun dari Dewan Dayak Besar.

Tanggal 28 Agustus 1949 rombongan Jenderal Mayor Soeharjo tiba di lapangan Ulin dengan disambut oleh Panitia Penyambutan, Wakil dari Residen Borneo Selatan A.R. Holiman dan Overste Veenendal. Jenderal Mayor Soeharjo terus mengadakan perundingan dengan Residen Borneo Selatan, dan tanggal 2 September 1949 diadakan pertemuan dengan pihak ALRI Divisi IV di Munggu Raya.

Sementara itu pada bulan Nopember Dewan Daerah Banjar sedang sibuk mengadakan sidang-sidang dalam menyusun rangka ketanegaraan Negara Kalimantan nanti. Dalam bulan Nopember tersebut ada tiga kali sidang Dewan, yang sidang ke IV tanggal 26 Nopember 1948 berhasil menetapkan tentang Rancangan Negara Kalimantan, sebagai berikut :

- A. Dewan Daerah Bandjar menjetoedjoei pembentoekan satoe negara Kalimantan, jang melipoeti seloeroeh Goebornemen Borneo Dahoeloe.
- B. Dewan Daerah Bandjar memoetoeskan, bahwa Negara Kalimantan jang akan didirikan, haroes mempoenjai bentoek kesatoean, jang garis² besarnja menoeroet rentjana dibawah ini :

- I. Rentjana Garis Besar Negara Kesatoean Kalimantan. Rentjana ini disoesoaikan dengan kenjataan2 Kalimantan sebeloem dan sesoedah Perang dunia ke II serta rentjana peratoeran soesoenan Tata Negara Kalimantan jang disoesoen oleh Panitia Perentjana di Djakarta
- II. Faktor2 jang mendorong Dewan Daerah Bandjar menghendaki membentuk Negara Kesatoean (aanstoot).
 1. mengetahoei sangat kekoerangan tenaga2 ahli dan tenaga2 terpeladjar, haroeslah tenaga2 jang ada itoe dipoesatkan dan dirasionalisir (gerationaliseerd).
 2. kesoekaran2 dalam keoeangan oentoek mendjamin kemakmoeran ra'yat akan maha berat, djika tidak ada pemoesatan oesaha oentoek mendapat hasil sebaik2 nja.
 3. kenjataan sebagai satoe bangsa, maka daerah2 jang soedah lebih madjoe wadjib toeroet bertanggung djawab dan mendjamin kemadjoean daerah2 jang masih terkebelakang.

III. D a s a r (gronslag).

Negara Kesatoean Kalimantan terbentoeok dari daerah2 (propinsi) : Kalimantan Barat, Dayak Besar, Bandjar, Borneo Timoer. Tentang Kesoeltanan Kotawaringin akan diserahkan kepada Constituante.

Dengan toedjoean :

A. Kedalam : Melaksanakan segala kekoeasaan dan menepati segala hak2 dan kewadajiban2 pemerintah oentoek kepentingan seloe-roeh Kalimantan dengan memperhatikan dasar2 demokrasi, agar tertjipta soeatoe masjarakat jang adil dan makmoer.

B. Keluar : Berkedoedoekan sebagai Negara Bagian (deelstaat) jang soenggoeh2 sederadjat dengan Negara2 bagian manapoen djoe-ga, dapat bersama2 mendoedoeki tempat dalam negara Indonesia Serikat jang

dirantjang.

IV. RANGKA

- a. Territory Negara Kesatoean Kalimantan melipoeti seloeroeh Borneo dengan poelaoe2nja menoeroet Gobernemen Borneo semasa pemerintahan Hindia Belanda, terbagi atas beberapa persekoetoean2 autonoom (grotere gemeensshap) dengan memperhatikan kedoedoekan dan hak2 Ke Soeltanan2 jang sampai sekarang ada.
- b. Pemerintahan terdiri dari Wali Negara dan Wakil Wali Negara jang dipilih setjara demokratis dibantoe oleh Kementeriannja serta parlemen jang terdiri dari dua kamar.
- c. Hubungan Persekoetoean Autonoom dengan Pemerintah Poesat ditetapkan dalam Oendang2 Dasar.

Djika sekiranya didalam Moektamar Daerah2 Negara Kesatoean Kalimantan tidak dapat dipertahan, maka jang akan didjadikan dasar politik Dewan daerah Bandjar, hasil pendapat Panitia tentang Negara Federasi Kalimantan jang disoesoen oleh Panitia Perantjang dengan memperhatikan laporan Penjelidikan Dewan Daerah Bandjar. 2)

Di luar Kalimantan Panitia pembentukan Negara Kalimantan diketuai oleh Pangeran Kartanegara, Sekretaris urusan Zelfbestuur, telah mengadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar dari Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Pasir serta Kalimantan Timur yang mewakili Swapraja Kutai, Bulongan dan Berau. Calon Presiden Negara Kalimantan sudah diumumkan melalui surat-surat kabar yaitu :

- a). Sultan Hamid II dari Kalimatnan Barat.
- b). Sultan Parikesit dari Kutai.
- c). Ir. Pangeran Moh.Noor.
- d). Mr. Tadjuddin Noor.

Kegiatan golongan federalisme telah meningkat dengan dilaksanakan Konferensi Inter Indonesia yang diadakan dua kali, yang pertama

di Jogja tanggal 19-22 Juli 1949 dan kemudian dilanjutkan di Jakarta tanggal 31 Juli - 2 Agustus 1949. Keputusan yang diambil ialah :

- a). Negara yang akan dibentuk ialah namanya Republik Indonesia Serikat.
- b). Bendera, Merah Putih.
- c). Bahasa Nasional, Bahasa Indonesia.
- d). Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, dan
- e). Tanggal 17 Agustus adalah hari Nasional.

Untuk menghadapi K M B, Dewan Banjar mengirim utusan ke KMB tersebut dengan diwakili oleh A.A.Rivai dan A.Sinaga yakni tokoh SKI yang berjiwa Republikan Unitarisme.

Konferensi Meja Bundar (KMB) itu dihadiri oleh :

- a). Delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II.
- b). Delegasi RI diketuai oleh Drs.Moh.Hatta.
- c). Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. van Maarseveen.

Semua usaha golongan federalisme yang diatur oleh Pemerintah Belanda ternyata hanya dalam kertas saja. Kegagalan ini disebabkan karena tidak adanya dukungan atau simpati dari rakyat Kalimantan sendiri, di samping itu dalam Dewan-Dewan Daerah yang ada di Kalimantan terdapat beberapa aliran yang satu dengan lain saling bertentangan.

Untuk menghadapi Belanda dalam perundingan nanti, antara RI dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) menghasilkan Piagam-Persetujuan tentang Naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bersama Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

B. SIKAP MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KONFERENSI ANTAR INDONESIA

Konferensi Antar Indonesia diadakan dua kali, yang pertama kali di Jogja dan kemudian dilanjutkan di Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Juli 1949. Konferensi ini bermaksud mencari kesepakatan pendapat tentang rencana pemerintah Belanda mengadakan Konferensi Meja Bundar di Negeri Belanda. Konferensi ini sangat diperlukan karena menjelang K M B diadakan, pemerintah Belanda telah

mendirikan beberapa Negara Bagian untuk memperkecil pengaruh RI dan juga untuk membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak menyetujui berdirinya RI tersebut. Inilah politik Belanda yang terus dijalan-kannya menjelang akhir pemerintahan Belanda di Indonesia. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam KMB nanti, maka diadakanlah Konferensi Antar Indonesia yang dihadiri oleh RI dan Negara-Negara bentukan van Mook yang disebut BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). Dari hasil konferensi ini ditetapkan beberapa kesepakatan tentang bentuk Republik Indonesia Serikat yang akan didirikan, dan menetapkan Sultan Hamid II Ketua BFO, sebagai ketua BFO ke KMB nanti.

Konferensi Antar Indonesia ini, kemudian dimantapkan lagi di Negeri Belanda pada saat KMB sedang berlangsung, yang kemudian melahirkan Piagam Persetujuan yang menetapkan kembali bentuk pemerintahan peralihan nanti menjelang RIS lahir. Dan dengan demikian maka dalam KMB nanti, akan berhadapan Belanda dan Indonesia (RI dan BFO).

Untuk membicarakan sikap masyarakat terhadap Konferensi Antar Indonesia ini, memang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa bangsa Indonesia terbagi atas 3 golongan, yaitu : golongan yang setia kepada Belanda, golongan federalisme, kedua golongan ini kemudian menjadi satu front untuk menghadapi golongan masyarakat yang ke tiga yaitu golongan Republikan- Unitarisme . Golongan Republikan Unitarisme ini mempunyai ide kesatuannya itu membela Proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan negara kesatuan RI

Golongan Republikan Unitarisme ini terbagi dua bagian dalam menentukan sikap perjuangan, tetapi ternyata keduanya saling mengisi dan saling berhubungan, yaitu golongan yang non dan koperasi. Golongan non-koperasi berjuang dengan memanggul senjata, bergerilya dan membentuk kesatuan kelasyakaran yang akhirnya membentuk pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV yang menguasai seluruh daerah pedalaman di seluruh Kalimantan Selatan. Golongan bersenjata ini yang bersikap non sangat konsekwen dan karena itu tidak menyetujui politik Belanda membentuk Negara Kalimantan, yang dikenal mereka hanya Republik Indonesia yang meliputi seluruh Kalimantan.

Golongan yang koperasi, berjuang melewati Dewan Daerah Banjar dengan liku-liku perjuangannya, berusaha memenangkan dalam pe-

milihan untuk memperoleh jumlah anggota yang lebih besar dalam Dewan, membentuk badan Koordinasi dalam Dewan hingga merupakan sebuah fraksi Republikan Unitarisme, yang terdiri dari Partai Politik SKI, SERMI dan PERTIWI. Sedang diluar Dewan Partai Politik ini mempelopori membentuk badan Koordinasi dengan organisasi massa yang sealian dan bermacam kegiatan untuk memenangkan ide kesatuan dengan cita-cita negara kesatuan R I

Dalam perjuangannya menghadapi golongan Federalisme yang disponsori oleh pemerintahan Belanda, golongan Republikan-Unitaris selalu mendapat tekanan, ancaman, penangkapan serta tahanan. Perjuangan golongan Republikan Unitarisme ini selalu kurang berhasil, karena itu golongan ini berusaha mempengaruhi Dewan supaya yang menjadi utusan ke BFO dan ke KMB nanti adalah dari golongan Republikan-Unitarisme, dan hal ini menguntungkan karena Dewan mengutus ke BFO dan KMB adalah tokoh-tokoh Partai SKI yaitu : A.A.Rivai dan A.Sinaga.

Dengan berhasilnya nanti KMB, yang melahirkan Republik Indonesia Serikat, ini berarti golongan Republikan-Unitarisme kalah di Kalimantan Selatan yang berarti pula golongan Federalisme yang memenangkan dalam pertarungan. Usaha golongan Republikan-Unitarisme tetap gigih dengan segala jalan, mengadakan rapat-rapat besar di seluruh Kalimantan Selatan yang menuntut agar bagian-bagian yang terdiri dari Dewan-Dewan Daerah Banjar, Daerah Kalimantan Tenggara di Kalimantan Selatan, dituntut untuk dibubarkan dan kembali bersatu dengan R I

Pada saat kemenangan golongan federalisme dengan hasil KMB, saat itulah kesatuan yang non koperasi konsekwen, yaitu ALRI Divisi IV dibubarkan dan dibentuklah kesatuan militer baru yang disebut Divisi Lambung Mangkurat yang dalam sejarah perjuangan bersenjata di Kalimantan Selatan tidak dikenal sama sekali, jelasnya nama ini tidak mempunyai andil dalam perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

Sikap Pemerintahan Daerah Kalimantan Selatan terhadap Konferensi Antar Indonesia, untuk ini perlu kita mendapat satu pengertian lebih dahulu dengan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan adalah bagian yang disahkan menjadi jajahan Belanda de facto dan de jure disahkan oleh wakil dari R I dan Belanda dalam Persetujuan Linggarjati (1947), kemudian dibenarkan lagi

dalam Persetujuan Renville (1948). Kalau yang dimaksud Pemerintah daerah yang sah yang dibenarkan oleh RI dan Belanda di Kalimantan, itu adalah pemerintahan Belanda (NICA) maka setiap pemerintah daerah ini jelas adalah sikap pemerintah Belanda sendiri.

Secara kenyataan pemerintahan Belanda (NICA) ini hanya berkuasa di kota-kota, selebihnya pemerintah Belanda tidak berkuasa. Untuk melewati jalan raya yang menghubungkan kota dengan kota, bagi Belanda suatu perjuangan untuk menempuhnya. Di pedalaman yang menguasai seluruh rakyat adalah pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Pemerintah Belanda menganggapnya sebagai gerombolan bersenjata yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, karena mengganggu ketenteraman umum dan mengganggu pemerintahan yang sah. Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI ini juga tidak ada mempunyai hubungan dengan RI dan Jogja, karena RI sendiri telah mengesahkan bahwa Kalimantan adalah tetap dibawah pemerintahan Belanda. Dengan demikian ALRI Divisi IV berjuang sendiri, membentuk pemerintahan militer sendiri tetapi tetap merasa bagian dari negara RI seperti apa yang dicituskan dalam Proklamasi 17 Mei 1949.

Kalau pemerintah Daerah yang dimaksud adalah pemerintah yang berdasarkan hukum tidak sah (*de facto* dan *de jure*) yang berbentuk Gubernur Militer ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan, maka sikapnya adalah tegas, bahwa yang dikenalnya hanyalah pemerintahan RI di Jogja dan Kalimantan adalah bagian dari pemerintahan RI tersebut.

C. PELAKSANAAN HASIL KMB DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, lahirlah negara dalam bentuk serikat yang bernama Republik Indonesia Serikat, dengan demikian maka BFO sudah tidak berfungsi lagi, seperti yang dikatakan oleh Ketua BFO Sultan Hamid II. Dengan bubarnya BFO, maka tidak ada lagi bahan yang mengikat negara-negara bagian atau daerah federal, kecuali hanya RIS yang mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar.

Berdirinya RIS, di Kalimantan terjadi pergolakan politik yaitu berlomba-lomba untuk menggabungkan diri dengan RI Partai-Partai

Politik yang berjiwa Republikan Unitarisme mempelopori mengadakan rapat-rapat raksasa untuk menuntut penggabungan itu.

Rentetan peristiwa pergolakan politik itu di Kalimantan Selatan sejak lahirnya RIS, sebagai berikut :

- a). Di Banjarmasin, dengan mengambil tempat di Gedung Perumfakatan Indonesia pada tanggal 25 Januari 1950, diadakan rapat gabungan partai-partai politik, organisasi massa dan berhasil mengambil keputusan yaitu : agar selekasnya dibentuk negara kesatuan, dengan demikian maka Dewan-Dewan Daerah maupun Gemeente sesegeranya dibubarkan dan dibentuk dewan baru berdasarkan pemilihan.
- b). Di Martapura pada tanggal 27 Januari 1950, oleh Partai S K I Cabang Martapura diadakan rapat besar yang dihadiri lebih dari 1000 orang. Rapat besar menghasilkan keputusan aklamasi untuk sesegeranya membubarkan Dewan Dewan di Kalimantan Selatan dan menggabungkan dan mewujudkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c). PNI Daerah Kalimantan Selatan, mengadakan rapat di Gedung Perumfakatan Indonesia (GPI) pada tanggal 5 Februari 1950. Rapat itu memperkuat hasil rapat gabungan partai-partai tanggal 25 Januari 1950, dan supaya pemerintah sesegeranya melaksanakan resolusi hasil rapat tersebut.
- d). Di Amuntai dengan bertempat di gedung Musyawarah thali bin, pada tanggal 5 Februari 1950, diadakan rapat partai-partai politik yang menghasilkan, memperkuat hasil keputusan rapat gabungan di Banjarmasin tanggal 25 Januari 1950 dan mendesak agar pembaharuan Dewan Daerah Banjar selekas-lekasnya 1 Juli 1950.
- e). Di Kuala Kapuas pada tanggal 5 Februari 1950, diadakan rapat umum gabungan partai politik yang diadakan oleh partai politik Cabang Kuala Kapuas dengan menghasilkan sebuah resolusi yang menuntut penggabungan dengan RI membubarkan segala Dewan-Dewan bentukan kolonial.
- f). Pada tanggal 13 Maret 1950, oleh Pemerintah diadakan rapat dengan Partai-Partai Politik dan Organisasi massa di bawah pimpinan Residen Kalimantan Selatan M. Hanapiah.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan ;

- penggabungan daerah Kalimantan Selatan harus dilaksanakan secepatnya dengan cara yang semudah-mudahnya.
 - karena itu Pemerintah Dewan-Dewan Daerah akan mendesak kepada Pemerintah RIS supaya menggabungkan daerah Kalimantan Selatan ke dalam RI berdasarkan pasal 7 ayat 3, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Darurat, yakni : kemauan penyatuan oleh Dewan-Dewan Daerah dianggap oleh Pemerintah RIS telah diambil sebagai suatu keputusan yang tetap. 3).
- g). Di Amuntai pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan demonstrasi rakyat dihadiri kurang lebih 6.000 orang, dimana diambil 2 mosi :
- Mosi pertama, mendesak agar secepatnya Kalimantan menjadi Propinsi Republik Indonesia, dan mendesak agar secepatnya seluruh Indonesia menjadi Negara Kesatuan.
 - Mosi yang kedua, mendesak agar supaya Dewan-Dewan di Kalimantan Selatan dibubarkan, dan agar dibentuk Dewan baru setelah bergabung dengan R I
- h). Pada tanggal 9 Maret 1950 di Banjarmasin diadakan demonstrasi rakyat yang dihadiri oleh 6000 orang dengan keputusan,
- menuntut pembubaran Dewan-Dewan sekarang, karena tidak dapat diterima oleh rakyat, dan mengajukan hasrat rakyat minta diakui sebagai pernyataan tetap untuk bergabung dengan RI menurut Undang-Undang Darurat no. 11 pasal 7 ayat 3 dan pasal 22 ayat 1. 4).
- i). Di Kandangan juga diadakan demonstrasi rakyat pada tanggal 26 Maret 1950, dengan tujuan yang sama dengan di Banjarmasin.
- j). Dalam surat Residen Kalimantan Selatan tertanggal 30 Maret 1950 ditujukan kepada Menteri Urusan Dalam Negeri RIS di Jakarta no. PB-17-32 yang berpokok : Penggabungan Daerah-Daerah Kalimantan Selatan dengan RI, yang isinya menjelaskan apa yang telah terjadi di Kaliman-

tan Selatan seperti yang dipaparkan di atas 5)

Dalam hal ini, pergolakan politik juga terjadi dalam Dewan-Dewan itu sendiri, dengan demikian pergolakan politik tidak hanya terjadi di kalangan rakyat yang berbentuk rapat raksasa dan kemudian menghasilkan mosi kepada pemerintah RIS.

Pergolakan dalam Dewan-Dewan itu menghasilkan beberapa keputusan yang sejalan dengan apa yang telah dihasilkan oleh rapat-rapat. Hasil keputusan dalam Dewan itu ialah :

- a). Dewan Daerah Banjar telah mengeluarkan sebuah mosi tanggal 26 Januari 1950, yang mendesak kepada Pemerintah RIS dan RI agar menyelenggarakan segala sesuatu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara RIS dan Undang-Undang Dasar RI, agar Daerah Banjar, daerah-daerah lain dan Haminte Banjarmasin di Kalimantan, selekasnya dapat masuk menjadi bagian Negara RI.
- b). Dalam mosinya tanggal 27 Maret 1950 ada diputuskan sebagai berikut :
 - Resolusi Dewan Daerah Banjar tanggal 26 Januari 1950 adalah pernyataan yang tetap dari seluruh Dewan Banjar untuk menggabungkan diri dengan RI sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat RIS no.11 pasal 7 ayat 3.
 - Dewan Daerah Banjar bubar setelah terjadi timbang terima hak, kekuasaan, kewajiban pemerintah RI.
 - Mendesak kepada pemerintah RIS meminta dengan selekasnya Resolusi tersebut, penetapan penggabungan Dewan Daerah Banjar dengan R.I. 6)
- c). Dewan Daerah Dayak Besar dalam suratnya tertanggal 15 Maret 1950 No.RIS-12-09 antara lain menyatakan :

Untuk menghindarkan segala sesuatu yang sebenarnya dapat diatasi kalau dijalankan dengan bijaksana, maka Badan Pengurus Harian Dewan Daerah Dayak Besar menganggap bahwa inisiatif yang telah diambil oleh Dewan pada tanggal 17 Oktober 1949 yaitu keputusan menggabungkan daerah ini dengan RI adalah sebagai pernyataan tetap berdasarkan dengan pasal 7 ayat 3 dari Undang-Undang Darurat dan pasal 22 ayat 1, yaitu mosinya tanggal 2 Maret 1950

ayat d yang bunyinya adalah: Mengingat bahwa Daerah Dayak Besar dalam sidangnya tanggal 17 Oktober 1949 telah memutuskan bergabung dengan RI seperti ternyata lebih jauh dalam maklumat Dewan pada tanggal 4 Februari 1950. ⁷⁾

d). Dalam sidang gabungan dari Dewan Kalimantan Tenggara dengan ketiga Landschapen-nya pada tanggal 20 dan 21 Maret 1950 telah diambil keputusan sebagai berikut :

- menyetujui prinsip pembubaran Dewan-Dewan di sana.
- menggabungkan Kalimantan Tenggara dengan RI sebagai kabupaten.
- Majelis Pengurus Harian tetap bekerja sebagaimana biasa, sampai penggabungan dilaksanakan.
- mengirim perutusan kepada Pemerintah RIS dan Pemerintah RI.
- menganjurkan kepada RI supaya secepatnya menempatkan perwakilan di Kota Baru.

Dan sidang gabungan itupun memutuskan sebagai berikut :

Terhitung mulai tanggal 21 Maret 1950 ditarik kembali-peraturan Pembentukan Daerah Kalimantan Tenggara yang dibuat di Kotabaru pada Tanggal 19 Agustus 1948. ⁸⁾

e). Landschap Kotawaringin kelihatannya tidak segigih di daerah lainnya, tetapi menurut keterangan dari *Bestuurscommissie* (suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Residen Kalimantan Selatan sebagai pengganti dari *Zelfbestuurder* yang telah dipecat oleh Pemerintah Pre Federal Indonesia dulu), bahwa rakyat tetap ingin bergabung dengan RI. ⁹⁾

Pada tanggal 1 Mei 1950 bertempat di Istana Sultan Kotawaringin dilakukan timbang terima kekuasaan Swapraja Kotawaringin dengan Pemerintah RI antara Kiai Kepala Basri dengan Dr. Murjani Gubernur RI dengan disaksikan oleh Wakil Residen M.Hanafiah, Residen Winarno D.A. dan seluruh masyarakat Kotawaringin. ¹⁰⁾

f). Di Gemeente Banjarmasin terjadi hal yang serupa, walaupun Gemeente itu belum mempunyai Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan saat itu hanya mempunyai Badan Penasihat Wali Kota. Pertemuan yang diadakan oleh wakil Wali Kota dengan wakil-wakil golongan dan partai pada tanggal 10 Maret 1950, yang dihadiri oleh golongan politik, ekonomi, sosial, wanita dan agama, yang kesemuanya ini menyatakan ingin bergabung dengan RI sesegera mungkin.

Dengan adanya pergolakan politik ini, baik dikalangan partai politik dan organisasi massa, maupun dikalangan Dewan-Dewan itu sendiri di seluruh Kalimantan Selatan, yang berupa tuntutan bergabung dengan RI Pejabat Residen Kalimantan Selatan memerlukan mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka tokoh partai politik, agama dan masyarakat di Hulu Sungai pada tanggal 26,27, dan 28 Maret 1950. Daerah yang dikunjungi ialah : Rantau, Kandangan, Tanjung, Amuntai dan Barabai. Pada setiap tempat yang dikunjungi, semua yang hadir menyatakan ingin bergabung dengan RI

Dari hasil pertemuan Pejabat Residen Kalimantan Selatan dengan pemuka masyarakat di Hulu Sungai tersebut, Pejabat Residen menarik kesimpulan bahwa :

- a). Rakyat seluruh Kalimantan yang terdiri atas daerah : Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin dan Gemeente Banjarmasin, mempunyai hasrat yang sangat besar untuk menggabungkan seluruh Kalimantan Selatan dengan RI.
- b). Hasrat yang begitu besar dan meluap-luap, tidak ditunda-tunda lagi, karena kalau terlambat pelaksanaannya memungkinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan tuntutan rakyat secara spontan ini, maka Presiden RIS mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 4 Maret 1950 nomor 137 menetapkan bahwa Daerah Banjar dihapuskan sebagai daerah bagian dari RIS dan dimasukkan kedalam bagian wilayah RI Jogjakarta. 11)

Untuk daerah-daerah lainnya di Kalimantan Presiden RIS telah menetapkan penggabungannya dengan RI, berdasarkan surat keputusan masing-masing, yaitu :

- a). Daerah Kalimantan Timur, dengan surat keputusan tanggal 24 Maret 1950 nomor 127, dan timbang terima antara

pemerintahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 April 1950.

- b). Daerah Dayak Besar dengan surat keputusan tanggal 2 April 1950 nomor 138, dan timbang terima antara pemerintahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 1950.
- c). Daerah Kalimantan Tenggara dengan surat keputusan tanggal 4 April 1950, nomor 139, dan timbang terima antara pemerintahan tersebut dilakukan pada tanggal 14 April 1950.
- d). Daerah Swapraja Kota Waringin, dengan surat keputusan tanggal 4 April 1950, nomor 140, dan timbang terima pemerintahan dilakukan pada tanggal 18 April 1950.
- e). Timbang terima daerah Banjar, dilakukan pada tanggal 14 April 1950.

Dengan timbang terima kekuasaan dari bentuk federasi bentuk kolonial Belanda kepada Pemerintahan RI maka lenyapkan bentuk pemerintahan federasi yang telah lama diperjuangkan oleh golongan federalisme. Pada pertengahan tahun 1950, RIS hanya terdiri dari : RI, Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur.

Dengan menggunakan pasal-190 Undang-Undang Dasar RIS, yang memberi kemungkinan untuk merubah Undang-Undang Dasar tersebut, demikian juga mengenai perubahan bentuk negara federasi tersebut pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ¹²⁾

D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN : sosial, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama serta kepercayaan kewanitaan dan sebagainya

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari KMB, maka Kalimantan termasuk bagian yang terbentuk daerah di dalam negara RIS tersebut, begitu pula RI yang berkedudukan di Jogja adalah sebagai bagian dari RIS tersebut. Gelora rakyat Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya untuk bersatu kembali dalam bentuk negara kesatuan RI telah dibicarakan pada bagian akhir dari BAB IV. Bagian ini membicarakan tentang keadaan di Kalimantan Selatan sekitar tahun

1950 dan 1951 yaitu saat terbentuknya Negara Kesatuan RI dan bubarnya RIS.

Pada pertengahan bulan Januari 1950 Dr. Murdjani dikirim oleh pemerintah pusat (RIS) ke Kalimantan untuk menyaksikan penggabungan daerah ini ke dalam RIS. Terlihatlah dengan jelas di seluruh Kalimantan gelora rakyat untuk kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan RI seperti dicita-citakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. 13) Demikianlah satu demi satu daerah di Kalimantan menggabungkan ke dalam RI Daerah yang pertama kali menggabungkan diri ialah Kalimantan Timur yang meliputi daerah Swapraja (zelfbestuur) Kesultanan Kutai, Bulongan, federasi Gunung Tabur/Sambaliuang, kemudian disusul oleh Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Kalimantan Tenggara. Penggabungan Kalimantan menjadi satu Propinsi saja, hal ini sesuai dengan kehendak rakyat yang diperjuangkan melewati Dewan Daerah maupun melewati rapat-rapat raksasa, hal ini juga merupakan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 14)

Pada masa sebelum perang bagian pulau Kalimantan yang termasuk pemerintah Hindia Belanda dahulu dibagi dalam dua buah keresidenan yang berkedudukan "gewest", yaitu Keresidenan "*Wes terafdeling van Borneo*" dengan ibu kota Pontianak, dan Keresidenan gewest "*Zuide en Oosterafdeling van Borneo*" dengan ibu kota di Banjarmasin. Keresidenan *Zuide en Oosterafdeling* diperintah langsung oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Banjarmasin, tetapi dalam praktek pemerintahan hanya dijalankan oleh seorang Residen terbeschikking, yang sebelumnya tidak ada di Kalimantan. 15)

Pemerintahan pendudukan Jepang membuat perubahan terhadap bentuk Kalimantan, menjadi 3 kresiden, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pembagian Jepang ini didasarkan pada kepentingan melayani pertahanan di masa dalam keadaan perang. Ketika Sekutu melucuti tentara Jepang dan diiringi oleh NICA-Belanda, ternyata NICA-Belanda melanjutkan tata pemerintahan yang telah dibuat oleh Jepang tersebut. 16)

Politik van Mook yang diciptakan melewati Malino dan Denpasar untuk melemahkan RI, melahirkan beberapa daerah yang merupakan bagian dari RIS. Daerah itu ialah :

- a). Federasi Kalimantan Timur dengan ibu kotanya Samarinda

- da.
- b). Daerah Banjar dengan ibu kota Banjarmasin.; Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam daerah Banjar, meskipun ditetapkan bahwa daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah tangga Kotapraja Banjarmasin dalam daerahnya.
 - c). Daerah Dayak Besar dengan ibu kota sementara Banjarmasin.
 - d). Daerah Kalimantan Tenggara dengan ibu kota Kotabaru.
 - e). Daerah Kotawaringin dengan ibu kota Pangkalan Bun.

Sejalan dengan keterangan Menteri Dalam Negeri R I, maka pada tanggal 4 April 1950, Presiden Soekarno telah menandatangani surat keputusan masuknya daerah-daerah Kalimantan Timur, Tenggara, Selatan dan Dayak Besar kepada Republik Indonesia. ¹⁷⁾ untuk melakukan timbang terima daerah ini, pemerintah pusat mengirimkan Menteri Dalam Negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo ke Kalimantan.

Beberapa hari setelah penggabungan itu ditandatangani Presiden Soekarno, pada tanggal 14 April 1950 pemerintah Republik telah menempatkan Dr. Moerdjani selaku wakil pemerintah pusat RI untuk menjalankan pemerintahan daerah Kalimantan. Sejak hari itu semua Dewan perwakilan daerah bentukan Belanda, serta Majelis Pemerintah Daerah dibubarkan. Untuk menjalankan segala pekerjaan pemerintah sebelum ada ketetapan dari pemerintah pusat, maka oleh wakil Pemerintah telah ditunjuk Winarno selaku Residen Kalimantan Selatan. ¹⁸⁾

1. Keadaan sosial

Keadaan sosial sehubungan dengan tuntutan kembalinya ke dalam bentuk Negara Kesatuan R.I, telah dijelaskan dan pada bagian ini kita uraikan tentang perkembangan sosial yang meliputi soal perburuhan di Kalimantan Selatan.

Keadaan sebelum perang, keadaan buruh sangat menyedihkan dengan gaji yang sangat rendah, bangsa Indonesia diperas pengusaha Belanda untuk memperoleh hasil bagi keuntungan Belanda itu sendiri. Ketika perang selesai dan Belanda berkuasa kembali, Belan-

da menguasai kembali perusahaan seperti perusahaan minyak (BPM dan OBM). Untuk memperbaiki BPM yang sebagian besar rusak kena bom Sekutu, Belanda memerlukan banyak tenaga Indonesia sebagai buruh. Pada saat itu gaji buruh hanya Rp.150.- sehari dan gaji itu hanya cukup dimakan buruh beserta isteri dan anak hanya setengah bulan, dan ini berjalan bertahun-tahun sampai tahun 1950. Karena kesadaran berorganisasi sudah mulai berkembang sebagai suatu usaha untuk menuntut perbaikan gaji, lahirlah beberapa organisasi buruh. 19)

Persatuan buruh yang ada di Kalimantan Selatan ialah :

- a). Persatuan Buruh Kehutanan,
- b). Persatuan Kaum Perawat Indonesia,
- c). Persatuan buruh bioskop,
- d). Serikat Sekerja Penggajian Indonesia,
- e). Serikat Buruh Percetakan Indonesia (Sarbuprin)
- f). Serikat Buruh Beca Indonesia,
- g). Serikat Pos,
- h). Persatuan Buruh Perusahaan Partikuler (Perbupi).
- i). Persatuan Buruh Rendahan Indonesia,
- y). Persatuan Buruh Tionghoa.

Persatuan buruh di atas berpusat di Banjarmasin, di samping itu terdapat pula persatuan buruh di daerah Hulu Sungai seperti :

- a). Serikat Sekerja Tukang Blik Seng (Sertubesi).
- b). Serikat Buruh gergaji, keduanya terdapat di Negara Hulu Sungai Selatan.
- c). Persatuan Buruh Indonesia (PBI) terdapat di Murung Pudak. 20)

Kantor Penempatan Tenaga Kerja yang mengelola buruh di Kalimantan Selatan, sebagai lanjutan dari kantor *Arbeidsbeurs* dari *Social Zaken* zaman Belanda, bertindak mempertahankan hak-hak tenaga buruh bangsa Indonesia. Suatu kasus perburuhan yang ditangani kantor ini seperti yang terjadi pada tahun 1950/51 ialah diberhentikannya secara serentak sebanyak 1114 buruh dari perusahaan Karet Pou Lim Chie dan atas usaha kantor ini, dapat diperker-

jakan kembali sebanyak 376 orang. 21)

Dari catatan Kantor Tenaga Kerja, jumlah penganggur yang terdaftar yang melamar pekerjaan adalah sebagai berikut : 22)

Statistik Penganggur Propinsi Kalimantan.

Tahun	Penganggur yang mendaftar	Telah dapat pekerjaan	Keterangan
1951	1738	468	sampai akhir
1952	2134	125	bulan Nopember 1952

Dari statistik di atas jelas pengangguran bertambah, sedangkan angka yang mendapat pekerjaan berkurang.

Dari penyelidikan tenaga yang mendaftar tersebut, diketahui bahwa tingkat pendidikan mereka adalah : 40% buta huruf, 55% tamatan SR 6 tahun dan SR 3 tahun, dan 5% sisanya Sekolah Menengah. Pekerjaan sebagai pegawai negeri waktu itu dari tamatan SR hanya dihargai dalam ruang II/a menurut PGP.48, dengan gaji yang sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk hidup keluarga suami isteri, sehingga sebagian besar dari mereka tidak ingin menjadi pegawai.

Pemeliharaan kesehatan masyarakat sangat terkebelakang sekali karena kekurangan tenaga kesehatan, juga karena daerah Kalimantan Selatan sangat luas, ditambah lagi dengan perhubungan yang tidak lancar.

Tenaga dokter untuk seluruh Kalimantan ialah : 23 orang dokter bangsa Indonesia, 12 orang bangsa Eropah, 12 orang Tingoah, terbagi dalam tiga daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Barat dan Timur. Untuk Kalimantan Selatan, terdapat 20 dokter praktek dalam 18 buah rumah sakit. 23).

Tenaga-tenaga lain, seperti Bidan, Jururawat, Mantri Malaria, Mantri cacar ditempatkan kecuali dalam rumah sakit, juga ditempatkan-tempat terpencil. Untuk menggambarkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat dilihat dari tersedianya tenaga kesehatan dibandingkan dengan rakyat di daerah ini, yaitu :

Sebuah rumah sakit untuk	: 57.682 jiwa
Sebuah balai pengobatan untuk	: 17.647 jiwa

Seorang dokter untuk	: 63.830 jiwa
Seorang bidang untuk	: 111.111 jiwa
Seorang jururawat untuk	: 20.000 jiwa
Seorang Mantri Malaria untuk	: 124.660 jiwa
Seorang Mantri Cacar untuk	: 54.545 jiwa. 24)

2. Ekonomi.

Masalah perhubungan sangat mempengaruhi jalannya perekonomian rakyat di Kalimantan Selatan. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan beruntung karena jalan darat dapat dilintasi mulai dari ibu kota Propinsi Banjarmasin, sampai ke daerah yang paling utara yaitu Tanjung, meskipun sarana jalaanan waktu itu tidak sebaik sekarang, tetapi dapat dilintasi kenderaan yang membawa barang-barang keperluan rakyat dan barang perdagangan. Hubungan yang kedua ialah jalan air yang juga dapat melayani dari Banjarmasin, sampai ke Tanjung dengan menggunakan kapal-kapal sungai.

Perhubungan jalan darat ini telah dimulai sejak tahun 1860, kemudian pada tahun 1936 pemerintah Belanda memperbaiki perhubungan darat di Kalimantan Selatan, yaitu jarak antara Banjarmasin - Hulu Sungai sepanjang 290 Km, Banjarmasin - Pleihari sepanjang 130 Km. Kemudian sejak tahun 1937 telah dimulai pekerjaan pembuatan jalan antara Banjarmasin - Balikpapan - Samarinda. Hubungan ini baru para tahun 1979 secara sempurna. Tetapi hubungan dengan daerah Kabupaten Kotabaru yang dahulu disebut Kalimantan Tenggara dengan Banjarmasin, masih sukar, kecuali dengan kapal laut. 25)

Koperasi Rakyat di Kalimantan, cukup memegang peranan penting dalam perdagangan dan pernah merupakan sumber dana ketika masa Gubernur Tentara ALRI Divisi IV. Koperasi telah berkembang di Kalimantan Selatan sejak tahun 1938, sejak perkembangan partai politik di daerah ini. Karena perkembangan koperasi ini, Pemerintah Belanda mendirikan "*Kantoor voor Cooperatie en Binnelandsch Handel*" yang bertugas memberikan bimbingan dan penyaluran sebagaimana mestinya. 26) Di seluruh Kalimantan terdapat 20 koperasi. Di Kalimantan Selatan terdapat Bank Koperasi "*Pensiun'*" yang didirikan di daerah Banjarmasin dan Hulu Sungai

dan Bank Kopererasi "Murni" di Kandangan. Di Kalimantan Selatan sendiri terdapat 5 buah badan koperasi yang baik sehingga mendapat "*rechtspersoon*", sehingga dalam perkembangan perdagangan koperasi ini menyaingi pedagang bangsa asing lainnya.

Setelah pengakuan kedaulatan, perkembangan koperasi ini bertambah pesat karena mendapat bimbingan dari Jawatan Koperasi. Pada waktu itu koperasi tumbuh seperti jamur musim hujan, tetapi akibatnya kurang terbimbing dan berjalan sendiri. Menjelang tahun 1950 terdapat 814 badan koperasi di seluruh Kalimantan dengan anggota 108.267 orang dan simpanan Rp.1.657.990.²⁷⁾

Kalimantan yang banyak mengandung objek ekonomi, turut membantu terhadap perkembangan industri besa maupun industri rakyat. Industri minyak di Kalimantan Timur merupakan sumber dana yang sangat penting, pada waktuitu masih dipegang oleh bangsa asing dalam perusahaan BPM. Begitu pula industri kayu yang terdapat di Sampit yaitu Bruynzeel Dayak Houbedrijven merupakan usaha patungan antara Indoensia-Belanda.

Perusahaan pengggergajian kayu diusahakan oleh Java Hout, sekarang dipindahkan ke tangan Indonesia. Di Kalimantan Selatan pada tahun 1949, Java Hout menghasilkan 100.000 Meter Kubik.²⁸⁾

Rotan sebagai hasil hutan Kalimantan merupakan bahan industri rumah tangga (*home industry*) untuk pembuatan tikar rotan. Dengan keahlian penduduk, rotan tersebut dibelah tipis dan diberi warna yang menarik, kemudian dianyam dalam bentuk tikar dengan komposisi warna yang menarik. Bukan saja dibuat tikar, tetapi barang lainnya, seperti kipas, keranjang dan sebagainya, yang cukup menarik.

Industri intan Martapura sangat terkenal sejak zaman dulu, dan daerah Martapura yang sekarang termasuk kabupaten di Kalimantan bahkan di seluruh Indonesia. Martapura yang menghasilkan intan belian dengan terdapat beberapa buah paberik penggosokannya, merupakan sumber perdagangan rakyat yang paling menguntungkan. Intan yang terbanyak di temukan adalah di daerah Cempaka (Kabupaten Banjar) dan bahkan terkenal keindahannya. Daerah lain dalam Kabupaten ini yang juga menghasilkan intan ialah Pengaron.

Cara pendulangan intan dikerjakan dengan cara tradisional de-

ngan segala pantangan (tabu) dan persyaratan tertentu, sangat ditaati oleh pendulang intan. Untuk mengetahui dimana intan berada, orang selalu meminta petunjuk seorang "malim" yang mengetahui dimana intan berada. Setiap pendulang intan selalu meminta petunjuk malim. Lubang yang digali untuk mencari intan, dalamnya penggalian tergantung pada jenis batu yang ditemukan sebagai petunjuk bagi tempat intan. Apabila jenis batu tersebut tidak ditemukan lagi orang menghentikan pekerjaannya. Lubang yang hanya sekitar 1 1/2 meter disebut *luang surut*, sedang yang lebih dari 10 meter disebut *luang dalam*. Alat yang dipergunakan ialah linggis, keranjang pengangkut batu dan linggangan. Linggangan ini berbentuk seperti topi besar yang terbuat dari kayu bundar yang garis tengahnya 1 sampai 1 1/2 meter dengan dasarnya agak tajam.

Intan Martapura yang paling baik, yang disebut nomor satu, ialah bercahaya air merah jambu, nomor dua air laut, nomor tiga putih bersih, nomor empat cahaya air hujan, nomor lima cahaya kuning, nomor enam atau nomor terakhir cahaya air minyak. 29)

Harga intan pada tahun 1950 an, intan merah jambu sebesar satu karet harganya Rp 5.000,- sampai Rp 6.000,- Warna air laut sebesar satu kerat berharga Rp 2.000,- dan yang putih bersih berharga Rp 1.000,- 30)

Sebagian besar rakyat di Kalimantan Selatan, tergantung hidupnya pada penghasilan karet.

Karet telah mulai ditanam di Kalimantan Selatan pada tahun 1911 dan 1912, kemudian pada tahun 1915-1920 penanaman karet secara besar-besaran. Perkembangan harga karet sangat memuncak pada tahun 1923 dengan harga sampai f.300,- tiap kati atau, f.500,- tiap 100 kg. Harga makin meloncat pada tahun 1925-1926 yang merupakan zaman keemasan bagi Kalimantan Selatan, tetapi harga ini kemudian menurun pada tahun 1930 sampai tahun 1955 yang dikenal sebagai "zaman meleset", sehingga Belanda perlu melarang rakyat menanam karet untuk menghindarkan membanjirnya di pasaran dunia. Penanaman karet di Kalimantan Selatan berdasarkan tiga taraf, yaitu tahun 1924, tahun 1925 dan yang ketiga tahun 1938. Menjelang tahun 1950 dan 1951, pohon karet tersebut sudah dianggap rusak, sehingga produksi karet sangat menurun. 31)

Di daerah Hulu Sungai pohon karet terdapat di sepanjang jalan

raya. Menurut perkiraan pohon karet di Hulu Sungai adalah di Rantau 5%, Kandangan 5%, Barabai 10%, dan Tanjung 5%. Di daerah Kabupaten Banjar karet yang ditanam sebelum tahun 1924, jumlahnya 20%.

Rumah asap rakyat di Hulu Sungai belum terdapat pada tahun 1935, selain kepunyaan orang Jepang di Telaga Langsung, Haruyan dan Kelua. Tetapi pada tahun 1949 dan 1950 rumah asap di Kalimantan Selatan berjumlah 337.006 buah. ³²⁾ Di antaranya terdapat rumah asap rakyat dan koperasi tidak kurang dari 800 buah yang terdapat di Hulu Sungai dan 150 buah di Kabupaten Banjar.

Pada tahun 1950/1951 ketika keamanan tidak mengizinkan, banyak rumah asap ini yang ditutup dan penyadap karet dan pemilik karet membuat "*unsmoked-sheets*". Di Pengambau (Barabai) dan di Haruyan (Tanjung) rakyat membuat rumah asap kecil secara sederhana rumah asap ini dikenal dengan nama *getah marlung*. Produksi getah marlung ini mencapai puluhan ton perminggunya, tetapi tentu harganya tidak semahal getah asap biasa, tetapi lebih baik dari pada harga *slabs*.

Export karet dari pelabuhan Banjarmasin pada tahun 1950, adalah 75.047 ton, termasuk di antaranya 46.424 ton getah rakyat, sehingga prosentasi produksi rakyat mencapai 62% dari getah yang di ekspor. ³³⁾

Pembuatan getah marlung ini dikerjakan oleh beberapa orang, kebiasaannya adalah pemilik atau penyadap bekas anggota koperasi yang merasa kecewa, dengan berserikat membeli dua pasang mesin penggiling. Perkakas lainnya seperti *takungan*, cuka dan lainnya dibeli oleh masing-masing yang berkepentingan. Begitu pula rumah asapnya yang sederhana sekali dan kecil bangunannya dibuat oleh masing-masing. Selama tahun 1950/1951 suasana keamanan di Kalimantan belum pulih, menyebabkan banyak rumah asap yang ditutup, selama itu pula getah marlung menggantikan produksi getah asap. Untuk membikin getah marlung sipengusaha harus bekerja hampir satu hari penuh, sebab selain menggiling, juga waktu *di salai*, harus tetap dijaga agar jangan sampai terjadi kebakaran.

Meskipun Kalimantan Selatan daerahnya sangat luas untuk memungkinkan dapat ditanami dijadikan tanah pertanian, tapi hasil panen sekitar tahun 1949/1950 sangat merosot sekali dan dapat

dikatakan kekurangan beras. Kekurangan beras untuk tahun 1949 berjumlah 89.000 ton, dan kekurangan ini tiap tahun bertambah hampir 10%. 34)

Keadaan pertanian di Kalimantan Selatan dapat dibagi menjadi lima (5) bagian daerah pertanian yaitu : dari Banjarmasin ke Hulu Sungai.

a). Letak pertanian yang berhubungan dengan tanah pegunungan. Sawah ini juga dapat dibedakan antara sawah yang dapat diairi dan sawah yang menanti jatuhnya hujan. Di daerah seperti ini, pertanian kurang berbahaya, asal dijaga tebat dan pengairannya.

b). Daerah pertanian yang letaknya di antara sawah dan *baruh*. Daerah ini banyak mengandung resiko, sebab bibit padi yang sudah ditanami sering tenggelam karena banjir.

c). Daerah pertanian yang letaknya dibagian sebuah danau. Air musim barat sangat dalam, oleh sebab itu mereka menanam padi pada saat air mulai surut, ialah permulaan musim kemarau. Pertanian di daerah ini banyak mengambil resiko, sebab seringkali banjir dan bibit padi tenggelam, karena itu mereka sering menyediakan bibit beberapa turunan. Dan sering pula, karena musim hujan terlalu lama, mengakibatkan mereka menanam terlambat, dan ketika padi berbuah datang lagi musim penghujan yang menyebabkan padi mereka yang sedang berbuah tenggelam.

d). Persawahan dalam waktu kemarau, seperti yang terdapat di Keliling Benteng Hilir. Banyaknya air ialah kalau terjadi hujan dan banjir dari *pahuluan*, mengakibatkan pertanian ini tenggelam air.

e). Persawahan yang letaknya di pinggir sungai besar yang mengarah ke laut, sebagaimana pertanian di daerah Banjarmasin. Padi yang ditanam yang berumur lama, yaitu 10 dan 11 bulan. Bahaya sawah ini ialah apabila terjadi kemarau lama, padi yang sedang mulai berbuah akan menjadi rusak karenanya.

Di samping persawahan di atas masih ada lagi yang disebut tegalan, yang melulu di daerah pegunungan. Sawah tegalan ini sebetulnya turut membantu lebih banyak banjir, sebab tegalan hanya dikerjakan di tanah dimana pohon kayu di daerah itu ditebang lebih dahulu. Pada musim kemarau, pohon-pohon kayu di tebang, kemudian setelah cukup kering baru *dipanduk*, yaitu dibakar sampai habis,

setelah itu tanahnya dibersihkan. Mendekati musim hujan, atau pada waktu awal musim hujan baru ditaburi padi. Pertanian seperti ini lebih banyak bahayanya, sebab letaknya satu dengan lain sangat berjauhan sehingga bahaya tikus, burung dan sebagainya. Juga sawah tegalan tidak mungkin dapat lebih luas, karena tergantung dari daerah yang digarap. Tahun depan tegalan ini berpindah lagi ke tempat yang banyak pepohonannya yang dapat ditebang.

Secara umum, maka persawahan di Kalimantan Selatan semata-mata tergantung pada alam, iklim serta menurut turunnya hujan atau jalannya air. Dengan demikian bukannya petani yang mengatur banyaknya air seperti persawahan pengairan, tetapi air yang mengatur bagaimana cara bertani.

3. Sosial Budaya

Masyarakat Kalimantan umumnya terdiri dari suku Banjar yang termasuk Suku Melayu, sedikit suku terasing yang umumnya terdiri dari suku Melayu tua yang tidak beragama Islam, umumnya disebut "orang bukit". Orang bukit ini beragama animisme dan hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Suku pendatang umumnya di daerah pinggir laut dalam Kabupaten Kotabaru, terdiri dari Bugis, Mandar dan Bajau.

Adat istiadat suku Banjar sangat dipengaruhi oleh agama Islam sehingga tata kehidupan orang Banjar selalu berpedoman pada agama Islam, meskipun beberapa tradisi kuno masih terlihat sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal ini terlihat dalam upacara penganten, kematian, memberi nama terhadap anak yang lahir yang disebut *batasmiah*, agama Islam merupakan dominan, meskipun demikian juga terdapat hal-hal yang bersifat tradisional, seperti pada acara mandi orang bunting yang disebut *bapapai*. *Bapapai* juga merupakan upacara orang yang akan dikawinkan, namun pekerjaan ini sudah mulai jarang dilakukan.

Di daerah Hulu Sungai, apabila bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awwal yang merupakan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, tiap kampung mengadakan upacara Mauludan, yang kadang-kadang bersifat besar-besaran. Yang dibaca dalam upacara tersebut ialah selain pengajian Al Quran, ceramah tentang kelahiran Nabi, juga syair tentang maulud Nabi yang dikenal sebagai Maulud Syara-

ful Anam. Syaraful Anam ini dilagukan dengan meriah sekali. Agak di kota-kota dibacakan Maulud Barjanzi dan untuk wanita dibaca Maulud Diba'. Di Banjarmasin umumnya dibacakan Maulud Diba' oleh kaum pria. Di Martapura dibaca pula syair dari Maulud al Habsyi, Maulud Ajab dan Qasidatul Burdah.

Hampir tiap kampung di Hulu Sungai terdapat majlis tadarus Quran, umumnya setiap malam Jum'at.

Pembacaan Al Qur'an juga dibacakan setelah orang meninggal, hal ini berlangsung tiap malam Jumat sampai hari keseratus dari orang yang meninggal tersebut.

Perkembangan kesenian rakyat yang waktu itu masih hidup adalah seperti wayang Banjar, topeng, jepen, lamut, madihin, kuda gepang, abdulmuluk, baladun dan sebagainya.

Kesenian Banjar yang ada sekarang adalah merupakan perpaduan kesenian daerah asli dengan kesenian yang datang dari luar daerah. Kalau kita kelompokkan kesenian yang ada dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kesenian tangan yang merupakan hasil yang indah berupa ukir-ukiran, bangunan, perhiasan. Dalam hal bangunan terlihat pada kepandaian membuat rumah Banjar dengan ukiran pada pintu masuk, pelis. Ukiran ini kadang-kadang dicampuri dengan huruf Arab. Juga terdapat ukiran khusus pada perahu tambangan dan perahu Amuntai yang melukiskan daun kangkung merayap dan bunga ilung.

Kesenian pertunjukkan termasuk wayang, tarian, mamanda (abdulmuluk), sedangkan yang ketiga adalah kesenian kesusasteraan berupa syair, berceritera.

4. Pendidikan

Dalam hal pendidikan ternyata bahwa Kalimantan sangat teringgal dari pulau lainnya apalagi dibandingkan dengan Jawa. Kalimantan yang luasnya 5 kali Pulau Jawa tersebut hanya mempunyai dua buah MULO yang didirikan pada tahun 1927. Pemerintah Belanda membiarkan rakyat dalam keadaan buta huruf supaya tetap bodoh. Hal ini memberi kesempatan bagi Missi dan Zending menjalankan operasinya. Kalimantan Selatan yang rakyatnya beragama Islam, mereka berusaha mendirikan sekolah-sekolah swasta yang mengutamakan agama Islam dan ternyata mendapat sambutan

an dari masyarakat. Dalam hal perkembangan sekolah-sekolah ini, pihak pemerintah Belanda selalu berpijak pada Missi dan Zending.

Pada masa pemerintahan NICA-Belanda, pendidikan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Jepang, antara lain Sekolah Rakyat hanya satu jenis saja lagi, dibanding sebelumnya berjenis-jenis sesuai dengan masyarakat yang heterogin.

Pada tahun 1951/1952 di Kalimantan Selatan terdapat sebuah SMA yaitu di Banjarmasin dengan murid 46 orang dan jumlah guru sebanyak 5 orang. Sekolah Guru Tingkat Atas, hanya sebuah yaitu SGA merupakan peleburan dari Kweekschool terdapat di Banjarmasin untuk seluruh Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, muridnya 99 orang dengan jumlah guru 5 orang. Sekolah Guru B (SGB) terdapat tiga buah, yaitu dua buah di Banjarmasin yang terdiri SGB puteri dan SGB putera, sedangkan di Hulu Sungai hanya terdapat di Kandangan. SKP hanya 3 buah di Banjarmasin, Kandangan dan Barabai dengan jumlah murid 164 orang dan guru sebanyak 15 orang, SMEP hanya satu-satunya terdapat di Banjarmasin. Untuk SMP seluruh Kalimantan Selatan, hanya 4 buah yaitu di Banjarmasin, Kandangan, Barabai dan Amuntai. Sebagaimana SMEP, maka STP hanya terdapat sebuah di Banjarmasin. ³⁵⁾

Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di seluruh Kalimantan Selatan, maka dibangunlah di beberapa kota (1951) KP kp kb, yaitu Kursus Pengantarke-Kewajiban Belajar) yang terdapat di Martapura, Kandangan, Barabai dan Amuntai. ³⁶⁾

5. Perkembangan agama.

Kalimantan Selatan yang terdiri dari suku Banjar menganut agama Islam yang mendiami hampir seluruh daerah ini, suku lain seperti : Bugis, Bajau, mendiami didaerah Pegatan dan Pulau Laut, juga termasuk penganut agama Islam yang taat. Suku Bakumpai di daerah Marabahan yang berasal dari suku Dayak Ngaju, juga beragama Islam, karena itu juga disebut sebagai suku Banjar.

Suku Dayak hanya sedikit terdapat di Kalimantan Selatan, yang umumnya disebut sebagai "orang bukit", terdapat di daerah : pegunungan Hulu Sungai Tengah, pegunungan daerah Tapin dan di daerah Gunung Batu Besar di Kalimantan Tenggara. ³⁷⁾ Agama Kristen yaitu Katholik dan Protestan hanya terdapat di Banjarma-

sin, biasanya terdiri dari suku bukan suku Banjar, seperti Dayak, ataupun dari daerah Indonesia Timur.

6. Wanita.

Kesadaran berorganisasi wanita sudah cukup matang pada sekitar tahun 1950 an. Wanita Kristen sudah mulai bangkit dengan organisasinya setelah Ny. Katharina Mahar menghadiri Kongres Pertiwi di Jogja pada tahun 1949. Oleh Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Jogja di beri mandat untuk membentuk PWKI di Kalimantan Selatan. Hal ini terlaksana pada tahun 1950 dengan susunan pengurus PWKI Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Ketua	: Ny. Katharina Mahar
Wakil Ketua	: Ny. A.Sinaga
Sekretaris	: Nn. Fransiska Rupuk
Bendahara I	: Ny. Siahaya
Bendahara II	: Ny. Tindan.

Dalam hal ini Ny. Katharina Mahar menjabat Ketua selama 17 tahun sampai tahun 1967. 38)

Aisyah yang sejak Jepang tidak dapat menjalankan aktivitasnya, pada tahun 1950 kembali menyusun organisasinya sebagai berikut :

Ketua	: Ny. Syarifah Muzenah Assegaf
Wakil Ketua	: Ny. Barlian Sani
Penulis	: Ny. Masithah
Pembantu	: Ny. Mawardi

Menjelang pengakuan kedaulatan tahun 1949, di Jogjakarta diadakan Kongres Umat Islam. Wanita Sermi Kalimantan Selatan mengirim utusannya ke Kongres tersebut, yang terdiri dari : Ny.H.Hamdah, Ny.Syarifah Muzenah Assegaf, Ny. Barlian Sani dan NY. Mastifah Hamdi. 39)

Setelah Kongres itu di pihak SERMI ada kecenderungan untuk melebur ke dalam MASYUMI, sehingga kongres terakhir di Kandangan pada bulan Maret 1950 SERMI dengan resmi melebur menjadi -MASYUMI, dengan demikian Muslimat SERMI menjadi Muslimat

MASYUMI pula.

Semenjak PERTIWI terbentuk, kegiatan PERWANI berkurang, sebab sebagian besar tokoh PERTIWI adalah tokoh dari PERWANI. Kongres wanita di Jogja itu memberi pengaruh pada perkembangan PERWANI, karena mengetahui ada organisasi yang terbentuk secara vertikal yang mempunyai asas dan tujuan tidak begitu berbeda dengan PERWANI yaitu PERWARI yang suah berdiri di Jogja tahun 1946. Oleh karena itu pada Kongresnya di Kandangan, PERWANI, menyebutnya sebagai PERWARI Cabang. Sejak itu PERWANI menjadi organisasi wanita lokal yang cukup besar.

Susunan pengurus PERWARI I ialah :

Ketua	: Ny. Norsehan Johansyah.
Wakil	: --
Sekretaris I	: Ny. Katharina Mahar.
Sekretaris II	: --
Bendahara	: Ny. Dr. Soeranto.
Pembantu	: Ny. Margaritha Hamli Carang. 40)

Demikian perkembangan wanita dan kesadaran berorganisasi pada sekitar tahun 1950.

CATATAN :

1. Surat Kabar "Kalimantan Berjuang", Banjarmasin, tanggal 18 Agustus 1949.
2. Garis Besar untuk Delegasi Dewan Daerah Banjar ke Muktamar Daerah-Daerah, menurut keputusan Dewan Daerah-Banjar dalam rapat Sidang ke III dan ke IV tanggal 26 Nopember 1948.
3. H. Ramli Nawawi, "*Dewan Banjar*", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg-UNLAM, Banjarmasin tahun 1972, hal.69.
4. Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, tahun 1979, hal.124
5. Syarifuddin, *Op.Cit*, hal.266.
6. Tjilik Eiwut, *Op.cit*, hal.125.
7. *Loc.cit*.
8. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.270.
9. Surat Pejabat Residen Kalimantan Selatan, penggabungan Daerah-Daerah Kalimantan Selatan dengan R.I., yang ditujukan kepada Menteri Urusan Dalam Negeri RIS di Jakarta, tertanggal 30 Maret 1950, nomor : OPB-17-32, hal.3.
10. Tjilik Riwut, *Op.cit*, hal.125.
11. Syarifuddin, *Op.cit*, hal.272.
12. H.Ramli Nawawi, *Op.cit*, hal.79.
13. Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Kalimantan*, Jakarta, tahun. hal.78.
14. *Ibid*, hal. 82.
15. *Ibid*, hal. 86.
16. *Ibid*, hal. 87.
17. *Ibid*, hal. 70.
18. *Ibid*, hal. 71.
19. *Ibid*, hal. 274.
20. *Ibid*, hal. 277.
21. *Ibid*, hal.280.
22. *Ibid*, hal.280.
23. *Ibid*, hal.298.
24. *Loc.cit*.

25. *Ibid*, hal.161.
26. *Ibid*, hal.178.
27. *Ibid*, hal.179.
28. *Ibid*, hal.181.
29. *Ibid*, hal.189.
30. *Loc.cit*.
31. *Ibid*, hal.191.
32. *Ibid*, hal.196.
33. *Ibid*, hal.195.
34. *Ibid*, hal.203.
35. *Ibid*, hal.286.
36. *Ibid*, hal.287.
37. Kodam X Membangun, Banjarmasin tahun 1962, hal. 504.
38. Kesuma Sekarsih, Wanita Banjar, Tesis, FKg-Unlam Banjarmasin, tahun 1977, hal. 201.
39. *Ibid*, hal. 201.
40. *Ibid*, hal. 203.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tentara Jepang masuk ke Kalimantan Selatan melalui jalan darat sebelah utara. Dengan berjalan kaki dari Balikpapan mereka datang di Kalimantan Selatan pertama kali memasuki kota Tanjung (Kabupaten Tabalong). Dari kota tersebut mereka meneruskan perjalanan ke arah selatan memasuki kota Amuntai, Barabai, Kandangan, Rantau, Martapura hingga ke Banjarmasin. Kedatangan tentara dari Angkatan Darat Jepang tersebut tidak menemui kesukaran sama sekali, karena tentara Belanda di daerah ini sebelumnya sudah terpengaruh dengan propaganda siasat yang mereka lakukan. Dengan mengirimbkan kurir bahwa mereka datang dengan jumlah yang banyak maka sebelumnya tentara Belanda sudah kalah mental. Tentara Belanda yang berada di kota-kota yang akan dimasuki Tentara Jepang tersebut sebelumnya sudah menyingkirkan atau membuang senjata mereka. Padahal sebenarnya Jepang yang datang pertama tersebut berjumlah kecil dan dalam keadaan lelah.

Sesudah Jepang mengambil alih kekuasaan di daerah ini, peristiwa pertama yang terjadi adalah pembumihangusan di beberapa daerah dan kota-kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan itu disertai dengan penggedoran rumah dan toko-toko serta perusakan-perusakan milik Cina dan Belanda. Rakyat diajak dan diikutsertakan dalam pengambilan milik orang-orang Cina dan Belanda tersebut. Sesudah itu barulah Jepang mengadakan konsolidasi ke dalam, dan untuk daerah Kalimantan Selatan pemerintahan selanjutnya dijalankan oleh pihak Angkatan Laut (Kaigun).

Pada masa Jepang berkuasa selama 31/2 tahun di daerah ini rakyat Kalimantan Selatan telah merasakan hidup yang dibayangi ketakutan, sementara segala kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan "untuk kepentingan Jepang". Mulai dari bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, yang dilaksanakan dan yang boleh dikembangkan apabila segalanya itu bersifat membantu perjuangan Jepang. Sehingga selama 31/2 tahun Jepang berkuasa selama itu pula rakyat di daerah Kalimantan Selatan mencatat sejarah

hitam dengan segala penderitaan baik jasmaniah maupun rohaniyah.

Apabila menjelang bulan Agustus 1945 orang-orang Jepang yang berada di Indonesia, khususnya yang berada di Kalimantan Selatan pernah bersikap baik hati, bukanlah karena demikian keadaan yang sebenarnya. Kebaikan-kebaikan tersebut semata-mata untuk mengharapkan simpati rakyat Indonesia pada masa mereka terdesak oleh Sekutu yang waktu itu sudah berhasil menundukkan beberapa daerah pertahanan Jepang. Dan ketika Jepang sudah secara resmi menyerah kepada Sekutu, di Kalimantan Selatan sementara menunggu kedatangan tentara Sekutu, Jepang merupakan penghalang dari setiap aktifitas pemuda atau tokoh-tokoh rakyat untuk menyiarkan berita tentang sudah adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Demikianlah Jepang datang dengan psyy-war dan tindakan keangkuhannya, dan kemudian meninggalkan Kalimantan Selatan dengan ketakutan dan kehinaannya.

Bangsa Indonesia yang telah merasakan pahit manisnya penjajahan bangsa asing pada waktu itu melakukan tindakan dan kegiatan untuk bebas dari penjajahan siapapun. Berbagai insiden berdarah telah terjadi. Rakyat Indonesia khususnya yang berada di Kalimantan Selatan kemudian berjuang dengan segala apa yang ada dan dimiliki. Organisasi-organisasi kelasykaran timbul di mana-mana. Akhirnya dirasakan bahwa bersatu di bawah satu komando perlu ditempuh, dan untuk itulah kemudian lahir ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan.

Politik van Mook yang dikenal sebagai policy pemerintah NICA-Belanda ialah divide et empera, diwujudkan van Mook dalam bentuk negara-negara dalam wilayah Republik Indonesia menurut cita-cita Proklamasi 17 Agustus 45. Untuk mewujudkan negara-negara bagian ini van Mook mengadakan beberapa kali konferensi yang tujuannya untuk meyakinkan para pemimpin Indonesia yang pro Belanda, bahwa Belanda mempunyai tugas suci untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai partner dari Kerajaan Belanda nanti, seperti Konferensi Malino, Denpasar, Konferensi Pangkal Pinang.

Untuk menghadapi siasat van Mook ini, rakyat di Kalimantan Selatan terbagi atas beberapa golongan, yaitu golongan yang pro Belanda, golongan federalisme dan golongan Republikan Unitarisme.

Golongan yang pro Belanda inilah yang mendukung policy NICA-Belanda untuk mendirikan negara Kalimantan, golongan inilah yang kemudian dikenal sebagai golongan federalisme. Golongan Republikan Unitarisme ialah yang menginginkan bahwa Kalimantan termasuk bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dicita-citakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.

Untuk mencapai tujuan golongan Republikan Unitarisme ini terbagi dalam dua kelompok sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, yaitu yang berjuang dengan dasar kooperasi yaitu bekerja sama dengan pemerintah NICA-Belanda. Kelompok yang kooperasi berjuang secara legal, dan membentuk partai-partai politik yang dikenal sangat gigih berjuang dalam Dewan Daerah Banjar. Partai-partai politik itu ialah : SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia), SERMI (Serikat Muslim Indonesia) dan PERTIWI (Persatuan Tindakan Wanita). Ketiga partai politik ini membentuk satu front yang berbentuk Badan Koordinasi. Badan Koordinasi selain bergerak dalam Dewan Daerah Banjar, juga bergerak mengkoordinasikan organisasi massa yang sehaluan di luar Dewan.

Kelompok Republikan-Unitarisme yang kedua adalah kelompok yang berjuang secara illegal dengan memanggul senjata mengandalkan kemenangan perjuangan dengan pertempuran bersenjata. Kelompok ini merupakan kelompok yang non-kooperasi yang menganggap Belanda sebagai musuh yang harus dikalahkan dengan senjata.

Ketika berhasilnya ditandatangani Persetujuan Linggarjati (1947) antara RI dengan Belanda, maka terjadilah yang paling gawat bagi pejuang bersenjata di Kalimantan Selatan. Dalam persetujuan itu disepakati bersama antara RI dan Belanda, bahwa Kalimantan termasuk berada dalam penjajahan Belanda dan di luar dari RI mengakibatkan ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan yang sudah berhasil menyatukan kelasykaran yang ada, sekarang berada dalam posisi yang sulit, sebab RI menganggap bukan daerah RI dengan kata lain tak ada hubungan dengan RI, sedangkan pemerintah NICA-Belanda menganggap sebagai ekstrimis, yaitu gerombolan pengacau ketentraman umum, dan mengganggu pemerintahan yang sah.

Perjuangan bersenjata makin ditingkatkan dengan menghimpun segala potensi, mengorganisir kesatuan, menyusun program se-

lanjutnya dengan beberapa kali mengadakan rapat antara tokoh-tokoh pejuang. Dalam hal ini pemerintah NICA-Belanda tidak berdaya menghadapinya. Pos-pos terpencil ditarik ke kota, hal ini memberi peluang bagi pejuang untuk mengatur pemerintahan dan mengatur kehidupan rakyat.

Kalau kita sebutkan kembali kemajuan yang telah dicapai oleh kesatuan bersenjata di Kalimantan adalah sebagai berikut :

Tahun 1945, lahirlah secara spontan kesatuan kelasykaran di Kalimantan Selatan yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membela negara Republik Indonesia. Tahun 1946 kelasykaran ini berhasil disatukan dalam satu komnando yang dinamakan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dan kemudian pada tahun 1947 sebagai reaksi Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani oleh R.I dan Belanda, Batalyon ini merubah namanya menjadi : Markas Besar SOPIK (Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan)/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan. Tahun 1948 berhasil memperluas wilayah perjuangan, dengan membentuk wilayah menjadi dua Sektor perjuangan, yaitu : Sektor Utara dan Sektor Selatan, Tahun ini juga kekuatan bertambah dengan bergabungnya kesatuan MTKI/1001 Hulu Sungai.

Tahun 1948 tersebut Markas Besar SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan menyusun komposisi dan personalia perjuangan dengan Hassan Basry sebagai Pimpinan Umum (PU) serta H.Aberani Sulaiman sebagai wakil merangkap sebagai Kepala Staf.

Tahun 1949 tersebut Markas Besar SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Pertahanan dalam bentuk : Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan Gubernur Tentara dijabat oleh Hassan Basry dengan pangkat Letnan Kolonel (L). Sejak itu pula diusahakan kepangkatan dalam pemerintahan Gubernur Tentara tersebut. Siasat perjuangan ini merupakan siasat menghadapi Belanda, dengan pengertian bahwa kekuatan militer Belanda dihadapi oleh kekuatan militer dari Gubernur Tentara ALRI. Program perjuangan ini dilahirkan dalam bentuk Proklamasi 17 Mei 1949. Dalam program perjuangan baru ini, Sektor Selatan diperluas dengan memasukkan Banjarmasin yang merupakan pusat pemerintahan NICA-Belanda di Kalimantan Selatan. Sektor Selatan ini meliputi Territorial yang cukup luas

karena itu membentuk sebuah Markas Besar yang dinamakan Markas Besar Alam Rokh

Perjuangan legal dalam bentuk Partai Politik tidak kalah gigihnya dengan perjuangan illegal. Dengan segala daya Badan Koordinasi yang merupakan wadah dari Partai-Partai Politik untuk menyatukan pendapat, berusaha menggagalkan policy pemerintah NICA-Belanda untuk mendirikan Negara Kalimantan. Antara perjuangan politik dan perjuangan bersenjata mempunyai hubungan yang saling mengisi dengan tujuan sama yaitu membela Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945.

Perjuangan tersebut berhasil, karena pemerintah NICA-Belanda terpaksa meminta supaya diadakan cease fire di Kalimantan Selatan. Dengan bantuan UNCI, pemerintah RI mengirim utusannya ke Kalimantan Selatan dan pada 2 September 1949 dinyatakan penghentian tembak menembak di seluruh Kalimantan Selatan. Sampai menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) Belanda di Kalimantan Selatan tidak berhasil membentuk Negara Kalimantan.

Berhasilnya KMB, berarti kemenangan bagi golongan federalisme di Kalimantan Selatan. Hal ini mendapat tantangan kembali dari pihak yang menginginkan negara Kesatuan R.I. Di mana-mana di seluruh Kalimantan Selatan terjadi rapat-rapat raksasa, resolusi, mosi yang semuanya menghendaki bubarnya Dewan-Dewan Daerah bentukan Belanda dan kembali bergabung dengan negara R I

B. DAFTAR SUMBER

1. Dokumen

Ma'loemat dari Djenderal Sir Thomas Albert Balamey GBE, KCB, CMG, DSO, ED, Pemimpin Tertinggi dari Tentara Australia tanggal 2 September 1945.

Proclamation by General Sir Thomas Albert Balamey GBE, KCB, CHG, DSO, ED. COMMANDER in chief Australian Military Forces, October 1 st, 1945.

Selebaran, Rakyat Borneo, Djarkarta 10-7-05, Soekarno-Hatta.

2. Buku Bacaan

- A. Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*, Skripsi Sarjana Pen-

didikan Jurusan Sejarah Antropologi FKIS-IKIP Malang 1968.

Hasan Basry, *Kisah Gerilya*.

Idwar Saleh M. Drs, *Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan di Kalimantan Selatan*, Widya Karya No. 1 tahun I September - Oktober 1970, FKg-UNLAM, Banjarmasin, th.1970.

Kartodirjo, Sartono, et al, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Departemen P dan K, Jakarta, 1977.

Kementerian Penerangan R.I., *Kepartaian di Indonesia* Djakarta, tahun 1951.

....., *Propinsi Kalimantan*, Djakarta.

Kesuma Sekarsih, *Wanita Banjar, Sebuah tinjauan singkat mengenai kedudukan dan peranannya dalam pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan sampai tahun 1950*, Tesis, FKg-UNLAM, Banjarmasin, 1977.

KODAM X/LM, *KODAM X/LM Membangun*, Banjarmasin, 1962.

Mugeni Junaidi, *Sejarah Singkat Bangkit dan Perkembangan Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), di Kalimantan Selatan*, Skripsi, jurusan Sejarah DKg-UNLAM, Banjarmasin, 1972.

Noor HS.M. *Propinsi Dati I Kalimantan Selatan*, Penerbit Indah, Banjarmasin, 1975.

Ramli Nawawi,H., *Dewan Banjar, Skripsi*, Jurusan Sejarah FKg-UNLAM, Banjarmasin, 1972.

Sanit Seman,M. *Sejarah Politik Pendudukan Belanda dan Perlawanan Rakyat di Kalimantan Selatan 1945-1949*, Skripsi, Jurusan Sejarah FKg-UNLAM, Banjarmasin, 1972.

SEMDAM X/LAM, *Sejarah Singkat Kodam X/Lam Waja Sampai Kaputing*, Kodam X/LAM, Banjarmasin.

Syarifuddin, *Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan, Priode 1945 sampai 17 Agustus 1950*, Tesis, FKg-UNLAM, Banjarmasin, 1974.

Susanto Tritoprojo, *Sejarah Revolusi Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1963.

Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, tahun 1979.

3. Majalah/Brosur.

Aman Gusti, *Route Gerilya*, Paper, 1979.

....., *Pertumbuhan Gerilya R I di Kalimantan, Utama*, Banjarmasin, 1973.

Amin Effendi, *M. Cukilan Riwayat Pemberontakan 9 Nopember 45 di Banjarmasin*, Pidato sambutan Perayaan 9 Nopember 1975 di Banjarmasin.

Anonim, *Markas Besar Alam Roch*, Paper.

....., *Turun Ke Kota Banjarmasin*, Paper.

....., *SEJARAH ALRI DIVISI IV (A) PERTAHANAN KALIMANTAN*, brosur.

Budhigawis, H.A.H., *Laporan Perjuangan dari Munggu Raya*, Paper 1968.

Conferentie Permoesjawaratan Malino tanggal 15-24 Juli 1946, Resolutie en/dan Motie, brosur.

Jawatan Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Majalah Suluh Daerah Hulu Sungai Selatan, Riwayat Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, tahun. I. no. 7, 1958.

Rusli, *Surat kabar sebagai alat perjuangan Nasional, Majalah Kesenjaraan & Kebudayaan Gema Banjarmasin*, Banjarmasin, 1975.

Yakub Amin, H.M., *Nostalgia Proklamsi Kemerdekaan RI*, Banjarmasin Post, 14-8-1979.

4. Surat Kabar.

Banjarmasin Post, Tahun ke VIII, Selasa, 14-8-1979. Borneo Simboen, tahun kedua, No. 324, Selasa, 21 Desember 2603.

Borneo Simboen, tahun ke empat, no. 851, Nitjijobi (Minggu), 26 Hatji-Gatsoe 2605.

Kalimantan Berjuang (Ka-Be), Banjarmasin, tanggal 29-8-1949.

Kalimantan Berjuang (Ka-Be), Banjarmasin, tanggal 1-10-1949.

Kalimantan Raya, Tahun Pertama, No. 5, tanggal 10 Maret 1942.

Utama, Banjarmasin, tanggal 21-11-1973.

5. Informan/Wawancara.

1. Nama : A.A. Hamidhan, H.

U m u r : 70 Thn, lahir 25 Februari 1909 di Rantau.
Pendidikan : Europeesch Lagere School Gernseltelijk Mulo Avondschoon di Jakarta sambil bekerja pada surat kabar "Bintang Timur" di bawah asuhan Parada Harahap.
Pekerjaan : Wartawan.
Alamat : Jalan Kalimantan Banjarmasin.
Kegiatan : a. Zaman Belanda memimpin surat kabar "Suara Kalimantan" (1930).
 b. Zaman Jepang waktu mula-mula Jepang masuk di bawah pendudukan Kaigun (Angkatan Darat) menerbitkan surat kabar "Kalimantan Raya"
 c. Ketika Kalimantan dioper oleh pendudukan Rikugun (Angkatan Laut), surat kabar tersebut berganti nama dengan :Borneo Simboen", dengan cabangnya di Pontianak, Balikpapan dan Kandangan.
 d. Ketika pengakuan kedaulatan dan terbentuknya RIS, menerbitkan surat kabar "Suara Kalimantan" dan kemudian dijual.

2. **N a m a** : Abdul Muis, Haji Gusti.
Umur : 60 tahun.
Pendidikan :
Alamat : Kampung Melayu, Komplek Mesjid Muhammadiyah Banjarmasin
Kegiatan : sebagai muballig.

3. **N a m a** : A m a t.
U m u r : 70 tahun.
Pendidikan : Volksschool 4 th, tahun 1921 keluar sekolah.
Pekerjaan : Pedagang kopian Pasar Barabai.
Alamat : Jalan Pasar II Barabai.
Kegiatan : Sebagai pedagang menetap di Barabai sejak za-

man Belanda, Jepang, Nica dengan pekerjaan yang sama sebagai pedagang kopiah. Tahun 1932 sebagai Wakil ketua KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) Cabang Barabai.

4. **N a m a** : Arya P nama samaran, nama sebenarnya Munir Sutan Tumenggung.
U m u r : 65 tahun, lahir di Payakumbuh (Sumbar).
Pendidikan : Sekolah agama,
Sekolah Kelas dua
Normal School
bermacam-macam kursus umumnya dari Negeri belanda.
Pekerjaan : Berkebun.
Alamat : Kämpung Sungai Lulut (Banjarmasin)
Kegiatan waktu Revolusi Fisik : Kepala Departemen kemakmuran Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan, Kepala Markas Besar Alam Rokh di Selatan. Ikut sebagai konseptor Proklamasi 17 Mei 1949 Gubernur Tentara ALRI Divisi IV.
Karya : Mendapat bintang gerilya yang diterima langsung dari Presiden/Panglima Tertinggi di Jogjakarta (1949).
5. **N a m a** : M.Amin Effendi
U m u r : 65 tahun
Pendidikan :
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Lama Banjarmasin
Kegiatan : Waktu Revolusi Fisik, sebagai pencetus peristiwa pemberontakan 9 November 1945 di Banjarmasin. Ketua BPRIK (Badan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan).
6. **N a m a** : Ahmad Zaini Yusuf.

- U m u r** : 65 tahun
Pendidikan : Inlandschool
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Trikesuma, Barabai HST.
Kegiatan : Pengurus S K I Cabang Barabai Wakil Ketua PPI. Pengurus Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI).
7. **N a m a** : Hanafiah, H.M.
U m u r : 64 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat Normal School 4 tahun K G A 2 tahun BI Sejarah 2 tahun.
Pekerjaan : Pensiunan pendidik
Alamat : Mulawarman
Kegiatan : Aktif sebagai guru mulai zaman Jepang, Belanda, dan Nica.
8. **N a m a** : Haji Idar.
U m u r : 68 tahun
Pendidikan : Sekolah Jaman Belanda Pembekal zaman Belanda, pembekal zaman Jepang, pembekal zaman Nica (sebentar)
Alamat : Kampung Utara Tanjung. Mengorganisir MN 1001, BPPRI Perwakilan GERPINDOM Tanjung, Anggota DPRD Kab. Tabalong (1971-1977).
9. **N a m a** : K a r e
U m u r : 67 tahun (lahir 1911)
Pendidikan : Sekolah Rakyat 5 tahun, Sekolah Guru 2 tahun, Kursus Bahasa Belanda.
Pekerjaan : Pensiunan Patih.
Alamat : Jalan Antasari 45 Barabai
Kegiatan : Guru S.D. 1930 - 1945. Selama Revolusi Fisik menjadi Kepala Markas Daerah I

lung. 1947 - 1948 ditahan Belanda, 1951 - 1952 ditahan Pemerintah R.I dianggap kepala gerombolan bersenjata, hampir ditembak, tanpa proses pengadilan., 1951 menjadi Camat Batumandi, daerah yang paling kacau oleh gerombolan bersenjata.

1950 setelah resmi menjadi tentara, menjabat komandan Batalyon Barabai, dengan pangkat Letnan satu.

10. **N a m a** : Lamberi Bustani
U m u r : 59 tahun (lahir 2-5-1920 di Kandangan).
Pendidikan : KPAA Pemerintahan
Pekerjaan : Pensiunan P.K.
Alamat : Jalan Telaga Barabai
Kegiatan : Anggota MTKI (Organisasi Illegal) ikut beberapa kali penelitian tentang kebudayaan dan kesenian untuk Kalimantan Selatan.
Karya : Ikut menyusun Encyclopedea Tari dan Musik Kalimantan Selatan, Nyampir/menyanggar, Gandut, Andi-andi, Pedoman Tari dan menabuh.
11. **N a m a** : Haji Muhni
U m u r : 55 tahun
Pendidikan : Sekolah PBI, Sekolah Parindera, Medan Antara (Schakel)
Pekerjaan : Staf Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah.
Alamat : Jalan Darma Barabai
Kegiatan : Pegawai station Radio Jepang. Penghubung waktu Revolusi Fisik.
12. **N a m a** : Moh. Saberani
U m u r : 56 tahun (lahir 17 Agustus 1923 di Kelua)
Pendidikan : Sekolah Guru

- Alamat** : Kelua
Pekerjaan : Guru SDN "Dharma Bhakti " Kelua
Kegiatan : Anggota SKI Kelua, Anggota organisasi illegal, Selama Revolusi Fisik menjadi tahanan politik d dalam penjara Banjarmasin.
- 13. N a m a** : H.Salman
U m u r : 66 tahun
Pendidikan : Sekolah kelas dua (5 th), tamat.
Alamat : Jalan Darma Barabai
Pekerjaan : Monter
Kegiatan : Wakil Ketua SKI Barabai. Ikut mengkoordinir pawai keliling Barabai membawa bendera Merah Putih. Anggota BPPKO (Organisasi illegal)
- 14. N a m a** : H.M.Yakub Amin
U m u r : 64 tahun (lahir 17 Nov. 1915 di Banjarmasin).
Pendidikan : HIS di Banjarmasin.
Alamat : Jalan Sungai Jingah Banjarmasin
Pekerjaan : Pensiunan TNI (1950) pangkat Letnan Dua.
Kegiatan : Zaman Jepang pengusaha paberik sabun. Selama menjadi TNI, sebagai staf Panglima Kalimantan, sewaktu Letkol Sukanda Bratamanggala.
Hasil karya : Selama menjadi tentara memimpin majalah resmi "Tanjungpura". Banyak menulis ka - rangan di surat-surat kabar
- 15. N a m a** : Yusni Antemas
U m u r : 57 tahun (lahir 22 April 1922 di Amuntai).
Pendidikan : Vervolk School HIS
Alamat : Jalan Sungai Karias Amuntai.
Pekerjaan : Pensiunan pegawai Departemen P dan K.
Kegiatan : Pengurus S.K.I.

Pengurus GERPINDOM (organisasi illegal)

Wartawan

Menerbitkan surat kabar "Trompet Rakyat" di Amuntai berhaluan Republik. (1946).

Ikut sebagai wartawan Surat Kabar "Kalimantan Berjuang" (Ka-Be) di Banjarmasin (1949).

Karya : Candi Agung dalam misteri, legenda dan Penggalan Kepurbakalaan. (1968).
Bara dan Nyala di Banua Lima.
Pangeran Antasari.
Orang-orang terkemuka dalam sejarah Kalimantan.
Dan banyak lagi buku-buku untuk Sekolah Dasar.

16. **N a m a** : Buamin
U m u r : 50 tahun (lahir di Sidoarjo)
Pendidikan : -
Pekerjaan : Pesuruh SMA Negeri I Banjarmasin
Alamat : Mulawarman Banjarmasin
Kegiatan : Bekas Romosha Jepang yang dikirim ke Kalimantan Selatan.

17. **N a m a** : R a b u n
U m u r : 70 tahun.
Pendidikan : -
Pekerjaan : Pensiunan SPG (pesuruh)
Alamat : Mulawarman Banjarmasin.
Kegiatan : Bekas Romosha Jepang di Kotabaru.

C. DAFTAR KATA-KATA

A.

Advertentie-blad, lembaran advertensi dari surat kabar "Borneo Courant" yang terbit di Banjarmasin, 2 kali dalam seminggu.

Afdeling, wilayah administrasi masa pemerintahan Belanda yang kira-kira sama dengan Kabupaten sekarang.

Afwereen Vernielings Corp (AVC) Pasukan Pelawan dan perusak, suatu pasukan yang dibentuk oleh Belanda pada saat Jepang hampir tiba di Banjarmasin, maksudnya untuk melawan Jepang dengan membunuh vital dan sumber bahan makanan, sehingga Jepang tidak berdaya nantinya.

Amat Heiho, nama sebuah ceritera sandiwara yang paling terkenal di Kalimantan Selatan. Ceritera ini dikarang oleh kantor bagian Penerangan (Keiming Syidobo) Jepang menggambarkan kepahlawanan Heiho yang namanya Amat.

Aspiran Controleur, wakil Controleur, nama jabatan suatu kepala wilayah administrasi zaman Belanda.

Antah, beras yang terkupas kulitnya waktu menggiling padi.

ALRI Divisi IV (A), Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV untuk daerah Kalimantan yang disebut (A), terdiri dari putera-putera Kalimantan yang pada mulanya diseludupkan ke Kalimantan untuk menghancurkan kekuasaan Belanda. kemudian dalam perjuangan selanjutnya, merupakan satu-satunya kesatuan yang bergabung di dalamnya semua kelasykaran yang ada di Kalimantan Selatan.

Ashahi Simboen, surat kabar Jepang yang terbit di Tokio.

B.

Banteng Indonesia, organisasi kelasykaran di Kandangan yang dipimpin oleh H.M. Rusli.

Banteng Borneo, organisasi kelasykaran di Rantau di bawah pimpinan M. Hammy A.M.

Barisan Parang Bungkul, nama organisasi bersenjata yang dibentuk oleh Partai Anti Indonesia Merdeka (PAIM) di bawah pimpinan

- Kiai Besar Merah Nadalsyah**, ditujukan untuk menghadapi ALRI Divisi IV(A) Kalimantan.
- Baruh**, adalah persawahan yang sebetulnya selalu digenangi air, sehingga tidak mungkin dapat ditanami padi, kecuali terjadi kemarau yang panjang.
- Batasmiah**, dalah kebiasaan dalam umat Islam untuk memberi nama anak yang lahir, biasanya sesudah berumur seminggu. Kalau lelaki anak yang lahir tersebut, maka orang tuanya menyembelih dua ekor kambing, dan kalau perempuan satu ekor kambing. Tetapi kalau tidak mampu menyembelih kambing cukup hanya selamatannya dengan membacakan ayat Qur'an surat Al-Imran.
- Bapapai**, biasanya upacara mandi-mandi orang yang akan kawin, tetapi bisa juga wanita yang hamil 7 bulan.
- Banjarmasinshi**, adalah wilayah administrasi zaman Jepang, pengganti Gemeente.
- Ban buta**, adalah ban sepeda yang dibuat dari karet, tanpa memakai ban dalam dan ban luar, jadi langsung melulu karet, buta udara.
- Banzai**, suatu jels zaman Jepang yang berarti "hidup".
- Banjarmasinsche-Drukery**, adalah sebuah percetakan pada zaman Belanda di Banjarmasin.
- Bestuur Commissie**, adalah sebuah Komisi yang bertugas menilai seorang anak Indonesia yang akan masuk ke sekolah, apakah diterima atau tidak. Penilaiannya terletak pada martabat orang tuanya.
- Big Five**, nama perusahaan zaman Belanda di Banjarmasin.
- Borneo Suisan Kabushiki Kaisha**, suatu persero-an terbatas zaman Jepang yang mengurangi urusan ikan.
- Borneo Shoesanshoe Kabushiki Kaisha**, persero-an terbatas yang mengurangi pembuatan kapal laut. Borneo Shimboenshi, perusahaan yang menerbitkan surat kabar "Borneo Shimboen" di Banjarmasin.
- Borsummy**, nama perseroan terbatas zaman Belanda.
- Borneo Internaat**, juga perusahaan zaman Belanda.
- Borneo Kaishyo Kyokai**, atau Jami'ah Islamiyah Borneo, yang menghimpun para ulama di bawah pimpinan H. Abdurrahman Sidik, dan juga diperbantukan beberapa Ulama Jepang seperti Umar Faisal, Thahir Zaki dan lain-lain.
- Borneo Courant**, adalah surat kabar yang terbit 2 kali seminggu yang

menerbitkan advertentie-blad.

Borneo Shimboen, surat kabar resmi Jepang yang terbit di Banjarmasin, mempunyai cabangnya di Pontianak, Balikpapan, dan Kandang an.

Bo Ei Tai Sin Tai, adalah pasukan yang dibuat Jepang sebagai perluasan dari Konan Kakoko Dan. Pasukan ini diberi pengetahuan senjata ringan, tugasnya sebagai tentara pembangunan.

Bhinneka Tunggal Ika, kata-kata dalam lambang negara Indonesia Pancasila, yang berarti berbeda-beda tetap satu.

Bunken, nama jabatan kepala wilayah zaman Jepang di daerah Angkatan Laut (Kaigun), sebagai pengganti Con Bushido, sifat kesatria kaum samurai Jepang.

Buntai, regu.

BB Ambtbaar, Binnelandsch Bestuur Ambtbaar, pamong praja.

BBM - BPRIK, Barisan Berani Mati dari BPRIK.

BPRIK, Barisan pemberontak Rakyat Indonesia Kalimantan suatu ke satuan illegal.

BPOG, Badan pembantu Oesaha Gubernur, suatu badan yang membantu Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran M. Noor yang berkedudukan di Jawa Timur.

BPRI, Barisan pembenrotak Republik Indonesia.

BPPKI, Barisan pelopor Pemberontak Kalimantan Indoneia.

C.

Charisma, sakral, suci.

Cease fire, perletakan senjata.

Co Sai Gi In, semacam dewan rakyat, yang anggotanya diangkat oleh Meinshibu Cokan, berkedudukan di Banjarmasin setingkat propinsi.

Commonwealth, persepakmuran, persatuan wilayah negara-negara yang dipimpin oleh sebuah negara induk.

Co, singkatan dari Cooperasi, yaitu bekerjasama dengan Belanda dalam taktik perjuangan merebut kemerdekaan.

Coen, nama jembatan di Banjarmasin, satu-satunya jembatan yang menghubungkan daerah ke pusat pemerintahan Belanda di Ban-

jarmasin (pada waktu itu).

CVO, Cursus Volk School, nama sekolah guru yang lamanya 2 tahun, sesudah Sekolah Rakyat.

Controleur, nama jabatan kepala wilayah administrasi zaman Belanda kira-kira setingkat kedewasaan sekarang.

D.

Dai Toa Senso, perang Asia Timur Raya.

De Endracht, nama percetakan zaman Belanda di Banjarmasin.

Disalai, diletakkan di atas api, untuk mengeringkan getah karet yang telah dibuat slabs.

De yurem berdasarkan hukum.

Defacto, berdasarkan kenyataan.

District-hoofs, kepala distrik, kepala wilayah administrasi.

Divide et empera, politik pecah belah yang dijalankan oleh van Mook, pada masa revolusi Fisik.

Dipanduk, dibakar, istilah ini khusus untuk menanam padi secara tegalan. Pohon-pohon di tebang lebih dahulu, kemudian dikeringkan dan kemudian dibakar.

Dji Sam Soe, nama rokok yang terkenal sejak sebelum perang.

Dai Nippon Teikoku, Kekaisaran Nippon Raya.

E.

Tigasha, nama perusahaan zaman Jepang yang mengurus tentang film, memasukkan film ke Banjarmasin,

ELC, Europese Lagere School, sekolah rendah Eropah khusus ekstremist, orang yang bertindak ekstrem, istilah ini ditujukan kepada ALRI Divisi IV (A), yang dianggap Belanda sebagai pengacau keamanan terhadap pemerintahan yang sah.

F.

Fajar Minami, karangan yang mendapat hadiah nomor satu zaman Jepang yang menceritakan tentang keberhasilan pembangunan berkat kerjasama pemuda Jepang dengan Indonesia. Dikarang oleh Pak Lamberi Bustani pensiunan (sekarang) Pegawai Departemen P dan K.

Federalist, orang yang berjiwa federal, yaitu menyetujui rencana Belanda untuk membentuk Negara Kalimantan dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Serikat.

federalisme, faham federal.

feodal, suatu istilah yang ditujukan terhadap para keluarga raja dan bangsawan.

Fort Tatas, Benteng Tatas, terletak di Banjarmasin, sekarang menjadi lokasi Masjid Raya "Sabilal Muhtadin".

Fujunkai, nama organisasi kewanitaan zaman Jepang.

Fuku Gun, nama wilayah administrasi zaman Jepang, sama dengan kecamatan.

G.

Gakkuto Tai.

Gemeente, wilayah administrasi, sekarang Kotamadya.

Gemeente Raad, Dewan Gemeente.

Gerpindom, a). Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka.

b). Gerakan Rakyat Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka.

GERMERI, Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia getah marlung, karet sheet, yang dihasilkan dengan diselai, bukan diasap dalam rumah asap yang biasa.

Gunco, jabatan zaman Jepang sama dengan wedana.

Gun, wilayah administrasi zaman Jepang, sama dengan Kewedanaan.

H.

Hanco, Ketua Kelas.

Hakko Iciu, cita-cita kepemimpinan Jepang terhadap dunia.

Hatji Gatsoe, bulan Agustus.

Heiho, pasukan pembantu Angkatan laut Jepang, ikut berperang.

Hi no Maro, nama bendera Jepang.

Hiragana, nama huruf Jepang.

HIS, Hollandsch Inlandsch Scholl, tingkatan Sekolah Rakyat.
Hoktong, nama perusahaan kepunyaan Cina.
HCS, Hollandsch Chinese Scholl, Sekolah Rakyat khusus Cina.
Huku Gunco, Assisten Kiai, Camat.
Hutsu Kogakko, Sekolah Rakyat 5 tahun.
Hutsu Djokyu Kegakku, Sekolah Rakyat 6 tahun.
Hutsu Tju Gakko, Sekolah Menengah Pertama.
Huruf Kanji, nama huruf Jepang.
Heroikisme, rasa kepahlawanan.

I.

Illegal, gerakan rahasia.
Inheemschee MULO, Mulo untuk bumiputera.
Interviu, wawancara.
Intrument, alat sarana
Implicit, tersirat.
Ishihara, perusahaan pertambangan Jepang.

J.

Javansche Bank, Bank zaman Belanda.
Juklak, petunjuk pelaksanaan.

K.

Kantoor voor Coppertie en Binnelandsch Handel, Kantor Koperasi dan Perdagangan dalam negeri, zaman Belanda.
Katakan, nama huruf Jepang.
Kan Bo, nama majalah Jepang.
Karakteristik, yang khusus, yang istimewa.
Kasen Ongkookai, perusahaan Jepang yang mengurus: pengangkutan sungai dan laut.
Kaigun, Angkatan Laut Jepang.
Katakanji, huruf Jepang.
Kaiin Joseijo, Sekolah 2 tahun pengganti CVO.

Keiming Syidobo, Kantor Penerangan Jepang.

Keimin Bunka Syidosyo, Badan penasehat Kebudayaan.

Kenrohoshi, kerja bakti, gotong royong dan kadang-kadang diberlakukan sama dengan romosha hanya berbatas waktu, umpama dua minggu.

Ken Kan Rikan, jabatan kepala wilayah kira-kira sama dengan Kabupaten.

Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang.

Kiai, jabatan seorang Indonesia di Kalimantan Selatan sama dengan Wedana. Kalau Asisten Kiai adalah Camat.

Kiai Kepala, sama dengan Bupati.

Kiai Besar, sama dengan Asisten Residen.

Korrektor Susunan, suatu tugas yang diberikan kepada Gusti Aman untuk menyusun kembali formasi serta personalia ALRI Divisi IV (A) Kalimantan.

Konvoi, iring-iringan truk militer Belanda.

Kogyo Djitsumo Gakko, Sekolah Teknik 2 Tahun.

Kompi X, rakyat menyebutnya Kompeni X, yaitu tentara KNIL yang pro perjuangan kemerdekaan, banyak membantu senjata.

Koonan Kaiyoon, adalah perusahaan yang fungsinya sama dengan Kasen Ongkookai, yaitu mengurus tentang pengangkutan sungai dan laut.

Koncojo, yaitu perusahaan Pertambangan Jepang.

Koco Sensai, Kepala Sekolah.

Konan Kakoku Dan, pasukan untuk pemuda yang berumur antara 20 tahun sampai 35 tahun, bertugas untuk pembangunan.

Klein Handel School, Sekolah Ekonomi tingkat pertama.

KNIL, Koninklijk Netherlande Indies Leger, pasukan tentara Belanda yang terdiri dari bangsa Indonesia.

KNILM, maskapai perkapalan Belanda.

Kumiai, yaitu semacam badan yang menangani segala keperluan

rakyat di desa-desa, sejenis koperasi.

Kyoren, latihan militer.

Kyoin Joseijo, Sekolah Pelayaran, tempatnya di Banjarmasin.

L.

Lasykas Hisbullah, organisasi kelasyakaran di Martapura, didirikan pada 18-10-1945.

Lingua franca, bahasa umum, bahasa pengantar.

Linggangan, alat untuk mendulang, berbentuk seperti topi yang besar, terbuat dari kayu bulat dengang aris tengah antara 1 meter dan 1 1/2 meter, pada tengahnya runcing.

Legal, gerakan yang bersifat nyata seperti partai politik.

Lunta, alat mencari ikan, jala.

Lumuh, alat untuk mencari api, terbuat dari serbut risi, sejenis enau yang batangnya lebih kecil. Dengan menggunakan sepotong batu yang tipis tajam dengan sepotong besi, digeserkan dan didekatkan lumuh tersebut, apinya akan menyala.

Luchtbeschermings Dienst, Penjaga Bahaya Udara, kesatuan yang dibentuk Belanda menjelang Jepang datang.

Luang dalam, lubang dalam, lubang untuk mencari intan.

Luang surut, lubang dangkal.

M.

Mac Laine & Watson, nama perusahaan asing di Banjarmasin, zaman Belanda.

Malim, sejenis/pawang, yang mengetahui dimana letaknya intan.

Markas Besar RX-8/SOPIK/ALRI Divisi IV (A) Kalimantan, kode rahasia bagi ALRI Divisi IV. SOPIK = Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan.

Men Sei Bu, sejenis Propinsi, seperti Kalimantan.

Men Sei Fu, wilayah yang mengkoordinir Men Sei Bu, berkedudukan di Makasar, khusus untuk Angkatan Laut Jepang.

Men Sei Bu Cokan, pangkat sejenis Gubernur.

Mendrop, mendatangkan, mensupply.

Mitshubishi Kabushiki Kaisha, perusahaan Jepang yang mengurus bahan makanan.

Mitsui Bussan Kaisha, perusahaan Jepang yang menangani urusan gula dan lain-lain.

MN 1001, pasukan yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Moh.Noor. MN dari kata Moh.Noor, 1001 artinya daya akalnya 1001 macam, untuk menghancurkan Belanda. Umumnya beroperasi di Kalimantan Tengah, antara lain pimpinannya Tjilik Riwut, bekas Gubernur Kalimantan Tengah.

Moment, saat.

MTKI, organisasi kelasyakaran yang tidak sependapat dengan ALRI Divisi IV. MTKI di Kalimantan Tengah tidak mau tunduk pada ALRI dan selalu bersaing. Menjelang tahun 1950 MTKI mengacau, mengganggu keamanan. Singkatan dari Menuju Tentara Kemerdekaan Indonesia.

MULO, Middelbar Uitgebreid Leger Onderwijs, Sekolah Menengah Pertama zaman Belanda.

N.

Nasionalisme, perasaan kebangsaan.

NICA, Netherland Indiese Civil Administration.

Niitei Maru, nama kapal Jepang.

Nitetsu, nama perusahaan pertambangan Jepang.

Nomura Teindo Kabushiki Kaisha, perusahaan Jepang yang mengurus perdagangan kayu.

Non singkatan dari non-koperasi, yaitu suatu taktik tidak mau bekerja sama dengan Belanda dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Non-koperasi, lihat non.

Nogyo Tju Gakko, Sekolah Menengah Pertanian jaman Jepang.

O.

Observasi, mengamati.

Oji Seizi Kabushiki Kaisha, perusahaan Jepang urusan pembikinan

kertas.

Onderdistrik, yaitu wilayah administrasi jaman Belanda di bawah distrik, setingkat kecamatan.

Onderafdeling, wilayah administrasi setingkat Kabupaten.

Opmaak, huruf yang sudah disusun siap untuk dicetak (surat kabar).

Orientasi lokasi, peninjauan lapangan.

Osaka Gekijo, nama gedung bioskop di Banjarmasin, sekarang Ria Theatre.

P.

Pahuluan, hulu, udik.

Pangkalan, nama wilayah teritorial masa Revolusi Fisik sama tingkatannya dengan kampung, guna menyaingi Kepala Kampung buatan Belanda.

Pasukan Lawung, pasukan yang terdiri dari orang Dayak yang sangat setia pada Belanda, mengganggu keamanan penduduk yang beragama Islam dan merupakan musuh dari ALRI Divisi IV (A) Kalimantan. Pasukan Lawung ini di bawah pimpinan Camat Conraat.

Parang bongkol, parang yang besar berbentuk melingkar.

Patriotisme, pandangan/paham cinta tanah air.

Penes, perahu besar dan dapat melayari lautan.

PETER, Pembantu Tentara Republik.

Persbriedel-ordonantie, peraturan pemberangusan pers.

Penghadangan, penyanggulan, menunggu pasukan Belanda yang lewat untuk digempur.

Peta, Pembela Tanah Air.

PPRI, Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia.

PRIK, Pemuda Republik Indonesia Kalimantan.

R.

Revolusioner, berjiwa revolusi, semangat revolusi.

Republiken, berjiwa Republik, yaitu mendukung Republik hasil

Proklamasi 17 Agustus 1945, biasanya disatukan dengan nama Unitarisme-Republiken. Lawannya ialah federalisme.

Rensei Seimo Co Sain, Penasihat Rahasia dari Pemerintahan Jepang di Kalimantan, terdiri dari tokoh-tokoh partai politik zaman Belanda.

Rensei Doojo, Pusat Latihan Pemuda.

Resersi, mata-mata, spion.

Rechtperson, berbadan hukum.

Riwas, adalah tentara gerilya, yang melindungi Pangkalan, dengan demikian komandannya adalah Kepala Markas Pangkalan.

Rikugun, Angkatan Darat Jepang.

Rumosha, penduduk yang dipekerjakan oleh Jepang dan diperlakukan seperti seorang terhukum, penuh dengan penyiksaan dan kekejaman.

S.

Sei ke re, hormat Jepang seperti membungkuk.

Sei mendan, pasukan pemuda antara umur 15 sampai 20 tahun.

Seisen, semangat.

Seksi, adalah wilayah territorial zaman Revolusi Fisik setingkat dengan RT yang kedudukannya di bawah Kepala Markas Pangkalan.

Senjata domdom, adalah senjata buatan sendiri yang larasnya terbuat dari besi bulat berlubang, karena itu sekali ditembakkan senjata itu rusak.

SERMI, Serikat Muslimin Indonesia. Partai Politik yang berjuang secara legal dan non koperasi.

Sihan Gakko, Sekolah Guru 4 tahun.

Si Kai Gi In, semacam dewan Gemeente.

Si Co, Ketua dewan tersebut.

School opziener, Penilik Sekolah.

School Comissie, sebuah Comisi buatan Belanda untuk menentukan seorang anak dapat diterima atau tidak disekolah. Penilaiannya berdasarkan derajat orang tua anak tersebut.

Schakel School, semacam sekolah rakyat.

Slabs, getah yang belum diasap, belum dikeringkan, yaitu lembaran yang baru digiling dengan mesin berwarna.

Show of force, peragaan kekuatan.

Shoomin Ginke, Bank Jepang pengganti B.R.I.

Sotai, seksi dalam pasukan.

Son, desa.

Social Zaken, jawatan Sosial.

Sonco, Pembekal, Kepala Desa.

Societeit de Kapel, Gedung tempat sidang Dewan Banjar zaman NICA, kemudian Gedung RRI Nusantara II Banjarmasin.

Syogyo Djitsumo Gakko, Sekolah Dagang, pengganti Klein Handel School.

Syosyo, Sabta Teno, sabda Kaisar Jepang.

S R I Serikat Rakyat Islam, adalah partai Politik bentukan NICA untuk menyaingi **S K I** dan **SERMI** dalam Dewan Banjar yang mendukung cita-cita Belanda mendirikan Negara Kalimantan.

Staatblad, lembaran Negara.

Sumo Butjo.

Status guo, keadaan tenang, diam.

S K I Serikat Kerakyatan Indoensia, Partai Politik yang berjiwa Republikan-Unitarisme, seperti **SERMI**.

T.

Taktik, strategi.

Takungan, alat tempat mengentalkan getah latex untuk dijadikan slabs dan kemudian dikeringkan dengan diasap supaya menjadi sheet, sejenis waskom, tetapi panjang segi empat.

Taiwan Ginka, Bank Jepang pengganti Javansche Bank.

Taiso, olah raga, gerak badan.

Tentyo Setsu, Ulang tahun Kaisar Jepang.

Tenno Heika, kaisar Jepang.

TOR, Term of Reference.

Tokubetsu Tokutai, yaitu Heiho pilihan untuk perang menghadapi Sekutu. Markasnya di Bati-Bati, Pelaihari.

Toyota Kabishiki Kaisha, Perusahaan angkutan yang membuat gerobak Toyota.

Toyo Menka Kaisha, perusahaan Jepang untuk urusan tekstil.

U.

Unitarisme, paham kesatuan, mencita-citakan negara kesatuan.

UNCI, United Nation Comission for Indonesia.

Unsmoked-sheets, slabs yang tidak diasap di rumah asap.

W.

Warerano Kotoiba wa Nippon - go, Asia non Kotoba wa Nippon-go,
Bahasa kami adalah bahasa Nippon, Bahasa Asia adalah
bahasa Nippon.

Westerafdeling, afdeling Barat, Kalimantan Barat.

Y.

Yuridis formal, resmi secara hukum.

Z.

Zelfbertuur, berpemerintahan sendiri.

Zuide en Oosterafdeling, Kalimantan Selatan dan Timur.

Zwaarte journalist, wartawan yang terdaftar hitam.

RAKYAT BORNEO

Dengan dentoeman meriam serta gemoeroehnya tank dan mesin terbang, sekarang ini sedang ditoelis sedjarah tanah-toempah-darah dan rakjatmoe kedalam boekoe sedjarah doenia.

Kamoe sekalian sekarang menghadapi saat tegak berdiri atau hantjoer-lebornja warisan nenek mojangmoe.

Timboel atau tenggelamnja rakjat dan tanah airmoe sekarang tergantoeng kepada kesigapanmoe oentoek pembela warisanmoe itoe didalam kantjah peperangan ini. Kewadjibanmoe sekarang tidak lain, ialah: menoenjoekkan dalam sedjarah doenia itoe, bahwa kamoe tetap berdjoeng oentoek memiliki tanah air Borneo sebagai bagian dari tanah air Indonesia bagi rakyat Borneo sebagai bagian dari pada Rakyat Indonesia.

Kita dilain-lain bagian dari pada tanah-air kita Indonesia sekarangoen berdjoeng sekoeat tenaga oentoek mewoedjoetkan Negara Indonesia Merdeka. Didalam keadaan jang bagaimanapoen kita haroeslah menolak tiap-tiap serangan yang hendak memisahkan kita antara kita. Ingatlah kepada tjita-tjita kita jang senantiasa kita dengoeng-dengoengkan sedjak api Pergerakan Kebangsaan kita menjoeloehi seloeroeh alam tanah-air kita Indonesia. Djiwa Partai Nasional Indonesia yang melipoeti seloeroeh Indonesia dari Atjeh hingga ke Papoea, sekarangoen menjala-njala dan berkobar-kobar dalam dadamoe. Kita tetap bedjoang oentoek mendirikan Negara Indonesia Merdeka jang bersatoe. Kita tetap berdjoang oentoek Kedaulatan Rakyat Indonesia.

Djakarta, 10/7-'05

Soekarno

Hatta

Lampiran II



MA'LOEMAT

DARI

Djenderal Sir Thomas Albert Blamey GBE, KCB, CMG, DSO, ED
Pemimpin Tinggi Dari Tentara Australia

KEPADA :

Semoea pendoedoek dari BORNEO, TIMOR, CFRAM, AMBON, KAI, AROE, TANIMBAR, KEPOELAUAN dilaoetan ARAFOERA, PAPOEA INGGERIS, NEW BRITAIN, NEW IRELAND, SOLOMONS, BOUGAINVILLE dan poelau2 dekatnja, OCEAN, NAURU dan KEPOELAUAN BISMARCK.

MENGINGAT bahwa dengan adanya surat menjerah yang ditandatangani di Tokio pada hari keloea boean September, 1945, atas perintah dan atas nama Kaisar Djepang, Pemerintah Djepang dan Pemimpin2 Oemoem dari tentara Keradjaan Djepang dan disetoedjoei oleh W. D. dari Amerika Serikat, Pepoedihk Tiongkok, Keradjaan Inggerris dan Poesia, telah disemoemkan... penjerahnja Pemimpin2 Oemoem dari tentara Keradjaan Djepang dan semoea tentara Djepang dan semoea tentara yang dikepalai oleh Djepang dimana saja, pada Negeri2 Serikat terseboet diatas dengan tuju menaka djanthi apa?

MENGINGAT POELA bahwa telah dikloearkan "Perintah Oemoem No 1" dari tentara Laut dan Darat oleh Pemimpin Oemoem dari tentara Keradjaan Djepang kepada semoea Kepala tentara Djepang dimana saja oentoek memerintahkan semoea tentara Djepang dan semoea tentara yang dikepalai Djepang, sepeja sepeja memberhentikan permoesoehan, melakkakan sumpahnja, tinggal dan ditempatnja sekarang dan menjerah dengan tuju menaka djanthi apa? pada Kepala2 tentara yang mewakili Negeri2 Serikat terseboet diatas.

DAN MENGINGAT LAGI bahwa saja Djenderal Sir Thomas Blamey GBE KCB CMG DSO ED Pemimpin Tinggi dari tentara Australia telah dutoendjoekkan oentoek meneruna penjerahnja semoea tentara Djepang dan semoea tentara yang dikepalai Djepang di-poelau2, daerah2 dan tempat2 terseboet diatas.

Maka saja menjanpaikan salam dan pemberian selamat pada TOEAN, semoea pendoedoek terseboet diatas, dan teroetama pada semoea TAWANAN PERANG dan lain2 ra'jat Negeri Serikat yang sekarang ada di poelau2, daerah2 dan tempat2 terseboet berhoeboeng dengan akan segera datangnja kebebasan toean oleh Tentara Australia.

SAJA MEMERINTAHKAN PADA TOEAN OENTOEK MENOEROET Ma'loemat2, Perintah2 dan Pertoendjoek2 yang saja keloearkan atau dikloearkan oleh Kepala tentara Australia yang saja toendjoekkan boeat Poelau, Daerah atau Tempat toean.

SELANDJOETNJA SAJA MEMERINTAHKAN pada toean sepeja tinggal tenang2 saja, pekerdjaan toean sehari-hari kerdjakanlah dengan baik2 dan berdiamlah pada tempat atau roeman toean sekarang oentoek menoeinggoe Ma'loemat2, Perintah2 dan Pertoendjoek2 dari saja atau dari Wakil2 saja.

Tertanda pada hari kedoga boean September 1945.

Pemimpin Tinggi
dari
Tentara Australia.



PROCLAMATION

by

GENERAL SIR THOMAS ALBERT BLANEY GBE, KCB, CMG, DSO, ED

COMMANDER-IN-CHIEF AUSTRALIAN MILITARY FORCES

TO: The Peoples of TIMOR, The CELEBES, MANADO, BORNEO, The RESIDENCY of TERHATE, AMBOINA, CERAM, Islands, AROE Islands, TANTIMBAR Islands, THE LESSER SUNDAS and OTHER ISLANDS

The forces of the United Nations have decisively defeated the Japanese by land, sea and air, and the whole Japanese nation has unconditionally surrendered to the United Nations.

Troops under the command of General Sir Thomas Blaney have arrived in your country and have accepted the surrender of the Japanese forces, on behalf of the United Nations, and will protect the people and maintain law and order until such time as the lawful Government of the Netherlands East Indies is once again functioning.

By command of General Sir Thomas Blaney, Allied Commander in this area, the Netherlands East Indies laws, with which you are familiar, will be applied and enforced by the Officers of the Netherlands East Indies Civil Administration now present in your country, subject only to any further orders which the Allied Commander may be obliged, in the interests of good order, to issue.

Signed this first day of October 1945.

General
Commander in Chief
Australian Military Forces

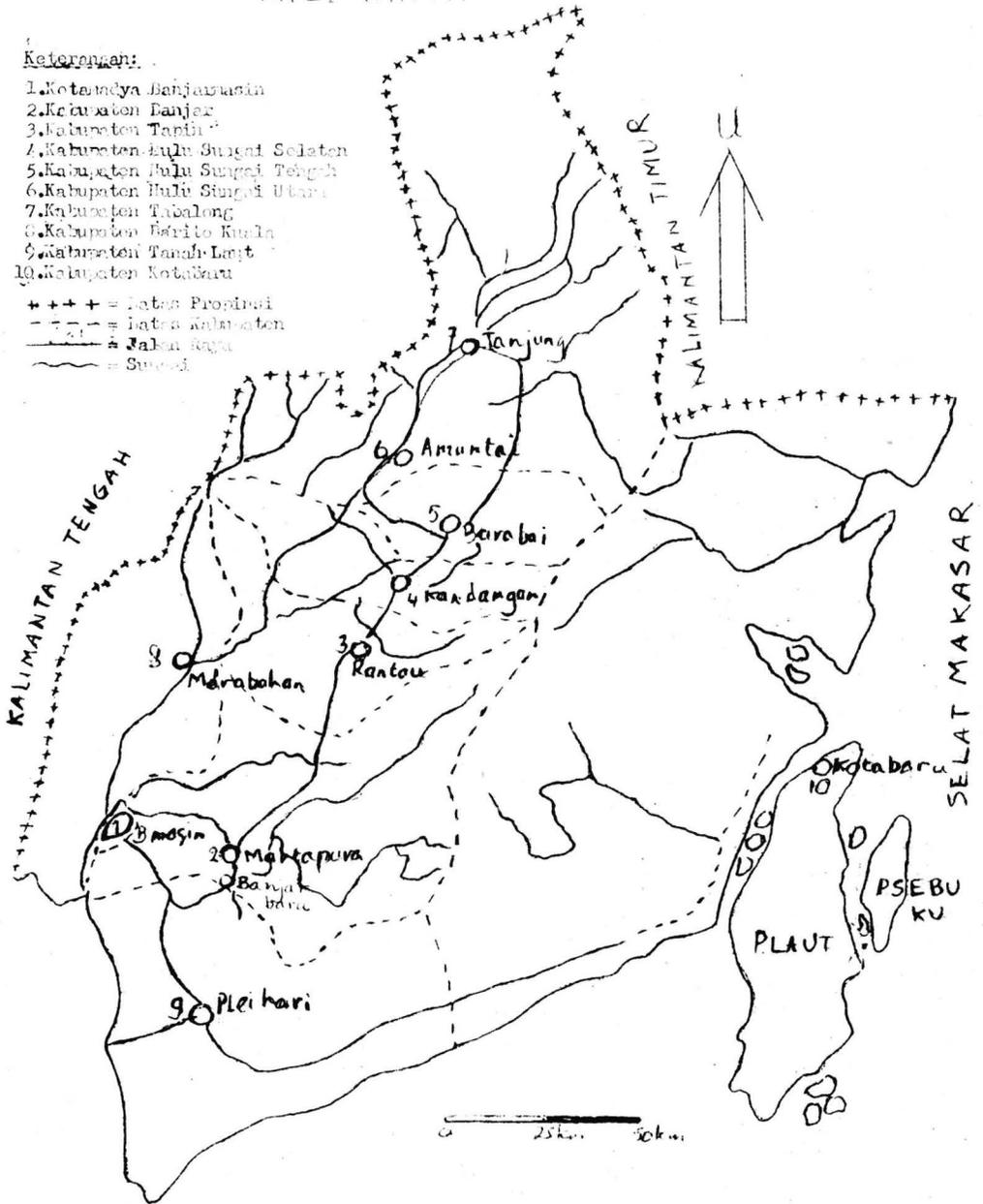
Lampiran IV

PETA
KALIMANTAN SELATAN

Keterangan:

1. Kotamadya Banjarmasin
2. Kabupaten Banjar
3. Kabupaten Tanah
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Kabupaten Tabalong
8. Kabupaten Barito Kuala
9. Kabupaten Tanah Liat
10. Kabupaten Kota Baru

- +++++ = Batas Propinsi
- - - - = Batas Kabupaten
- — — = Jalan Raya
- ~~~~~ = Sungai



Lampiran V

SALINAN

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN TETANGGA

**SUSUNAN TGL. 10 MARET IV. REP. MARKAS
BESAR GERAKAN D.IV.(A) ANGKATAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA DIVISI PERTAHANAN
KALIMANTAN.**

Pasal 1 Nama ;

Gerakan ini dinamai : Badan Gerakan Rahasia Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi Pertahanan Kalimantan, umumnya dikenal dengan nama ; Gerakan D.IV.(A),

Pasal 2, Berdirinja Pimpinan dan Kedudukan.

1. Berdirinja ;

Berdirinja Gerakan ini dihitung mulai tgl. 17-11/II.Rep. (1946) dengan keputusan PUTJUK PIMPINAN A.L.R.I. Divisi IV. : Letnan Kolonel DJAKARIA.

2. Sebagai Pimpinan Umum (P.U.) ditetapkan : HASAN BASRI.

3. Kedudukan Gerakan ini ditempat MARKAS BESAR.

4. Habisnja Gerakan ini tidak ditentukan.

Pasal 3. Haluan.

Gerakan ini berhaluan REVOLUSI.

Pasal 4. Tjita tjita

Menegakkan Kemerdekaan di Kalimantan serta mempertahankannya sebagai bagian dari : Republik Indonesia Merdeka Berdaulat.

Pasal 5. Usaha.

- 1. Menjusun Ketentaraan guna djaminan tjita tjita.**
- 2. Menjusun kekuatan rakjat total sebagai kenjataan masa (AKSI seluruhnja Rakyat).**
- 3. Berdaja upaja melaksanakan tjita tjita masjarakat sempurna dengan pedoman Pantja Sila Undang2 Dasar Republik Indonesia.**

- Pantja Sila :**
1. Ketuhanan jang maha Esa.
 2. Kemanusiaan jang adil dan beradab.
 3. Persatuan Indonesia.
 4. Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmat Kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan.
 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat.

Pasal 6. Anggota.

1. Anggota ialah Rakjat Warga Negara Indonesia.
2. Anggota Tentara dan Kepolisian ialah Pemuda Pemudi Warga Negara jang berdisiplin dan ber-ideologi.
3. Semua anggota disjahkan djika memakai tanda anggota.

Pasal 7 Susunan.

Markas Besar Gerakan D.IV. (A)

1. Pimpinan Umum.
2. Wakil Pimpinan Umum.
3. Djuru Surat (Dokumentasi).
4. Djuru Uang (Keuangan)
5. Pembantu-2

(Badan Markas Besar)

1. Staf Gerakan.
2. Bagian urusan Direksi Perdjjuangan.
3. Bagian urusan Comisariat Gerakan.

SUSUNAN DIREKSI PERDJUANGAN (PUSAT MARKAS BESAR).

1. Pimpinan.
2. Wakil Pimpinan.
3. Djuru Surat.
4. Djuru Uang.
5. Pembantu.

Pasal 8. Kewajiban.

1. Tunduk dan berchidmad sungguh2 pada tiap2 peraturan, tiap perintah dan putusan ketetapan dari MARKAS BESAR dan PIMPINAN selaras dengan bunji ANGGARAN DASAR.
2. Taat dan setia pada Pimpinan dengan hati sutji serta dengan pikiran sehat.
3. Beradab sopan santun ramah tamah kepada Rakjat serta berperi kemanusiaan sebagai lambang Keluhuran Bangsa dan kemuliaan ber-Agama.
4. Tidak akan mengchianat, tidak akan melanggar, serta tidak merugikan atau mengabui mata Rakjat atau Gerakan dengan mempergunakan nama Gerakan ataupun pimpinan.
5. Tidak akan memasuki *Gerakan lain*, selain dari Gerakan D. IV. (A) Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi Pertahanan Kalimantan.

Pasal 9. Hukum.

1. Tiap anggota jang melanggar ANGGARAN DASAR, Perintah dan Keputusan.
2. Tiap anggota jang menanggalkan kewadajibannja dengan tidak alasan jang sjah.
3. Tiap anggota jang mengabui mata Rakjat dengan memakai nama Gerakan untuk kepentingan diri sendiri.
4. Tiap anggota jang mengchianat pada Gerakan.
5. Tiap anggota jang merugikan Rakjat.

Hukuman : 1. Dipetjat (dikeluarkan dari anggota).

2. Distraf.

3. Ditawan.

4. Dibunuh.

Larangan : Tiap anggota memasuki *Gerakan lain*.

Pasal 10. Keuangan.

- Didapat dari :
1. Ekonomi dan usaha lainnja.
 2. Sokongan dan Fons.
 3. Dan lain-lainnja jang halal.

Pasal 11. Bantuan

Diberikan bantuan pada anggota yang dalam melakukan kewajiban serta Rakjat yang tersengsara oleh karena akibat perjuangannya.

Pasal 12. Kekuasaan Gerakan

- 1.a. Pimpinan umum memegang kekuasaan Gerakan menurut Anggaran Dasar.
- b. Dalam melakukan kewajiban P.U. dibantu oleh Dewan Eksekutif.
- 2.a. Pimpinan Umum menetapkan membentuk Anggaran Dasar dengan persetujuan Dewan Partai.
- b. Pimpinan umum menetapkan peraturan Gerakan untuk menjalankan Anggaran Dasar sebagaimana mestinya.
- 3.a. P.U. dan juga Dewan Eksekutif bersumpah dalam menjalankan kewajibannya.
- b. Sumpah : DEMI ALLAH, SAJA BERSUMPAH AKAN MENJALANKAN KEWADJIBAN PIMPINAN (PEMBANTU P.U. DALAM DEWAN EKSEKUTIF), DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN MENJALANKAN SEGALA ANGGARAN DASAR DAN PERATURAN NYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SERTA BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA SERTA AGAMA.
- 4.a. P.U (Pimpinan Umum) mengangkat dan memberhentikan Dewan Eksekutif.
- b. Dewan Eksekutif terdiri dari seluruh anggota Staf Gerakan.
- 5.a. Dewan Partai terdiri dari wakil2 anggota tiap2 Daerah (2 a 3 orang).
- 6.a. P.U.(Pimpinan Umum) memberikan tanda2(Anggota-Djabatan-Djasa dan l.l.).

Pasal 13. Rapat (Sidang)

- 1.a. Dewan Eksekutif-bersidang sekurang kurangnya setengah bulan sekali.
- b. Untuk keadaan memaksa, Dewan Eksekutif bersidang dengan

- sidang istimewa.
- 2.a. Dewan Partai bersidang sekurang kurangnya setengah bulan sekali.
 - b. Dalam keadaan memaksa, sidang Dewan Partai diadakan sewaktu2 dengan istimewa.
 - 3.a. Konperensi diadakan oleh seluruh Daerah, dipimpin oleh Markas Besar.
 - b. Rapat Daerah dipimpin oleh Markas Daerah (terdiri dari Wakil2 Pangkalan).
 - c. Rapat Pangkalan dipimpin oleh Markas Pangkalan (terdiri dari Wakil2 Seksi).
 - d. Rapat Seksi dari seluruh Warga, (Rapat Daerah berhak menentukan putusan seluruh Daerah tentang hal yang tidak berkepentingan dengan Anggaran Dasar)

BADAN DIREKSI PUSAT.

1. Strategie (Perdjuangan).
2.
 - a. Persendjataan.
 - b. Ketentaraan.
 - c. Rentjana (Plan) Perdjuangan.

3. MAHKAMAH TENTARA

- a. Kehakiman.
- b. Koreksi plan.
4. Palang Merah Tentara.

SUSUNAN KOMISARIAT GERAKAN.

1. Pimpinan.
2. Wakil Pimpinan.
3. Djuru Surat.
4. Djuru Uang.
5. Pembantu.

BADAN KOMISARIAT GERAKAN.

1. Keamanan (Kepolisian).
2.
 - a. Bagian Urusan Polisi.

- b. Bagian Urusan Penjelidikan.
- 3. Tata Usaha.
- 4. Keuangan.
 - a. Bagian Urusan Hakim.
 - b. Bagian Propaganda.
 - c. Bagian Pengadjaran Agama.

MARKAS DAERAH.

- 1. Kepala Markas Daerah.
- 2. Wakil Kepala Markas Daerah.
- 3. Djuru Surat.
- 4. Djuru Uang.
- 5. Pembantu.

BADAN MARKAS DAERAH.

- 1. Keamanan Kepolisian.
 - a. Bagian Urusan Kepolisian.
 - b. Bagian Penjelidikan.
- 2. Kesehatan (Palang Merah).
- 3. Perhubungan
- 4. Keagamaan.
- 5. Pedalaman.
- 6. Perangan.

SUSUNAN MARKAS PANGKALAN.

- 1. Kepala Markas Pangkalan.
- 2. Wakil Kepala Markas Pangkalan.
- 3. Djuru Surat.
- 4. Djuru Uang.
- 5. Pembantu.

BADAN MARKAS PANGKALAN

- 1. Keamanan (Kepolisian).
 - a. Bagian Urusan Kepolisian.
 - b. Bagian Urusan Penjelidikan.

2. Palang Merah/ Kesehatan.
3. Penghubung.
4. Keagamaan.

MARKAS SEKSI.

1. Kepala Markas Seksi.
2. Wakil Kepala Markas Seksi.
3. Djuru Surat.
4. Djuru Uang.
5. Pembantu.

BADAN MARKAS SEKSI.

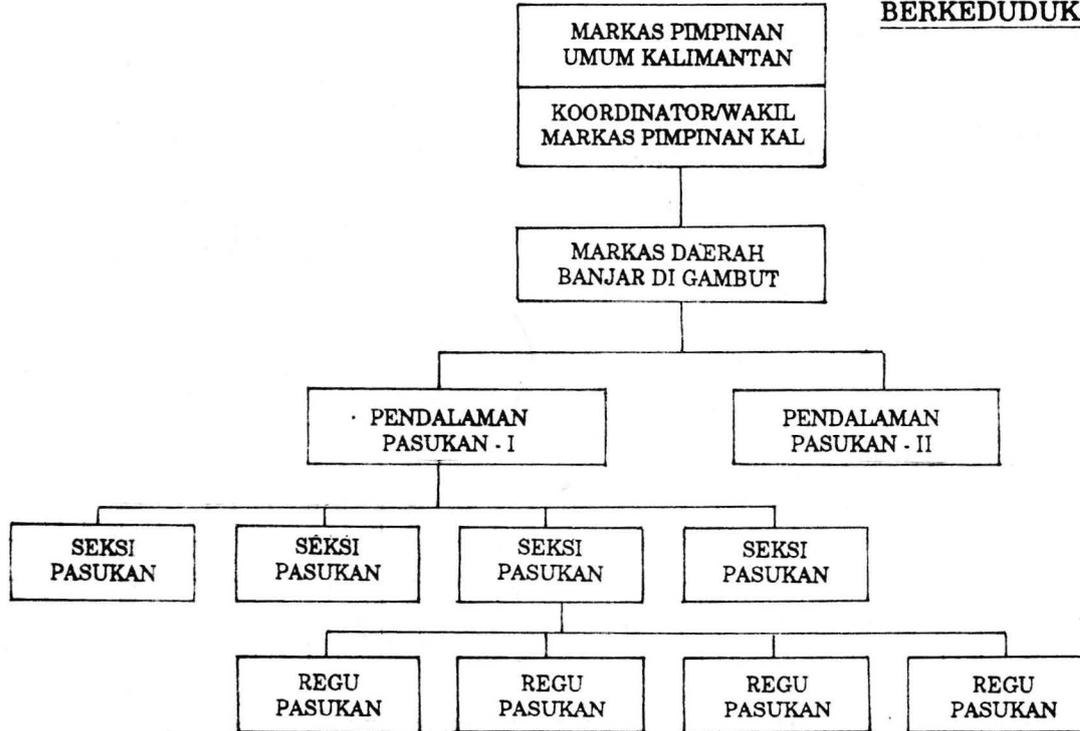
1. Bagian Markas Seksi.
2. Bagian Urusan Padang.
3. Urusan pembantu-pembantu.

Disalin yang sama dengan aslinya,
oleh ;

ISBAT TARMUN

SUSUNAN : MARKAS PASUKAN MN-1001
(MTKI) TNI DAERAH
BERKEDUDUKAN DI GAMBUT

Lampiran VI



SUMBER : DAFTAR SUSUNAN ORGANISASI
DAN PERSONIL (MTKI) DISAHKAN OLEH
PANGlima TT VI/TANJUNGPURA

**PERSONALIA MARKAS DAERAH MN.1001 (MTKI)
BANJAR DI GAMBUT**

1. H.ABDULLAH - H. MASANANG: KEPALA MARKAS DAERAH
2. MAHDJURI - JAKUP : WKL KEP MARKAS DAERAH
3. ABD SAMAD - SAMAN : SEKRETARIS I
4. M.AINI - H.NAPIAH : SEKRETARIS II
5. DJAMBERI - LAHIR : KEUANGAN
6. SABRAN - H. ABD. MUIT : TATA USAHA
7. ASMUNI - ISYA : TATA USAHA
8. PARISI - BAKRI : PENGHUBUNG
9. DARHAM - TAHAR : ANGGOTA PENGHUBUNG
10. SUNI - UTUHAN : ANGGOTA PENGHUBUNG

**PERSONALIA MARKAS PASUKAN MN-1001 (MTKI)
BANJAR DI GAMBUT**

1. RUSTAM - DJAMAL : KEPALA PIMPINAN PASUKAN
2. DARMAWI - USUF : WAKIL PIMPINAN PASUKAN
3. M.ZAINI - HASAN : SEKRETARIS I
4. MUHDAR - SEMAN : SEKRETARIS II
5. PILI - MIRANG : KEUANGAN
6. AMBERI - H.DJAHRI : WAKIL KEUANGAN
7. MANGSUR - RASIDI : KEPALA PERLENGKAPAN
8. ALIR - GUHAI : WKL KEPALA PERLENGKAPAN
9. NAPIAH - ADUL : ANGGOTA PERLENGKAPAN
10. DARSI - KARMAN : KEP URS PENGANGKUTAN
11. HAMID - TAIB : PEMBANTU URS PENGANGKUTAN
12. I.C.BODOI - CORNALIUS : KEPALA PALANG MERAH
13. H. DJUHRI - UNUS : PEMBANTU PALANG MERAH
14. H. MUHAMMAD - H. SAHAK: ANGGOTA PALANG MERAH.

Perpust
Jender

CV. AMELIA